



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR **2** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
-

Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
-

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024 (lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN
dan
GUBERNUR PAPUA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
-

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
-

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
-

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Pasal 2

Penyusunan RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat di Daerah.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan

keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJMN.
 - b. RTRW;
 - c. RPJPD; dan
- (3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. RKPD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. dokumen perencanaan lainnya.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.
-

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapperida.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan; dan
-

- c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan kembali penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal, 25 September 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal, 25 September 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN **2025** NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN : **2-156/2025**

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR **2** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan.

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta RPJMD Papua Selatan Tahun 2020-2024. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi:

“Terwujudnya Masyarakat Papua Selatan yang Bermartabat, Aman, Pemerintah yang Aspiratif”.

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menaakomodir hal tersebut dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal diatas, maka maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2025-2029.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 2

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN



RPJMD

2025
2029



VISI PAPUA SELATAN 2025-2029:

Terwujudnya Masyarakat
Papua Selatan yang
Bermartabat, Aman,
Damai, Sejahtera dan
Pemerintah yang
Aspiratif



Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT.

Gubernur Papua Selatan



Paskalis Imadawa, S.Pd.

Wakil Gubernur Papua Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan. Perencanaan pembangunan disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up.

Periode RPJMD Tahun 2025-2029 sangat strategis sebagai fondasi awal untuk mencapai visi pembangunan Provinsi Papua Selatan 2025-2045: **“Terwujudnya Papua Selatan yang Sejahtera, Adil, Maju, Makmur Berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim”** dan dapat berkontribusi untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan optimalisasi sinergi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, penguatan kolaborasi Pemerintah Provinsi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta penguatan integrasi berbagai sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Akhir kata, ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Merauke, September 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN



APOLO SAFANPO,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN	7
1.3.1 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029	8
1.3.2 Hubungan antara RPJMD dengan RIPP	10
1.3.3 Hubungan antara RPJMD dengan RTRW	10
1.3.4 Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD	11
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	11
1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD	12
1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	155
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	155
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	155
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	66
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	164
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	169
2.2. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH	249
2.2.1. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah	249
2.2.2. Kinerja Keuangan Daerah	251
2.2.3. Neraca Daerah	255
2.2.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu (2022-2024)	257
2.2.5. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029	258
2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	263
2.3.1.1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi	264
2.3.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	274
BAB III VISI, MISI, dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	287
3.1. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	287
3.1.1 Visi Pembangunan Papua Selatan Tahun 2025-2029	287
3.1.2 Misi Pembangunan Papua Selatan Tahun 2025-2029	284

3.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	294
3.2.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ..	309
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029	310
3.2.2.	Arah Kebijakan Umum dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Selatan	334
3.2.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN 2025-2029	354
3.3.	PRORGAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025-2029	356
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH dan KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	384
4.1.	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	384
4.1.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	384
4.2.	INDIKATOR KINERJA	439
4.2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029	439
4.2.1	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029	440
BAB V	PENUTUP	453
5.1.	KESIMPULAN SUBSTANSIAL	453
5.2.	KAIDAH PELAKSANAAN dan PEDOMAN TRANSISI	454

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua Selatan diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Papua Selatan Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantikanya **Gubenur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT., IPM. dan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa, S.Pd** pada tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia **Nomor 24 / P Tahun 2025 Tanggal 17 Februari Tahun 2025**, tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Papua Selatan dan Wakil Gubernur Papua Selatan, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sebagaimana juga amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Papua Selatan Yang Bermartabat, Aman, Damai, Sejahtera Dan Pemerintah Yang Aspiratif”**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang

dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan; 2) Memberdayakan ekonomi yang inklusif berbasis potensi unggulan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP); 3) Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola OTSUS yang efektif (tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran), bersih, partisipatif, dan afirmatif; 4) Melestarikan dan mendayagunakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan; 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kohesi dan harmoni sosial lintas etnis, agama, dan golongan berbasis kearifan Anim Ha; 6) Meningkatkan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah terutama daerah 3T, pusat pertumbuhan berbasis tata ruang yang inklusif.

Dokumen RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Papua Selatan selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, Pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 15 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) supaya prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam berbagai kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 juga menegaskan pentingnya KLHS dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan telah mempertimbangkan dampak dan risiko lingkungan secara sistematis sejak tahap perencanaan. Peran KLHS menjadi semakin strategis karena hasilnya wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dokumen perencanaan lain di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya integrasi KLHS ke dalam penyusunan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029, diharapkan seluruh kebijakan, rencana, dan program pembangunan selama periode RPJMD tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mampu mengantisipasi serta meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan ke depan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Papua Selatan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 - 12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

- 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 14) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

- 24) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 31) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 32) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 33) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- 34) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029; serta
- 35) Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.3/2472/Bangda tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasca Pelantikan Kepala Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor ...);

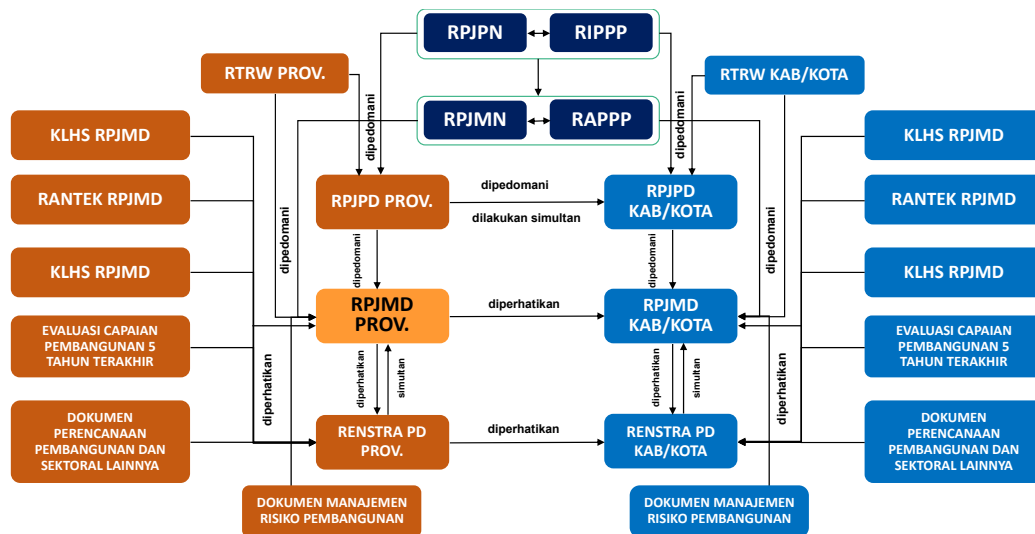
1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN

RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah kebijakan serta serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan kondisi Provinsi Papua Selatan. RPJMD juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua Selatan, serta memperhatikan RPJMD Provinsi lainnya yang berbatasan, dan RTRW Provinsi Papua Selatan.

Adapun Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

Gambar I.1 Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Lainnya



Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta spasial. RPJMD Provinsi Papua Selatan yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.3.1 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 memperhatikan tema, fokus agenda pembangunan, serta arah pembangunan wilayah Provinsi Papua Selatan sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan kebijakan pembangunan nasional.

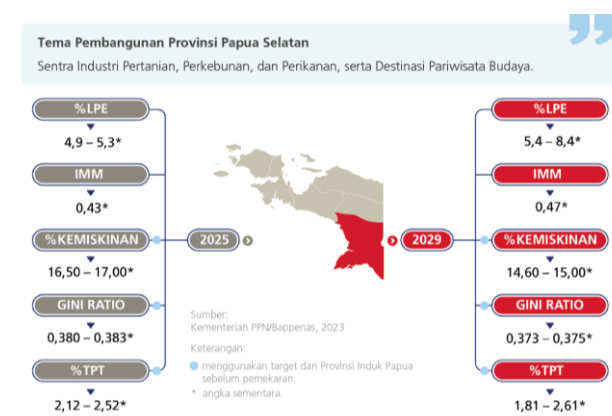
Tema pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi”. Adapun fokus agenda pembangunan nasional tahun 2025-2029 adalah:

- Transformasi sosial:** penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

- b. **Transformasi ekonomi:** hilirisasi serta penguatan riset unovasi dan produktivitas tenaga kerja.
- c. **Transformasi tata kelola:** kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
- d. **Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia:** memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan.
- e. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi:** memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Hasil pembangunan di tingkat nasional merupakan agregasi dari hasil pembangunan wilayah, pembangunan wilayah dan sarana prasarana merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah dan sarana prasarana adalah untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan sasaran visi Indonesia Emas 2045, terdapat tema pembangunan wilayah Papua 2025-2029 yaitu: **“percepatan pembangunan wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif”**. Adapun tema pembangunan khusus Provinsi Papua Selatan sebagaimana RPJMN 2025-2029 adalah **“sentra industri pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta destinasi pariwisata budaya”**.

Gambar I.2 Tema Pembangunan Provinsi Papua Selatan 2025-2029



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

1.3.2 Hubungan antara RPJMD dengan RIPPP

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041 adalah dokumen rencana yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2023. Dokumen ini merupakan mandat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dokumen RIPPP memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua, indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan percepatan pembangunan Papua. Dokumen RIPPP juga memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun 2022-2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif (termasuk kondisi perlu), dan lokasi prioritas pembangunan wilayah adat.

Untuk memastikan rencana pembangunan di Provinsi Papua Selatan selaras dengan pembangunan nasional, RIPPP memuat uraian sinergi perencanaan dan pendanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan di Tanah Papua tahun 2022-2041. Juga memuat uraian mekanisme pelaksanaan, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, mekanisme pengawasan serta penghargaan dan sanksi pada RIPPP Tahun 2022-2041.

1.3.3 Hubungan antara RPJMD dengan RTRW

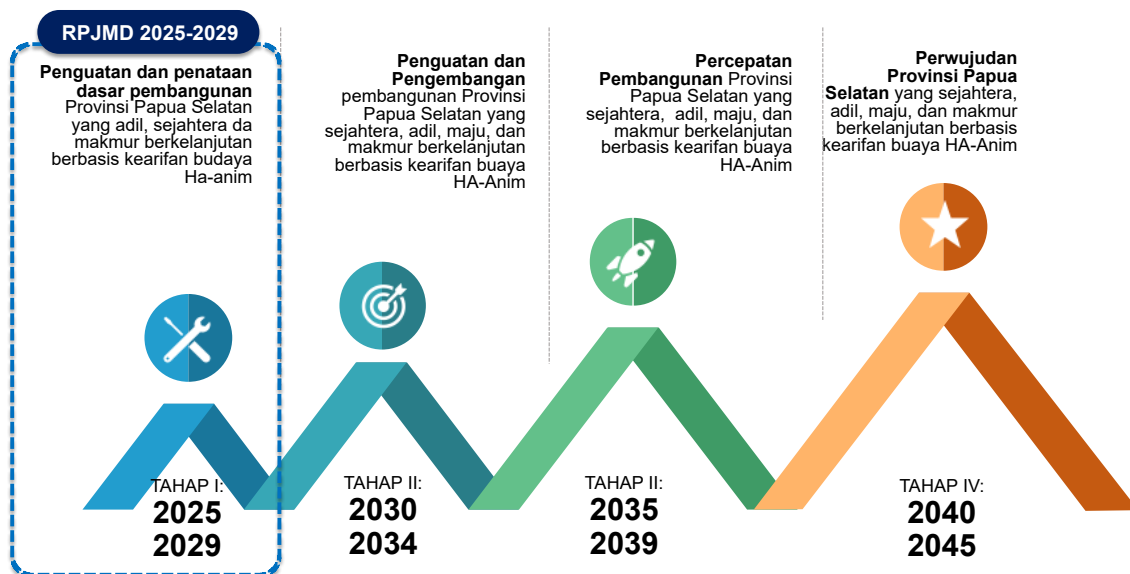
Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Papua Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Papua Selatan. Hal ini menjadi penting dilakukan karena pengembangan wilayah Provinsi Papua Selatan merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam periode pembangunan tahun 2025-2029 tujuan pendataan ruang

Provinsi Papua Selatan sebagaimana Rancangan RTRW Papua Selatan adalah **“Mewujudkan pendataan ruang Provinsi Papua Selatan yang berdaya saing tinggi, terintegrasi aman, dan berkelanjutan berbasis Pengembangan agropolitan, minapolitan, pariwisata, serta pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan kearifan lokal”**.

1.3.4 Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Provinsi Papua Selatan merupakan fondasi awal untuk mencapai visi pembangunan jangka Panjang Provinsi Papua Selatan sebagaimana Rancangan RPJPD 2025-2045, yaitu “Terwujudnya Papua Selatan yang Sejahtera, Adil, Maju, Makmur Berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim”. Adapun tahap awal pembangunan Papua Selatan dalam RPJPD adalah **“Penguatan dan pendataan dasar-dasar pembangunan** Provinsi Papua Selatan yang sejahtera, adil, maju dan makmur berkelanjutan Berbasis kearifan budaya Ha-Anim”.

Gambar I.3 Tahapan Pembangunan Provinsi Papua Selatan 2025-2045



Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi Papua Selatan 2025-2029

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Papua

Selatan tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Provinsi Papua Selatan ini antara lain: 1) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Papua Selatan selama kurun waktu 2025-2029; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah Pusat; 3) Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua Selatan yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029; serta 4) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD

Penyusunan RPJMD dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah

- 1) Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra perangkat daerah;
- 2) Orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah;
- 3) Penyiapan agenda kerja; serta
- 4) Penyiapan data dan informasi.

b. Penyusunan Substansi RPJMD

- 1) Pembahasan visi dan misi secara teknokratis antara tim penyusun dengan Kepala Daerah terpilih;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD;
- 3) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD;
- 4) Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD;
- 5) Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD; serta
- 6) Konsultasi Ranwal RPJMD untuk memperoleh masukan dari Kemendagri dan Bappenas dengan pertimbangan kesesuaian terhadap kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Penyampaian Ranwal RPJMD kepada perangkat daerah dan penyusunan Rancangan Renstra perangkat daerah;
- 8) Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- 9) Penyusunan Rancangan RPJMD, yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi Ranwal dan Rancangan Renstra perangkat daerah);
- 10) Musrenbang RPJMD untuk membahas Rancangan RPJMD, dengan melibatkan pemangku kepentingan;
- 11) Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD, yang merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rankhir berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD; serta
- 12) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir.

c. Proses Penetapan RPJMD

- 1) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD;
- 2) Pembahasan dengan DPRD;
- 3) Persetujuan bersama;
- 4) Evaluasi Ranperda RPJMD; serta
- 5) Penetapan Ranperda RPJMD menjadi Peraturan Daerah.

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN

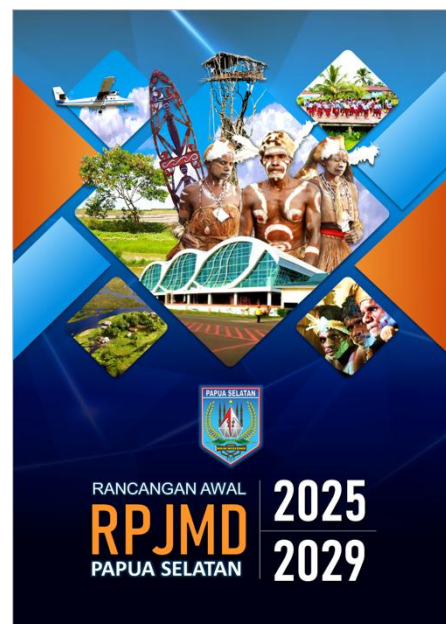
Dokumen RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mencakup 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen;

BAB II Gambaran Umum Daerah

Memuat analisis kondisi umum daerah Papua Selatan yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan



masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah. selain itu, memuat juga gambaran umum keuangan daerah dan permasalahan serta isu strategis;

BAB III Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada konsolidasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai isu strategis yang mengemuka di Papua selatan, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk 5 tahun mendatang;

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan. Memuat ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030;

BAB V Penutup

Memuat kaidah implementasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan Papua Selatan tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN UMUM

DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1) Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara administrasi, pembentukan Provinsi Papua Selatan didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Secara geografis, Provinsi Papua Selatan terletak pada garis koordinat 6° 00' LU 9° 00' LS dan 137° 30' BT-141° 00' BT. Posisi Papua Selatan yang strategis, ditunjang oleh batas administrasi di sekitarnya yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang
- Sebelah Timur : Negara Papua Nugini
- Sebelah Selatan : Laut Arafura
- Sebelah Barat : Kabupaten Mimika dan Laut Aru

Tabel II.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

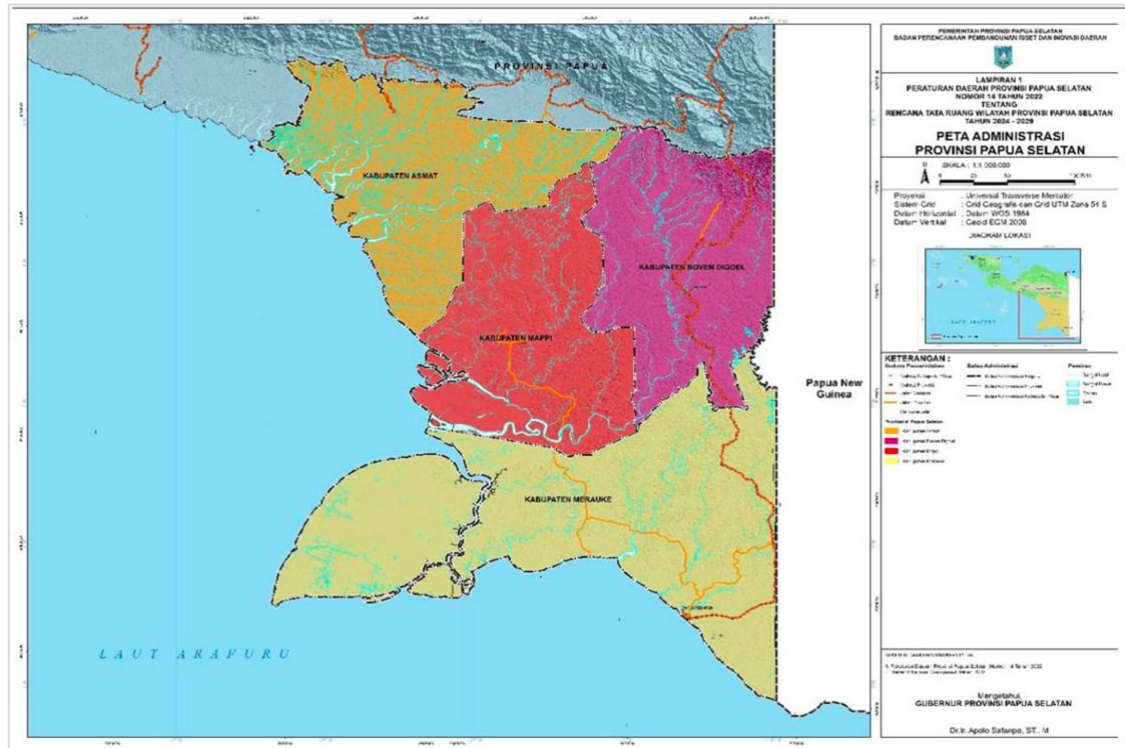
No	Kabupaten	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi	Distrik	Jumlah Pulau
1	Asmat	Agats	25.015,31	21,23	25	4
2	Boven Digoel	Tanah Merah	23.558,27	19,99	20	-
3	Mappi	Kepi	24.262,23	20,59	15	-
4	Merauke	Merauke	45.013,35	38,20	22	3
Papua Selatan			117. 849,16	100	82	7

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2025

Provinsi Papua Selatan terdiri atas 90 Distrik, 24 Kelurahan, dan 686 Kampung. Provinsi Papua Selatan memiliki luas sebesar 117. 849,16 Km² dengan daerah terluas adalah Kabupaten Merauke. Provinsi Papua

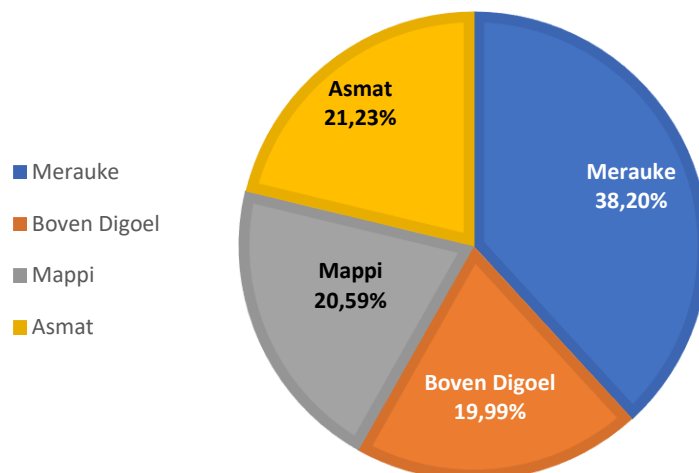
Selatan terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.

Gambar II.1 Peta Administrasi Provinsi Papua Selatan



Sumber: RTRW Provisi Papua Selatan Tahun 2025-2045, 2025

Gambar II.2 Persentase Luas Daerah menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan (km²), 2024

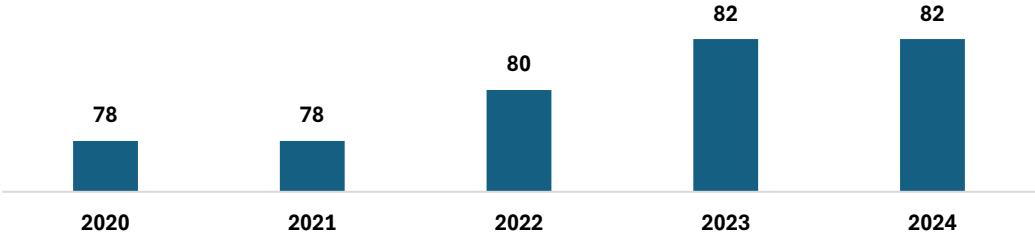


Sumber: Kementrian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022

Provinsi Papua Selatan memiliki beberapa sebaran pulau pada beberapa kabupaten dengan jumlah total persebaran pulau sebanyak 7 pulau.

Adapun jumlah kecamatan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 adalah sebanyak 82 kecamatan.

Gambar II.3 Jumlah Kecamatan di Provinsi Papua Selatan, 2020-2024

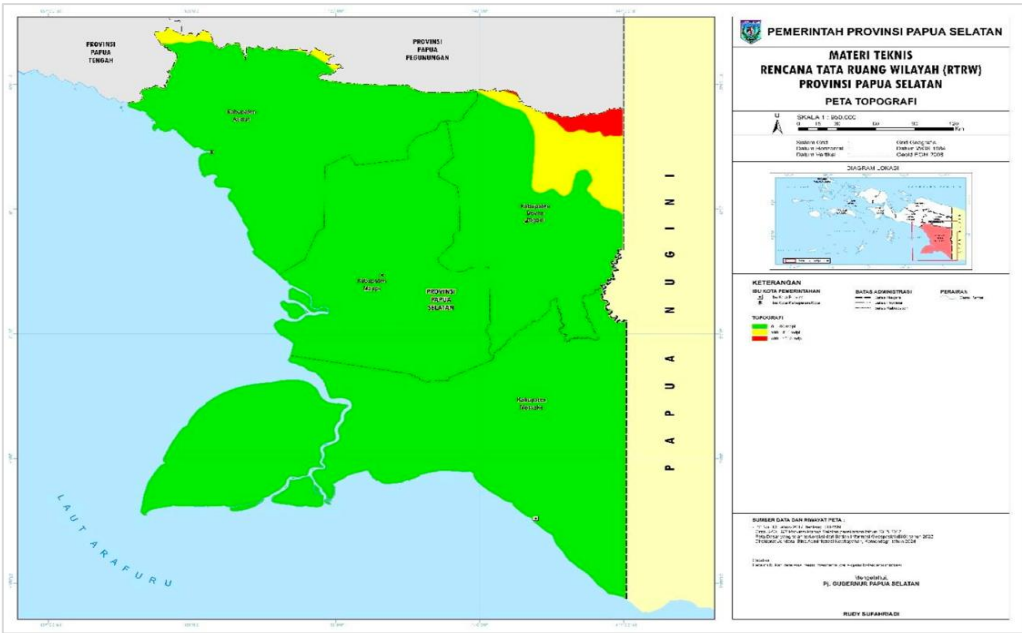


Sumber: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2021

2) Kondisi Topografi

Topografi merupakan gambaran terkait tinggi dan rendahnya suatu bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Topografi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Topografi diperlukan dalam perencanaan ruang dan wilayah untuk melihat kesesuaian lahan, kemampuan lahan, bencana alam, dan pembentukan tanah. Provinsi Papua Selatan didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-ratanya sebesar 0-55 mdpl.

Gambar II.4 Peta Topografi Provinsi Papua Selatan



Sumber: RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, 2025

Adapun morfologi wilayah di Provinsi Papua Selatan merupakan dataran rendah yang terdiri dari dataran rendah pantai, rawa pantai, dan muara sungai yang terletak pada pesisir barat dan pesisir selatan. Sementara dataran bergelombang hingga berbukit terletak dibagian tengah hingga utara dengan ketinggian mencapai 1.135 mdpl yang memiliki morfologi berupa kaki gunung dan lembah kecil teras dataran tinggi.

Kelerengan menunjukkan kemiringan lahan dalam mengidentifikasi arah aliran air permukaan. Provinsi Papua Selatan secara umum memiliki kelerengan morfologi berarah utara ke selatan dengan besaran sudut lereng dominan kurang dari 10 persen di seluruh kabupaten. Kelerengan yang lebih dari 40 persen terdapat hanya di Kabupaten Asmat dan Boven Digoel yang letaknya berada di sebelah utara berbatasan dengan Pegunungan Tengah Papua.

Tabel II.2 Kelerengan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Kelerengan	Asmat	Boven Digoel	Mappi	Merauke	Grand Total
>= 40%	33.151	239.988			273.139
15 - 40%	4.957	1.407.376	4.644	4.332	1.421.308
8 - 15%	542	285.720	786.559	211.662	1.284.483
0 - 8 %	2.465.335	421.195	1.635.094	4.285.331	8.806.955
Jumlah	2.503.984	2.354.279	2.426.297	4.501.325	11.785.885

Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Kampung/kelurahan di Provinsi Papua Selatan juga dapat dilihat berdasarkan letak geografisnya yaitu tepi laut dan bukan tepi laut. Jumlah kampung/kelurahan di tepi laut pada tahun 2024 adalah sebanyak 86 desa/kelurahan, sedangkan jumlah desa/kelurahan berada bukan di tepi laut pada tahun 2024 adalah sebanyak 604 desa/kelurahan.

Tabel II.3 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dan Letak Geografi, 2018-2024

Kabupaten	Tepi Laut			Bukan Tepi Laut		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
Merauke	57	46	47	133	144	143
Boven Digoel	-	1	-	110	111	112
Mappi	2	2	9	162	162	155
Asmat	18	17	30	203	204	194
Papua Selatan	77	66	86	608	621	604

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Apabila dilihat berdasarkan kondisi topografinya, desa/kelurahan di Papua Selatan terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu lembah, lereng/puncak, dan dataran. Jumlah kampung/kelurahan yang berada di lembah pada tahun 2021 adalah sebanyak 3 kampung/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan di lereng/puncak pada tahun 2023 adalah sebanyak 34 desa/kelurahan. Adapun desa/kelurahan di dataran pada tahun 2023 adalah sebanyak 650 desa/kelurahan.

Tabel II.4 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kabupaten dan Topografi Wilayah di Provinsi Papua Selatan, 2018-2024

Kabupaten	Lembah			Lereng/Puncak			Dataran		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024	2018	2021	2024
Merauke	-	-	-	-	-	-	190	190	190
Boven Digoel	-	-	-	17	2	-	93	110	112
Mappi	-	-	-	-	12	-	164	152	164
Asmat	-	3	3	-	20	15	221	198	206
Papua Selatan	-	3	3	17	34	15	668	650	672

Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

3) Jenis Tanah

Tanah adalah tubuh alam yang terbentuk dari hasil proses pelapukan batuan yang berfungsi sebagai tempat hidup tumbuhan. Faktor pembentuk tanah terdiri dari bahan induk, iklim, topografi, organisme, dan waktu. Jenis tanah dapat bervariasi, sama halnya dengan produktivitas dalam pemanfaatannya. Adapun jenis tanah di Provinsi Papua Selatan didominasi oleh tanah mineral dan menyebar tanah gambut. Jenis tanah yang ditemui diantaranya adalah aluvial tonik, fluvisol eutrik, kambisol distrik, kambisol humik, oksisol eutrik, dan podsolik plintik.

Tabel II.5 Jenis Tanah Mineral Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Jenis Tanah	Asmat	Boven Digoel	Mappi	Merauke	Jumlah
Aluvial Tonik	18.670	1.582.647	316.594	303.754	2.421.664
Fluvisol Eutrik	333.947	656.308	1.203.838	523.191	2.717.284
Kambisol Distrik		33.454			33.454
Kambisol Humik	41.403	8.715			50.118
Oksisol Eutrik	1.909.964	73.155	729.735	2.576.429	5.289.283
Podsolik Plintik			176.131	1.097.951	1.274.082
Jumlah	2.503.984	2.354.279	2.426.297	4.501.325	11.785.885

Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

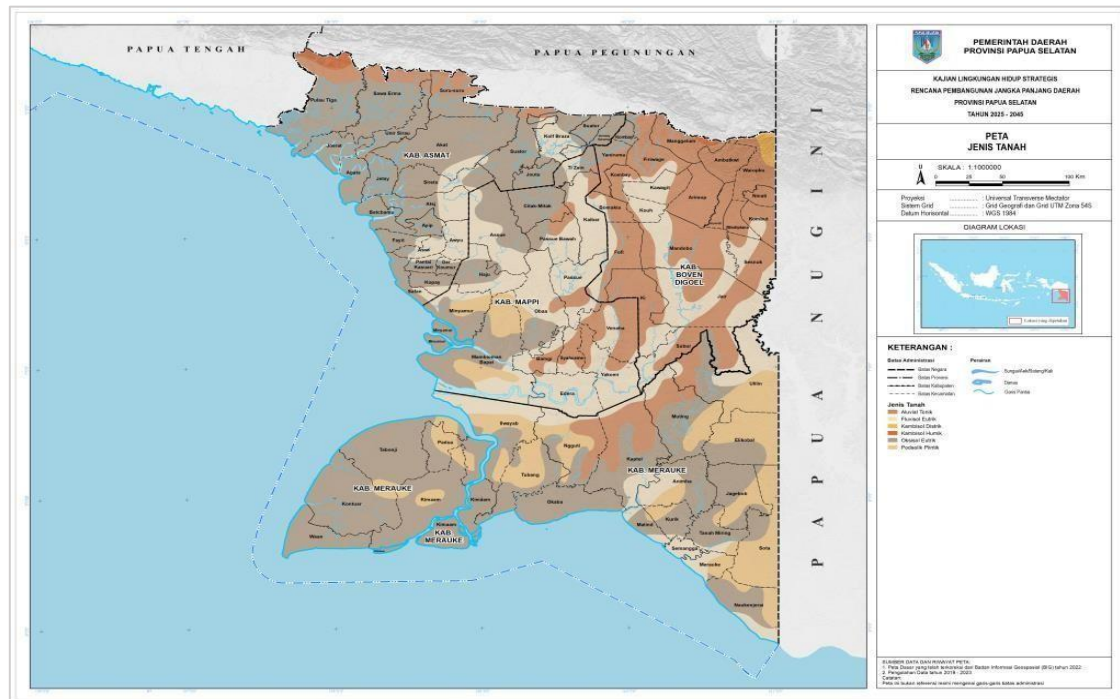
Tabel II.6 Jenis dan Karakteristik Tanah di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

No	Jenis	Karakteristik	Lokasi
1	Orgonosol	a. Sifat sangat peka terhadap erosi memiliki tekstur yang lembek karena tergenang air b. Terbentuk dari proses pelapukan dan pembusukan organik c. Biasa dijumpai di rawa-rawa	Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat
2	Alluvial	a. Warna kelabu, coklat, hitam b. Tersebar didataran rendah dan cekun c. Baik jika digunakan untuk tanah pertanian Tidak pekaterhadap erosi	Merauke, Mappi
3	Hidromorf (oksisol) kelabu	a. Terbentuk akibat dari pelapukan batuan sedimen masam yang sering tergenang air vulkanik asam dan batu pasir. b. Ditemui di wilayah dataran rendah dengan curah hujan lebih dari 2.000 milimeter per tahun c. Memiliki produktivitas rendah sampai sedang.	Merauke, Mappi
4	Lithosol (Oksisol)	a. Sangat peka terhadap erosi b. Biasanya tanah pertanian kurang baik atau padang rumput c. Terebar di daerah berombak	Mappi, Asmat
5	Padisolik	a. Berwarna kuning sampai merah b. Sifat masam dan peka terhadap erosi c. Tersebar didataran bukit sampai gunung d. Sebagian diupayakan untuk tanah pertanian, hutan dan perkebunan e. Berupa ilalang	Mappi, Boven Digoel, Asmat
6	Gleisol	a. Terdapat di daerah dataran rendah atau cekungan, yang hampir selalu tergenang air, solum tanah sedang, warna kelabu hingga kekuningan, tekstur geluh hingga lempung, struktur berlumpur hingga masif, konsistensi lekat, bersifat asam pH 4.5 - 6.0, dan bahan organik. b.	Boven Digoel
7	Regosol	a. Terdapat di daerah dataran rendah atau cekungan, yang hampir selalu tergenang air, solum tanah sedang, warna kelabu hingga kekuningan, tekstur geluh hingga lempung b.	Boven Digoel, Asmat

Sumber: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSLDP)

Sebaran tanah terluas adalah Oksisol. Oksisol merupakan jenis tanah marginal yang telah mengalami pelapukan lanjut (dengan perkembangan) dan berusia tua, serta memiliki faktor pembatas, seperti rendahnya tingkat kesuburan alami yang disebabkan karena kandungan bahan organik yang sedikit, kelarutan mineral besi dan aluminium yang tinggi, pH yang cukup masam, serta keadaan fiksasi fosfor dan rendahnya kapasitas pertukaran kation. Adapun jenis tanah Aluvial merupakan tanah mineral yang tidak menunjukkan perkembangan dan jenis tanah fluvial dipengaruhi oleh keadaan aliran air permukaan seperti sungai. Sedangkan, tanah gambut ditunjukkan oleh jenis tanah organosol yang biasa ditemukan di sekitar rawa-rawa dan antara sungai-sungai besar.

Gambar II.5 Peta Jenis Tanah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

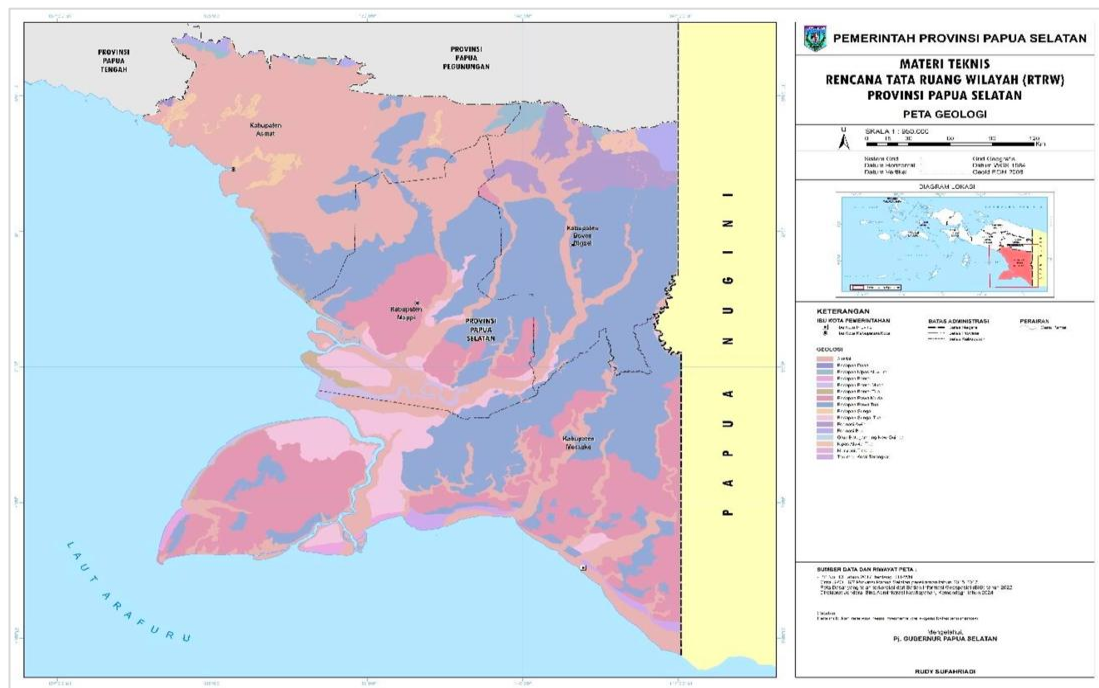


Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

4) Kondisi Geologi

Geologi adalah salah satu kondisi fisik yang menggambarkan jenis batuan, struktur, dan proses yang terjadi di permukaan bumi. Provinsi Papua Selatan secara umum memiliki geologi yang dipengaruhi oleh tatanan tektonik yang berkaitan dengan lempeng Australia dan bagian dari dangkalan Sahul. Dataran selatan Papua terdiri dari dataran dan rawa-rawa yang didasari oleh batuan sedimen klastis yang mempunyai ketebalan lebih dari 2 km berumur Eosen hingga Miosen Tengah dan ditutupi oleh batu gamping berumur Pliosen-Plistosen (Dow dan Sukamto, 1984).

Gambar II.6 Peta Geologi Provinsi Papua Selatan Tahun 2024



Sumber: RTRW Provisi Papua Selatan Tahun 2025-2045, 2025

Adapun struktur geologi yang berkembang di Papua Selatan adalah sesar naik dan sesar geser. Formasi geologi yang ada terdiri dari aluvial, batuan sedimen tersier, batu gamping tersier, endapan teras sungai, kipas non vulkanik (aliran debris), kipas sedimen vulkanik (aliran lahar), rawa gambut, rawa mangrove, dan terumbu karang yang terangkat. Kabupaten Merauke di dominasi oleh rawa gambut dan kipas non vulkanis (aliran debris). Kabupaten Asmat didominasi oleh batuan sedimen tersier. Kabupaten Boven Digoel didominasi oleh kipas non vulkanik (aliran debris). Kabupaten Mappi di dominasi oleh rawa gambut, kipas non vulkanis (aliran debris) dan batuan sedimen tersier. Potensi bahan tambang/mineral di Provinsi Papua Selatan adalah minyak dan emas. Provinsi Papua Selatan dibentuk oleh hutan sedimen, tergolong endapan aluvium, di utara pasir kwarsa dan batu apung. Tingkat kesuburan tanah Provinsi Papua Selatan tergolong rendah hingga sedang.

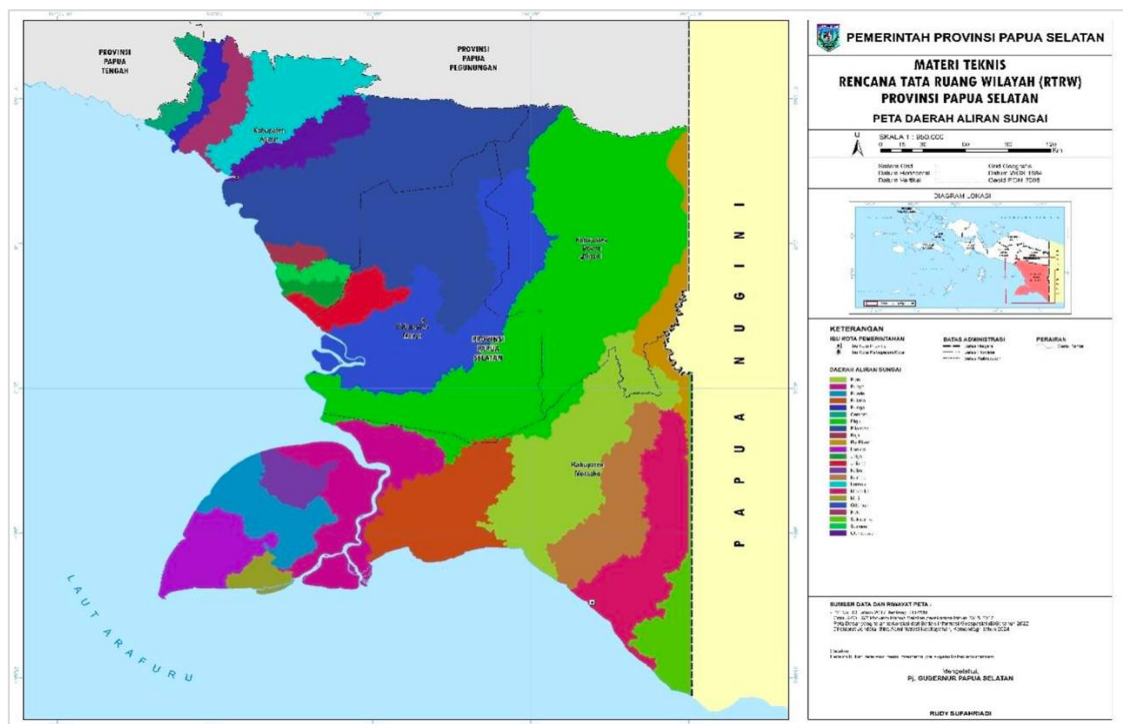
5) Kondisi Hidrologi

Provinsi Papua Selatan memiliki berbagai sungai besar antara lain Sungai Bian, Digul, Maro, Mapi, dan Wildeman. Sungai tersebut merupakan potensi sumber air tawar untuk pengairan dan digunakan sebagai prasarana angkutan antara kecamatan dan desa-desa. Sumber

air tawar dari rawa – rawa, air permukaan dan air tanah cukup tersedia untuk dimanfaatkan. Dibeberapa tempat air tanah mengandung belerang panas. Sungai juga membentuk batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini berbentuk garis lurus kecuali sebagian kecil Sungai Fly di Papua Nugini yang menjorok ke arah Indonesia. Sungai Bensbach juga mengalir di Papua Nugini namun wilayah muaranya atau disebut Muara Torasi di Kampung Kondo dikenal sebagai titik ujung timur Indonesia.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Berikut daerah aliran sungai di Papua Selatan.

Gambar II.7 Peta Hidrologi Provinsi Papua Selatan Tahun 2024



Sumber: RTRW Provisi Papua Selatan Tahun 2025-2045, 2025

Provinsi Papua Selatan memiliki banyak danau yang merupakan kesatuan sistem hidrologi dengan sungai. Danau merupakan cekungan air alami berisi air dan terletak di permukaan bumi. Danau-danau di

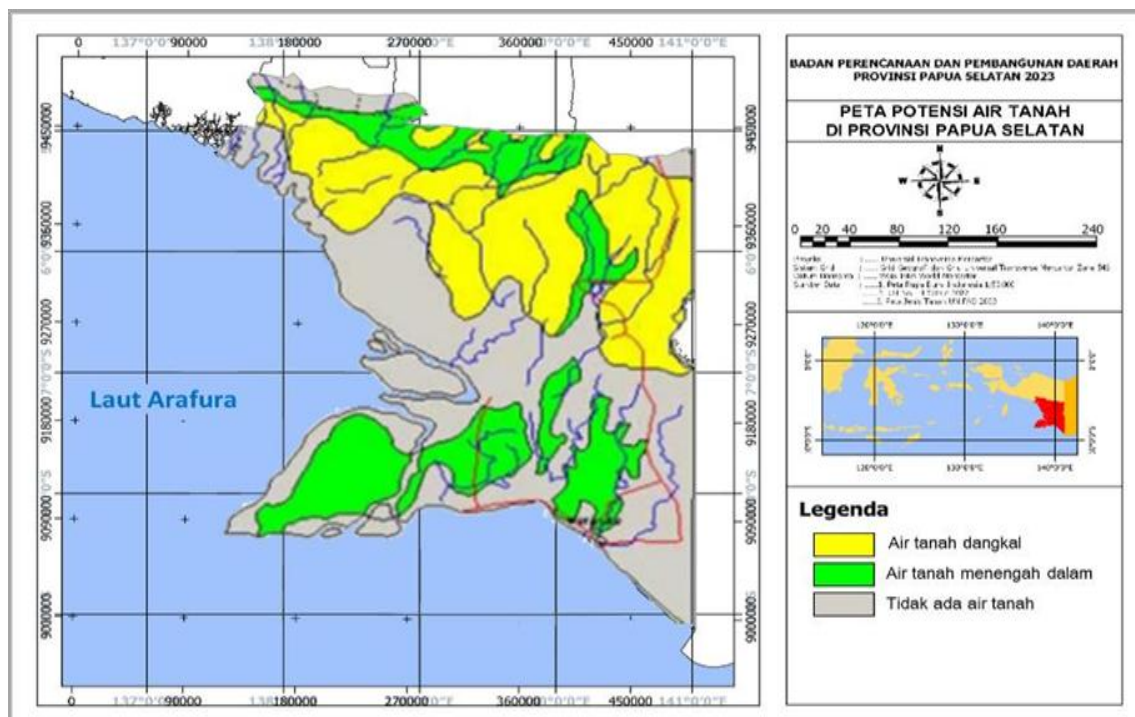
Provinsi Papua Selatan terbentuk dari berbagai proses geologis dan geomorfologi. Faktor-faktor pembentuk danau di Provinsi Papua Selatan meliputi: (a) Tektonik Lempeng; (b) Aktivitas Vulkanik; (c) Erosi dan Sedimentasi; (d) Hujan yang Melimpah; dan (e) Aktivitas Glasial.

Selain menjadi habitat bagi beberapa makhluk hidup dan berperan penting dalam ekologi serta ekosistem, danau dapat digunakan untuk berbagai keperluan manusia, seperti pasokan air minum, pertanian, perikanan, pariwisata, dan kegiatan rekreasi. Beberapa danau yang terletak di Provinsi Papua Selatan antara lain:

- a. Asmat : Atoerpura, Imyan, Sekampung, Langgara, Kasuari
- b. Merauke : Rombebai, Sota, Tigi, Dakwa, Tabar, Modo
- c. Mappi : Apo, Anggim, Hainam, Andey, Bahoi

Selain sumber air permukaan terdapat sumber air yang berasal dari dalam tanah, Gambar II.8 menunjukkan potensi air tanah di bagian selatan Papua Selatan berupa potensi air tanah menengah dalam, sedangkan di bagian utara Papua Selatan sebagian besar berupa tanah potensi air tanah dangkal dan sebagian kecil potensi air tanah dalam.

Gambar II.8 Peta Potensi Air Tanah di Pulau Papua



Sumber: website resmi Pemerintah Provinsi Papua, 2023

6) Kondisi Klimatologi

Sebagian besar komposisi wilayah Provinsi Papua Selatan merupakan dataran rendah menyebabkan sering terjadinya bencana banjir maupun longsor. Tiga ancaman besar dari perubahan iklim terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua antara lain dengan Tiga ancaman perubahan iklim khususnya di Papua Selatan diantaranya (1) Naiknya permukaan air laut, (2) Perubahan temperature dan penguapan akibat pemanasan global, dan (3) Perubahan pada kerusakan lainnya seperti gelombang dan pasang.

Perubahan iklim menjadi salah satu isu internasional untuk menjaga lingkungan. Klimatologi berkaitan akan dampaknya bagi kelangsungan hidup penduduk dilihat dari perubahan iklim yang terjadi serta pola dan perilaku suatu penduduk. Berdasarkan pengamatan unsur iklim di Stasiun Meteorologi Mopah, suhu rata-rata di tahun 2023 adalah 28,40 lebih rendah dibandingkan di Stasiun Klimatologi Merauke yaitu 29,90. Adapun jumlah curah hujan pada tahun 2023 di Stasiun Meteorologi Mopah adalah 399,50 mm lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dan pengukuran di Stasiun Klimatologi Merauke yaitu 321,30 mm. Pencatatan jumlah hari hujan di tahun 2023 di Stasiun Klimatologi Merauke lebih tinggi (22,00) dibandingkan Stasiun Meteorologi Mopah (18,00). Penyinaran pada tahun 2023 di Stasiun Meteorologi Mopah tercatat sebanyak 7,25 jam dan 5,88 tercatat di Stasiun Klimatologi Merauke.

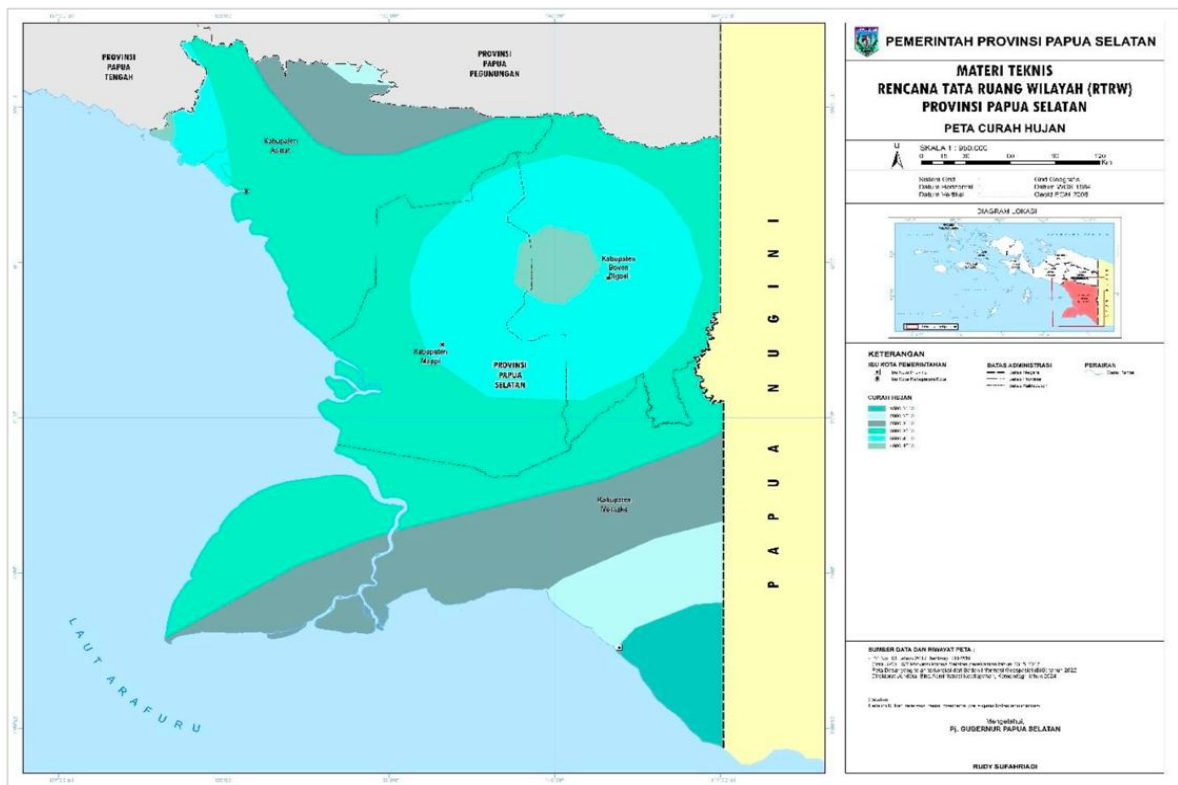
Tabel II.7 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2022- 2023

Unsur Iklim	Stasiun Meteorologi Mopah						Stasiun Klimatologi Merauke					
	2022			2023			2022			2023		
	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.
Suhu (°C)	22,50	28,98	...	23,50	28,40	35,70	22,50	28,98	...	22,10	29,90	...
Kelembaban (%)	52,00	84,39	100,00	48,00	83,10	99,00	57,00	86,36	99,00	49,00	81,90	100,00
Kecepatan Angin (knot)	0,00	3,08	10,00	0,00	5,70	19,00	0,00	4,01	19,00	0,00	4,70	13,00
Tekanan Udara (mbar)	1000,70	1005,86	1011,00	1003,40	1007,80	1013,70	1000,60	1006,15	1011,30	1003,10	1007,20	1013,70
Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	299,60			399,50			265,40			321,30		
Jumlah Hari Hujan (hari)	21,00			18,00			21,00			22,00		
Penyinaran Matahari (jam)	4,23			7,25			4,53			5,88		

Catatan: Calm adalah kecepatan angin mendekati nol

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Gambar II.9 Peta Iklim Provinsi Papua Selatan Tahun 2024



Sumber: RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, 2025

7) Kondisi Bentang Alam

Bentang alam merupakan keadaan bentangan permukaan bumi yang di dalamnya terjadi hubungan saling terkait dan saling bergantung antar berbagai komponen lingkungan seperti udara, air, batuan, tanah, serta flora, dan fauna yang saling mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Fisiografi “badan burung” Papua terbagi atas 5 tipe bentang alam, yaitu:

- Dataran Gambut yang melampar dari Kokonao hingga Digoel
- Dataran Pantai Selatan
- Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya (Pegunungan Tengah Papua)
- Perbukitan Karts Papua yang melampar secara tidak merata hampir di seluruh pulau Papua
- Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya merupakan bagian dari lereng pegunungan Tengah Papua

Provinsi Papua Selatan berada pada bentang alam Dataran Pantai Selatan dan Dataran Gambut yang terdiri atas morfologi dataran dengan kemiringan sebagian besar adalah <10 persen dan ketinggian antara 0 – 50 mdpl, serta ditempati oleh vegetasi hutan pamah. Bentang alam

dataran pantai dan rawa gambut mempengaruhi karakteristik suku dan budaya di Papua Selatan seperti makanan pokok berupa sagu dan ikan air tawar dari sungai, serta kehidupan sehari-hari memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi.

Tabel II.8 Bentang Alam dari Fisiografi Papua Selatan Tahun 2023

Bentang Alam	Asmat	Boven Digoel	Mappi	Merauke	Jumlah
Dataran Gambut Kokonao - Digul	315.473	150.222	546.467	72.675	1.084.837
Dataran Pantai Selatan Papua	2.140.097	1.960.623	1.879.830	4.428.650	10.409.200
Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya		129.102			129.102
Perbukitan Karst Papua		149			149
Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	48.414	114.183			162.597
Jumlah	2.503.984	2.354.279	2.426.297	4.501.325	11.785.885

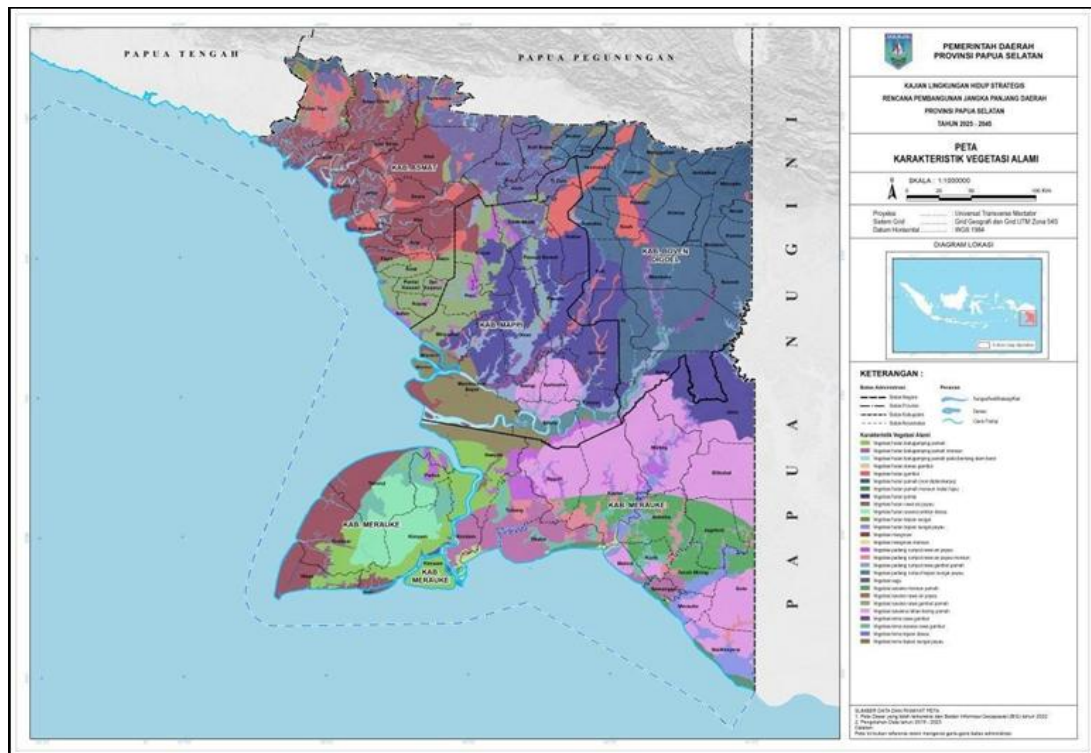
Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

8) Kondisi Vegetasi

Hutan di Pulau Papua merupakan hutan perawan yang juga menjadi hutan perawan terluas se-Asia Tenggara. Tipe vegetasi alam di Papua merupakan mosaik komunitas tumbuhan dalam bentang alam yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Spesies pohon utama yang ditemukan di dataran rendah (dominasi Merbau *Instia* sp dan Damar *Agathis* sp), di perbukitan (dominasi oleh *Araucaria* sp) dan semakin tinggi tempat keanekaragaman ekosistem yang melimpah. Perbedaan ekosistem satu dengan ekosistem lainnya bahkan sangat kontras. Hutan musim di Papua terbatas berada di wilayah bagian selatan dengan dominasi jenis *Eucalyptus* sp. dan rumput.

Ekosistem hutan Papua Selatan terdiri atas ekosistem mangrove, rawa air tawar, dan rawa sagu yang luas. Di bibir pantai ditempati oleh tipe vegetasi terdepan hutan pantai yang berkarakter Indo-pasifik (Collins *etal.* 1991). Pohon sagu menjadi vegetasi paling banyak ditemukan di daerah rawa dan merupakan produksi sumber pangan utama. Sebaran vegetasi alami didominasi oleh vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) yang merupakan vegetasi dengan tegakan pohon-pohon dengan tinggi 30-45 meter, berbatang lurus dan ramping, bertajuk lebat dan berdaun kecil, sedang sampai lebar. Tumbuh di atas tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah yang kompleks, berada di ketinggian 0-1000 mdpl. Disamping itu, vegetasi yang juga banyak ditemui adalah Vegetasi mangrove berjenis *Avicennia* spp dan *Rhizophora* spp, serta Vegetasi hutan Pantai.

Gambar II.10 Peta Sebaran Vegetasi Alami Tahun 2023

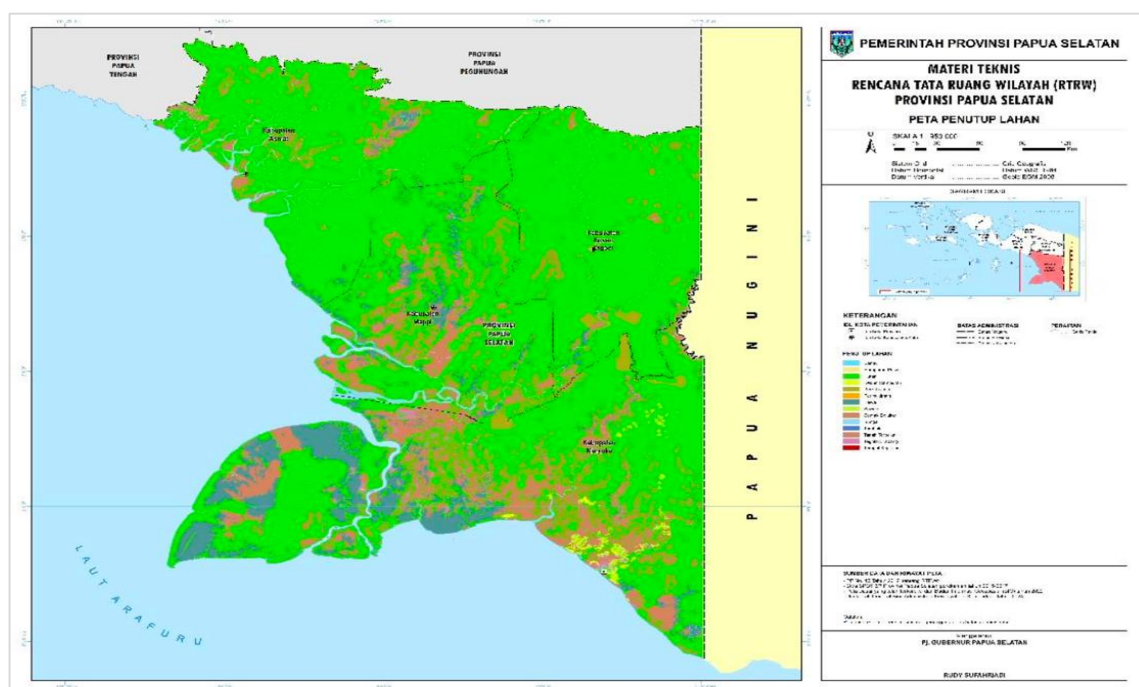


Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

9) Kondisi Tutupan Lahan

Penggunaan istilah penutupan lahan (land cover) dan penggunaan lahan (land use) digunakan dalam kajian penataan ruang. Penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada obyek tersebut. Penutupan lahan adalah perwujudan secara fisik dari vegetasi, benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Dalam lingkup penyusunan RTRW Provinsi Papua Selatan digunakan data penutupan lahan, terutama atas pertimbangan ketersediaan dan kualitas data yang relatif beragam. Selain kekayaan alam berupa DAS yang sangat luas, Provinsi Papua Selatan masih memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Klasifikasi penutup lahan berdasarkan PERDIRJEN Planologi Kehutanan No P.1-VII-IPSDH-2015 tahun 2015 di bagi menjadi 23 klasifikasi.

Gambar II.11 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024



Sumber: RTRW Provisi Papua Selatan Tahun 2025-2045, 2025

Selain kekayaan alam berupa DAS yang sangat luas, penutupan lahan di Provinsi Papua Selatan di dominasi oleh tutupan lahan Hutan. Penutupan lahan di Provinsi Papua Selatan secara garis besar terbagi menjadi Hutan dan Non Hutan.

Tabel II.9 Luas dan Persentase Penutupan Lahan di Provinsi Papua Selatan

Penutupan Lahan	Asmat	Boven Digoel	Mappi	Merauke	Jumlah
Bandara/Pelabuhan	49	109	96	139	395
Hutan Lahan Kering Primer	241.479	1.066.146	532.842	356.601	2.197.068
Hutan Lahan Kering Sekunder	168.112	861.832	294.836	711.654	2.036.434
Hutan Mangrove Primer	193.255		52.390	264.716	510.362
Hutan Mangrove Sekunder	21.038		6.371	19.622	47.030
Hutan Rawa Primer	1.356.393	70.284	378.513	204.013	2.009.203
Hutan Rawa Sekunder	263.679	38.587	246.782	625.874	1.174.922
Hutan Tanaman			1.824		1.824
Lahan Terbuka	24	17.082	62.693	52.439	132.238
Pemukiman	2.565	3.748	3.525	6.903	16.741
Perkebunan	46	34.313	7.927	93.779	136.064
Pertanian Lahan Kering		1.674	1.042	18.896	21.613
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	2.161	34.771	41.289	62.377	140.598
Rawa	22.341	25.988	141.319	438.213	627.860
Savana/Rumput	742	11.209	68.869	485.369	566.189
Sawah				44.366	44.366
Semak Belukar	12.024	113.147	130.712	79.349	335.233
Semak Belukar Rawa	125.311	44.022	383.895	973.928	1.527.156
Tambak				78	78
Transmigrasi				23.299	23.299
Tubuh Air	94.764	31.368	71.369	39.710	237.212
Jumlah	2.503.984	2.354.279	2.426.297	4.501.325	11.785.885

Sumber: RTRW Provisi Papua Selatan Tahun 2025-2045, 2025

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1) Potensi Hutan Produksi

Hutan di Provinsi Papua Selatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya atau kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup. Adapun kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Tabel II.10 Luas Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 (Ha)

Kabupaten	Kawasan Hutan Lindung		Kawasan Hutan Produksi			Jumlah Luas Hutan dan Perairan
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	
Merauke	268.734	1.405.767	978.542	213.723	1.237.698	4.119.825
Boven Digoel	83.772	0	1.292.101	403.213	173.785	1.956.482
Mappi	210.729	0	586.285	796.061	48.459	2.128.312
Asmat	1.124.067	278.888	105.556	1.031.620	42.352	2.594.449
Papua Selatan	1.687.302	1.684.655	2.962.484	2.444.617	1.502.294	10.799.068

Sumber: BPS Provinsi Papua Dalam Angka, 2023

Hutan produksi di Provinsi Papua Selatan terbagi menjadi tiga jenis kawasan peruntukan hutan produksi yaitu: hutan produksi terbatas (HPT) seluas 2.962.484 ha, hutan produksi tetap (HP) seluas 2.444.617 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.502.294 ha, yang tersebar di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Tabel II.11 Kriteria Jenis Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan Produksi	Kriteria
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b. kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam.
Hutan Produksi Tetap (HP)	a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b. kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	a. memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b. merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan,

Hutan Produksi	Kriteria
	c. kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk, yang diolah dengan mempertimbangkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan (lihat Tabel II.13). Pemanfaatan hutan produksi di Papua Selatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan potensi hutan produksi di Papua Selatan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dilakukan secara berkeadilan dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kriteria ekonomi, lingkungan dan sosial, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.12.

Tabel II.12 Kriteria Pengelolaan Hutan Produksi

No	Kriteria	Uraian
1	Ekonomi	a. terdapat batas yang secara jelas tergambar dalam peta dan teridentifikasi di lapangan; b. terdapat lembaga pengelola yang dilengkapi dengan organisasi, tenaga ahli, serta sistem keuangan yang jelas dan transparan; c. terdapat ketegasan proses produksi; serta d. terdapat sistem tata usaha kayu, administrasi dan keuangan yang jelas.
2	Lingkungan	a. tidak menyebabkan erosi tanah atau sedimentasi pada badan air; b. tidak menyebabkan perubahan drastis terhadap struktur dan komposisi tegakan; c. terlindunginya satwa liar dan habitatnya dari gangguan kegiatan penebangan kayu.
3	Sosial	a. mempertimbangkan sistem penguasaan lahan yang mengatur hak dan kewajiban penguasaan dan pemanfaatan hutan yang bersumber pada hukum adat; b. membangun integrasi sosial budaya masyarakat dan karyawan pengelola hutan, termasuk kepedulian terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar; serta c. keberadaan pengelola hutan tidak mengganggu sistem kehidupan masyarakat setempat, terutama yang perikehidupannya bertumpu pada kawasan hutan.

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk, yang diolah dengan mempertimbangkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

2) Potensi Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, pada umumnya berada di atas tanah milik atau tanah adat. Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan hutan rakyat yang tersebar di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan

Asmat (lihat Tabel II.13). Hutan rakyat memainkan peranan penting baik dalam upaya penanganan lahan kritis, dan juga perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun data tentang produksi hasil hutan rakyat yang valid belum tersedia secara lengkap, tetapi hutan rakyat yang berkembang secara tradisional di Papua Selatan telah berperan signifikan dalam produksi hasil hutan, maupun penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat. Selain itu, ikatan emosional yang terbangun dalam pengembangan hutan rakyat secara bersama-sama oleh petani secara berkelompok telah meningkatkan keeratn hubungan sosial di masyarakat Papua Selatan. Dalam hal ini, kearifan lokal dalam mengelola kekayaan alam, termasuk hutan rakyat, merupakan aspek yang perlu dicermati sebagai bagian dari pengelolaan kawasan hutan rakyat di Papua Selatan.

3) Potensi Pertanian

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan (lihat Tabel II.13). Pertanian lahan basah dapat dikembangkan di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Pertanian lahan kering dapat dikembangkan di Kabupaten Merauke. Pertanian holtikultura dapat dikembangkan di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Perkebunan dan peternakan dapat dikembangkan di Merauke, Boven Digoel dan Mappi. Adapun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu dilindungi dan dikembangkan di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan secara konsisten dalam mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam hal ini, penggunaan lahan untuk pertanian di Provinsi Papua Selatan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, termasuk mencegah kerusakannya.

4) Potensi Perikanan

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan, dengan karakteristik yang berbeda-beda (lihat Tabel II.13). Potensi perikanan tangkap yang tinggi terdapat di Kabupaten Merauke, Mappi dan Asmat. Potensi perikanan budaya yang tinggi terdapat di seluruh kabupaten di Papua Selatan. Adapun potensi pengembangan industri perikanan hanya terdapat di Kabupaten

Merauke. Dalam hal ini, Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan minapolitan berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

5) Potensi Pertambangan

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan pertambangan batubara di Kabupaten Boven Digoel (lihat Tabel II.13). Meskipun demikian, **diperlukan kajian lebih lanjut** untuk melakukan pemetaan serta meninjau potensi pertambangan di Provinsi Papua Selatan. Hal ini mempertimbangkan bahwa pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap **memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup**. Selain itu, kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) yang dilengkapi dengan RPL dan RKL. Hal ini diperlukan sejak tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga tahap eksploitasi agar tidak menimbulkan perselisihan dan/atau persengketaan dengan masyarakat setempat.

6) Potensi Industri

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pemantapan industri di Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi (lihat Tabel II.13). Dengan adanya pertimbangan bahwa di 3 (tiga) kabupaten tersebut telah terdapat kompleks industri besar sebelumnya, maka sifat pemantapan yang dimaksud dalam subbab ini meliputi: (1) pemenuhan persyaratan pengelolaan dampak lingkungan; (2) penataan di dalam kawasan industri termasuk peletakan bangunan pabrik dan ruang terbuka hijau; (3) pengendalian dampak terhadap sistem transportasi daerah sekitarnya; (4) penataan dan pengendalian Kawasan dan kegiatan non-industri lainnya di sekitar kawasan agar tidak saling merugikan. Adapun jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan hasil hutan, pertambangan, perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan.

7) Potensi Pariwisata

Provinsi Papua Selatan memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan ialah: Taman Nasional Lorentz di Asmat, dan Taman Nasional Wasur di Merauke. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Selatan dikelompokkan menjadi 4 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, dan obyek wisata alam. Selain itu, ada beberapa obyek wisata lainnya di Provinsi Papua Selatan yaitu Tugu Kembar Sabang Merauke di Merauke, Pantai Lampu Satu di Merauke, dan Museum Kebudayaan dan Kerajinan di Asmat. Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

8) Potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mempertimbangkan arahan pengembangan kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, pemanfaatan potensi pengembangan wilayah menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis, potensi sektoral yang dapat dikembangkan, pola investasi yang berkembang, serta potensi alam yang luar biasa di Provinsi Papua Selatan. Pembangunan Provinsi Papua Selatan harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial secara optimal yang lebih menekankan pada pengembangan sektor-sektor unggulan, dengan tetap **memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup**. Tabel II.13 menampilkan potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mempertimbangkan arahan pengembangan kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk.

Tabel II.13 Potensi Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Selatan

No	Potensi Pengembangan Wilayah	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
1	Kawasan peruntukkan hutan produksi				
	a. Hutan produksi terbatas (HPT)	✓	✓	✓	✓
	b. Hutan produksi tetap (HP)	✓	✓	✓	✓
	c. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	✓	✓	✓	✓
2	Kawasan hutan rakyat	✓	✓	✓	✓
3	Kawasan peruntukkan pertanian				
	a. Pertanian lahan basah	✓	✓	✓	
	b. Pertanian lahan kering	✓			
	c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	✓	✓	✓	✓
	d. Hortikultura	✓	✓		
	e. Perkebunan	✓	✓	✓	
	f. Peternakan	✓	✓	✓	
4	Kawasan peruntukkan perikanan				
	a. Perikanan tangkap	✓		✓	✓
	b. Perikanan budidaya	✓	✓	✓	✓
	c. Pengembangan industri perikanan	✓			
5	Kawasan peruntukkan pertambangan				
	Pertambangan batubara		✓		
6	Kawasan peruntukkan industri	✓	✓	✓	
7	Kawasan peruntukkan pariwisata				
	a. Wisata budaya				✓
	b. Wisata alam	✓	✓	✓	✓
	c. Wisata minat khusus	✓	✓	✓	✓
8	Kawasan peruntukkan permukiman				
	a. Permukiman perkotaan	✓	✓	✓	✓
	b. Permukiman perkampungan	✓	✓	✓	✓

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk, dan data hasil olahan mengacu UU Nomor 14 Tahun 2022

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

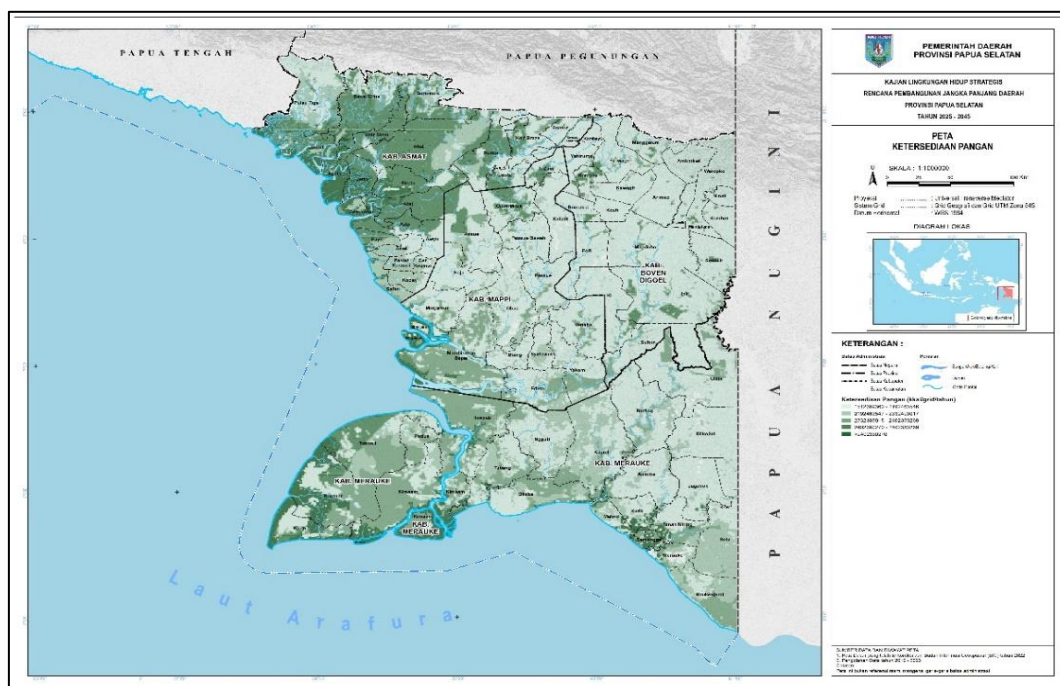
1. Daya Dukung Penyedia Pangan

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia, dan berkebalikan dengan jumlah

konsumsi penduduk. Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara spasial menggunakan grid dengan resolusi 5"x5" ($\approx 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$), sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Provinsi Papua Selatan dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPPB) sebagai bobot pendistribusian. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi di Provinsi Papua Selatan berada di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Asmat.

Gambar II.12 Peta Ketersediaan Pangan Tahun 2022

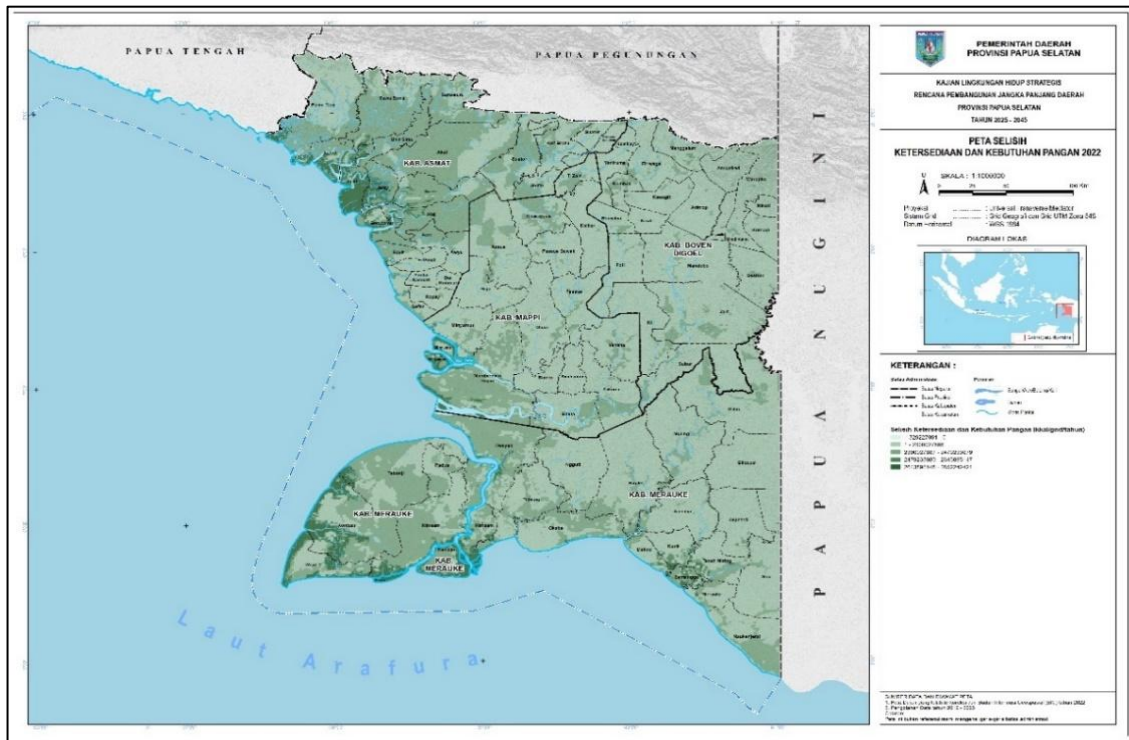


Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2025

Gambar II.13 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022



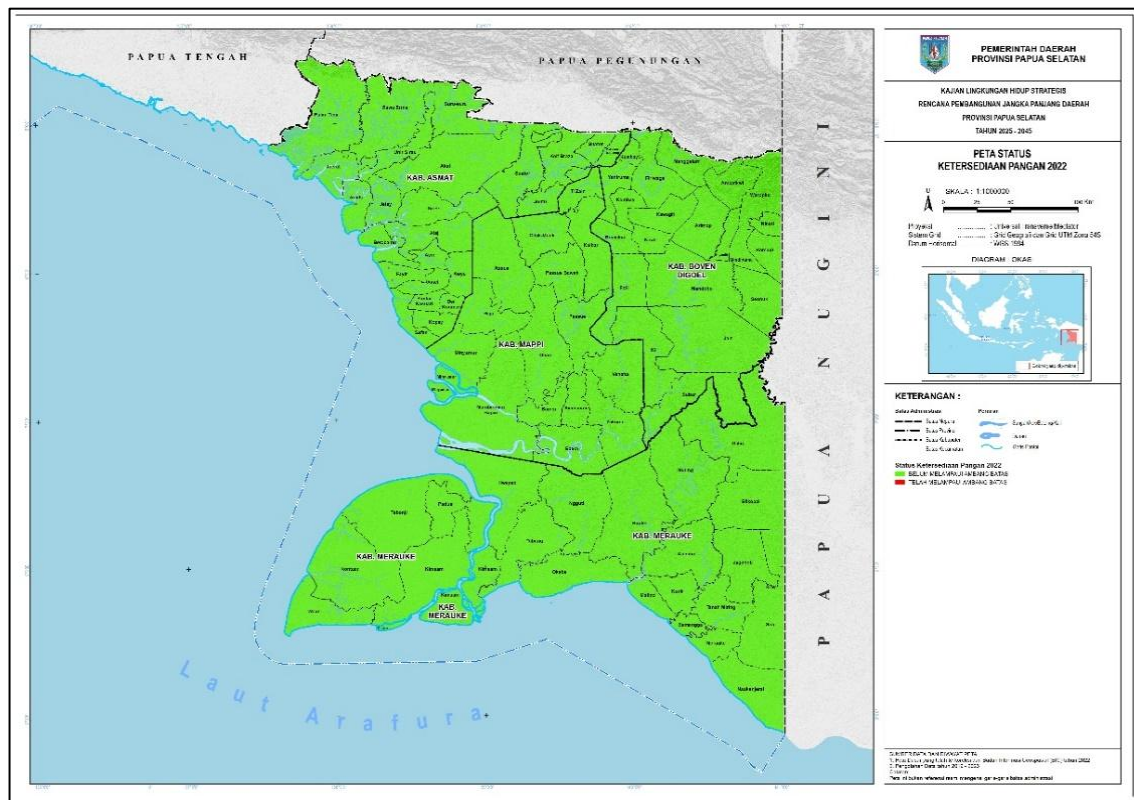
Gambar II.14 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2022



Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2025

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Provinsi Papua Selatan didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai positif di setiap Kabupaten. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan Provinsi Papua Selatan masih dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Provinsi Papua Selatan tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, jika terjadi selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Gambar II.15 Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2022



Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2025

Tabel II.14 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan Domestik (kkal)	Ketersediaan Pangan (kkal)	Selisih (kkal)
Kab. Asmat	114.088	89.530.558.001	59.507.717.380.451	59.418.186.822.450
Kab. Boven Digoel	66.392	52.101.122.000	49.687.341.508.981	49.635.240.386.981
Kab. Mappi	112.647	88.399.733.251	52.828.835.659.147	52.740.435.925.896
Kab. Merauke	234.546	184.059.974.946	101.773.511.828.619	101.589.451.853.673
Grand Total	527.673	414.091.388.199	263.797.406.377.198	263.383.314.989.000

Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2025

Status DDLH penyedia pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia Pangan “**Belum Melampaui**”

Tabel II.15 Status Ketersediaan Pangan Tahun 2022

Kabupaten	Belum Melampaui Ambang Batas (Ha)	Telah Melampaui Ambang Batas (Ha)	Total (Ha)
Kab. Asmat	2.503.486	498	2.503.984
Kab. Boven Digoel	2.354.279	-	2.354.279
Kab. Mappi	2.425.997	300	2.426.297
Kab. Merauke	4.501.325	-	4.501.325
Grand Total	11.785.087	798	11.785.885

Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2025

Terlihat total ketersediaan pangan Provinsi Papua Selatan sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun Kabupaten dengan Ketersediaan pangan tertinggi adalah Kabupaten Merauke sebesar 101.773.511.828.619 Kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan hanya sebesar 184.059.974.946 Kkal/tahun, diperoleh selisih sebesar 101.589.451.853.673 Kkal/tahun. Berdasarkan analisis status ketersediaan pangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa luas wilayah yang melampaui ambang batas sebesar 798 Ha (0,0067 %) sementara yang belum melampaui ambang batas sebesar 11.785.087 Ha. Hal ini menunjukkan ketersediaan pangan di Provinsi Papua Selatan masih sangat mencukupi.

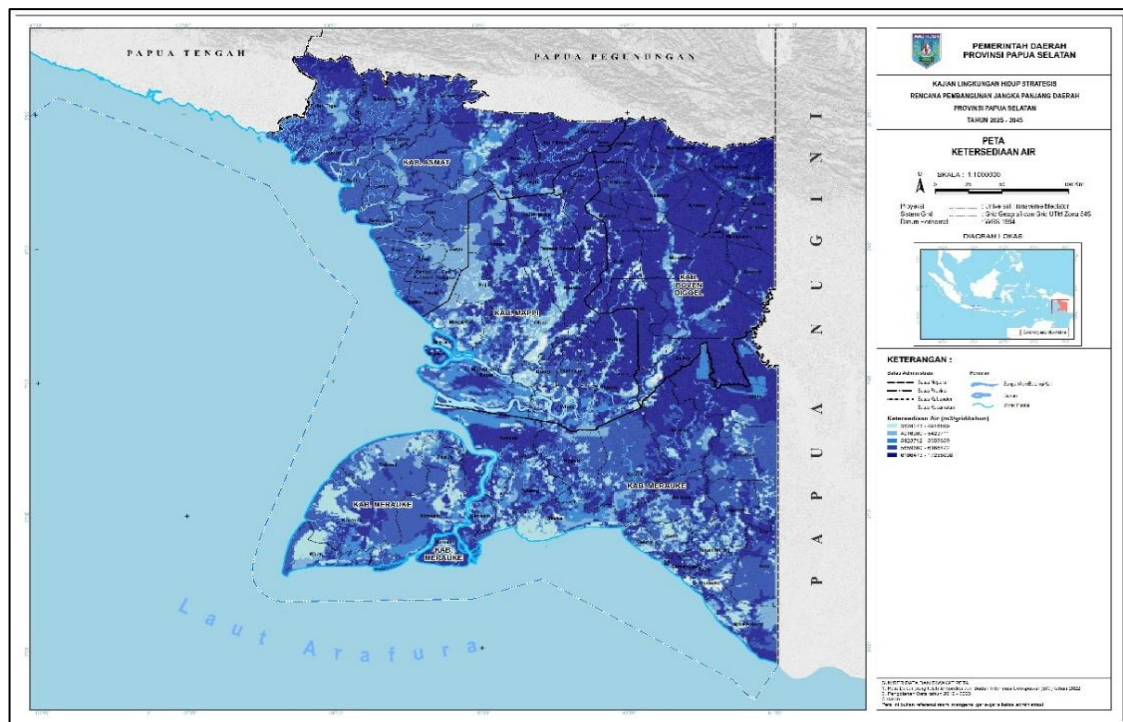
2. Daya Dukung Penyedia Air

Total ketersediaan air Provinsi Papua Selatan bersumber dari SK. No 146 MENLHK 1.2.2023. Kemudian, dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap Kabupaten Provinsi Papua Selatan dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian.

Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 800 m³ /tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai safety factor.

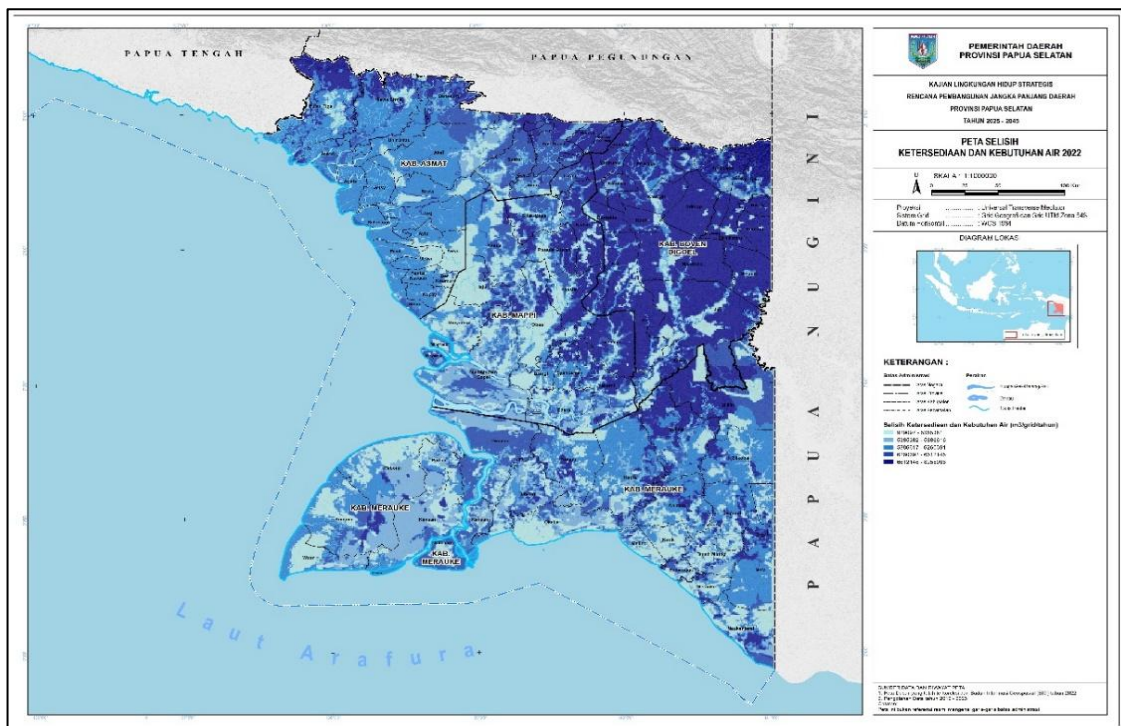
Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya,

Ambang batas penduduk yang telah dihitung selanjutnya dibandingkan dengan populasi penduduk di grid tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air “Melampaui”, dan jika sebaliknya maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”.



[illegible]

Gambar II.18 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2022



42

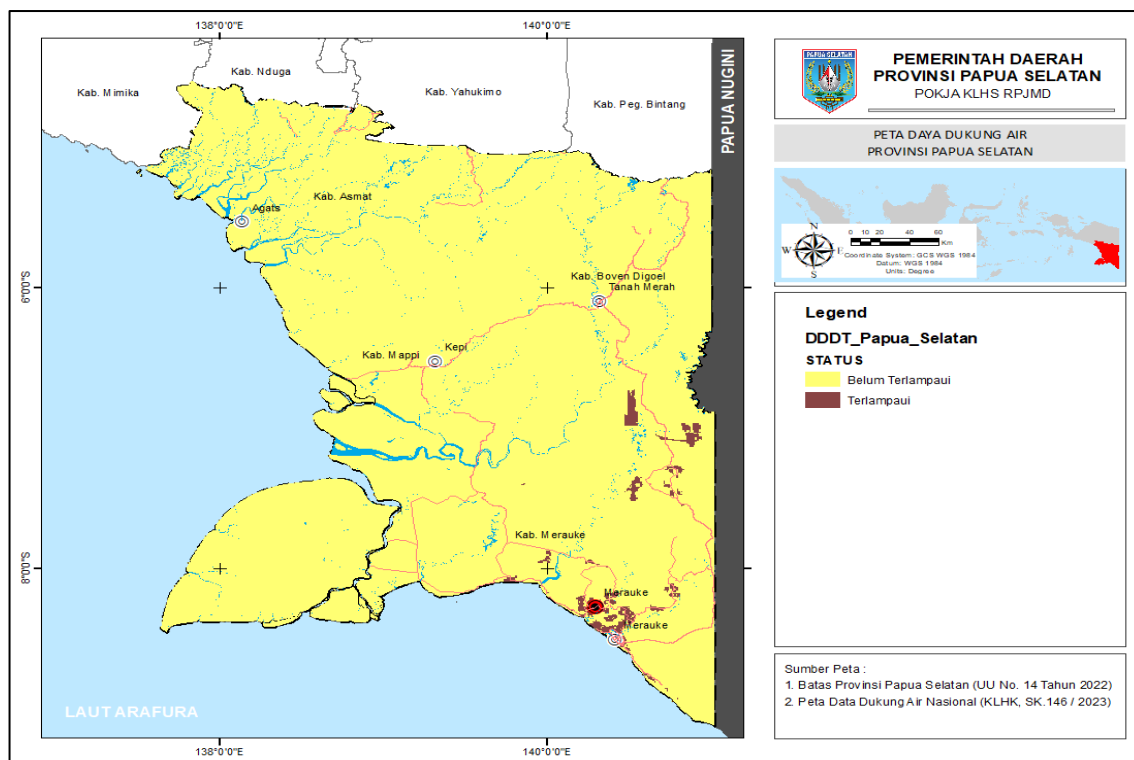
Tabel II.16 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m3)	Kebutuhan Air Lahan (m3)	Total Kebutuhan Air (m3)	Ketersediaan Air (m3)	Selisih (m3)
Kab. Asmat	114.088	91.270.400	17.335.784	108.606.184	159.545.008.357	159.436.402.173
Kab. Boven Digoel	66.392	53.113.600	683.622.529	736.736.129	162.931.292.080	162.194.555.951
Kab. Mappi	112.647	90.117.600	421.622.773	511.740.373	148.802.462.585	148.290.722.212
Kab. Merauke	234.546	187.636.801	2.185.885.417	2.373.522.218	274.083.025.006	271.709.502.788
Total	527.673	422.138.401	3.308.466.503	3.730.604.904	745.361.788.028	741.631.183.123

Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat total ketersediaan air Provinsi Papua Selatan masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun Kabupaten dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kabupaten Merauke sebesar 274.083.025.006 m3/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 2.373.522.218 m3/tahun, sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 271.709.502.788 m3/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung air di Provinsi Papua Selatan masih sangat mencukupi atau **“Belum Terlampaui”**.

Gambar II.19 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Papua Selatan



Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2025

Untuk memperjelas informasi status daya dukung air maka dilakukan perbandingan luas area yang telah melampaui ambang batas dan luas area yang belum melampaui ambang batas. Berdasarkan hasil analisis dibawah terlihat bahwa tidak terdapat wilayah dimana daya dukung air melampaui ambang batas. Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut daya dukung lingkungan, khususnya berkaitan dengan potensi air yang dapat disediakan oleh alam untuk mendukung kegiatan penduduk dan pembangunan di Provinsi Papua Selatan masih sangat mencukupi.

Tabel II.17 Status Ketersediaan Air Tahun 2022

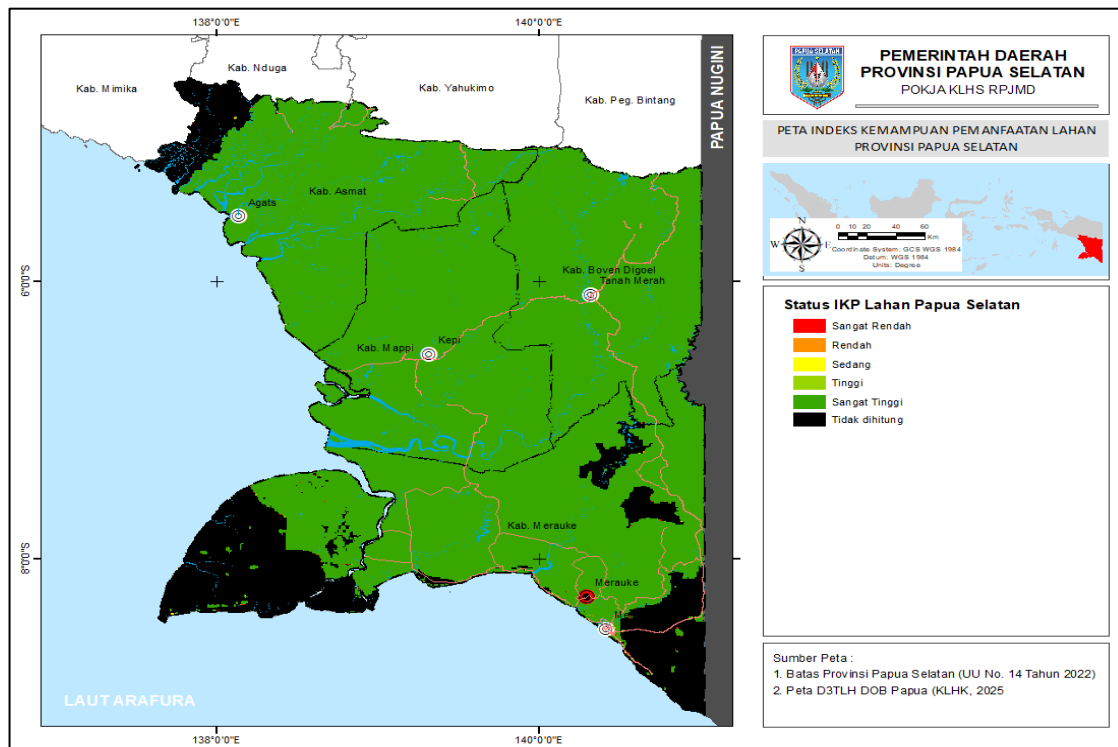
Kabupaten	Status Daya Dukung Air (Ha)		Total (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas (Ha)	Telah Melampaui Ambang Batas (Ha)	
Kab. Asmat	2.503.984	-	2.503.984
Kab. Boven Digoel	2.354.279	-	2.354.279
Kab. Mappi	2.426.297	-	2.426.297
Kab. Merauke	4.501.325	-	4.501.325
Grand Total	11.785.885	-	11.785.885

Sumber: Hasil Olahan POKJA KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2025

3. Indeks Kemampuan Pemanfaatan Lahan

Daya dukung dan daya tampung lahan ditentukan dari nilai jasa lingkungan hidup penyedia pangan. Parameter utama lahan adalah luas lahan yang dihasilkan dari jasa lingkungan hidup penyedia pangan dalam kelas sedang, tinggi dan sangat tinggi, yang dikurangi penutupan lahan pertambangan, bandara, dan kawasan hutan konservasi. Oleh karena itu, definisi operasional Daya dukung dan daya tampung lahan (D3T) dibatasi hanya pada definisi daya dukung, dan dapat dirumuskan sebagai: “Kemampuan pemanfaatan lahan adalah kemampuan lahan untuk dimanfaatkan dan mendukung kebutuhan dasar hidup manusia berupa pangan dan tempat tinggal secara alami” (KLHK 2025)

Gambar II.20 Peta Indeks Kemampuan Pemanfaatan Lahan Provinsi Papua Selatan



Sumber: D3TLH DOB Papua – KLHK Tahun 2025

Luas ketersediaan lahan yang ditampilkan dalam peta berikut ini adalah luas lahan secara total dan luas lahan yang tersedia berdasarkan jasa lingkungan hidup penyedia pangan yang dikurangi dengan faktor pengoreksi (Populasi Eksisting dan Kawasan Konservasi). Berdasarkan hasil analisa indeks D3TLH yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024, menunjukkan bahwa Indeks Kemampuan Pemanfaatan (IKP) Pangan Provinsi Papua Selatan secara Keseluruhan masih berada dalam kelas sangat tinggi yang menggambarkan bahwa Ketersediaan lahan untuk penduduk yang dapat didukung masih melebihi kebutuhan dasarnya akan lahan tersebut. Tidak ada tekanan signifikan terhadap lahan, dan lahan dapat mendukung pertumbuhan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan masih memiliki kemampuan lahan dalam menyediakan pangan dan tempat tinggal sangat baik, sehingga wilayah ini memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan masyarakat dengan efisiensi tinggi dan kualitas yang baik.

Tabel II.18 Interpretasi Hasil Pengolahan Data Kemampuan Pemanfaatan Lahan

Kelas IKP Lahan	Interpretasi
Sangat Tinggi	Ketersediaan lahan untuk penduduk yang dapat didukung masih melebihi kebutuhan dasarnya akan lahan tersebut. Tidak ada tekanan signifikan terhadap lahan, dan lahan dapat mendukung pertumbuhan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan masih memiliki kemampuan lahan dalam menyediakan pangan dan tempat tinggal sangat baik, sehingga wilayah ini memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan masyarakat dengan efisiensi tinggi dan kualitas yang baik.
Tinggi	Ketersediaan lahan untuk penduduk yang dapat didukung masih melebihi kebutuhan dasarnya akan lahan tersebut. Hal ini menunjukkan masih memiliki kemampuan lahan dalam menyediakan pangan dan tempat tinggal sangat baik, sehingga wilayah ini memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan masyarakat dengan efisiensi tinggi dan kualitas yang baik.
Sedang	Ketersediaan lahan cukup mendukung kebutuhan dasar penduduk akan lahan tersebut. Hal ini menunjukkan masih memiliki kemampuan lahannya berada pada tingkat yang moderat, sehingga pengelolaan yang tepat masih diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan keberlanjutan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Rendah	Ketersediaan lahan sudah kurang mampu mendukung kebutuhan dasar penduduk akan lahan tersebut. Hal ini menunjukkan masih memiliki kurang subur, upaya signifikan diperlukan dalam pengelolaan lahan, termasuk penerapan teknologi pertanian dan praktik konservasi.
Sangat Rendah	Lahan dalam kondisi sangat kritis, di mana kebutuhan lahan jauh melebihi ketersediaan lahan. Hal ini menunjukkan lahan tidak lagi mampu mendukung populasi dalam pemenuhan pangan secara mandiri dan pemenuhan tempat tinggal dengan konsep hunian tapak, tanpa mengakibatkan kerusakan lahan yang serius. Solusi seperti penataan wilayah atau pengurangan tekanan aktivitas terhadap lahan sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan permanen.

Sumber: D3TLH DOB Papua – KLHK Tahun 2025

4. Indeks Kemampuan Pemanfaatan Air

Kemampuan Pemanfaatan Air merujuk pada konsep keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air yang dapat memenuhi sejumlah populasi yang akan dihasilkan dalam bentuk indeks atau Indeks Kemampuan Pemanfaatan Air (IKP Air). Sebagaimana hal tersebut kemudian menjadi definisi operasional sebagai kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan air yang layak untuk memenuhi kebutuhan sejumlah populasi tanpa menimbulkan kelangkaan air. Oleh karena itu, dalam menilai keseimbangan keduanya, IKP Air mengadopsi teori dari **Water Criticality Ratio** untuk menentukan potensi tekanan air (*water stress*). Pendekatan ini dinilai berkorelasi dengan IKP Air dikarenakan menggambarkan rasio antara pemanfaatan (kebutuhan) dengan ketersediaan air sehingga akan mempengaruhi kondisi kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Dengan kata lain, juga dapat memberikan gambaran langsung tentang seberapa cukup sumber daya air dalam memenuhi kebutuhan air manusia tanpa menimbulkan risiko

Berdasarkan hasil analisa indeks D3TLH yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024, menunjukan bahwa Indeks Kemampuan Pemanfaatan (IKP) Air Provinsi Papua Selatan secara Keseluruhan masih berada dalam Kelas Sangat Tinggi yang artinya Cadangan ketersediaan air sangat berlebih dan jauh di bawah ambang batas keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan air secara total. Kebutuhan air kurang dari 10% dari ketersediaan air sehingga tidak ada tekanan air. Hal ini menunjukkan wilayah tersebut memiliki kemampuan penyedia air dan menyerap beban pencemar yang tinggi. Direkomendasikan pengoptimalisasian fungsi lingkungan yang lebih tinggi dengan tetap mempertahankan wilayah yang memiliki kemampuan konservasi air.

47

Tabel II.19 Interpretasi Hasil Pengolahan Data Kemampuan Pemanfaatan Air

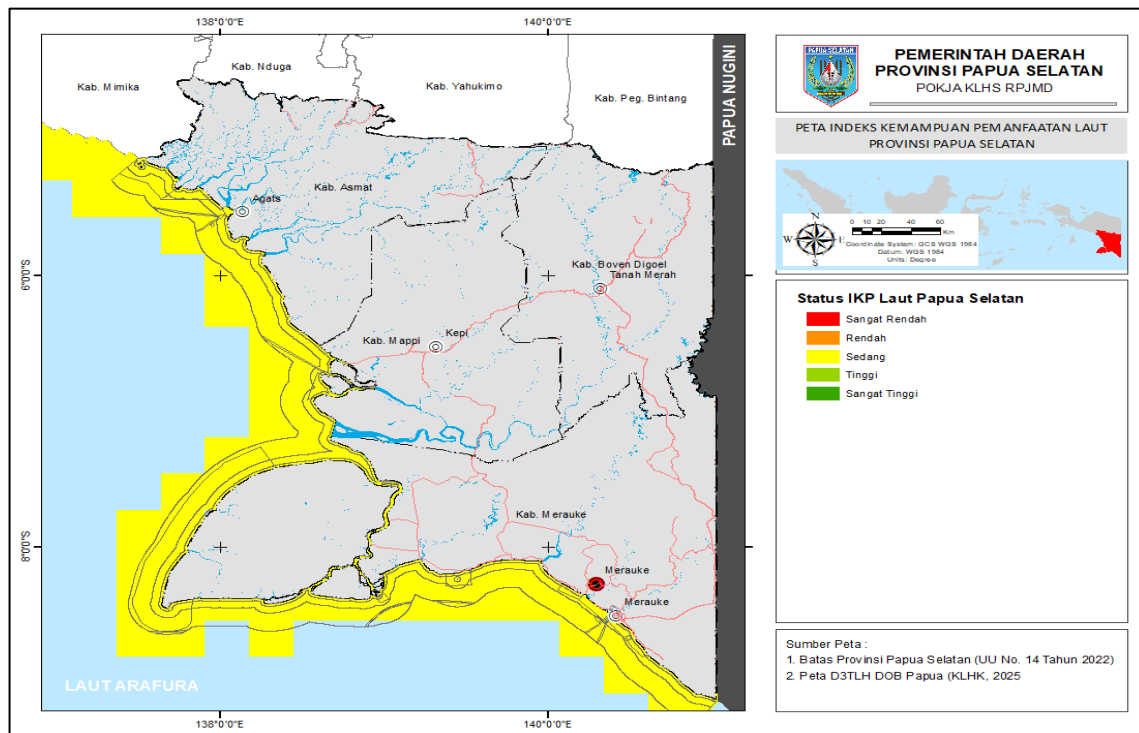
Kelas IKP Lahan	Interpretasi
Sangat Tinggi	Cadangan ketersediaan air sangat berlebih dan jauh di bawah ambang batas keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan air secara total. Kebutuhan air kurang dari 10% dari ketersediaan air sehingga tidak ada tekanan air. Hal ini menunjukkan wilayah tersebut memiliki kemampuan penyedia air dan menyerap beban pencemar yang tinggi. Direkomendasikan pengoptimalisasian fungsi lingkungan yang lebih tinggi dengan tetap mempertahankan wilayah yang memiliki kemampuan konservasi air.
Tinggi	Cadangan ketersediaan air besar sehingga masih cukup mampu memenuhi kebutuhan air secara total. Kebutuhan air sekitar 10-20% dari ketersediaan air sehingga tidak ada tekanan air. Hal ini menunjukkan wilayah tersebut memiliki kemampuan penyedia air dan menyerap beban pencemar yang cukup tinggi. Pengoptimalisasian fungsi lingkungan masih dapat dilakukan meskipun direkomendasikan untuk mulai dilakukan pemanfaatan air dengan asas kehati-hatian.
Sedang	Cadangan ketersediaan air mulai mendekati ambang batas keseimbangannya untuk memenuhi kebutuhan air secara total. Kebutuhan air sekitar 20-40% dari ketersediaan air sehingga berpotensi terjadi tekanan air. Hal ini menunjukkan wilayah tersebut memiliki kemampuan penyedia air dan menyerap beban pencemar yang moderat. Direkomendasikan pengendalian dan peningkatan efisiensi penggunaan air.
Rendah	Cadangan ketersediaan air berada di ambang batas keseimbangannya untuk memenuhi kebutuhan air secara total. Kebutuhan air sekitar 40-80% dari ketersediaan air dengan sebagian besar wilayahnya mulai terjadi tekanan air. Hal ini menunjukkan wilayah tersebut memiliki kemampuan penyedia air dan menyerap beban pencemar yang cukup rendah. Direkomendasikan implementasi langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan area konservasi air dan penguatan perizinan pembuangan limbah pada wilayah sungai.
Sangat Rendah	Cadangan ketersediaan air sudah melebihi keseimbangannya untuk memenuhi kebutuhan air secara total. Kebutuhan air lebih dari 80% dari ketersediaan sehingga sangat tertekan hingga mengalami kelangkaan air. Hal ini menunjukkan wilayah tersebut memiliki kemampuan penyedia air dan menyerap beban pencemar yang rendah. Direkomendasikan restorasi ekosistem, penguatan kebijakan dengan pelarangan penggunaan air secara berlebihan, serta mendorong dilakukan intervensi melalui infrastruktur alami berbasis ekosistem.

Sumber: D3TLH DOB Papua – KLHK Tahun 2025

5. Indeks Kemampuan Pemanfaatan Laut

Kemampuan Pemanfaatan Laut berdasarkan data D3TLH DOB Papua Tahun 2025 disederhanakan hanya melihat kemampuan daya dukung saja yang didasarkan pada kapasitas produksi perikanan untuk penyediaan pangan. Pengolahan data yang dilakukan didasarkan pada data statistik yang bersumber dari berbagai walidata. Pengolahan data berbasis *ecosystem services* (jasa lingkungan) disebut pula sebagai kuantifikasi jasa lingkungan. Lihat gambar Indeks Kemampuan Pemanfaatan Laut Provinsi Papua Selatan berdasarkan data D3TLH DOB Papua Tahun 2025.

Gambar II.22 Peta Indeks Kemampuan Pemanfaatan Air Provinsi Papua Selatan



Sumber: D3TLH DOB Papua – KLHK Tahun 2025

Dalam perhitungan Kemampuan Pemanfaatan Laut akan diperoleh tiga hasil, yaitu jasa lingkungan penyedia pangan laut, Indeks Kemampuan Pemanfaatan Laut (IKP Laut) dan ambang batas populasi. Berdasarkan hasil analisa indeks D3TLH yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024, menunjukkan bahwa Indeks Kemampuan Pemanfaatan (IKP) Laut Provinsi Papua Selatan secara Keseluruhan berada dalam kelas sedang dengan rentang nilai $1 < \text{IKP Laut} < 1,5$ yang artinya Kapasitas laut cukup memadai untuk mendukung kebutuhan manusia secara proporsional, tetapi masih terdapat risiko terhadap keberlanjutan ekosistem jika tekanan pemanfaatan meningkat. Wilayah dalam kelas ini menunjukkan keseimbangan yang rapuh antara supply dan demand, sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk mencegah penurunan kapasitas di masa mendatang

Tabel II.20 Klasifikasi Indeks Kemampuan Pemanfaatan Laut

Rentang Nilai	Kelas	Interpretasi Kemampuan Pemanfaatan Laut
IKP Laut ≥ 2	Sangat Tinggi	Kapasitas laut berada pada tingkat yang optimal, mencerminkan potensi ekosistem yang sehat dan tekanan pemanfaatan yang terkendali. Wilayah dalam kategori ini memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan manusia secara berkelanjutan tanpa mengancam kelestarian ekosistem. Wilayah ini memberikan peluang pengembangan ekonomi berbasis laut dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
$1,5 \leq \text{IKP Laut} \leq 2$	Tinggi	Laut memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan manusia tanpa mengancam keberlanjutan ekosistemnya. Potensi ekosistem laut, seperti produktivitas ikan dan keberlanjutan ekosistem pendukung seperti mangrove dan terumbu karang, berada dalam kondisi baik. Wilayah dalam kategori ini tetap memerlukan pengelolaan yang optimal untuk mempertahankan statusnya.
$1 < \text{IKP Laut} < 1,5$	Sedang	Kapasitas laut cukup memadai untuk mendukung kebutuhan manusia secara proporsional, tetapi masih terdapat risiko terhadap keberlanjutan ekosistem jika tekanan pemanfaatan meningkat. Wilayah dalam kelas ini menunjukkan keseimbangan yang rapuh antara supply dan demand, sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk mencegah penurunan kapasitas di masa mendatang.
$0,5 < \text{IKP Laut} \leq 1$	Rendah	Kapasitas Laut masih mampu memberikan jasa lingkungan, tetapi sangat terbatas dan mendekati ambang kritis. Kategori ini mencerminkan wilayah dengan tingkat pemanfaatan yang lebih besar dibandingkan kapasitas produksi hasil lautnya. Upaya mitigasi dan pengelolaan yang lebih bijak sangat diperlukan untuk menghindari degradasi lebih lanjut.
$0 \leq \text{IKP Laut} < 0,5$	Sangat Rendah	Kapasitas laut sangat terbatas untuk mendukung kebutuhan pangan manusia. Kategori ini menunjukkan kondisi di mana tingkat kebutuhan terhadap produk sumber daya laut telah melampaui batas kemampuan produktivitas hasil laut. Wilayah dalam kelas ini memerlukan tindakan konservasi yang segera untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.

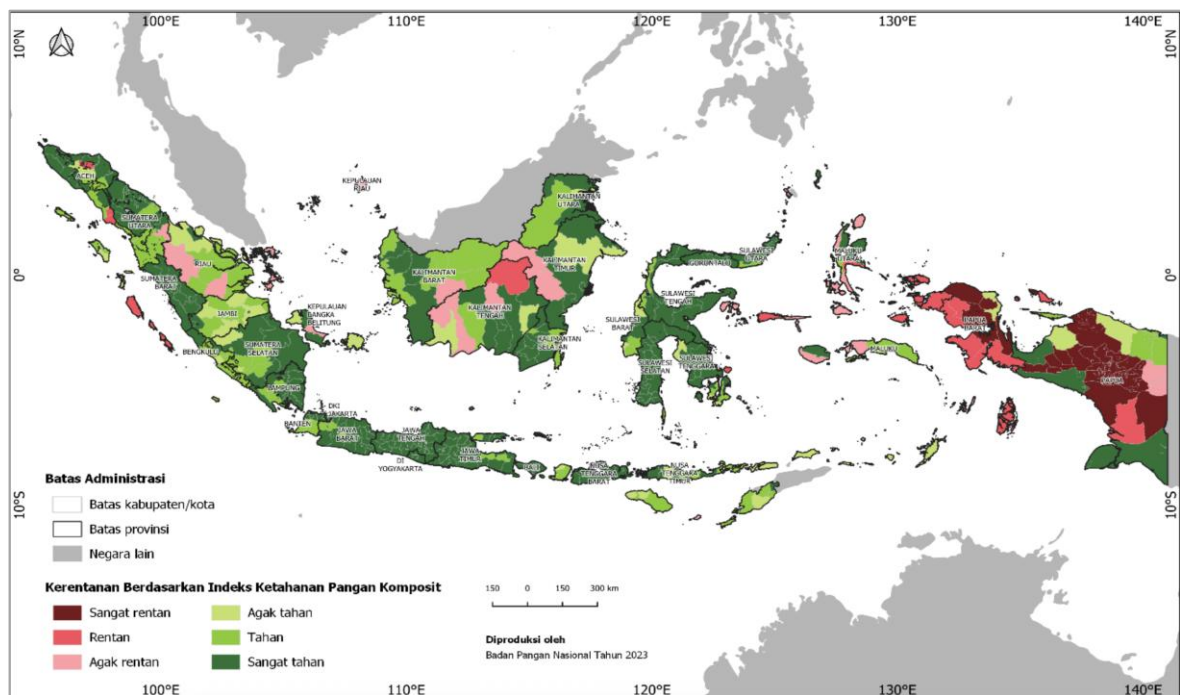
Sumber: D3TLH DOB Papua – KLHK Tahun 2025

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur ketahanan pangan daerah adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Gambar II.23 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

Tabel II.21 Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
Prioritas 1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$	$\leq 37,61$
Prioritas 2	41,52 – 51,42	28,84 – 41,44	37,61 – 48,27
Prioritas 3	51,42 – 59,58	41,44 – 51,29	48,27 – 57,11
Prioritas 4	59,58 – 67,75	51,29 – 61,13	57,11 – 65,96
Prioritas 5	67,75 – 75,68	61,13 – 70,64	65,96 – 74,40
Prioritas 6	$> 75,68$	$> 70,64$	$> 74,40$

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2021

Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) selama tujuh tahun terakhir, dengan peningkatan nilai provinsi dari 46,37 pada 2018 menjadi 52,17 di 2024. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan IKP 52,04 sebelum mengalami stagnasi di tahun berikutnya. Kabupaten Merauke konsisten menjadi wilayah dengan ketahanan pangan terbaik, meningkat dari 78,53 (2018) menjadi 84,07 (2024). Sementara tiga kabupaten lain menunjukkan fluktuasi: Asmat mengalami penurunan drastis di 2019-2020 (22,85 dan 19,9) sebelum pulih ke 45,99 di 2024; Boven Digoel turun dari 50,69 (2018) ke titik terendah 38,58 (2020) lalu naik perlahan; dan Mappi yang fluktuatif dengan puncak 47,85 di 2023. Tren positif secara keseluruhan menunjukkan perbaikan sistem pangan meskipun disparitas antar wilayah masih signifikan.

Tabel II Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2024

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asmat	27,91	22,85	19,9	21,16	38,98	36,69	45,99
Boven Digoel	50,69	44,13	38,58	41,18	38,87	40,55	43,19
Mappi	28,34	28,03	28,59	31,51	33,82	47,85	35,44
Merauke	78,53	78,25	77,6	77,75	80,1	83,08	84,07
*Papua Selatan	46,37	43,32	41,17	42,90	47,94	52,04	52,17

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2021

*) Nilai Rata-Rata capaian Setiap Kabupaten

Secara keseluruhan, Papua Selatan menghadapi tantangan utama dalam aspek ketersediaan pangan (rata-rata 30,72) dan pemanfaatan pangan (47,83), meskipun indeks keterjangkauan relatif lebih baik (62,27). Kesenjangan antar wilayah sangat mencolok, dimana Merauke memiliki kinerja sepuluh kali lipat lebih baik dalam ketersediaan pangan dibanding Boven Digoel yang nol. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi khusus untuk meningkatkan distribusi dan akses pangan di kabupaten-kabupaten tertinggal, sekaligus optimalisasi pemanfaatan pangan di seluruh wilayah.

Tabel II.22 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Menurut Kategori di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2023

Wilayah	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Merauke	Kategori	Prioritas 6	Prioritas 6	Prioritas 6	Prioritas 6	Prioritas 6	Prioritas 6
	Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	94,40	97,39	96,43	98,79	97,58
	Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	84,00	82,54	83,82	84,98	83,66
	Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	61,82	59,06	59,18	62,44	71,77
2 Boven Digoel	Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
	Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	66,71	67,98	69,66	66,96	67,10
	Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	47,22	45,46	50,71	46,96	51,04
3 Mappi	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
	Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55
	Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	42,47	43,61	52,05	56,03	58,62
	Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	38,23	38,77	39,74	42,52	44,50
4 Asmat	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
	Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	0,00	0,00	0,00	51,38	50,62
	Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	54,38	46,80	48,18	44,00	39,68
	Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	16,33	14,66	16,77	25,92	24,01
Rata-rata 4 Kabupaten	Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 3
	Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	27,96	24,35	24,11	37,54	30,72
	Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	61,89	60,23	63,43	62,99	62,27
	Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	40,90	39,49	41,60	44,46	47,83

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Dalam Dokumen “Indeks Ketahanan Pangan 2018-2023”

2) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang beragam dalam penanganan ketidacukupan pangan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, prevalensi ketidacukupan pangan di tingkat provinsi mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi sebesar 41,56% pada tahun 2021 dan terendah 29,26% di tahun 2024, menunjukkan adanya perbaikan dalam tiga tahun terakhir.

Kabupaten Merauke mencatat perkembangan paling signifikan dengan penurunan hampir 6 poin persentase dari 20,21% (2020) menjadi 14,29% (2024), sekaligus menjadi wilayah dengan prevalensi terendah. Sebaliknya, Boven Digoel justru menunjukkan kenaikan dari 34,44% (2020) menjadi 39,74% (2024), menandakan perlunya intervensi khusus di wilayah ini.

Mappi dan Asmat menampilkan pola fluktuasi yang mirip, dimana keduanya mencapai puncak di tahun 2021 (Mappi 56,26%, Asmat 39,37%) sebelum mengalami penurunan, meskipun angka tahun 2024 masih lebih tinggi dibanding 2020 untuk Mappi. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan di beberapa wilayah, tantangan ketahanan pangan masih perlu menjadi perhatian utama, khususnya dalam menangani disparitas antar kabupaten dan mempertahankan tren penurunan yang telah dicapai.

Tabel II.23 Prevalensi Ketidacukupan Pangan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	20,21	27,39	24,37	23,02	14,29
Boven Digoel	34,44	43,21	38,47	39,13	39,74
Mappi	45,62	56,26	39,54	48,88	46,32
Asmat	39,36	39,37	33,40	42,88	37,04
*Papua Selatan	34,91	41,56	33,95	38,48	29,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

*) Data Tahun 2020-2023 Menggunakan Nilai Rata-Rata capaian Setiap Kabupaten.

3) Konsumsi Listrik Perkapita

Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan signifikan dalam perluasan akses listrik rumah tangga selama tiga tahun terakhir. Pada tingkat provinsi, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN meningkat dari 48,17% (2022) menjadi 67,05% (2024), didukung oleh penurunan penggunaan sumber non-PLN (dari 28,43% menjadi 13,56%) dan energi non-listrik (dari 23,40% menjadi 19,39%).

Tabel II.24 Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Penerangan Utama 2022-2024

Kabupaten	2022			2023			2024		
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik
Merauke	90,54	1,68	7,78	92,85	0,93	6,21	91,41	4,29	4,3
Boven Digoel	45,70	39,01	15,30	48,69	39,96	11,35	60,77	30,45	8,78
Mappi	32,99	55,03	11,97	36,42	42,76	20,82	42,34	20,03	37,63
Asmat	23,44	17,99	58,56	35,85	12,85	51,3	36,26	16,87	46,87
*Papua Selatan	48,17	28,43	23,40	64,70	16,56	18,74	67,05	13,56	19,39

Sumber: Provinsi Papua Selatan Dalam Angka

*) Data Tahun 2022 Menggunakan Nilai Rata-Rata capaian Setiap Kabupaten.

Kabupaten Merauke memimpin dengan tingkat elektrifikasi tertinggi, mencapai 91,41% rumah tangga menggunakan listrik PLN pada 2024. Boven Digoel menunjukkan kemajuan pesat dengan peningkatan 15 poin persentase dalam penggunaan listrik PLN selama periode yang sama (dari 45,70% menjadi 60,77%). Namun, tantangan masih terlihat di Mappi dan Asmat dimana pada 2024 masih terdapat 37,63% dan 46,87% rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama.

Provinsi Papua Selatan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam penggunaan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak di tingkat rumah tangga. Pada tingkat provinsi, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik untuk memasak menurun drastis dari 1,19% di tahun 2022 menjadi hanya 0,35% di tahun 2024, dengan titik terendah mencapai 0,12% pada tahun 2023. Kabupaten Boven Digoel mengalami perubahan paling dramatis, dari 4,18% di tahun 2022 menjadi 0% di tahun 2023 dan 2024. Pola serupa terlihat di Mappi yang turun dari 0,21% menjadi 0%, serta Merauke yang mencapai 0% di tahun 2024 setelah sebelumnya sebesar 0,38%. Asmat menunjukkan fluktuasi kecil namun tetap pada tingkat yang sangat rendah (0-0,05%).

Tabel II ... Persentase Distribusi Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Penggunaan Listrik Sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

Kabupaten	2022	2023	2024
Merauke	0,38	0,24	0,00
Boven Digoel	4,18	0,00	0,00
Mappi	0,21	0,00	0,00
Asmat	0,00	0,05	0,00
*Papua Selatan	1,19	0,12	0,35

Sumber: Provinsi Papua Selatan Dalam Angka

*) Data Tahun 2022 Menggunakan Nilai Rata-Rata capaian Setiap Kabupaten.

4) Akses Rumah Tangga Terhadap Akses Air Minum

Provinsi Papua Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga selama periode lima tahun terakhir. Secara agregat, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 45,32% pada tahun 2020 menjadi 71,90% di tahun 2024, dengan pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 71,74%.

Tabel II.25 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	29,67	71,35	77,32	80,97	72,52
Boven Digoel	36,22	64,5	61,98	61,37	67,26
Mappi	23,58	48,66	49,69	43,10	38,55
Asmat	91,81	98,67	97,97	98,90	98,53
*Papua Selatan	45,32	70,8	71,74	71,09	71,90

Sumber: Provinsi Papua Selatan Dalam Angka

*) Data Tahun 2020-2023 Menggunakan Nilai Rata-Rata capaian Setiap Kabupaten.

Kabupaten Asmat secara konsisten memimpin dengan cakupan hampir universal, mencapai 98,53% di tahun 2024. Merauke dan Boven Digoel menunjukkan tren positif, dimana Merauke meningkat dari 29,67% menjadi 72,52% dan Boven Digoel dari 36,22% menjadi 67,26%. Namun, Mappi menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami penurunan, dari 48,66% di tahun 2021 menjadi 38,55% di tahun 2024.

Provinsi Papua Selatan menunjukkan variasi yang signifikan dalam pola penggunaan sumber air minum rumah tangga antarkabupaten. Secara keseluruhan, air kemasan bermerk/isi ulang menjadi sumber utama dengan persentase tertinggi (46,46%), diikuti oleh mata air terlindung (28,28%). Namun, terdapat disparitas mencolok antarwilayah.

Kabupaten Merauke sangat bergantung pada air kemasan (72,12%) dengan penggunaan minimal sumber air tradisional. Sebaliknya, Asmat menunjukkan ketergantungan ekstrem pada mata air terlindung (85,88%) dengan penggunaan air kemasan hanya 11,83%. Boven Digoel dan Mappi memiliki karakteristik berbeda. Boven Digoel dengan distribusi yang lebih merata antar sumber, sementara Mappi menunjukkan ketergantungan tinggi pada sumur tak terlindung (37,03%) dan mata air (40,99% gabungan terlindung dan tak terlindung).

Tabel II.26 Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama, 2024

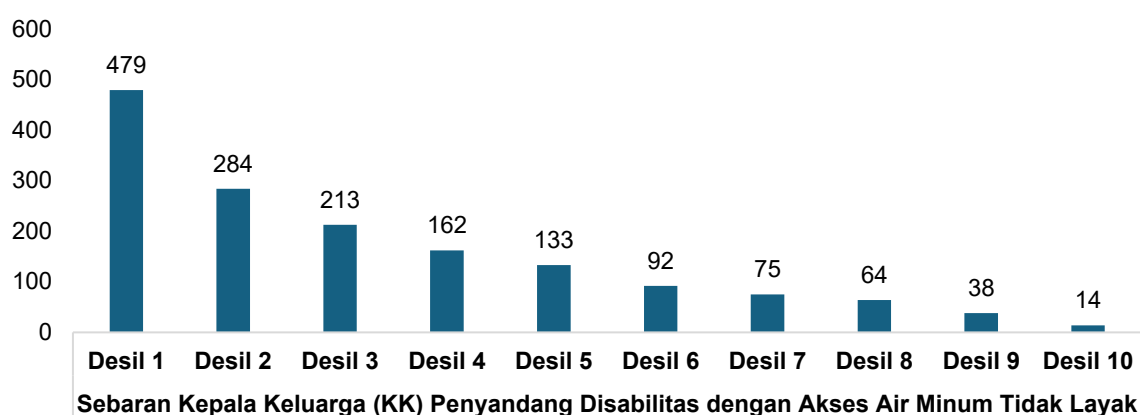
Kategori	Kabupaten				Papua Selatan
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	
Air Kemasan Bermerk/ Isi Ulang	72,12	51,36	13,44	11,83	46,46
Leding	1,11	-	-	-	0,52
Sumur Bor/ Pompa	2,05	5,33	-	0,85	1,93

Kategori	Kabupaten				Papua Selatan
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	
Sumur Terlindung	6,97	7,27	8,53	-	5,95
Sumur Tak Terlindung	1,82	15,36	37,03	-	10,01
Mata Air Terlindung	13,36	8,78	21,72	85,88	28,28
Mata Air Tak Terlindung	2,57	11,91	19,27	1,44	6,84

Sumber: Provinsi Papua Selatan Dalam Angka

Adapun berdasarkan data regsosek sepakat di Papua Selatan menunjukkan terdapat 1.554 KK Disabilitas yang tidak dapat mengakses air minum layak sepanjang tahun 2022.

Gambar II.24 Sebaran Kepala Keluarga (KK) Penyandang Disabilitas dengan Akses Air Minum Tidak Layak Tahun 2022



Sumber : Regsosek Sepakat (2022)

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

1) Kondisi Lingkungan Hidup

Provinsi Papua Selatan mencatat prestasi yang menggembirakan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 dengan skor 85,08, mencerminkan kondisi lingkungan yang relatif baik. Pencapaian ini terutama didorong oleh kualitas udara yang sangat baik (95,44) dan tutupan lahan yang terjaga (93,20), menunjukkan keberhasilan dalam menjaga kelestarian alam. Kualitas air laut juga menunjukkan performa yang memadai dengan skor 73,67. Namun, terdapat satu area yang memerlukan perhatian khusus yaitu kualitas air dengan skor 60,73 yang menjadi indikator terendah. Angka ini mengisyaratkan perlunya peningkatan pengelolaan sumber daya air tawar di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan keseimbangan ekologis yang baik, meskipun masih diperlukan upaya lebih intensif untuk

meningkatkan kualitas air demi menyempurnakan perlindungan lingkungan hidup di Papua Selatan.

**Tabel II.27 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Papua Selatan Tahun 2023**

Indikator	2023
Indeks Kualitas Air	60,73
Indeks Kualitas Udara	95,44
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	93,20
Indeks Kualitas Air Laut	73,67
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	85,08

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024

Perhitungan IKLH pada tahun 2023 menggunakan metode baru sehingga terdapat perbedaan pada IKH, IKU, IKA, dan IKL seperti terlihat pada Tabel II.28. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, Provinsi Papua Selatan memiliki capaian IKLH yang lebih unggul. Capaian IKLH beserta komponennya kecuali IKAL di Provinsi Papua Selatan memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sehingga perlu dipertahankan.

Tabel II.28 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komposisinya Berdasarkan Metode Perhitungan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Kabupaten	Gambut/No n Gambut	Capaian 2023 (Rumus Lama)					Capaian 2023 (Rumus Baru)				
		IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL
Asmat	Gambut	84,64	98,36	60,91	100	73,67	82,37	85,26	69	100	73,67
Boven Digoel	Gambut	85,61	95,41	66,67	100		83,95	84,52	73,99	100	
Mappi	Gambut	84,32	94,09	70	90,83		81,67	84,13	73	92,04	
Merauke	Gambut	76,43	93,89	55,56	79,99		78,9	83,69	70,08	85,2	
Papua Selatan	Gambut	81,18	95,44	60,73	93,16		80,29	84,4	71,37	94,81	
Nasional		72,53	88,67	54,59	61,79	78,84	76,09	78,14	72,01	77,87	78,84

Catatan:

- 1) IKU: penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi iku memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan)
- 2) IKA: perubahan metode perhitungan menjadi metode ika ina (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai)
- 3) IKL: 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan ikl (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (fkeg) bagi kab/kota dengan ekosistem gambut

Sumber: Bappeda 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

2) Sanitasi Layak

Provinsi Papua Selatan menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam penyediaan akses sanitasi layak selama lima tahun terakhir. Secara agregat, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 47,47% pada 2020 menjadi 60,85% di 2024, menandakan peningkatan signifikan sebesar 13,38 poin persentase. Kabupaten Merauke memimpin dengan capaian tertinggi (82,05% di 2024), diikuti oleh Boven Digoel yang menunjukkan pertumbuhan stabil dari 66,37% menjadi 73,45%. Namun, dua kabupaten lain masih tertinggal - Mappi hanya mencapai 39,08% meskipun ada peningkatan dari 26,19%, sementara Asmat stagnan di kisaran 20% sejak 2023.

Tabel II.29 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	74,02	78,24	72,86	82,00	82,05
Boven Digoel	66,37	56,78	62,93	70,10	73,45
Mappi	26,19	38,11	33,47	37,30	39,08
Asmat	23,28	30,36	29,48	20,50	20,32
*Papua Selatan	47,47	50,87	56,84	59,55	60,85

Sumber: Provinsi Papua Selatan Dalam Angka

*) Data Tahun 2020-2021 Menggunakan Nilai Rata-Rata capaian Setiap Kabupaten.

Prioritas peningkatan pelayanan sanitasi layak didukung oleh data yang ditunjukkan pada Tabel II.30. Provinsi Papua Selatan menunjukkan kondisi yang beragam dalam penggunaan fasilitas sanitasi dasar. Secara keseluruhan, 73,36% rumah tangga di provinsi ini telah memiliki jamban sendiri, sementara 6,49% menggunakan fasilitas bersama. Namun, masih terdapat 17,40% rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi sama sekali. Kabupaten Merauke memimpin dengan 88,02% rumah tangga memiliki jamban pribadi dan hanya 6,07% yang tidak memiliki fasilitas. Boven Digoel mengikuti dengan 74,25% kepemilikan jamban sendiri, meskipun 20,07% rumah tangganya masih belum memiliki akses sanitasi. Kondisi lebih memprihatinkan terlihat di Mappi dan Asmat, di mana sekitar sepertiga rumah tangga (33,54% dan 27,45%) sama sekali tidak memiliki fasilitas buang air besar. Penggunaan MCK umum relatif rendah di seluruh kabupaten (berkisar 1,45%-3,48%), menunjukkan ketergantungan utama pada fasilitas pribadi atau bersama.

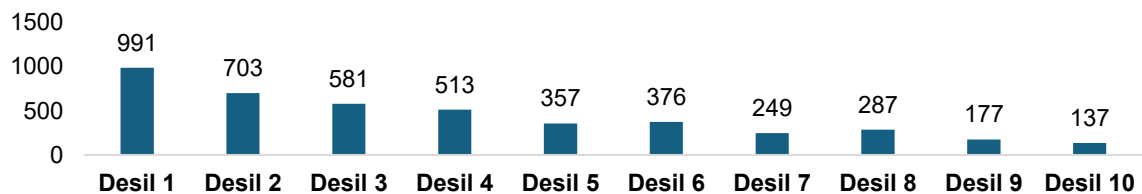
Tabel II.30 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 2024

Kabupaten	Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada
Merauke	88,02	3,38	2,47	0,05	6,07
Boven Digoel	74,25	3,92	1,45	0,31	20,07
Mappi	56,1	6,76	3,48	0,12	33,54
Asmat	53,51	15,76	2,89	0,39	27,45
Papua Selatan	73,36	6,49	2,59	0,17	17,40

Sumber: Provinsi Papua Selatan Dalam Angka

Adapun berdasarkan data regsosek sepakat di Papua Selatan menunjukkan terdapat 4.371 KK Disabilitas yang tidak dapat mengakses saniasi layak sepanjang tahun 2022.

Gambar II.25 Sebaran Kepala Keluarga (KK) Penyandang Disabilitas dengan Sanitasi Tidak Layak Tahun 2024



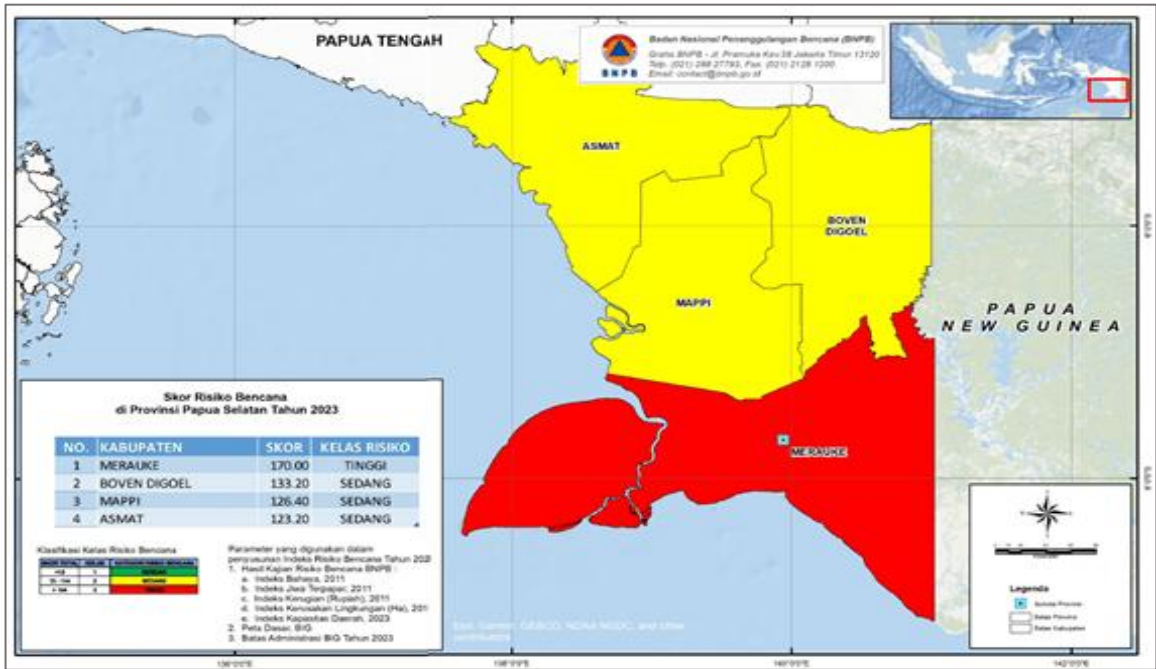
Sumber : Regsosek Sepakat, 2022

2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1) Indeks Risiko Bencana

Provinsi Papua Selatan secara garis besar memiliki indeks risiko bencana pada rentang risiko sedang hingga tinggi, dengan Indeks Risiko Bencana sebesar 138,20 pada tahun 2023 (kategori sedang). Pada tahun 2023, kabupaten yang memiliki indeks risiko bencana adalah Kabupaten Merauke (170,00: kategori tinggi), Boven Digoel (133,20: kategori sedang), Mappi (126,40: kategori sedang), dan Asmat (123,20: kategori sedang).

Gambar II.26 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Papua Selatan Tahun 2024



Sumber: BNPB, 2024

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2024, bencana yang terjadi di Provinsi Papua Selatan adalah bencana banjir, dan gelombang pasang dan abrasi. Pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 pada Provinsi Papua Selatan memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 138,20.

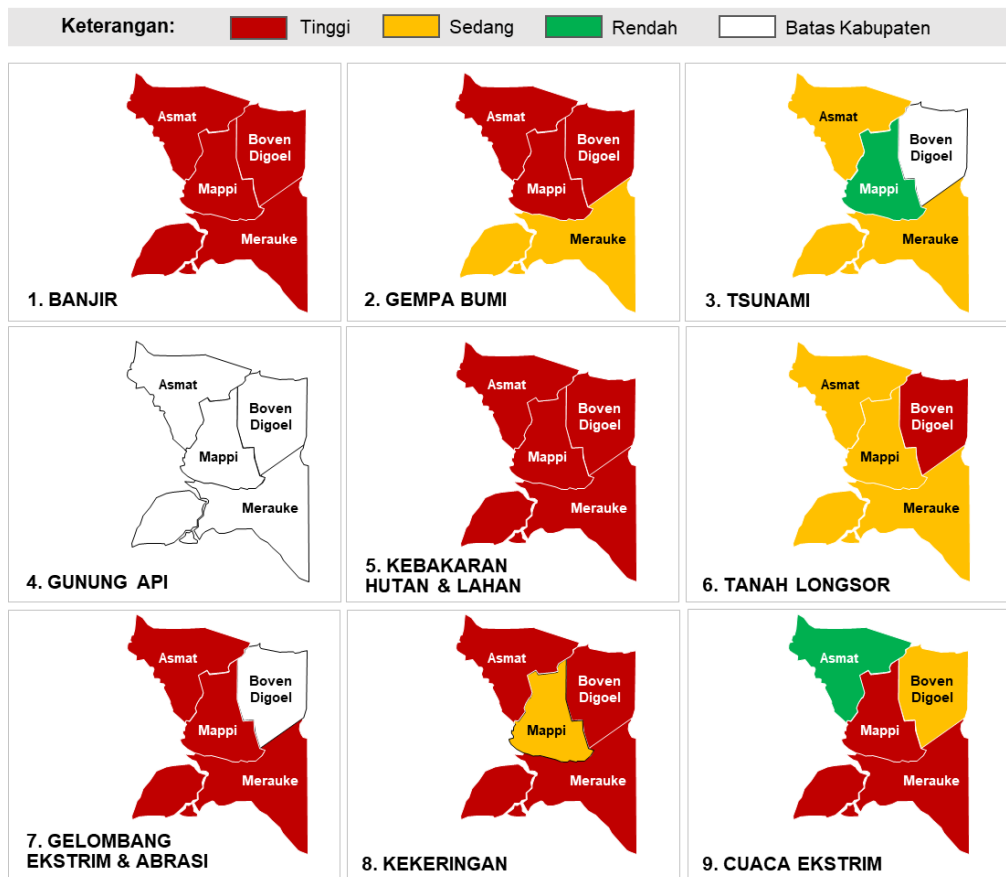
Tabel II.31 Indeks Risiko Bencana Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

No	Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko
1	Merauke	170.00	170.00	170.00	170,00	170,00	Tinggi
2	Boven Digoel	133.20	133.20	133.20	133,20	133,20	Sedang
3	Mappi	126.40	126.40	126.40	126,40	126,40	Sedang
4	Asmat	123.20	123.20	123.20	123,20	123,20	Sedang
Papua Selatan		138,20	138,20	138,20	138,20	138,20	Sedang

Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)" Tahun 2020-2024

Kabupaten di Provinsi Papua Selatan secara umum memiliki risiko yang tinggi untuk jenis bencana banjir dan kebakaran hutan, sedangkan risiko sedang untuk bencana tanah longsor. Kabupaten dengan wilayah pesisir yaitu Merauke, Mappi, dan Asmat memiliki risiko tinggi terhadap gelombang ekstrem dan abrasi, Sementara Kabupaten yang berdekatan dengan daerah pegunungan di sebelah utara memiliki risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi, sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.27 Peta Indeks Tiap Risiko Bencana Kabupaten dan Kota Tahun 2024

Gambar II.27 Peta Indeks Tiap Risiko Bencana Kabupaten dan Kota Tahun 2024



Sumber: BNPB, 2024

Dalam konteks bencana, akibat kondisi sosial, isu kemiskinan, akses terhadap informasi, ruang untuk partisipasi maupun akibat diskriminasi berbasis gender, kelompok Perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, lansia acapkali memiliki kerentanan yang berlipat, maka dari itu Pemerintah Daerah perlu memiliki strategi kebijakan, perencanaan, penganggaran yang responsive gender dalam penanggulangan kebencanaan.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, menegaskan bahwa daerah perlu melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang responsive gender untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan laki-laki dan Perempuan secara adil dan manusiawi. Perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana responsive gender perlu tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah

dan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah yang akan jadi acuannya.

Penyusunan Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam Penanggulangan Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pemulihan Paska Bencana yang Responsive Gender perlu dilakukan dengan menggunakan Analisa Gender yang dilengkapi dengan data pilah serta mempertimbangkan kebutuhan laki-laki, Perempuan, anak-anak, dewasa rentan, disabilitas, serta sosial inklusi. Kegiatan Penanggulangan Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Pemulihan Paska Bencana perlu melibatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang baik dalam menyusun rencana, melakukan kaji cepat, menganalisis, melaksanakan baik dalam mengidentifikasi kebutuhan Perempuan dan laki-laki, anak-anak dan kelompok rentan lainnya, pendataan, hingga proses distribusi yang juga memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari risiko kekerasan berbasis gender maupun kesenjangan lainnya.

Pada akhirnya perencanaan responsif gender dalam penanggulangan bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan paska bencana juga dapat menghasilkan anggaran responsif gender yang diharapkan dapat:

- a. Mengatasi masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya.
- b. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- c. Memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan dan/atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan analisis gender.

2) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kabupaten Merauke adalah Kabupaten penghasil beras utama dan sebagai penghasil ternak untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Produksi Beras di tahun 2022 sebesar sebesar 349.588 ton dan ternak sebanyak 69.524 ekor yang didominasi 60 persennya adalah sapi potong. Secara nasional, total penghasil gas rumah kaca CH₄ dan N₂O adalah 10-12% di sektor pertanian dan 18-51% di sektor peternakan. kontribusi Kawasan Pengembangan Pertanian Kabupaten Merauke terhadap gas rumah kaca sebesar 59.0618 CO₂-e Gg/tahun. Sumber pencemaran terbesar adalah Kecamatan Semangga yaitu 24,52% dan Kabupaten

Tanah Miring 24,21%. Emisi gas CH₄ dari fermentasi enterik 28,24 Gg CH₄/tahun, emisi CH₄ dari pengelolaan pupuk kandang 2,081 Gg CH₄/tahun, emisi N₂O langsung dari pengelolaan pupuk kandang 28,74Kg N₂O/tahun. Sumber pencemaran terbesar adalah jenis hewan, daging sapi dan kambing yaitu sebesar 75,04% dan 10,575%. disusul kambing sebesar 10,57%. Peternakan sapi berkontribusi terhadap pemanasan global, baik dari fermentasi enterik maupun dari CH₄ dan NO₂ dari pengolahan kotoran hewan.

Tabel II.32 Emisi GRK dan Semua Jenis Ternak Tahun 2022

Distrik	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi	Unggas	Total Emisi	%
Emisi CH ₄ dari Fermentasi Enterik (Gg CH ₄ /th)								
Kurik	5.8421	0.1652	0.1232	0.2662	0.0057	0.1028	6.5052	23.04
Malind	3.6371	0.2252	0.0809	0.1161	0.0221	0.0175	4.0989	14.52
Semangga	6.0197	0.0601	0.1191	0.2966	0.0298	0.234	6.7593	23.94
Tanah Mirng	5.8963	0.0832	0.1588	0.268	0.0158	0.1433	6.5654	23.25
Jagebob	4.0052	0.0601	0.0469	0.0973	0.0158	0.0834	4.3087	15.26
Total	25.4004	0.5937	0.5288	1.0442	0.0891	0.5809	28.2375	100.00
Persen	89.95	2.10	1.87	3.70	0.32	2.06		
Emisi CH ₄ dari Pengelolaan Kotoran (Gg CH ₄ /th)								
Kurik	0.1243	0.006	0.015	0.0117	0.0397	0.1028	0.2995	14.392119
Malind	0.0774	0.0082	0.0098	0.0051	0.1549	0.0175	0.2729	13.113888
Semangga	0.1281	0.0022	0.0145	0.0131	0.2083	0.234	0.6002	28.841903
Tanah Mirng	0.1255	0.003	0.0193	0.0118	0.3143	0.1433	0.6172	29.658818
Jagebob	0.0852	0.0022	0.0057	0.0043	0.1104	0.0834	0.2912	13.993272
Total	0.5404	0.0216	0.0643	0.0459	0.8276	0.5809	2.081	100
Persen	25.9683	1.0380	3.0899	2.2057	39.7693	27.9145		
Emisi N ₂ O dari Pengelolaan Kotoran (CO ₂ Gg CH ₄ /th)								
Kurik	4.2276	0.1154	0.693	1.3132	0.0456	0.1542	6.549	22.784282
Malind	2.632	0.1573	0.4549	0.5729	0.1779	0.0262	4.0212	13.989946
Semangga	4.3561	0.0419	0.6697	1.4634	0.2392	0.3511	7.1214	24.775688
Tanah Mirng	4.2669	0.0581	0.8929	1.322	0.3609	0.215	7.1158	24.756206
Jagebob	2.8984	0.0419	0.2636	0.4802	0.1268	0.1252	3.9361	13.693879
Total	18.381	0.4146	2.9742	5.1518	0.9504	0.8717	28.7435	100
Persen	63.9484	1.4424	10.3474	17.9234	3.3065	3.0327		
Total emisi (CO ₂ -e Gg/tahun)								
Kurik	10.1939	0.2865	0.8313	1.5911	0.0909	0.3597	13.3534	22.609199
Malind	6.3465	0.3907	0.5457	0.6942	0.355	0.0611	8.3932	14.210877
Semangga	10.5039	0.1042	0.8032	1.7731	0.4773	0.8191	14.4808	24.518047
Tanah Mirng	10.2887	0.1443	1.071	1.6018	0.691	0.5017	14.2985	24.209387
Jagebob	6.9888	0.1042	0.3162	0.5818	0.2529	0.292	8.5359	14.452489
Total	44.3218	1.0299	3.5673	6.242	1.8671	2.0336	59.0618	100
Persen	75.0431	1.7438	6.0399	10.5686	3.1613	3.4432		

Sumber: Djaja, I dkk (2025)

2.1.1.7. Demografi

1) Kondisi Umum Demografi Papua Selatan

Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 542,08 ribu jiwa. Jumlah penduduk Papua Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Papua Selatan (imigrasi) yang biasanya didorong oleh perkembangan kegiatan perekonomian wilayah. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Papua Selatan sampai pada tahun 2024 adalah Kabupaten Merauke yaitu sebanyak 239,40 ribu jiwa (44,16% dari total penduduk di Papua Selatan), diikuti Kabupaten Asmat sebanyak 118,53 ribu jiwa (21,87%), dan Kabupaten Mappi sebanyak 115,10 ribu jiwa

(21,23%). Sementara itu, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Boven Digoel yaitu sebanyak 69,04 ribu jiwa (12,74%) (lihat Tabel II.33).

Tabel II.33 Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Papua Selatan 2020-2024

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)					Distribusi Penduduk (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Merauke	230,17	232,54	234,90	237,20	239,40	45,03	44,81	44,60	44,38	44,16
2	Boven Digoel	63,88	65,20	66,49	67,76	69,04	12,50	12,57	12,62	12,68	12,74
3	Mappi	107,72	109,56	111,41	113,26	115,10	21,07	21,11	21,15	21,19	21,23
4	Asmat	109,39	111,60	113,88	116,20	118,53	21,40	21,51	21,62	21,74	21,87
Papua Selatan		511,16	518,90	526,68	534,42	542,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022-2024 (dalam dokumen "Provinsi Papua Selatan Dalam Angka")

Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Merauke disebabkan karena memiliki sarana transportasi dan aksesibilitas yang paling memadai, infrastruktur yang cukup bagus, memiliki variasi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, serta keadaan sosial ekonomi yang lebih baik dibandingkan kabupaten yang lain. Pada tahun 2024 kepadatan penduduk di Kabupaten Merauke adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Selatan, yaitu 5,32 jiwa per km². Kabupaten Merauke sebagai ibukota provinsi mendorong peningkatan migrasi penduduk yang didorong meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan.

Tabel II.34 Kepadatan dan Laju pertumbuhan Penduduk Papua Selatan 2020-2024

No	Kabupaten	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)					Laju Pertumbuhan (%)			
		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1	Merauke	5,11	5,19	5,27	5,27	5,32	1,03	1,01	0,98	0,93
2	Boven Digoel	2,71	2,77	2,82	2,88	2,93	2,07	1,98	1,91	1,89
3	Mappi	4,44	4,52	4,59	4,67	4,74	1,71	1,69	1,66	1,62
4	Asmat	4,37	2,54	2,59	4,65	4,74	2,02	2,04	2,04	2,01
Papua Selatan		4,37	4,44	4,51	4,57	4,64	1,51	1,50	1,47	1,43

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022-2024 (dalam dokumen "Provinsi Papua Selatan Dalam Angka")

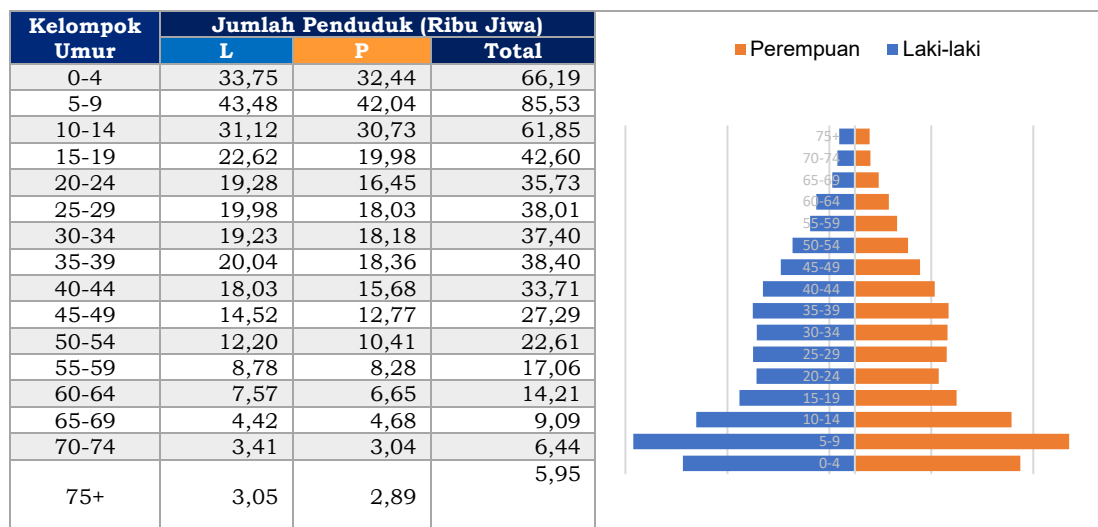
Tabel II.35 menunjukkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Papua Selatan pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Tabel II.35 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki tahun 2024 di Papua Selatan sebanyak 281,47 ribu jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 260,61 ribu jiwa. Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 108,00 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Provinsi Papua Selatan terdapat 108 penduduk laki-laki (lihat Tabel II.35).

Tabel II.35 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Papua Selatan Tahun 2020-2024

No	Kabupaten	Laki-laki					Perempuan					Rasio Jenis Kelamin				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Merauke	120,48	121,50	122,51	123,51	124,45	109,69	111,04	112,39	113,69	114,95	109,84	109,42	109,00	108,64	108,26
2	Boven Digoel	33,97	34,64	35,28	35,92	36,56	29,91	30,56	31,21	31,84	32,48	113,57	113,35	113,04	112,81	112,56
3	Mappi	55,64	56,53	57,43	58,32	59,22	52,08	53,04	53,99	54,94	55,88	106,84	106,58	106,37	106,15	105,98
4	Asmat	56,75	57,83	58,96	60,10	61,24	52,64	53,77	54,93	56,10	57,29	107,81	107,55	107,34	107,13	106,89
Papua Selatan		266,84	270,49	274,17	277,84	281,47	244,32	248,41	252,51	256,57	260,61	109,22	108,89	108,58	108,29	108,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022-2024 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Gambar II.28 Komposisi dan Piramida Penduduk Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 (Ribu Jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan paling banyak berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 85,53 ribu jiwa, diikuti kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 66,19 ribu jiwa, dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 61,85 jiwa. Piramida penduduk Provinsi Papua Selatan termasuk dalam kategori *expansive* dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda, dengan tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang memiliki dua implikasi, jika penduduk dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif maka akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah, dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah. Dalam aspek kesehatan, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengimplementasikan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan tingginya tingkat kelahiran sekaligus memastikan anak di Provinsi Papua Selatan dapat tumbuh berkembang dengan seimbang dan berkualitas. Selain itu, dengan jumlah penduduk

muda dan angkatan kerja juga besar, maka pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

2) Kondisi Demografi OAP dan non-OAP

Berbagai upaya untuk mengetahui kondisi demografi OAP dan non-OAP telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di wilayah Papua. Berdasarkan Tabel II.36 dapat diketahui cakupan pendataan yang dilakukan sampai dengan 9 Agustus 2024 di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan sebesar 23.865 jiwa atau 4,65% dari total jumlah penduduk dalam sensus penduduk 2020 (jumlah penduduk dalam SP 2020: 513.617 jiwa). Dari total penduduk yang terdata SIO Papua, sebanyak 19.646 jiwa adalah OAP sedangkan 4.219 jiwa lainnya adalah non-OAP. Cakupan pendataan ini masih dinamis dan akan terus bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan di tingkat kampung dengan target cakupan 100%.

Tabel II.36 Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SIO Papua (update: 9 Agustus 2024)

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan SIO Papua (jiwa)			Cakupan SIO Papua Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
Papua Selatan		513.617	19.646	4.219	23.865	4,65
1	Merauke	230.932	71	3	74	0,04
2	Boven Digoel	64.285	9.850	3.343	13.193	20,52
3	Mappi	108.295	0	0	0	0,00
4	Asmat	110.105	9.725	873	10.598	9,63

Sumber: SIO Papua (Sistem Informasi Orang Papua) <https://www.siopapua.com/>

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1) Kinerja Ekonomi

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2018-2024. Kabupaten Merauke menjadi daerah dengan nilai PDRB tertinggi baik nilai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang terus tumbuh dari 14,53 milyar ditahun 2018 menjadi 20,34 milyar pada tahun 2024, dan juga nilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari 9,58 milyar ditahun 2018 menjadi 11,91 milyar pada tahun 2024. Perkembangan nilai PDRB Papua Selatan menurut Kabupaten secara lengkap disajikan pada Tabel II.37 berikut.

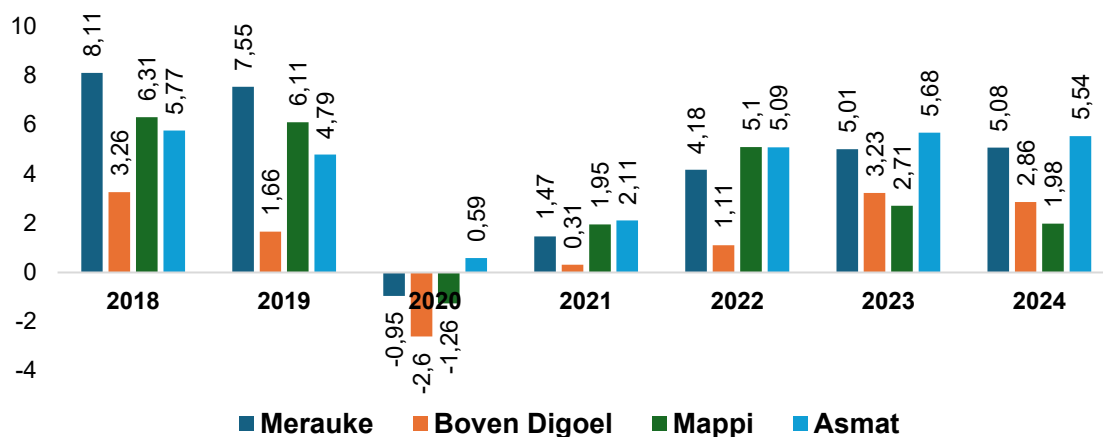
Tabel II.37 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan (Miliar rupiah) 2018-2024

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)							
Merauke	14.536,82	16.023,14	16.026,18	16.395,80	17.370,16	18.966,43	20.349,76
Boven Digoel	4.566,55	4.818,16	4.820,54	4.938,65	5.077,91	5.342,48	5.866,71
Mappi	2.674,53	2.957,68	2.991,71	3.108,44	3.350,84	3.608,32	3.833,76
Asmat	2.258,84	2.470,83	2.569,01	2.694,79	2.880,58	3.163,51	3.409,89
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)							
Merauke	9.583,70	10.307,40	10.209,60	10.363,50	10.792,10	11.335,17	11.911,10
Boven Digoel	3.221,87	3.275,51	3.190,50	3.200,39	3.235,93	3.341,59	3.437,30
Mappi	1.775,92	1.884,40	1.860,73	1.897,02	1.993,79	2.048,19	2.088,84
Asmat	1.373,50	1.522,32	1.531,36	1.563,64	1.643,23	1.729,26	1.825,14

Sumber: BPS Kabupaten, 2024

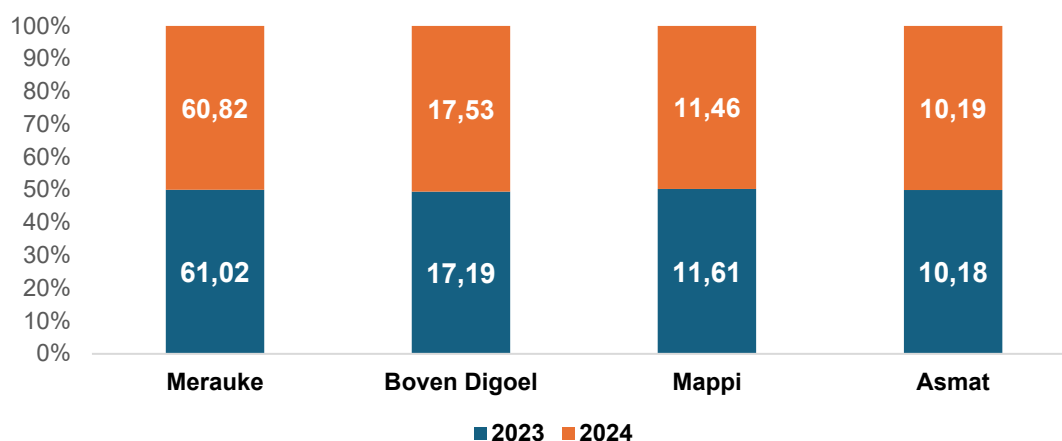
Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2018-2024 secara umum mengalami pergerakan secara fluktuatif. Data berikut menunjukkan Laju pertumbuhan PDRB ADHK ditahun 2020 untuk Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi menunjukkan tren negarif. Adapun pada periode yang sama Kabupaten Asmat mampu mencatatkan pertumbuhan secara positif meskipun mengalami penurunan secara signifikan dari 4,79% ditahun 2019 menjadi 0,59% pada tahun 2020. Pasca tahun 2020 yang dapat dipahami sebagai masa krisis akibat bencana global (covid-19) tercatat laju pertumbuhan PDRB ADHK setiap Kabupaten di Provinsi Papua Selatan secara menyakinkan terus menunjukkan peningkatan secara konsisten hingga tahun 2024. Capaian selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar II.29 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan (%) Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2025

Gambar II.30 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Kabupaten, Tahun 2023-2024



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2025

Distribusi PDRB ADHB setiap wilayah di Provinsi Papua Selatan secara keseluruhan mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan antar wilayah, maka Kabupaten Merauke merupakan Kabupaten dengan distribusi PDRB ADHB tertinggi yaitu sebesar 61,02% pada tahun 2023 dan 60,82% ditahun 2024. Adapun distribusi PDRB ADHB terendah yaitu Kabupaten Asmat yang hanya mampu mencapai 10,18% pada tahun 2023 dan 10,19% ditahun 2024.

2) Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan komposisi sektor ekonomi dalam perekonomian suatu wilayah. Dalam subbab ini, pembahasan struktur ekonomi dirumuskan berdasarkan sektor ekonomi atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Pada tahun 2017-2022, secara

umum struktur ekonomi kabupaten di Papua Selatan menunjukkan struktur ekonomi agraris dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel II.38 Rata-rata Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan (%), 2017-2022

Lapangan Usaha	Rata-rata Distribusi PDRB ADHK 2017-2022 (%)			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,55	26,03	23,36	20,90
Pertambangan dan Penggalian	1,72	1,38	0,32	0,01
Industri Pengolahan	3,78	23,95	0,67	2,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,00	0,00	0,05
Konstruksi	16,08	24,19	32,93	30,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	5,76	6,90	5,99
Transportasi dan Pergudangan	7,27	1,76	1,96	2,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	0,23	0,22	0,26
Informasi dan Komunikasi	8,68	0,33	0,55	0,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	0,91	0,71	0,20
Real Estate	2,86	1,35	1,65	1,82
Jasa Perusahaan	1,52	0,17	0,10	0,54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,27	9,56	23,31	21,79
Jasa Pendidikan	2,36	2,00	3,69	7,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,71	2,67	4,07
Jasa Lainnya	1,20	0,67	0,95	1,09
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:  kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata kontribusi seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel II.38 diketahui bahwa seluruh kabupaten di Papua Selatan memiliki struktur ekonomi yang didominasi kontribusi lapangan usaha: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) konstruksi, serta (3) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Meskipun demikian, terdapat kabupaten yang memiliki kontribusi lapangan usaha perdagangan yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Merauke (14,25%), Mappi (6,90%) dan Asmat (5,99%). Khusus untuk Kabupaten Merauke sebagai ibukota provinsi, terdapat kontribusi yang tinggi pada sektor transportasi dan pergudangan (7,27%), informasi dan komunikasi (8,68%). Selain itu, terdapat kontribusi sektor industri pengolahan yang sangat tinggi di Boven Digoel selama tahun 2017-2022 dengan rata-rata sebesar 23,95%.

Dalam menganalisis struktur ekonomi daerah, selain mengkaji kontribusi lapangan usaha juga perlu meninjau laju pertumbuhan lapangan usaha pada rentang tahun tertentu. Berdasarkan Tabel II.39 dapat diketahui terdapat laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor tersier/jasa seperti perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini mengindikasikan mulai adanya transformasi struktural atau pergeseran pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja/struktur mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor jasa di Papua Selatan. Meskipun demikian, perubahan struktur ekonomi ini perlu didukung dengan upaya peningkatan pertumbuhan sektor industri di Papua Selatan yang belum berkembang atau bahkan mengalami perlambatan pertumbuhan pada 2017-2022 (Boven Digoel: -3,02% dan Asmat: -0,08%).

Untuk menganalisis struktur ekonomi kabupaten di Provinsi Papua Selatan dilakukan analisis Tipologi Klassen terhadap kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB per lapangan usaha di seluruh kabupaten tahun 2017-2022. Tipologi Klassen membagi lapangan usaha menjadi 4 kategori yaitu: kuadran I adalah sektor maju dan cepat tumbuh, kuadran II adalah sektor berkembang cepat, kuadran III adalah sektor maju tapi tertekan, serta kuadran IV adalah sektor yang relatif tertinggal (lihat Tabel II.40).

Tabel II.39 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan (%), 2017-2022

Lapangan Usaha	Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2017-2022 (%)			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	1,11	0,63	1,88
Pertambangan dan Penggalian	6,01	2,47	1,94	-0,19
Industri Pengolahan	2,30	-3,02	2,04	-0,06
Pengadaan Listrik dan Gas	7,64	5,33	7,83	1,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,98	0,00	4,61	1,13
Konstruksi	9,29	2,83	4,81	6,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,08	5,04	5,33	1,47
Transportasi dan Pergudangan	1,70	2,48	2,46	4,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,29	2,68	3,17	2,61
Informasi dan Komunikasi	7,87	5,00	6,01	8,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	4,91	5,94	2,04
Real Estate	4,83	2,57	3,57	2,32
Jasa Perusahaan	3,09	2,37	2,16	2,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	2,04	5,81	3,49
Jasa Pendidikan	2,94	1,87	3,98	3,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,68	6,80	6,43	7,17
Jasa Lainnya	3,28	2,13	4,61	5,04
PDRB	4,45	0,92	3,91	3,90

Keterangan: Laju pertumbuhan lapangan usaha relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel II.40 dapat diketahui bahwa sektor maju dan tumbuh pesat di seluruh Kabupaten adalah sektor konstruksi. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian justru memiliki laju pertumbuhan yang kecil sehingga termasuk dalam kategori “**sektor maju tapi tertekan**” (kuadran III). Selain sektor konstruksi, sektor lainnya yang termasuk sektor maju dan cepat tumbuh adalah sektor perdagangan (di Kabupaten Merauke dan Mappi), sektor informasi dan komunikasi (di Kabupaten Merauke), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (di Kabupaten Mappi dan Asmat), serta sektor jasa pendidikan (di Kabupaten Asmat).

**Tabel II.40 Tipologi Klassen Menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2017-2022**

Lapangan Usaha	Tipologi Klassen			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3	3	3	3
Pertambangan dan Penggalian	2	4	4	4
Industri Pengolahan	4	3	4	4
Pengadaan Listrik dan Gas	2	2	2	4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4	4	2	4
Konstruksi	1	1	1	1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1	2	1	3
Transportasi dan Pergudangan	3	4	4	2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4	4	4	4
Informasi dan Komunikasi	1	2	2	2
Jasa Keuangan dan Asuransi	4	2	2	4
Real Estate	2	4	4	4
Jasa Perusahaan	4	4	4	4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3	3	1	1
Jasa Pendidikan	4	4	4	1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2	2	2	2
Jasa Lainnya	4	4	2	2

Keterangan:

- 1 **Kuadran I:** sektor maju dan tumbuh pesat
- 2 **Kuadran II:** sektor potensial dan dapat berkembang pesat
- 3 **Kuadran III:** sektor maju tapi tertekan
- 4 **Kuadran IV:** sektor relatif tertinggal

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (diolah)

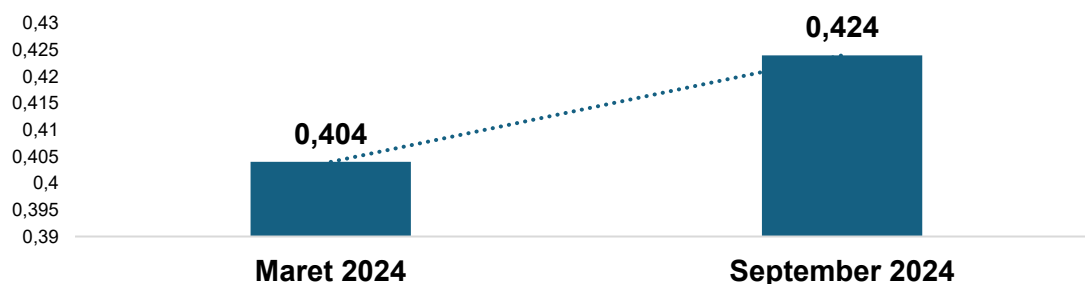
Sebagai tindaklanjut dari analisis Tipologi Klassen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.40, dapat diketahui intervensi sektoral yang

dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pembangunan ekonomi jangka pendek/menengah maupun jangka panjang. Untuk perbaikan ekonomi jangka pendek/menengah pemerintah provinsi/kabupaten dapat fokus pada perbaikan sektor-sektor potensial yang berkembang pesat (kuadran II), seperti jasa keuangan dan asuransi (di Kabupaten Boven Digoel dan Mappi), pertambangan dan penggalian (di Kabupaten Merauke), transportasi dan pergudangan (di Kabupaten Asmat), serta sektor informasi dan komunikasi (di Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat).

3) Indeks Gini

Pada September 2024 gini rasio Provinsi Papua Selatan adalah sebesar 0,424. Angka ini naik 0,020 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,404. Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,351; naik 0,052 poin dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,299. Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,429; turun 0,006 poin dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,435. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk Provinsi Papua Selatan 40 persen terbawah adalah sebesar 13,68 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,12 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 12,91 persen.

Gambar II.31 Perkembangan Gini Ratio, Maret 2024 September 2024



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

Secara regional, wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan paling rendah pada tahun 2023 di Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke (skor: 0,369) dan Kabupaten Asmat (skor: 0,398). Adapun wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kabupaten Mappi (skor: 0,420) dan Boven Digoel (skor: 0,417).

Tabel II.41 Indeks Gini Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2017-2023

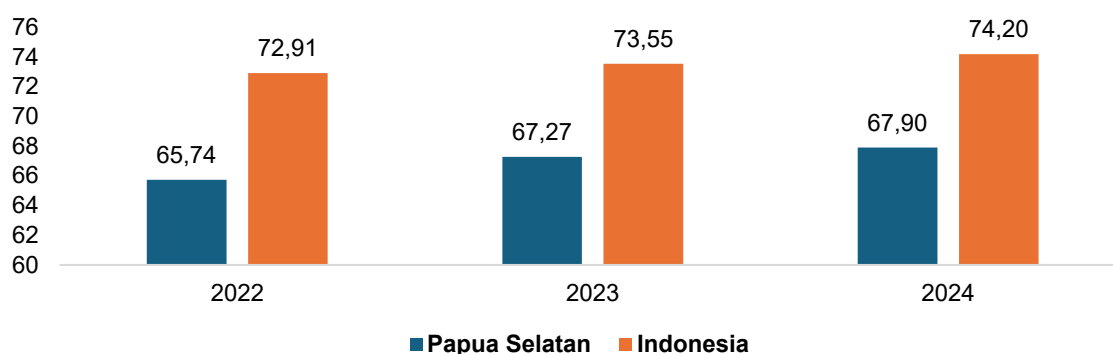
No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Merauke	0,368	0,388	0,386	0,380	0,385	0,402	0,365
2	Boven Digoel	0,345	0,424	0,392	0,448	0,407	0,420	0,417
3	Mappi	0,394	0,416	0,416	0,427	0,384	0,403	0,420
4	Asmat	0,233	0,385	0,398	0,403	0,405	0,391	0,398

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

4) Indeks Pembangunan Manusia

Pasca pemekaran menjadi Provinsi Papua Selatan, tercatat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Papua Selatan terus menunjukkan peningkatan dari 65,75 point pada tahun 2022 menjadi 67,90 poin ditahun 2024. Meskipun cenderung mengalami peningkatan, pada periode waktu yang sama capaian Papua Selatan tercatat masih berada jauh di bawah capaian nasional. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

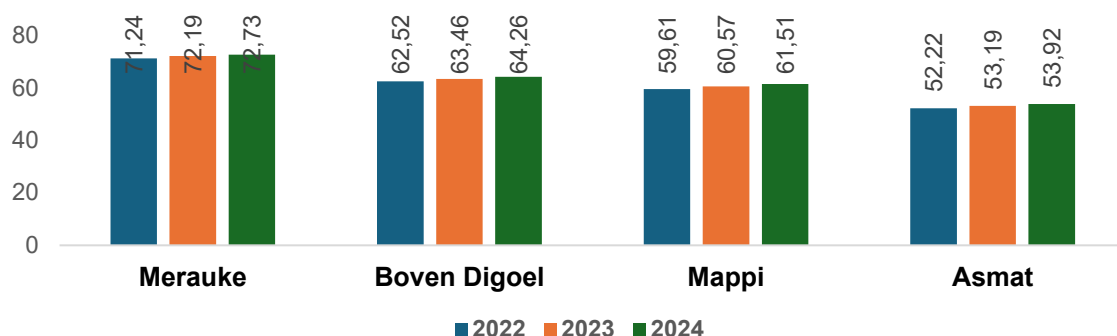
Gambar II.32 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Indonesia, (2025)

Kemudian jika dilihat berdasarkan capaian ditingkat Kabupaten, tercatat capaian IPM setiap Kabupaten terus menunjukkan peningkatan sepanjang periode 2022-2024. Adapun Kabupaten Asmat tercatat sebagai wilayah dengan perkembangan dalam pencapaian IPM terendah dengan rata-rata capaian hanya sebesar 53,11 point pada periode yang sama jika dibandingkan dengan Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar II.33 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Indonesia, (2025)

Dalam melakukan analisis kondisi IPM, penting untuk dilakukan analisis IPM terpilah gender (laki-laki dan perempuan) karena adanya perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar laki-laki dan perempuan. Diketahui bahwa capaian IPM laki-laki di Papua Selatan termasuk dalam **kategori sedang** (kriteria: 60-69) dan terus mengalami peningkatan dari 64,24 pada tahun 2017 menjadi 67,76 pada tahun 2023. Meskipun demikian, capaian IPM perempuan di Papua Selatan masih termasuk dalam **kategori rendah** (kriteria: <60) dan mengalami peningkatan dari 49,13 pada tahun 2017 menjadi 53,42 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar untuk perempuan di Papua Selatan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam hal ini, wilayah dengan capaian IPM perempuan sangat rendah adalah Kabupaten Asmat yaitu 27,85 pada tahun 2017 dan 33,36 pada tahun 2023.

Tabel II.42 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-Laki dan Perempuan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023

Indikator		Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki	Merauke	75,12	75,14	75,53	76,10	76,93
		Boven Digoel	66,84	66,91	67,10	67,80	68,48
		Mappi	63,88	63,74	64,17	65,06	66,03
		Asmat	56,62	56,84	57,71	58,64	59,62
		Rata-rata 4 Kab.	65,62	65,66	66,13	66,90	67,76
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan	Merauke	65,88	66,00	66,50	67,96	68,96
		Boven Digoel	52,97	52,98	53,05	54,17	55,10
		Mappi	53,42	53,21	53,76	55,22	56,23
		Asmat	30,41	30,46	31,00	32,45	33,38
		Rata-rata 4 Kab.	50,67	50,66	51,08	52,45	53,42

(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IPM seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2017-2023 (diolah).

5) **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Secara umum terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di Papua Selatan dari 88,78 ribu jiwa ditahun 2020 menjadi 92,20 ribu jiwa pada tahun 2024. Hingga tahun 2024 tercatat Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat di Kabupaten Mappi yaitu mencapai 27,18 ribu jiwa dan Kabupaten Asmat sebesar 26,24 ribu jiwa. Meskipun mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, namun apabila melihat persentase penduduk miskin di Papua Selatan terhadap total penduduk cenderung menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin Provinsi Papua Selatan tahun 2024 tercatat sebesar 17,44%, menurun jika dibandingkan dengan kondisi ditahun 2023. Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Merauke yaitu 10,19% pada tahun 2024. Adapun Kabupaten Mappi tercatat menunjukkan persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 25,70% jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya.

Tabel II.43 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua Selatan 2020-2024

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	22,89	23,83	23,96	24,03	24,72	10,03	10,16	10,10	10,01	10,19
Boven Digoel	13,86	13,88	14,20	14,25	14,05	19,41	19,90	20,04	19,80	19,24
Mappi	26,91	26,36	26,76	26,82	27,18	25,04	26,05	26,04	25,72	25,70
Asmat	25,12	25,04	25,60	25,58	26,24	25,49	24,83	24,87	24,36	24,50
Papua Selatan*	88,78	89,11	90,52	90,68	92,20	19,99	20,24	20,26	19,97	17,44

* Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Papua Selatan merupakan hasil proxy terhadap data 4 kabupaten di Papua Selatan
Sumber: BPS Provinsi Papua, (2025)

Berdasarkan Tabel II.44 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin (P0), Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan pada 2023-2024. Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan, dalam periode yang sama tercatat rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 3,33 pada 2023 menjadi 3,71 pada tahun 2024. Begitupula dengan rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengalami peningkatan dari 0,89 pada tahun 2023 menjadi 1,08 pada tahun 2024.

Tabel II.44 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 dan 2024

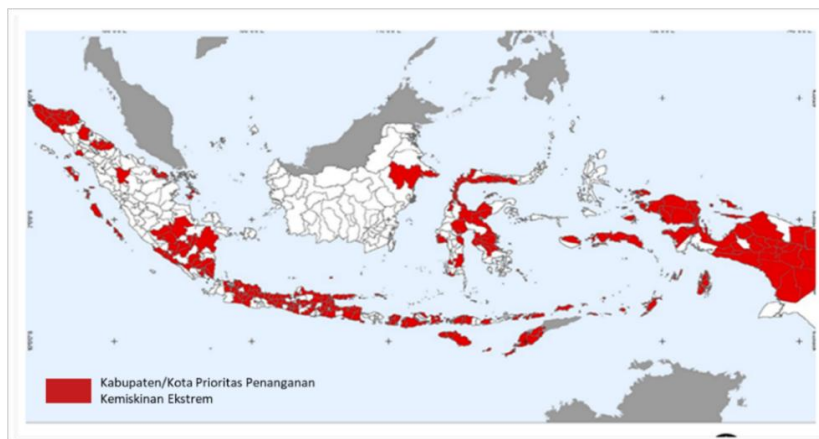
Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin (%)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Merauke	10,01	10,19	1,96	1,98	0,55	0,67	434.596	484.224
Boven Digoel	19,80	19,24	4,50	3,96	1,46	1,17	585.228	622.315
Mappi	25,72	25,70	3,12	4,58	0,66	1,20	427.352	480.727
Asmat	24,36	24,50	3,75	4,17	0,89	1,04	450.237	487.035
Rata-rata	19,97	17,44	3,33	3,71	0,89	1,08	474.353	519.979

Sumber: BPS Provinsi Papua dan BPS Nasional, (2025)

6) Kemiskinan Ekstrem

Arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Selatan akan dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan program kemiskinan Ekstrem sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu. Berdasarkan Gambar II.34 diketahui bahwa 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Papua Selatan termasuk dalam wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

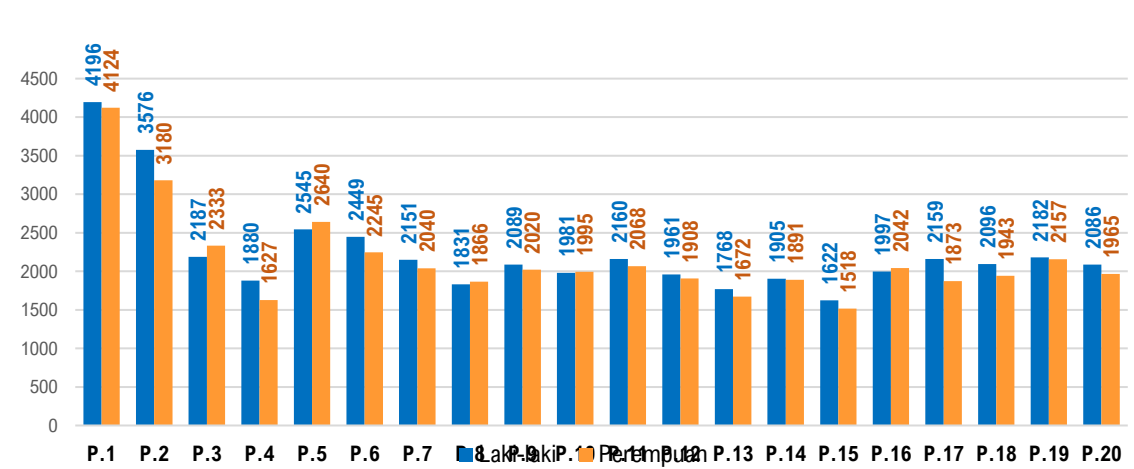
Gambar II.34 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia



Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2022

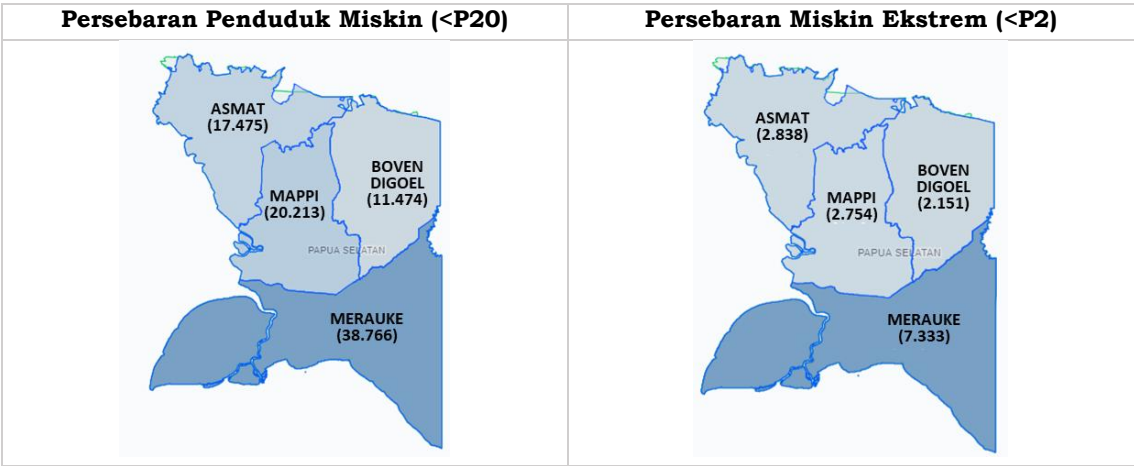
Gambar II.35 dan Gambar II.36 menunjukkan sebaran penduduk miskin (<P20) dan miskin ekstrem (<P2) di Papua Selatan berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.35 dan Gambar II.36 diketahui bahwa sebanyak 87.928 penduduk (20,59%) dari total 427.044 penduduk berada pada 20% termiskin di Papua Selatan, didominasi oleh laki-laki. Dari sebarannya, penduduk miskin terkonsentrasi di 2% termiskin di Papua Selatan sebanyak 15.076 penduduk (3,53%) dari total penduduk di Papua Selatan. Berdasarkan wilayahnya, penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem paling tinggi terdapat di Kabupaten Merauke.

Gambar II.35 Sebaran Penduduk Miskin di Papua Selatan (<P20)



Sumber: Regsosek, 2022

Gambar II.36 Sebaran Penduduk Miskin (<P20) dan Miskin Ekstrem (<P2) di Papua Selatan



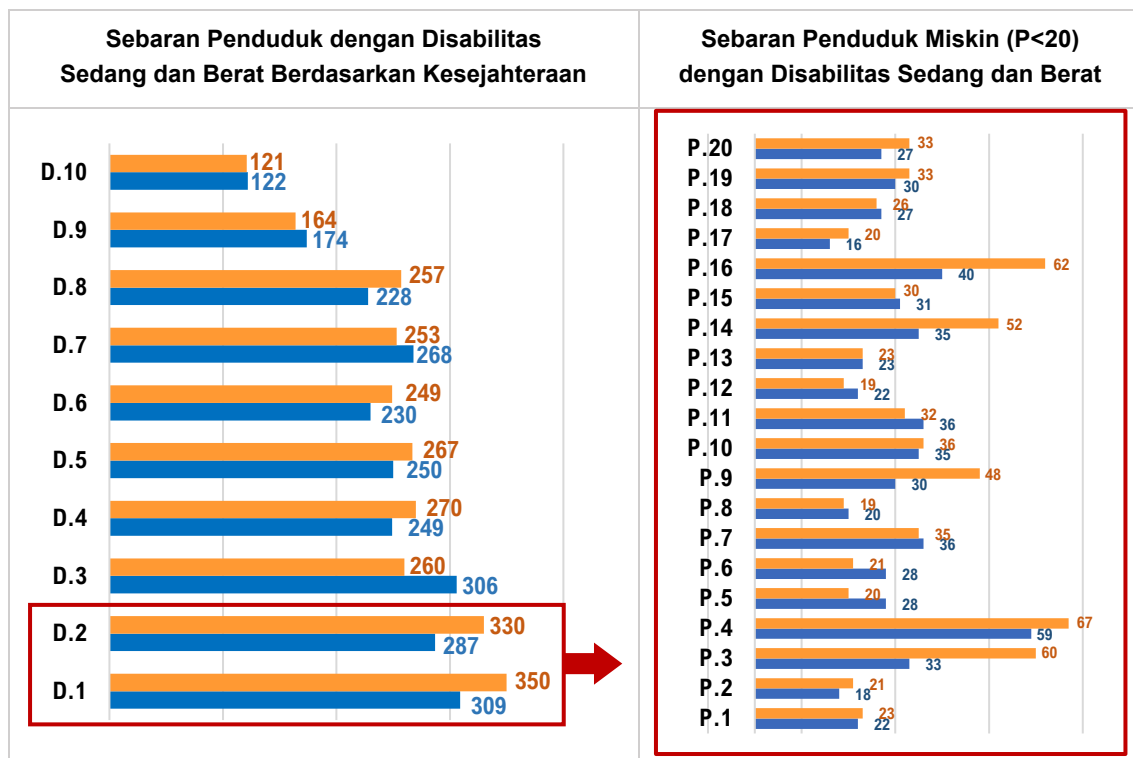
Sumber: Regsosek, 2022

7) Kondisi Kemiskinan Kelompok Disabilitas (Sedang dan Berat)

Gambar II.37 menunjukkan sebaran penduduk dengan disabilitas sedang dan berat berdasarkan kesejahteraan serta penduduk miskin

(p<20) dengan disabilitas sedang dan berat di Papua Selatan. Berdasarkan Gambar II.37 diketahui sebanyak 4.944 (1,16%) dari 427.044 penduduk di Provinsi Papua Selatan mengalami disabilitas sedang dan berat, serta sebanyak 1.276 (0,30%) dari total penduduk di Provinsi Papua Selatan mengalami disabilitas sedang dan berat dengan status miskin.

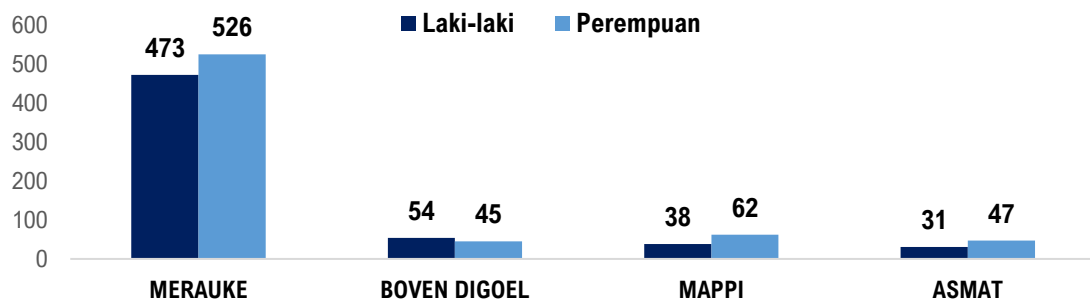
Gambar II.37 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Kesejahteraan serta Penduduk Miskin (P<20) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Papua Selatan



Sumber: Regsosek, 2022

Adapun penduduk disabilitas sedang dan berat yang berstatus miskin terbanyak berada di 3-4% termiskin dan berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan lokasinya, penyandang disabilitas di Papua Selatan dengan status miskin paling banyak berada di Kab Merauke, serta merupakan kelompok miskin ekstrim dan sangat rentan (disabilitas, Perempuan) yang perlu dibantu.

Gambar II.38 Persebaran Penduduk Miskin (P<20) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Papua Selatan

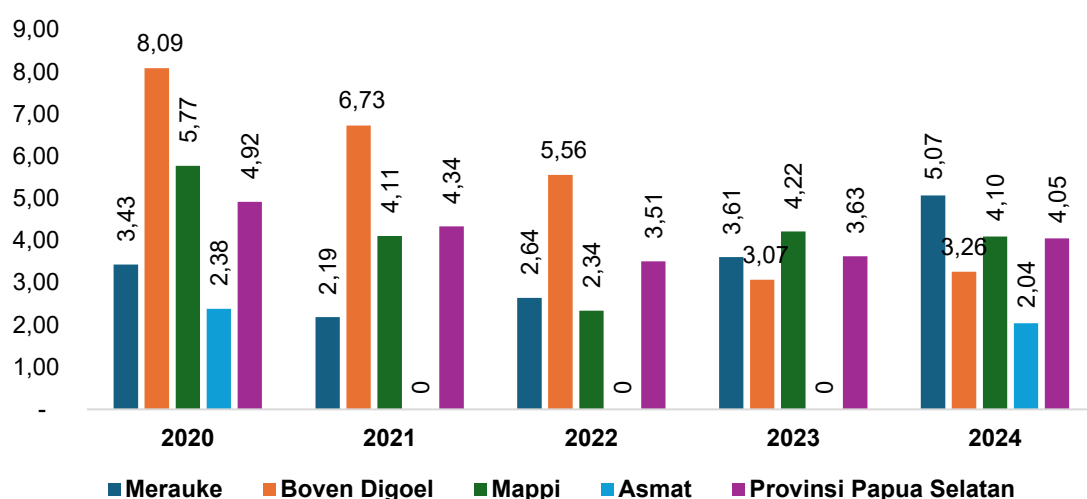


Sumber: Regsosek, 2022

8) Tingkat Pengangguran Terbuka

Provinsi Papua Selatan mencatat perkembangan beragam dalam tingkat pengangguran terbuka selama lima tahun terakhir. Secara agregat, terjadi perbaikan dengan penurunan dari 4,92% (2020) menjadi 4,05% (2024), meskipun sempat mengalami fluktuasi dengan titik terendah 3,51% di tahun 2022. Analisis per kabupaten menunjukkan pola yang berbeda: Merauke mengalami kenaikan signifikan dari 3,43% menjadi 5,07%, sementara Boven Digoel justru menunjukkan penurunan drastis dari 8,09% ke 3,26%. Kabupaten Mappi dan Asmat masing-masing mencatat penurunan menjadi 4,10% dan 2,04%.

Gambar II.39 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten di Papua Selatan Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS, 2025

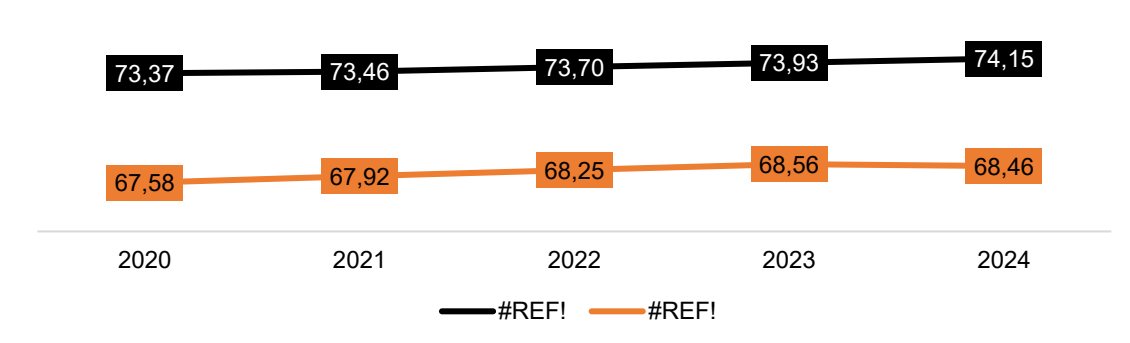
*Catatan: Angka Provinsi Tahun 2020-2023 menggunakan angka rata-rata Kabupaten

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, AHH Provinsi Papua Selatan mencapai angka 68,46 pada tahun 2024. Sedangkan angka provinsi yang dipublikasikan BPS pada periode di bawah tahun 2024 belum terpilah dengan Provinsi Papua induk. Sebagai pembanding, untuk periode tahun 2020 sampai 2023 digunakan angka rata-rata kabupaten. Menggunakan data ini, diperoleh AHH Provinsi Papua Selatan mencapai 67,58 tahun pada 2020, dan terus meningkat setiap tahun. Dibandingkan dengan angka nasional, terdapat selisih yang cenderung tetap, yakni Provinsi Papua Selatan berada pada sekitar 5,4-5,8 tahun di bawah angka nasional. Gambar II.406 menunjukkan peningkatan AHH Provinsi Papua Selatan dibandingkan dengan AHH Nasional sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.

Gambar II.406 Perbandingan Capaian AHH Papua Selatan dengan Nasional*

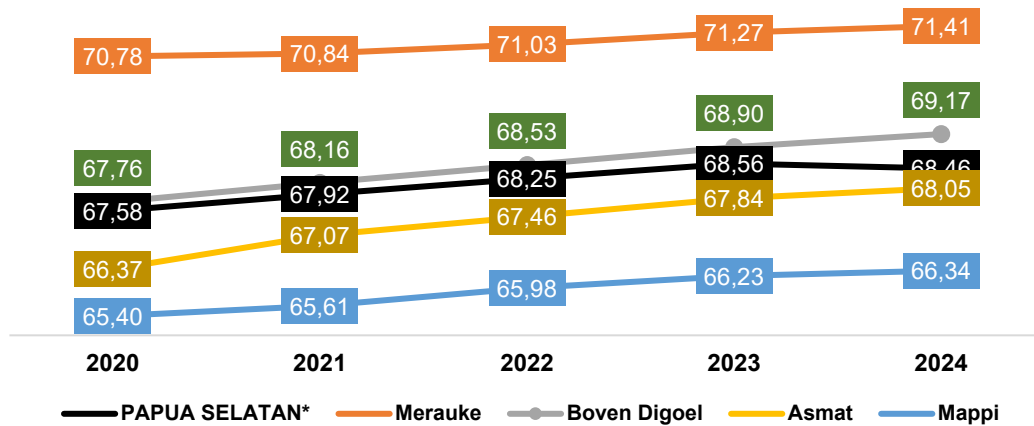


*Catatan: Angka Provinsi Papua Selatan tahun 2020 sampai dengan 2023 menggunakan angka rata-rata kabupaten

Sumber: Long Form SP2020 (Sensus Penduduk 2020, BPS RI, diakses April 2025)

Perbandingan antar kabupaten menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Merauke dan Boven Digoel memiliki AHH yang lebih tinggi dari angka provinsi. Pada Gambar II.27 di bawah ini nampak bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Merauke dan Boven Digoel memiliki AHH masing-masing 71,41 tahun dan 69,17 tahun. Sedangkan Mappi memiliki AHH terendah, yakni 66,34 tahun, disusul oleh Kabupaten Asmat, 68,05 tahun. Rentang perbedaan AHH dari kabupaten terendah hingga tertinggi cukup jauh, yakni sekitar 5 poin.

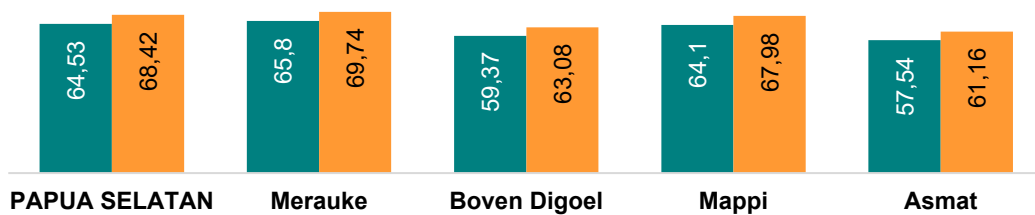
Gambar II.27 Perkembangan AHH berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: Long Form SP2020 (Sensus Penduduk 2020, BPS RI, diakses April 2025)

Pemilahan AHH berdasarkan jenis kelamin per kabupaten/kota yang dipublikasikan BPS menggunakan metode statistik yang berbeda dengan AHH hasil Sensus Penduduk 2020, sehingga ada perbedaan angka dibandingkan dengan AHH yang mengacu kepada hasil SP 2020. Berdasarkan penghitungan ini untuk tahun 2024, diperoleh AHH perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar II.28), dengan selisih untuk angka provinsi mendekati 4 tahun. Perbedaan berdasarkan jenis kelamin ini memiliki pola yang sama pada AHH nasional maupun global.

Gambar II.28 Perbandingan AHH berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Papua Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, diakses April 2025)

2) Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

Tingginya angka stunting merupakan hambatan dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program Percepatan penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan semua pemangku kepentingan.

Tabel II.45 Prevalensi Status Gizi Menurut Kategori di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

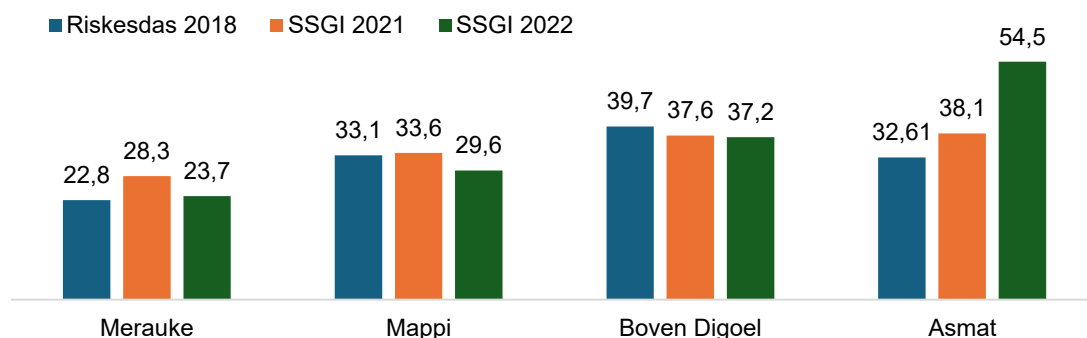
Status Gizi Menurut BB/U (Underweight)	Status Gizi Menurut TB/U (Stunting)	Status Gizi Menurut BB/TB (Wasting)
13,5	16,5	7,10

Survei Status Gizi Indonesia Dalam Angka, 2025.

Provinsi Papua Selatan mencatat prevalensi masalah gizi yang mengkhawatirkan pada 2024. Kasus stunting (TB/U) menjadi yang tertinggi dengan 16,5%, disusul underweight (BB/U) sebesar 13,5%, dan wasting (BB/TB) sebesar 7,1%. Angka ini menunjukkan perlunya intervensi gizi yang lebih intensif, terutama untuk penanganan stunting yang masih menjadi tantangan utama.

Tinjauan berdasarkan kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Asmat memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi (54,5%) pada tahun 2022, yang meningkat dibandingkan angka tahun 2018 dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 32,6% dan 38,1%. Tiga kabupaten lainnya pun masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi, kecuali Kabupaten Merauke yang mendekati angka nasional pada tahun 2022 sebesar 23,7% (angka nasional 21,6%). Gambar berikut menunjukkan prevalensi stunting pada balita di 4 kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan hasil 3 survey yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI. Berdasarkan pengukuran TB/U yang dapat menilai anak *stunted* (pendek), pada tahun 2022 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) didapatkan angka rata-rata kabupaten untuk balita stunting sebesar 36,3%. Angka rata-rata kabupaten ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 32,0% (Hasil Riskesdas 2018) dan 34,4% (SSGI 2021).

Gambar II.28 Prevalensi Stunting pada Balita Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022



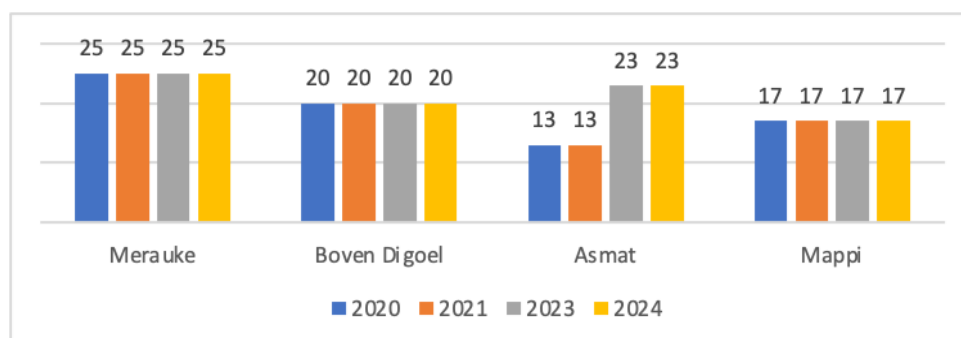
Sumber: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, SSGI 2022

3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas di Papua Selatan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 85 unit, Jika dipilah per kabupaten, dalam 5 tahun terakhir penambahan jumlah puskesmas hanya terdapat di Kabupaten Asmat, yakni dari 13 unit di tahun 2020 menjadi 23 unit di tahun 2024. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah puskesmas di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan sejak 2020 hingga 2024.

Gambar II.56 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Papua Selatan Menurut Kabupaten, Tahun 2020 - 2024

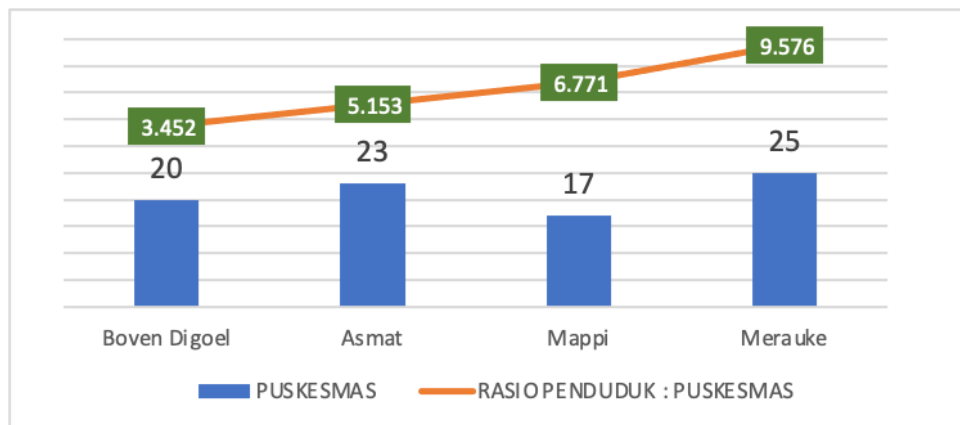


Sumber: BPS; Provinsi Papua dalam Angka 2023, Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2024, 2025

Dengan mengacu pada publikasi BPS tahun 2025, rasio puskesmas per penduduk yang dilayani di Provinsi Papua Selatan adalah 1 : 6.377 penduduk. Rasio ini tergolong sangat baik dibandingkan standar nasional yakni minimal 1 puskesmas untuk 16.000 penduduk, bahkan jika dilihat per kabupaten, semua kabupaten telah memenuhi standar nasional. Namun rasio yang baik ini tidak serta merta mewakili tingkat aksesibilitas penduduk, mengingat kondisi geografis dan keterbatasan

sarana transportasi di Papua Selatan masih merupakan hambatan terhadap aksesibilitas penduduk untuk memperoleh layanan kesehatan puskesmas.

Gambar II.57 Jumlah Puskesmas dan Rasio Penduduk per Puskesmas Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024



Sumber: Provinsi Papua Selatan dalam Angka, BPS 2025 (diolah)

Dari 85 puskesmas yang ada, menurut data pada Profil Kesehatan Indonesia 2023 menyebutkan baru separuhnya (51%) yang terakreditasi, dengan 4 puskesmas berstatus akreditasi dasar (5%), 16 madya (19%), 15 utama (18%) dan 8 paripurna (9%)

Dari Profil Kesehatan Indonesia 2023 juga diketahui bahwa puskesmas yang memenuhi standar dengan ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan baru 7,2%. Sedangkan puskesmas dengan tenaga dokter mencapai 78,3% (dari 83 puskesmas yang melapor). Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, tercatat mencapai 90,8% dari 65 puskesmas yang melapor.

b. Rumah Sakit

Terdapat 8 rumah sakit di Provinsi Papua Selatan, yang 7 di antaranya merupakan RS Kelas D, sedangkan 1 lainnya belum ditentukan kelasnya. menampilkan daftar nama, kelas dan akreditasi rumah sakit di Provinsi Papua Selatan.

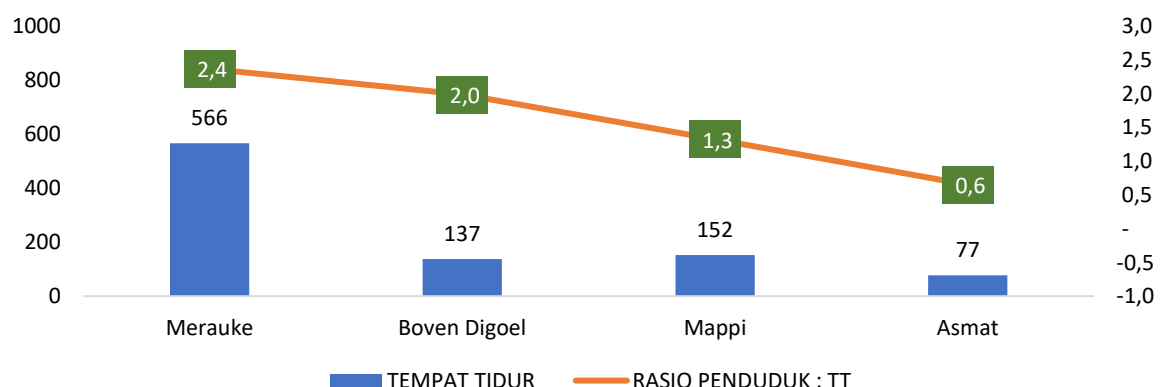
Tabel II.46 Nama, Kelas dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Kabupaten	No.	Nama Rumah Sakit	Kelas	Jumlah Tempat Tidur	Akreditasi
Merauke	1	RS Umum Daerah Merauke	D	312	Paripurna
	2	RS Umum Bunda Pengharapan	D	96	Paripurna
	3	RS TNI Angkatan Laut	D	57	Paripurna
	4	RS TNI Angkatan Darat	D	101	
Boven Digoel	5	RS Bergerak Boven Digoel	Belum Ditetapkan	22	
	6	RS Umum Daerah Boven Digoel	D	115	
Mappi	7	RS Umum Daerah Mappi	D	152	
Asmat	8	RS Umum Daerah Asmat	D	77	

Sumber: Profil Kesehatan Dinkes Provinsi Papua, 2021
[https://sirs.kemkes.go.id/\(Ditjen Yankes Kemenkes RI\)](https://sirs.kemkes.go.id/(Ditjen Yankes Kemenkes RI))
<https://kars.or.id> (komisi akreditasi rumah sakit)

Indikator terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap penduduk. Dengan seluruh tempat tidur RS di Papua Selatan berjumlah 932 Tempat Tidur, atau 1,7 Tempat Tidur per 1000 penduduk, menunjukkan rasio yang melebihi standar WHO, yakni 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Jika dipilah per kabupaten, hanya kabupaten Asmat yang belum memenuhi standar, yakni rasio TT per 1000 penduduknya sebesar 0,6 atau 1 TT untuk 1.539 penduduk. Gambar II.58 berikut menunjukkan perbandingan antar kabupaten tersebut.

Gambar II.58 Jumlah Tempat Tidur RS dan Rasio per 1000 Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024



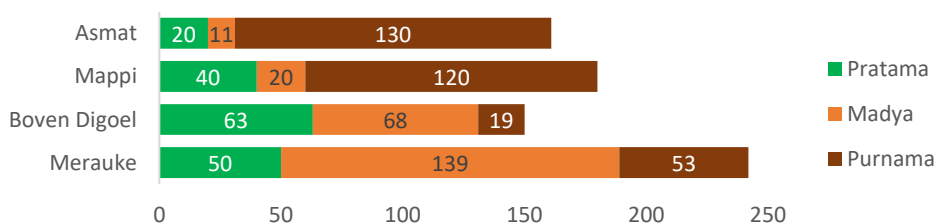
Sumber: [https://sirs.kemkes.go.id/\(Ditjen Yankes Kemenkes RI\)](https://sirs.kemkes.go.id/(Ditjen Yankes Kemenkes RI))
Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2025, BPS RI 2025(diolah)

4) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

a. Pos Pelayanan Terpadu

Mengacu kepada Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022, jumlah posyandu di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021 sebanyak 733 posyandu, yang meliputi 242 posyandu di Kabupaten Merauke, 150 posyandu di Kabupaten Boven Digoel, 180 posyandu di Kabupaten Mappi dan 161 lainnya di Kabupaten Asmat. Berdasarkan stratanya, posyandu di Provinsi Papua Selatan terbanyak merupakan Posyandu Purnama (322 unit atau 43,9%), dan selebihnya merupakan Posyandu Madya (238 unit atau 32,5%), dan Posyandu Pratama (173 unit atau 23,6%). Pada gambar di bawah ini menjabarkan jumlah serta strata posyandu di masing-masing kabupaten.

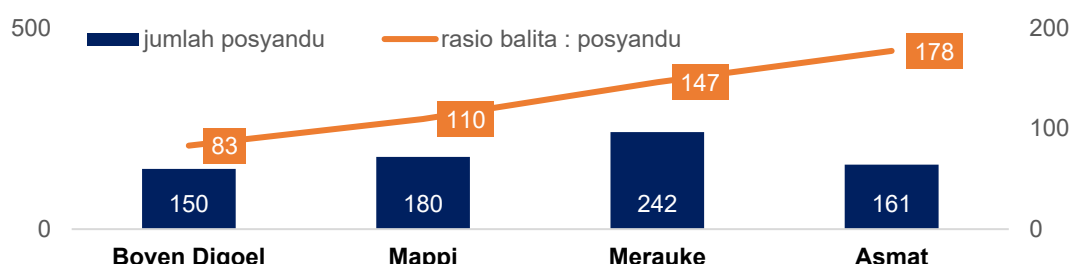
Gambar II.41 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Untuk mengetahui jangkauan pelayanan posyandu terhadap balita, digunakan rasio jumlah balita yang dilayani oleh 1 posyandu. Pada tingkat provinsi, rasio tersebut sebesar 131 balita per posyandu. Berdasarkan kabupaten, rasio tertinggi terdapat di Boven Digoel dengan rasio posyandu per balita per sebesar 1: 83. Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Asmat dengan rasio 1:178. Selengkapnya mengenai jumlah posyandu dan rasionya per balita di masing-masing kabupaten di tunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar II.42 Jumlah Posyandu dan Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021

b. Posbindu PTM

Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) adalah bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Informasi mengenai jumlah Posbindu PTM hingga tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua Selatan tidak tersedia secara lengkap. Data Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2022 hanya menampilkan jumlah Posbindu PTM di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, masing-masing sebanyak 123 dan 22 unit.

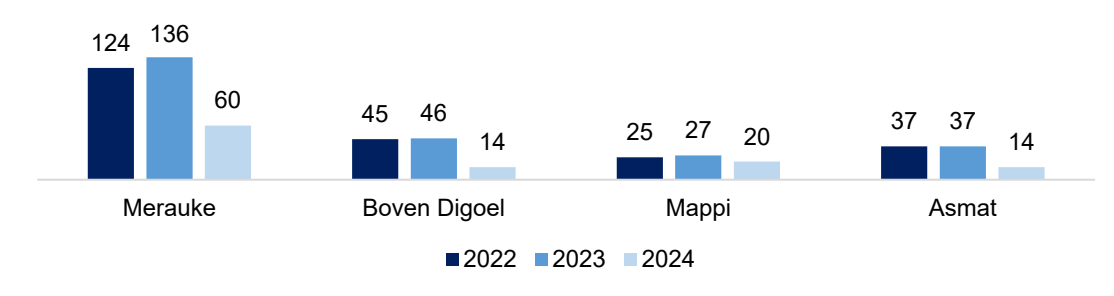
5) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dalam Undang-Undang No, 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan; dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan..

a. Tenaga Medis

Yang dimaksud tenaga medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan subspesialis serta dokter gigi spesialis dan subspesialis. Namun dokumen ini, hanya menguraikan ketersediaan dokter umum di Provinsi Papua Selatan. Pada tahun 2024, data BPS menyebutkan terdapat 108 orang dokter yang bekerja di Provinsi Papua Selatan, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Merauke (60 orang). Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, data BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah dokter di ke4 kabupaten.

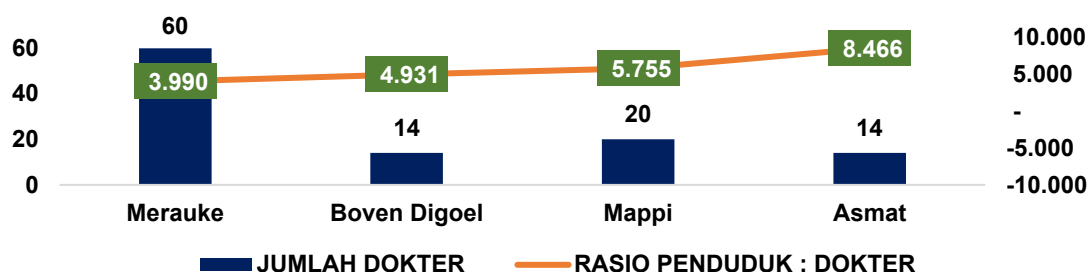
Gambar II.47 Perkembangan Jumlah Tenaga Dokter menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022-2024



Sumber: BPS; Provinsi Papua dalam Angka 2023, Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2024, 2025

Kecukupan tenaga dokter umum dapat dinilai melalui rasio dokter umum terhadap penduduk yang dilayani. Pada tingkat provinsi, rasionya sebesar 1: 5019, atau 1 dokter umum melayani 5.019 penduduk. Sedangkan jika dipilah menurut kabupaten, rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat dengan rasio 1 dokter untuk 8.466 penduduk. Angka-angka ini menunjukkan rasio dokter terhadap penduduk di semua wilayah Provinsi Papua Selatan masih di bawah standar nasional sebesar 1: 2500. Gambar II.62 berikut menggambarkan jumlah serta rasio dokter umum terhadap penduduk pada tahun 2024.

Gambar II.62 Jumlah serta Rasio Dokter Umum Terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2024

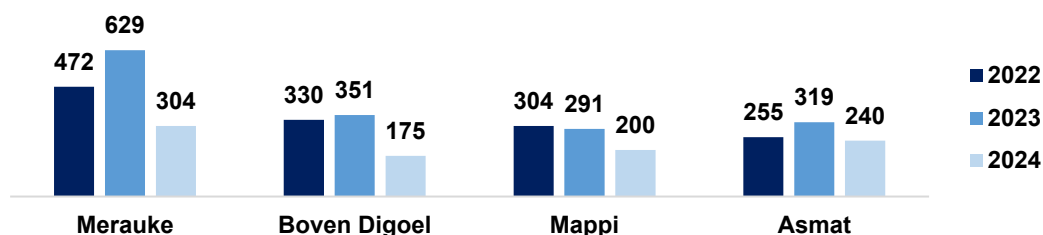


Sumber: BPS; Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2025

b. Tenaga Keperawatan dan Kebidanan

Di tahun 2024, berdasarkan data BPS, Provinsi Papua Selatan memiliki 919 orang perawat dan 745 bidan. Data BPS ini menunjukkan penurunan jumlah perawat dan bidan dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar II.63a dan II.63b di bawah ini menampilkan jumlah perawat dan bidan di masing-masing kabupaten dalam 3 tahun terakhir.

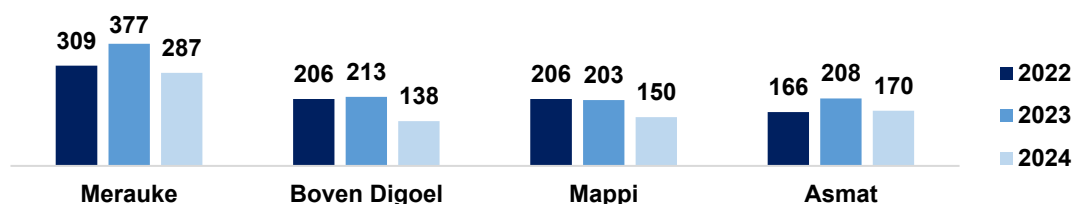
Gambar II.63a Perkembangan Jumlah Tenaga Keperawatan menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022-2024



Sumber: BPS; Provinsi Papua dalam Angka 2023, Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2024, 2025

Dengan jumlah di atas, pada tahun 2024 rasio perawat terhadap jumlah penduduk adalah 1 perawat untuk 590 penduduk, sedangkan rasio tenaga bidan adalah 1 bidan untuk 728 penduduk. Angka ini telah melampaui standar nasional jumlah minimal perawat terhadap jumlah penduduk, yakni 1:855. dan jumlah minimal tenaga bidan terhadap jumlah penduduk yang, yakni 1: 1000.

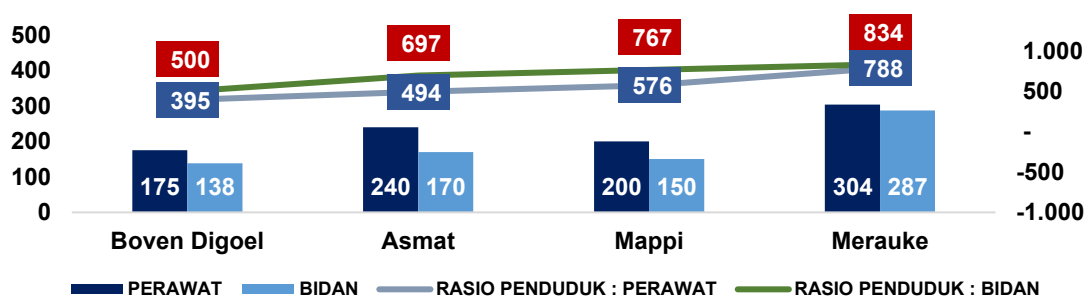
Gambar II.48 Perkembangan Jumlah Tenaga Kebidanan menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022-2024



Sumber: BPS; Provinsi Papua dalam Angka 2023, Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2024, 2025

Jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan bukan saja telah memenuhi standar pada tingkat provinsi, namun juga pada ke-4 kabupaten di Papua Selatan. Distribusi tenaga perawat dan bidan di masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar II.434 Jumlah serta Rasio Tenaga Perawat dan Bidan terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2024



Sumber: BPS; Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2025

c. Tenaga Kesehatan Lainnya

Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas promotif dan preventif untuk mendukung tugas pelayanan kesehatan masyarakat cukup terdistribusi ke hampir semua kabupaten, namun kecukupan jumlahnya belum memenuhi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan yang ada. Data mengenai jumlah tenaga kesehatan yang dipublikasikan BPS tahun 2025 menampilkan distribusi tenaga kesehatan di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 yang dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel II.49 Distribusi Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif berdasarkan Jenisnya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2024

Jenis Tenaga Kesehatan	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Psikologi Klinis	1	0	1	0	2
Kefarmasian	34	20	21	25	100
Kesehatan Masyarakat	71	40	49	41	201
Kesehatan Lingkungan	38	19	8	13	78
Tenaga Gizi	35	19	15	17	86
Keterapian Fisik	4	0	1	3	8
Keteknisian Medis	4	22	9	8	43
Teknik Biomedika	46	54	30	13	143

Sumber: BPS, Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2024

6) Kesehatan Keluarga

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Definisi kematian ibu adalah semua kematian selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya serta bukan karena sebab lain seperti kecelakaan. AKI adalah semua kematian dalam lingkup tersebut dengan denominator 1.000 atau 100.000 kelahiran hidup. Selain mewakili kondisi pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga menunjukkan derajat kesehatan masyarakat. Penghitungan AKI seringkali mengalami hambatan, karena selain jumlah kematian, diperlukan data yang valid mengenai jumlah kelahiran hidup dalam satu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ketersediaan data ini di Provinsi Papua Selatan masih terbatas, karena sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak memadai.

Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dipublikasikan BPS tidak memilah data provinsi Papua Selatan pasca pembentukan DOB. Demikian pula data terpilah kabupaten tidak tersedia. Berdasarkan SP 2020, AKI di Provinsi Papua sebelum pemekaran adalah 565 per 100.000 KH. Angka ini menempatkan Papua sebagai provinsi dengan AKI tertinggi di Indonesia.

AKI untuk Provinsi Papua Selatan dapat diperkirakan dari data yang ditampilkan dalam Profil Kesehatan Indonesia 2023. Publikasi Kemenkes itu menyebutkan di Provinsi Papua Selatan dalam tahun 2023 terdapat **23 kematian dari 9.614 kelahiran hidup** yang dilaporkan. Sehingga dari data tersebut dapat diperkirakan AKI Provinsi Papua Selatan sebesar **239 per 100.000 Kelahiran Hidup**. Sangat mungkin angka sesungguhnya lebih tinggi karena terdapat kasus-kasus kematian yang tidak dilaporkan.

Sebagai pembanding, AKI nasional saat ini adalah 189 per 100.000 kelahiran hidup (Sensus Penduduk 2020 – BPS RI), Sehingga angka BPS untuk provinsi sebelum pemekaran maupun data perkiraan dari Profil Kesehatan Indonesia menunjukkan angka provinsi Papua Selatan jauh di atas angka nasional.

Untuk meninjau keadaan di tiap kabupaten, data terakhir yang tersedia adalah data dari Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021. Dinkes Provinsi Papua melaporkan 24 kematian ibu dari 8.507 kelahiran hidup, sehingga diperoleh perkiraan AKI Provinsi Papua Selatan tahun 2021 sebesar 282 per 100.000 kelahiran hidup. Perbandingan antar kabupaten menunjukkan rentang AKI yang cukup lebar, yakni dari 164 per 100.000 KH di Kabupaten Asmat hingga 491 per 100.000 KH di Boven Digoel. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Mengenai penyebab Kematian Ibu, dari 24 kasus tersebut 6 di antaranya adalah perdarahan (25%). Sebab lainnya antara lain Infeksi (4 kasus atau 17%), sementara separuhnya (58%) tidak diketahui atau digolongkan sebagai sebab lainnya.

Tabel II.36 Jumlah Kematian dan Perkiraan Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup (KH)	Perkiraan AKI Per 100.000 KH
Merauke	10	3698	270
Boven Digoel	7	1427	491
Mappi	4	1548	258

Kabupaten	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup (KH)	Perkiraan AKI Per 100.000 KH
Asmat	3	1834	164
Jumlah	24	8507	282

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

b. Pemeriksaan Kehamilan

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan menilai cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan kehamilan pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan K4 adalah pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali, dengan kriteria masing-masing 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama dan ke 2 serta 2 kali pemeriksaan pada trimester ke 3. Data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021 menunjukkan cakupan 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan untuk K1 sebesar 93,6% dan K4 sebesar 29,8%. Cakupan K4 Provinsi Papua Selatan ini jauh di bawah cakupan nasional tahun 2019 sebesar 88,5%.

Jika dilihat per kabupaten, Kabupaten Merauke memiliki jumlah ibu hamil paling banyak, dan juga cakupan K1 dan K4 tertinggi di antara 4 Kabupaten di Papua Selatan. Cakupan K1 dan K4 yang cukup rendah terdapat di Kabupaten Asmat. Terdapatnya angka cakupan di atas 100% menunjukkan adanya ketidaktepatan perkiraan jumlah ibu hamil sebagai target pelayanan ini. Tabel II.37 berikut menunjukkan informasi selengkapnya mengenai cakupan K1 dan K4.

Tabel II.507 Cakupan K1 dan K4 di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

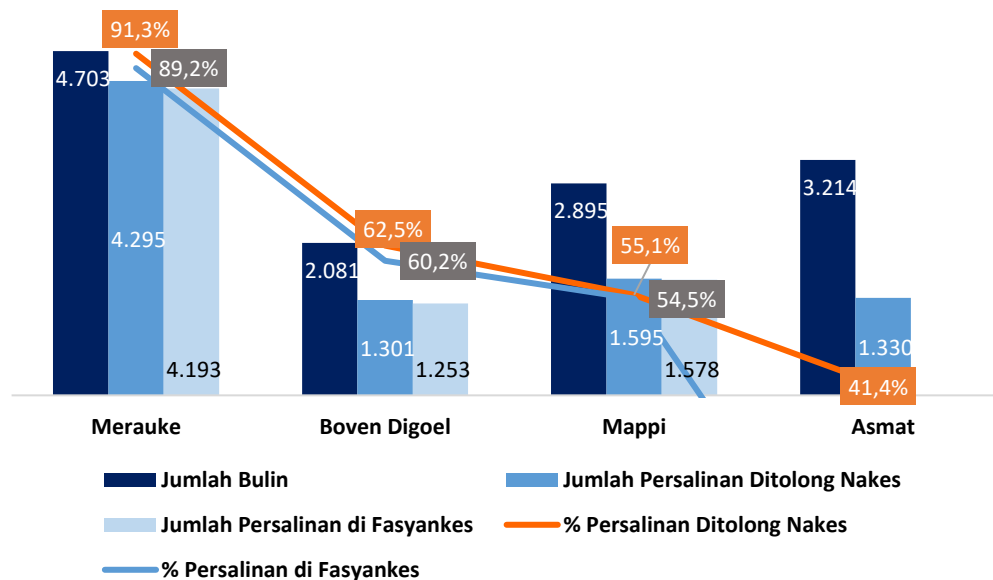
Kabupaten	Jumlah Ibu Hamil	K1		K4	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,924	5,041	102.4%	2,058	41.8%
Boven Digoel	2,180	2,091	95.9%	768	35.2%
Mappi	3,033	3,393	111.9%	583	19.2%
Asmat	3,367	2,121	63.0%	620	18.4%
Jumlah	13,504	12,646	93.6%	4,029	29.8%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

c. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Upaya lainnya dalam penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi adalah mendorong setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, dan bidan, serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Papua Selatan tahun 2021 cukup baik, yakni sebesar 66,1%, meskipun masih jauh di bawah target nasional sebesar 87%. Angka pertolongan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih rendah, yakni 54,5%.

Gambar II.44 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022



*Catatan: Data pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan untuk Kabupaten Asmat tidak valid sehingga tidak diperhitungkan

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Berdasarkan kabupaten, terdapat ketidaklengkapan data, namun informasi yang tersedia cukup menggambarkan kondisi pertolongan persalinan di 4 kabupaten di Papua Selatan. Terdapat perbedaan yang cukup tajam antara kabupaten Merauke dengan 3 kabupaten lainnya. Merauke memiliki cakupan pertolongan persalinan oleh nakes sebesar 91,3% dan dilakukan di fasilitas kesehatan sebesar 89,2%, sementara 3 kabupaten lainnya hanya mencapai paling tinggi 62,5% di antara kedua indikator tersebut. Gambar di atas menunjukkan perbedaan tersebut.

d. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Standar Pelayanan kesehatan ibu nifas dilakukan minimal tiga kali dengan jadwal yang dianjurkan, yakni pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF3). Pada tingkat provinsi, cakupan KF1, KF2 dan KF3 di 4 kabupaten se-Papua Selatan tahun 2021 berturut-turut 67,2%, 61,2% dan 54,5%. Data Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan pada tahun 2020 cakupan kunjungan nifas lengkap secara nasional 88,3%.

Capaian kunjungan nifas menurut kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut. Berdasarkan data dari Dinkes tersebut nampak bahwa Kabupaten Merauke memiliki cakupan Kunjungan Nifas Lengkap di atas 76,1%, sedangkan 3 kabupaten lainnya memiliki cakupan antara 31% hingga 54%.

Tabel II.51 Cakupan Kunjungan Nifas Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Bulin	KF1		KF2		KF3		Ibu Nifas dapat Vitamin A	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,703	4,300	91.4%	3,939	83.8%	3,580	76.1%	4,303	91.5%
Boven Digoel	2,081	1,358	65.3%	1,021	49.1%	657	31.6%	1,329	63.9%
Mappi	2,895	1,669	57.7%	1,149	39.7%	1,047	36.2%	872	30.1%
Asmat	3,214	1,337	41.6%	1,786	55.6%	1,748	54.4%	243	7.6%
Jumlah	12,893	8,664	67.2%	7,895	61.2%	7,032	54.5%	6,747	52.3%

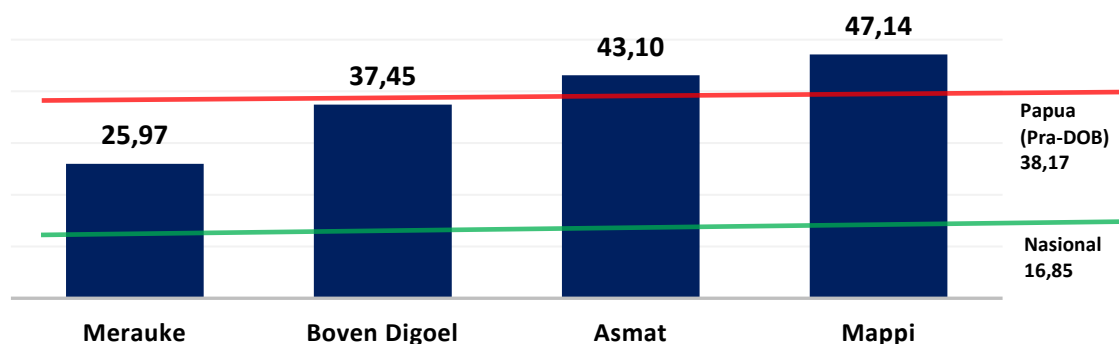
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

e. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator yang dapat menilai kondisi kesehatan masyarakat selain AKI. AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu tertentu. AKB Provinsi Papua Selatan dalam publikasi hasil Sensus Penduduk 2020 belum terpisah sebagai DOB, namun terdapat AKB untuk masing-masing kabupaten. Jika AKB 4 kabupaten dirataratakan, diperoleh angka Provinsi Papua Selatan sebesar 38,42 kematian per 1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka nasional (16,85), namun tidak jauh berbeda dengan AKB Provinsi Papua sebelum pemekaran.

Pemilahan berdasarkan kabupaten menunjukkan rentang AKB antara 25,97 (Kabupaten Merauke) hingga 47,14 (Kabupaten Mappi). Gambar II.66 di bawah ini menunjukkan AKB menurut kabupaten dibandingkan dengan angka nasional dan angka Provinsi Papua sebelum pembentukan DOB.

Gambar II.45 Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Hasil Sensus Penduduk 2020



Sumber: Long Form SP2020, BPS RI 2023 (diakses Mei 2025)

Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 diketahui bahwa penyebab kematian bayi terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, sepsis, diare, dan sebagian lainnya digolongkan sebagai “lain-lain”.

f. Kunjungan Neonatal

Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada masa neonatal (0-28 hari) antara lain dengan mengupayakan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Tabel II.52 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,349	3,983	91.6%	3,959	91.0%
Boven Digoel	1,605	1,452	90.5%	743	46.3%
Mappi	1,587	1,870	117.8%	999	62.9%
Asmat	1,877	662	35.3%	1,231	65.6%

Kabupaten	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah	9,418	7,967	84.6%	6,932	73.6%

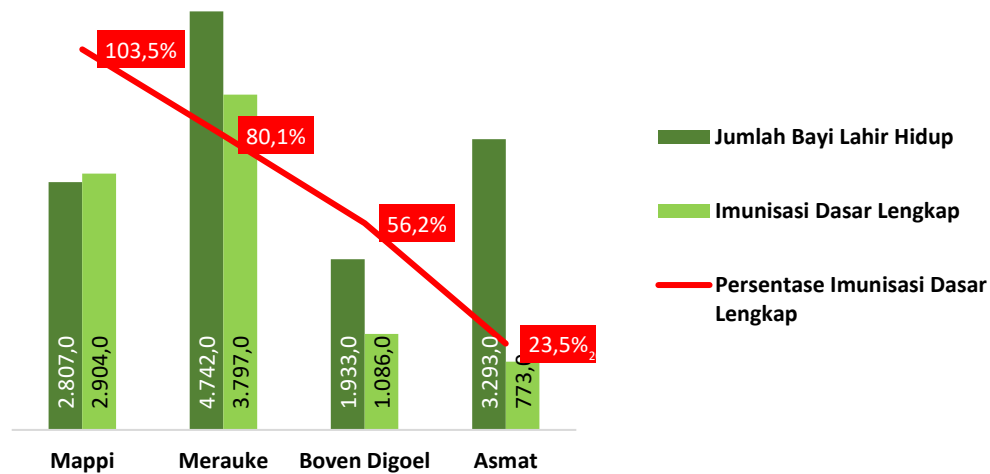
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Cakupan KN1 di 4 Kabupaten Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021 tergolong baik, yakni mencapai 84,6%, sedangkan cakupan KN3 sebesar 73,6%. Sebaran cakupan Kunjungan Neonatal berdasarkan kabupaten ditampilkan dalam tabel di atas yang menunjukkan bahwa cakupan KN1 dan KN3 yang tinggi mencapai di atas 90% terdapat di Kabupaten Merauke, serta K1 yang tinggi juga terdapat di Boven Digoel dan Mappi. Cakupan di Kabupaten Asmat tidak dapat dibandingkan karena ada ketidaksesuaian data yakni cakupan KN3 yang melebihi KN1. Adanya cakupan di atas 100% di Kabupaten Mappi menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah pembilang (jumlah lahir hidup).

g. Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak. Program imunisasi mewajibkan setiap bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak. Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan sebesar 56,7%. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 92,2%. Gambar berikut menunjukkan cakupan IDL yang dimaksud. Grafik tersebut menunjukkan 2 kabupaten di Papua Selatan memiliki cakupan IDL di atas 80%, meskipun ada kemungkinan kesalahan jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Mappi, sehingga memiliki cakupan di atas 100%.

Gambar II.46 Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Mengenai *Universal Child Immunization* (UCI), menurut Profil Kesehatan Papua 2022, di Provinsi Papua Selatan telah terdapat 32,52% kampung/kelurahan yang mencapai UCI. Yang dimaksud dengan kampung/kelurahan UCI adalah kampung dengan cakupan minimal 85% bayinya memperoleh imunisasi dasar lengkap. Secara nasional, capaian desa/kelurahan UCI adalah 59,2%. Pilahan per kabupaten menunjukkan rentang persentase Kampung/ kelurahan UCI antara 21,33% (Kabupaten Asmat) dan 44,51% (Kabupaten Mappi). Tabel II.40 di atas menunjukkan informasi selengkapnya.

Tabel II.53 Jumlah dan Persentase Kampung/ Kelurahan UCI Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

No.	Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Kampung/ Kelurahan UCI	% Kampung/ Kelurahan UCI
1	Merauke	192	78	40.63%
2	Boven Digoel	117	28	23.93%
3	Mappi	164	73	44.51%
4	Asmat	225	48	21.33%
Papua Selatan		698	227	32.52%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

h. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan balita meliputi antara lain pemantauan pertumbuhan (penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/ tinggi badan), Pemberian Makanan Tambahan dan pemberian kapsul

vitamin A. Berdasarkan data LPPD Provinsi Papua 2021, pelayanan Kesehatan Balita di 4 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan baru mencapai 23,4% di tahun 2021. Angka yang sangat rendah bahkan belum melebihi 10%, yakni di Kabupaten Boven Digoel, sementara capaian tertinggi di Kabupaten Merauke baru mencapai 30,9%, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel II.54 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2021

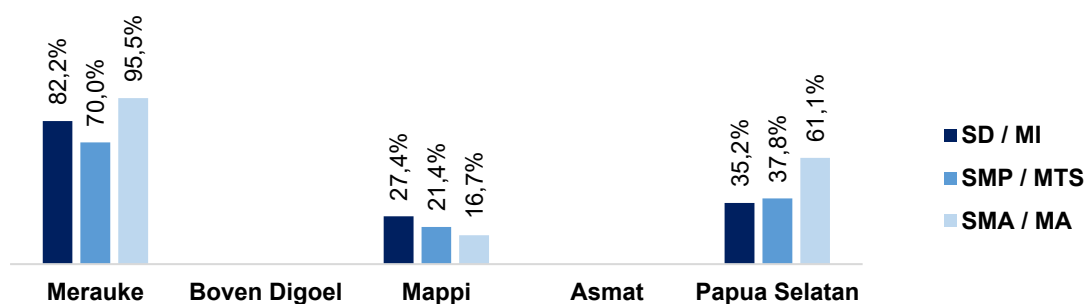
No	Kabupaten	Jumlah Balita			Pelayanan Kesehatan Balita					
					Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
		L	P	Total	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Merauke	10.640	10.711	21.351	3.330	31,3	3.266	15,3	6.596	30,9
2	Boven Digoel	3.264	3.498	6.762	306	9,4	267	3,9	573	8,5
3	Mappi	6.476	6.726	13.202	902	13,9	1.102	8,3	2.004	15,2
4	Asmat	7.164	7.496	14.660	1.767	24,7	2.159	14,7	3.926	26,8
Papua Selatan		27.544	28.431	55.975	6.305	22,9	6.794	12,1	13.099	23,4

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022

i. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan UKS merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Gambar II.47 Persentase Sekolah dengan Pelayanan Kesehatan Sekolah Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

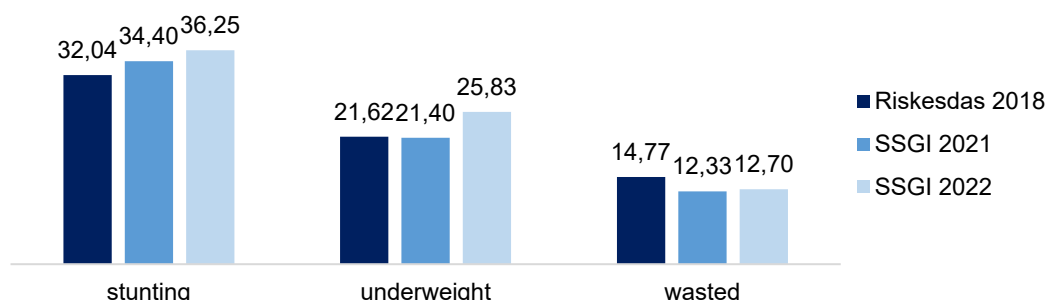
Tidak terdapat laporan yang lengkap mengenai cakupan sekolah di Provinsi Papua Selatan yang mendapat pelayanan kesehatan peserta

didik dalam periode tahun 2018-2022. Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 menampilkan data dari 2 kabupaten saja, yakni Kabupaten Merauke dan Mappi. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang lebar antara cakupan Kabupaten Merauke dan Mappi dalam ke-3 jenjang sekolah. Dari 2 kabupaten yang tersedia datanya, wilayah Provinsi Papua Selatan masih memiliki cakupan yang rendah, yakni mencakup 35,2% untuk tingkat SD/MI, 37,8% tingkat SMP/MTs dan 61,1% tingkat SMA/ MA. Gambar di atas menampilkan cakupan pelayanan kesehatan sekolah di masing-masing kabupaten pada tahun 2021.

j. Gizi

Data mengenai kondisi gizi anak di 4 kabupaten Provinsi Papua Selatan yang dijadikan acuan dalam pembahasan ini adalah hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI tahun 2021 dan 2022. Perbandingan kondisi gizi dari tahun ke tahun berdasarkan ke-3 survey ini menunjukkan bahwa kondisi gizi balita di Provinsi Papua Selatan tidak membaik dalam 4 tahun terakhir. Terjadi peningkatan angka rata-rata kabupaten baik untuk balita dengan berat badan kurang (underweight) maupun tinggi badan kurang (stunting).

Gambar II.48 Persentase Balita Stunting, Underweight dan Wasted di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022

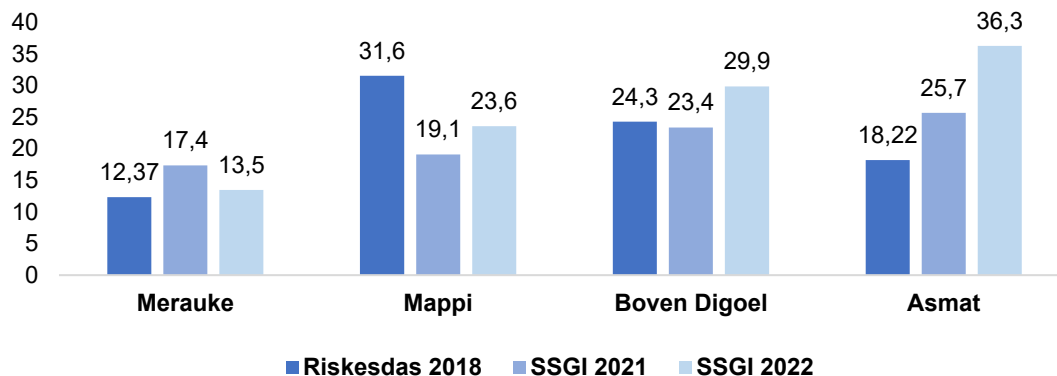


Sumber: Riskesdas 2018, SSGI 2021 dan 2022

Gambar di atas menunjukkan prevalensi balita pendek berdasarkan TB/U, balita kurang berat badan berdasarkan BB/U dan balita kurus berdasarkan BB/TB tahun 2018, 2021 dan 2022. Secara rata-rata kabupaten, nampak bahwa persentase balita dengan masalah gizi cenderung meningkat menggunakan ke-3 indeks pengukuran atatus gizi,

Mengenai stunting, berdasarkan SSGI 2022 didapatkan angka rata-rata kabupaten untuk balita stunting sebesar 36,3%. Angka rata-rata kabupaten ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 32,0% (Hasil Riskesdas 2018) dan 34,4% (SSGI 2021). Kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Asmat memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi (54,5%) di tahun 2022. Uraian mengenai stunting ini diuraikan di muka pada Sub Bab 2.1.2.2.B Fokus Kesehatan.

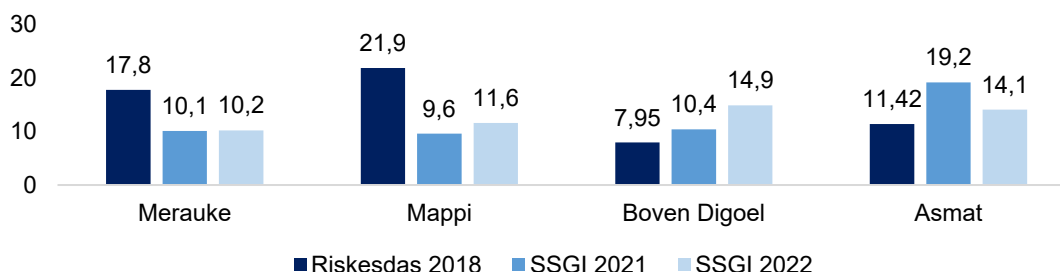
Gambar II.49 Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk (underweight) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022



Sumber: Riskesdas 2018, SSGI 2021 dan 2022

Kondisi yang serupa juga terjadi pada hasil pengukuran status gizi berdasarkan BB/U, untuk menentukan gizi kurang dan gizi buruk pada balita (*underweight*). Secara rata-rata kabupaten, prevalensi balita *underweight* pada tahun 2018, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, yakni berturut-turut 21.62%, 21.40% dan 25.83%. Gambar II.71 berikut menampilkan prevalensi balita *underweight* berdasarkan kabupaten.

Gambar II.50 Persentase Balita Kurus (Wasted) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022



Sumber: Riskesdas 2018, SSGI 2021 dan 2022

Pengukuran status gizi berdasarkan indeks BB/TB atau balita kurus (*wasted*) menunjukkan persentase yang lebih rendah dibandingkan 2 indeks pengukuran lainnya. Berturut-turut pada tahun 2018, 2021 dan 2022 prevalensi balita kurus di rata-rata kabupaten di Provinsi Papua selatan adalah 14.77%, 12.33% dan 12.70%. Dengan indeks pengukuran ini, Kabupaten Mappi pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi tertinggi. Gambar di atas menunjukkan perbandingan antar kabupaten mengenai prevalensi balita kurus tersebut.

7) Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

a. Tuberkulosis (TBC)

Provinsi Papua Selatan menunjukkan hasil yang beragam dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2024. Secara keseluruhan, provinsi ini berhasil mencapai angka penemuan kasus TBC sebesar 4,0% dengan tingkat keberhasilan pengobatan 3,00%. Namun, pencapaian ini menyimpan variasi yang signifikan di tingkat kabupaten. Kabupaten Merauke menonjol dengan tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 977%, meskipun angka penemuannya relatif rendah (1,30%). Di sisi lain, Boven Digoel menunjukkan angka penemuan yang tinggi (483%) tetapi tingkat keberhasilan pengobatan yang lebih rendah (315%). Kabupaten Mappi dan Asmat masing-masing mencatat angka 1,70% dan 530% untuk penemuan kasus, dengan tingkat keberhasilan pengobatan 1,50% dan 261%.

Tabel II.55 Angka Penemuan dan Pengobatan TBC (%) Tahun 2024

Kabupaten	Angka Penemuan dan Pengobatan TBC	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC
Merauke	1,30	977
Boven Digoel	483	315
Mappi	1,70	1,50
Asmat	530	261
Papua Selatan	4,0	3,00

Sumber: Provinsi Papua Dalang Angka, 2025

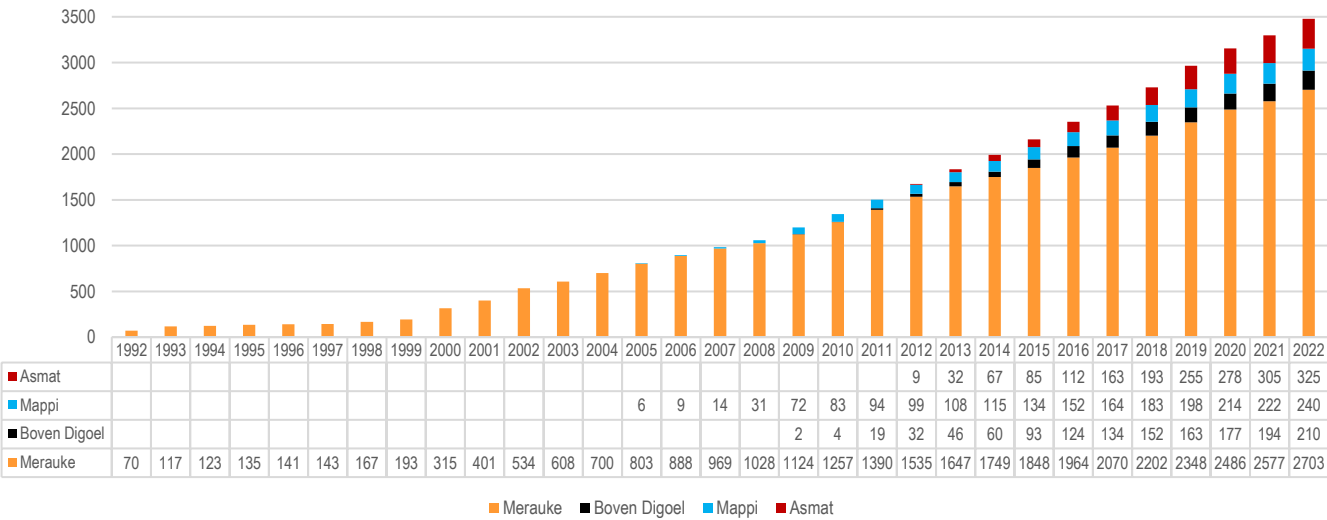
b. HIV-AIDS

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua menunjukkan hingga akhir tahun 2022 di wilayah Provinsi Papua Selatan secara kumulatif telah tercatat 2703 kasus HIV-AIDS. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten pertama di Papua yang melaporkan kasus AIDS di tahun 1992.

Sementara kabupaten lain baru melaporkan kasus-kasus pertama pada tahun 2005 (Mappi), 2009 (Boven Digoel) dan 2012 (Asmat).

Pada tahun 2021, ODHA yang sedang dalam pengobatan ARV di Papua Selatan mencakup 58,0%, dengan angka tertinggi di Kabupaten Merauke; 81,4%. Kabupaten Asmat menduduki urutan terbawah dengan cakupan ODHA dengan pengobatan ARV hanya 11,6%. Sedangkan Kabupaten Boven Digoel dan Mappi masing-masing mencapai angka 28,4% dan 21,9%. Perkembangan kasus HIV-AIDS di Provinsi Papua Selatan sejak tahun 1992 hingga 2022 ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar II.51 Perkembangan Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS di Papua Selatan, 1992-2022



Sumber: Unit Pelaksana Teknis AIDS Tuberkulosis Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan 2023

Provinsi Papua Selatan menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan ditemukannya 168 kasus baru AIDS sepanjang tahun 2024. Data menunjukkan konsentrasi kasus tertinggi berada di Kabupaten Merauke dengan 115 kasus (68,5% dari total kasus provinsi), diikuti oleh Mappi (30 kasus) dan Asmat (21 kasus). Sementara itu, Kabupaten Boven Digoel mencatat kasus terendah dengan hanya 2 kasus.

Tabel II.56 Jumlah Kasus Baru AIDS Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Kasus Baru AIDS
Merauke	115
Boven Digoel	2

Kabupaten	Jumlah Kasus Baru AIDS
Mappi	30
Asmat	21
Papua Selatan	168

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2025

c. Pnemonia

Pnemonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh virus, jamur dan bakteri. Program pengendalian pnemonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pnemonia balita, yang ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pnemonia pada balita. Cakupan penemuan pnemonia pada balita di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 34,8% dari angka perkiraan kasus (3,55% dari jumlah balita). Tidak tersedia data yang lengkap untuk Provinsi Papua Selatan. Data LPPD Provinsi Papua 2021 menampilkan data 2 kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel dengan cakupan penemuan kasus masing-masing sebesar 34% dan 5%.

d. Diare

Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Secara nasional, pada tahun 2020 cakupan pelayanan penderita diare pada balita sebesar 28,9% dari sasaran yang ditetapkan. Sedangkan capaian provinsi Papua Selatan untuk balita cukup baik yakni sebesar 39,8%. Sementara untuk pelayanan pada semua umur, papua Selatan mencapai 15,1%. Tabel berikut menunjukkan cakupan pelayanan diare berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021.

Tabel II.57 Cakupan Pelayanan Kasus Diare Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Target Penemuan Kasus		Pelayanan Balita		Pelayanan Semua Umur	
	Balita	Semua Umur	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	3,600	23,520	791	22.0%	1,823	7.8%
Boven Digoel	1,140	7,002	834	73.2%	1,699	24.3%
Mappi	2,226	10,161	981	44.1%	2,185	21.5%
Asmat	2,472	10,135	1,149	46.5%	1,958	19.3%
Papua Selatan	9,438	50,818	3,755	39.8%	7,665	15.1%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022

e. Malaria

Provinsi Papua Selatan menghadapi beban malaria yang cukup berat dengan angka kesakitan rata-rata sebesar 96,26 kasus per 1.000 penduduk pada tahun 2024. Data kabupaten menunjukkan variasi yang sangat signifikan dalam tingkat penularan malaria. Kabupaten Asmat mencatat angka tertinggi (193,08 kasus/1.000 penduduk), disusul oleh Boven Digoel (183,25 kasus/1.000 penduduk) dan Mappi (105,19 kasus/1.000 penduduk). Sementara itu, Merauke menunjukkan angka yang relatif lebih rendah (18,88 kasus/1.000 penduduk).

Tabel II.58 Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2024

Kabupaten	Angka Kesakitan Malaria
Merauke	18,88
Boven Digoel	183,25
Mappi	105,19
Asmat	193,08
Papua Selatan	96,26

Sumber: Provinsi Papua Dalang Angka, 2025

f. Penyakit Tidak Menular (PTM)

Data mengenai PTM di Provinsi Papua Selatan tidak tersedia secara lengkap. LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 menampilkan data mengenai cakupan pelayanan penderita Hipertensi, Diabetes Mellitus dan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat hanya pada 2 kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel. Berikut data yang dapat menjadi gambaran tentang situasi pelayanan PTM di Provinsi Papua Selatan:

1. Penderita Hipertensi yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus Hipertensi Berusia ≥ 15 Tahun:
 - a) Kabupaten Merauke: 84,66%

- b) Kabupaten Boven Digoel: 81,39%
- 2. Penderita Diabetes Melitus yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus:
 - a) Kabupaten Merauke: 44,58%
 - b) Kabupaten Boven Digoel: 41,88%
- 3. Penderita ODGJ Berat yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus:
 - a) Kabupaten Merauke: 87,55%
 - b) Kabupaten Boven Digoel: 48,98%

8) Kesehatan Lingkungan

a. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Upaya yang dilakukan adalah mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 285 dari 324 kabupaten/kota yang ditargetkan dapat menerapkan KTR, atau baru 54,3% dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Papua Selatan sendiri penerapan KTR ini belum berjalan dengan baik.

b. Tempat Tempat Umum (TTU)

Yang dimaksud dengan TTU adalah tempat-tempat umum yang mencakup Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Tempat Ibadah, Pasar dan sebagainya. Upaya Kesehatan yang dijalankan adalah dengan pembinaan TTU agar memenuhi syarat-syarat kesehatan. Di wilayah provinsi Papua Selatan, Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022 hanya menampilkan data tentang persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan dari 3 kabupaten, antara lain: Merauke 79,9%, Boven Digoel 57,3% dan Mappi 5,2%. Angka-angka ini menunjukkan upaya kesehatan lingkungan ini belum menunjukkan capaian yang tinggi.

c. Kabupaten/Kota Sehat

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 111 kabupaten/kota (21,6%). Jumlah ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu 110 KKS.

Sedangkan sebanyak 22 Provinsi hingga tahun 2020 belum menyelenggarakan KKS, termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

9) Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang membagi kepesertaan JKN menjadi 2 kelompok, yaitu (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari oleh pemerintah. (2) Bukan PBI jaminan kesehatan, yang terdiri dari Pekerja maupun Non Pekerja beserta keluarganya.

Data mengenai kepesertaan JKN ini tidak tersedia secara lengkap untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 hanya menampilkan data dari 2 kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel, dengan masing-masing cakupan JKN sebesar 109,6% dan 114,5%. Dari keseluruhan peserta itu, sebagian besar merupakan peserta PBI, yakni 85,5% di Kabupaten Merauke dan 86,4% di Kabupaten Boven Digoel.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Provinsi Papua Selatan menunjukkan kemajuan dalam pembangunan literasi masyarakat, dengan Indeks Pembangunan Literasi meningkat dari 42,38 pada tahun 2023 menjadi 49,78 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program literasi yang dijalankan di tingkat provinsi. Secara kabupaten, capaian tersebut didukung oleh peningkatan signifikan di Mappi (dari 30,67 menjadi 45,64) dan Asmat (dari 36,76 menjadi 44,78), yang menunjukkan efektivitas intervensi literasi di wilayah-wilayah tersebut. Namun, terdapat penurunan di Merauke (dari 48,30 menjadi 37,78) dan Boven Digoel (dari 53,79 menjadi 33,65), yang perlu menjadi perhatian khusus.

Tabel II.59 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Papua Selatan Tahun 2023-2024

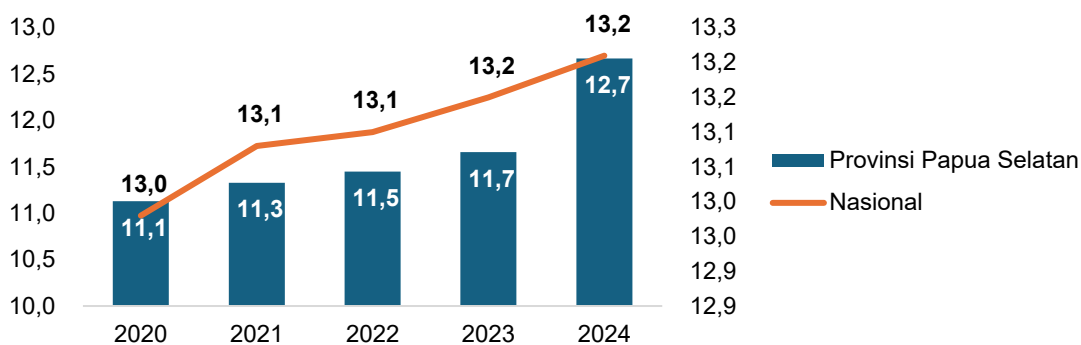
Kabupaten/Provinsi	2023	2024
Merauke	48,30	37,78
Boven Digoel	53,79	33,65
Mappi	30,67	45,64
Asmat	36,76	44,78
Papua Selatan	42,38	49,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2025

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 11,1 tahun pada 2020 menjadi 12,7 tahun pada 2024. Meskipun demikian, capaian ini masih di bawah rata-rata nasional, yang juga mengalami kenaikan dari 12,9 tahun (2020) menjadi 13,2 tahun (2024). Tren kenaikan HLS di Papua Selatan mencerminkan upaya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan, meski tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari angka nasional masih perlu menjadi fokus pembangunan di Papua Selatan.

Gambar II.52 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Provinsi Papua Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

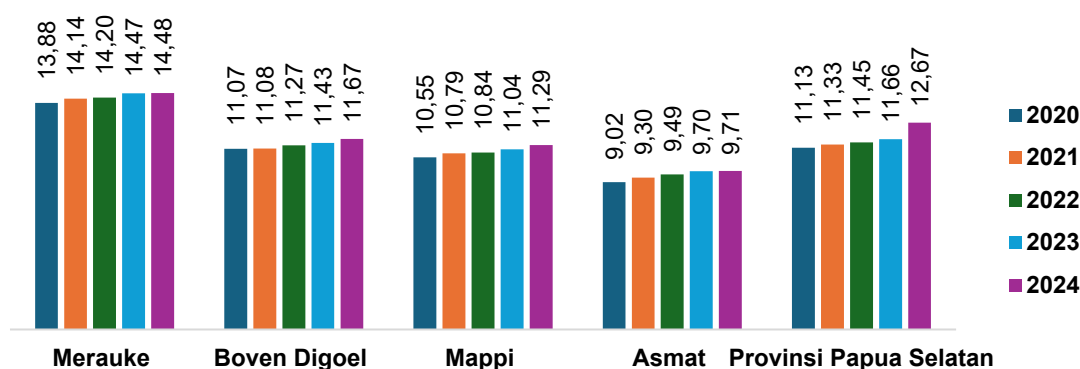


*Catatan: Angka Provinsi Tahun 2020-2023 menggunakan angka rata-rata Kabupaten
Sumber: BPS, 2025

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang bervariasi antar kabupaten pada periode 2020-2024. Kabupaten Merauke mencatat capaian tertinggi, meningkat dari 13,88 tahun (2020) menjadi 14,48 tahun (2024), melampaui rata-rata provinsi. Sementara itu, Kabupaten Boven Digoel dan Mappi juga mengalami kenaikan, masing-masing dari 11,07 tahun menjadi 11,67 tahun dan dari 10,55 tahun menjadi 11,29 tahun. Di sisi lain, Kabupaten Asmat memiliki angka terendah, meskipun meningkat dari 9,02 tahun menjadi 9,71 tahun, masih jauh di bawah rata-rata provinsi (12,67 tahun pada 2024).

Secara keseluruhan, HLS Provinsi Papua Selatan naik dari 11,13 tahun (2020) menjadi 12,67 tahun (2024), mencerminkan kemajuan di sebagian besar wilayah. Namun, disparitas antar kabupaten khususnya ketertinggalan Asmat menunjukkan perlunya intervensi khusus untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal.

Gambar II.53 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2020-2024

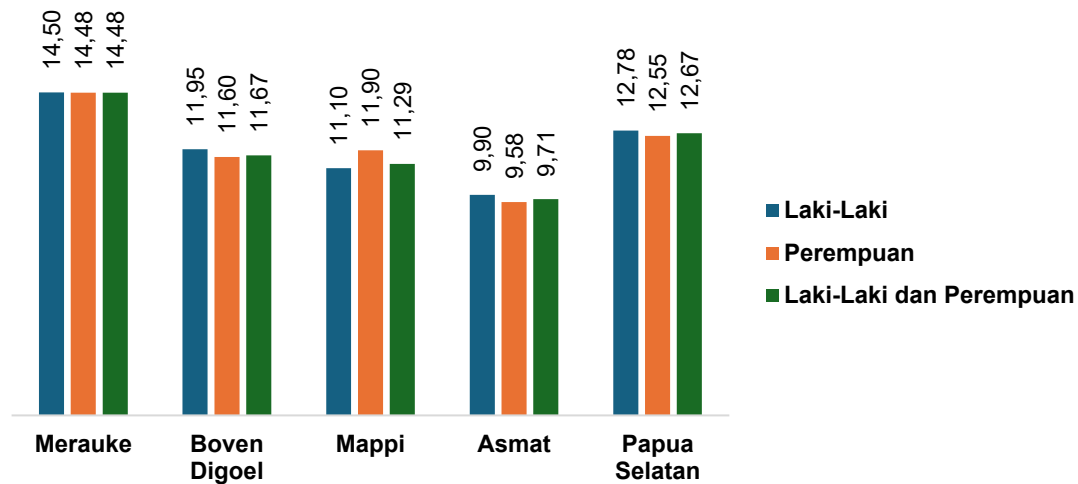


*Catatan: Angka Provinsi Tahun 2020-2023 menggunakan angka rata-rata Kabupaten
Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2024, disparitas Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) antarjenis kelamin terlihat di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke mencatat kesetaraan yang hampir sempurna antara laki-laki (14,50 tahun) dan perempuan (14,48 tahun). Sementara itu, Kabupaten Boven Digoel menunjukkan HLS laki-laki lebih tinggi (11,95 tahun) dibandingkan perempuan (11,60 tahun). Pola sebaliknya terjadi di Kabupaten Mappi, di mana perempuan memiliki HLS lebih tinggi (11,90 tahun) daripada laki-laki (11,10 tahun). Kabupaten Asmat tetap menjadi wilayah dengan capaian terendah, meskipun HLS laki-laki (9,90 tahun) sedikit lebih tinggi daripada perempuan (9,58 tahun).

Secara keseluruhan, HLS Provinsi Papua Selatan untuk laki-laki (12,78 tahun) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (12,55 tahun), dengan rata-rata gabungan mencapai 12,67 tahun. Data ini mengindikasikan perlunya pendekatan berbasis gender dan wilayah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah dengan ketimpangan signifikan seperti Mappi dan Asmat.

Gambar II.54 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2024

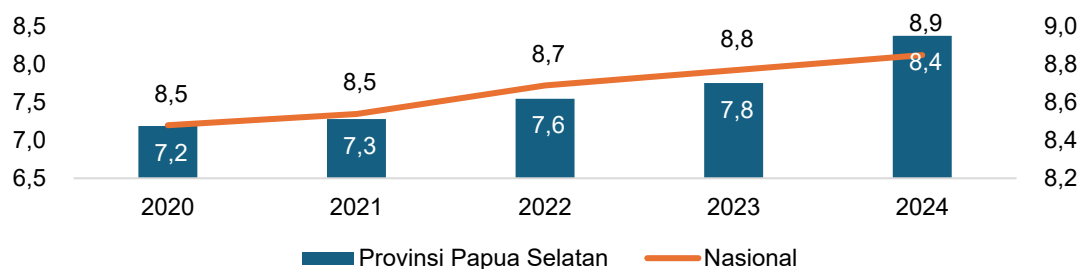


Sumber: BPS, 2025.

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Selama periode 2020-2024, Provinsi Papua Selatan menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. RLS di Papua Selatan meningkat dari 7,2 tahun pada 2020 menjadi 8,4 tahun pada 2024, mencerminkan kemajuan dalam perluasan akses pendidikan. Namun, capaian ini masih tertinggal dibandingkan dengan angka nasional yang juga mengalami kenaikan dari 8,5 tahun (2020) menjadi 8,9 tahun (2024). Perbedaan antara Papua Selatan dan nasional menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, tren positif di Papua Selatan mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pendidikan mulai membuahkan hasil.

Gambar II.55 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Provinsi Papua Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

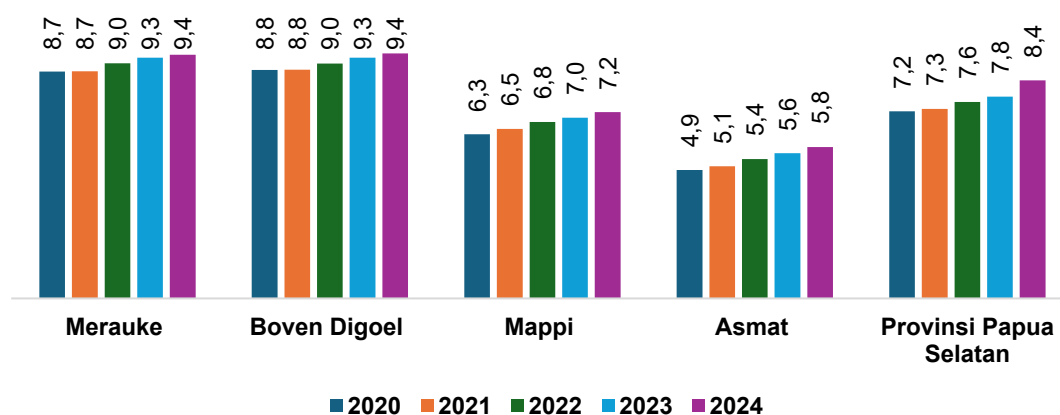


*Catatan: Angka Provinsi Tahun 2020-2023 menggunakan angka rata-rata Kabupaten
Sumber: BPS, 2025

Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang beragam dalam Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) antar kabupaten selama lima tahun terakhir. Kabupaten Merauke dan Boven Digoel memimpin dengan capaian tertinggi, dimana Merauke meningkat dari 8,7 tahun (2020) menjadi 9,3 tahun (2024), sementara Boven Digoel dari 8,7 tahun menjadi 9,4 tahun - keduanya melampaui rata-rata provinsi (8,3 tahun).

Kabupaten Mappi menunjukkan pertumbuhan stabil dari 6,3 tahun menjadi 7,1 tahun, meski masih di bawah standar provinsi. Kabupaten Asmat menjadi wilayah dengan RLS terendah meskipun ada peningkatan dari 4,94 tahun 2020 menjadi 5,8 tahun 2024 tertinggal jauh dari kabupaten lain.

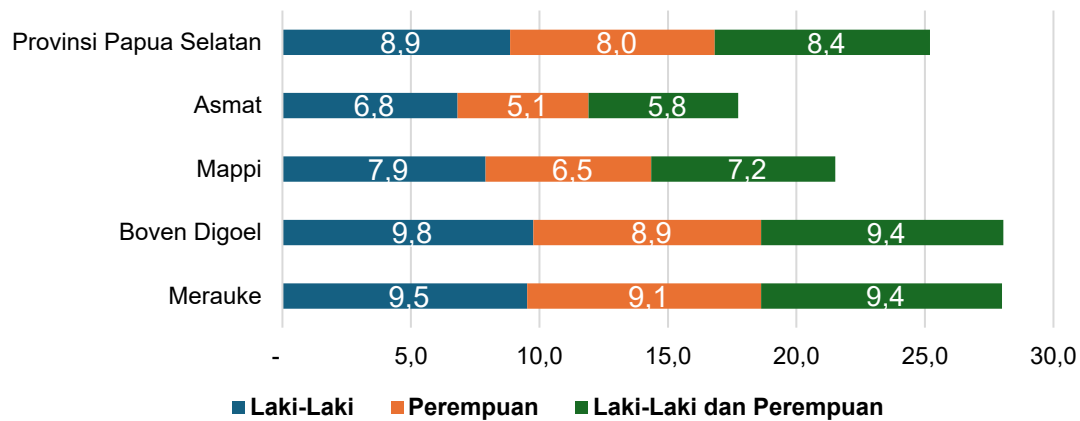
Gambar II.56 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Papua Selatan, 2020-2024



*Catatan: Angka Provinsi Tahun 2020-2023 menggunakan angka rata-rata Kabupaten
Sumber: BPS, 2025

Pada 2024, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Papua Selatan menunjukkan ketimpangan gender yang mencolok. Laki-laki secara konsisten memiliki RLS lebih tinggi dibanding perempuan di semua kabupaten, dengan selisih terbesar di Asmat (6,8 tahun dibanding 5,1 tahun) dan Mappi (7,9 tahun dibanding 6,5 tahun). Boven Digoel mencatat RLS tertinggi untuk laki-laki (9,8 tahun), sementara perempuan di Asmat memiliki capaian terendah (5,1 tahun). Secara rata-rata provinsi, RLS laki-laki (8,9 tahun) unggul 0,9 tahun dibanding perempuan (8,0 tahun). Data ini menguatkan perlunya intervensi berbasis gender untuk mengurangi kesenjangan, khususnya di daerah tertinggal.

Gambar II.57 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2024

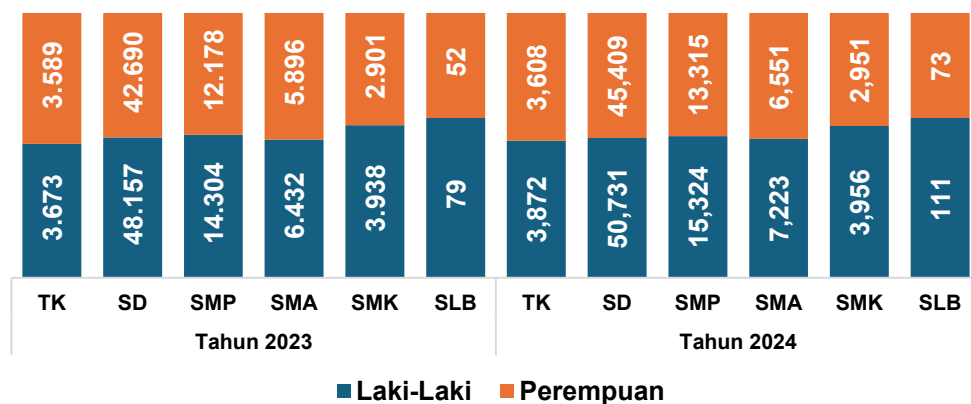


Sumber: BPS, 2025

4) Partisipasi Sekolah

Pada tahun 2023-2024, Provinsi Papua Selatan mencatat peningkatan jumlah peserta didik di hampir semua jenjang pendidikan. Untuk laki-laki, jumlah peserta didik meningkat dari 3.673 (TK) menjadi 3.872, 48.157 (SD) menjadi 50.731, dan 14.304 (SMP) menjadi 15.324. Sementara itu, perempuan juga mengalami kenaikan dari 3.589 (TK) menjadi 3.608, 42.690 (SD) menjadi 45.409, dan 12.178 (SMP) menjadi 13.315. Peningkatan serupa terlihat di jenjang SMA, SMK, dan SLB, meskipun dengan proporsi yang lebih rendah. Data ini menunjukkan kemajuan dalam pemerataan akses pendidikan bagi kedua gender di provinsi Papua Selatan.

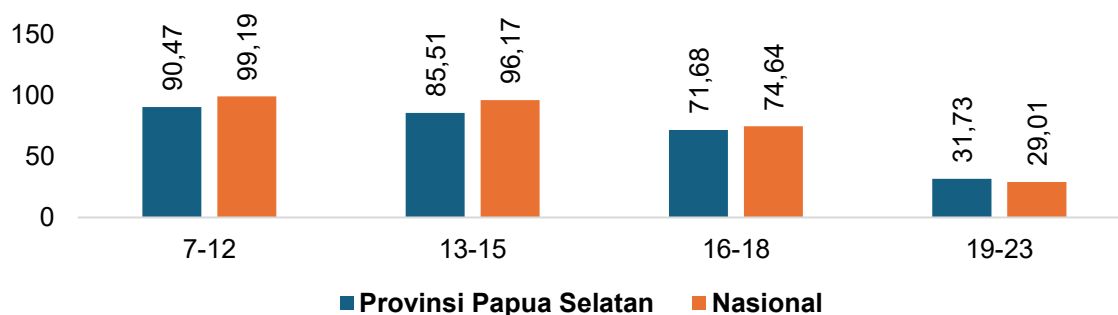
Gambar II.58 Perkembangan Jumlah Peserta Didik dan Proporsi Gender pada Tiap Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2024



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapodik.kemdikbud.go.id/>

Pada tahun 2024, Provinsi Papua Selatan menunjukkan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang bervariasi menurut kelompok umur. Untuk kelompok usia 7-12 tahun, APS mencapai 90,47%, sementara nasional berada di 99,19%. Pada usia 13-15 tahun, APS provinsi ini sebesar 85,51%, lebih rendah dibandingkan nasional (96,17%). Di kelompok 16-18 tahun, gap sedikit menyempit dengan APS 71,68% (Papua Selatan) berbanding 74,64% (nasional). Namun, untuk usia 19-23 tahun, Papua Selatan justru mencatat APS lebih tinggi (31,73%) dibanding rata-rata nasional (29,01%). Data ini mengindikasikan tantangan khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekaligus potensi di pendidikan tinggi.

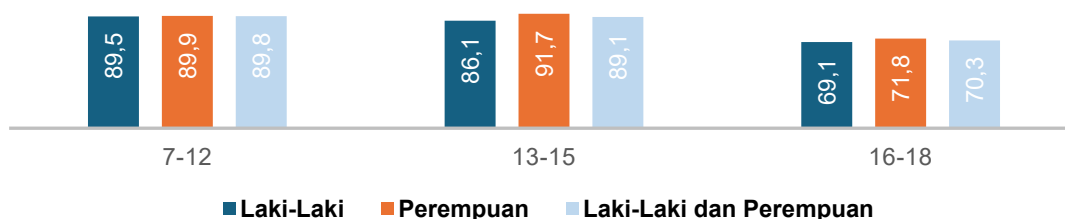
Gambar II.59 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Papua Selatan Menurut Kelompok Umur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2024

Sedangkan data APS berdasarkan kabupaten terpilah gender tahun 2022 menunjukkan bahwa perbedaan APS antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh, namun APS perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada semua kelompok umur. APS berdasarkan jenis kelamin dan rata-rata di 4 kabupaten ditunjukkan pada Gambar II.60.

Gambar II.60 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Pemilahan APS terpilah jender berdasarkan kabupaten ditampilkan pada Tabel II.60. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa APS pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di beberapa kabupaten, terutama pada kelompok umur 13-15 tahun.

Tabel II.60 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2022

Kabupaten	APS per Kelompok Umur Berdasarkan Gender								
	7-12			13-15			16-18		
	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
Merauke	95.6	94.6	95.1	96.0	98.4	97.0	87.3	90.8	89.0
Mappi	94.2	92.6	93.5	80.7	93.2	88.0	60.8	60.2	60.5
Asmat	77.7	78.5	78.1	76.5	77.8	77.2	58.3	54.1	56.0
Boven Digoel	90.7	94.1	92.4	91.1	97.2	94.0	70.1	82.1	75.8
Rata-Rata Kab.	89.5	89.9	89.8	86.1	91.7	89.1	69.1	71.8	70.3

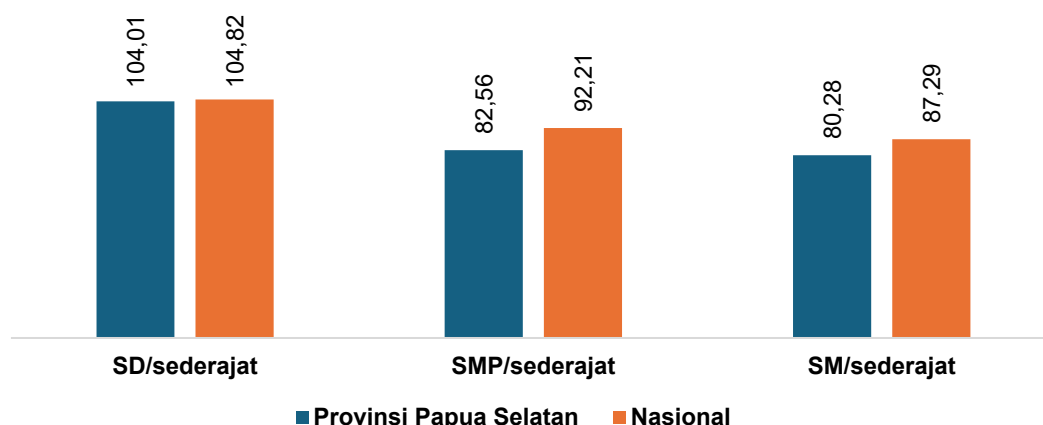
Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

5) Angka Partisipasi Kasar

Tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Papua Selatan menunjukkan capaian yang beragam di berbagai jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD/ sederajat, APK Papua Selatan mencapai 104,01, sedikit lebih rendah dibandingkan angka nasional yang berada di 104,82. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi pendidikan dasar di Papua Selatan sudah mendekati rata-rata nasional, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Di jenjang SMP/ sederajat, APK Provinsi Papua Selatan tercatat sebesar 82,56, lebih rendah secara signifikan dibandingkan capaian nasional (92,21). Selisih hampir 10 poin ini menunjukkan adanya tantangan dalam akses dan daya tampung pendidikan menengah pertama di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk jenjang SM/ sederajat, APK Papua Selatan mencapai 80,28, juga di bawah angka nasional (87,29).

Gambar II.61 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Papua Selatan Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2024



Sumber: BPS, 2025

Dari gambar dan tabel tersebut, nampak bahwa APK pada jenjang SD makin menurun hingga ke jenjang SMA, namun jika dipilah per kabupaten, tidak selalu terjadi penurunan itu pada beberapa jenjang. Angka di atas 100% pada APK menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peserta didik pada jenjang tersebut yang usianya di luar usia sekolah pada jenjang ini.

Tabel II.61 APK Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

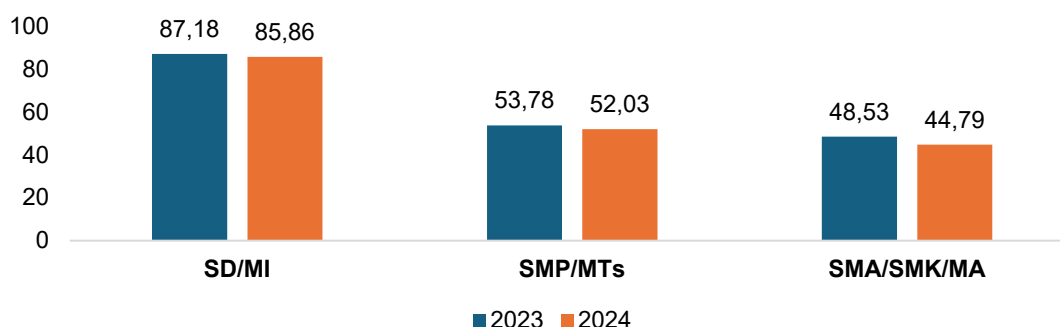
Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Merauke	120.48	106.17	113.14	92.82	122.1	105.37	124.29	108.27	116.58
Mappi	110.74	114.28	112.29	97.6	86.07	90.86	60.24	75.57	66.81
Asmat	97.63	98.66	98.1	49.04	72.68	62.33	79.51	55.43	66.18
Boven Digoel	99.98	99.88	99.93	91.15	121.35	105.6	67.14	71.37	69.17
Rata-Rata	107.21	104.75	105.87	82.65	100.55	91.04	82.795	77.66	79.685

Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

6) Angka Partisipasi Murni

Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan partisipasi pendidikan di semua jenjang selama periode 2023-2024. Pada jenjang SD/MI, APM menurun dari 87,18% menjadi 85,86%. Di tingkat SMP/MTs terjadi penurunan dari 53,78% ke 52,03%, sementara di SMA/SMK/MA penurunannya lebih signifikan dari 48,53% menjadi 44,79%.

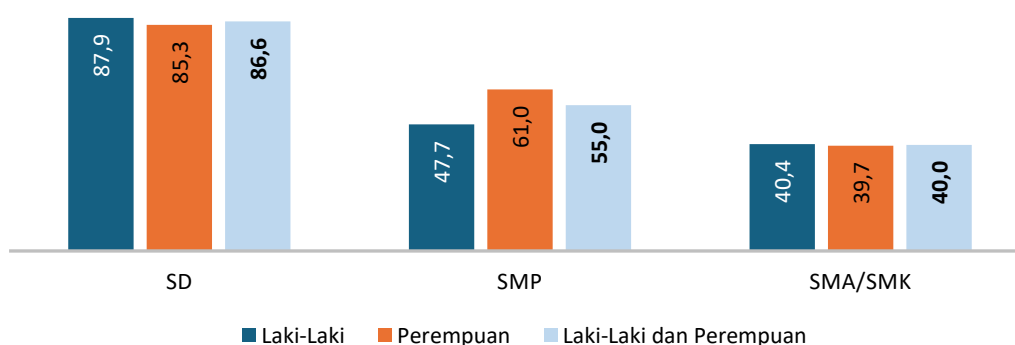
Gambar II.62 Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua Selatan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Perbandingan APM antar kabupaten tahun 2022 menunjukkan pola yang sama yakni APM yang makin rendah dengan makin tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI semua kabupaten menunjukkan angka yang tinggi, dengan capaian paling rendah sebesar 76,95% di Kabupaten Asmat. Terjadi penurunan yang cukup tajam yang sama di semua kabupaten yakni dari jenjang SD ke SMP dan dari SMA ke Perguruan Tinggi. Tabel II.62 menunjukkan perbandingan APM antar kabupaten pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2022.

Gambar II.63 Rata-Rata APM dari 4 Kabupaten berdasarkan jenis Kelamin pada Tiap Jenjang Pendidikan, di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Tabel II.62 APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

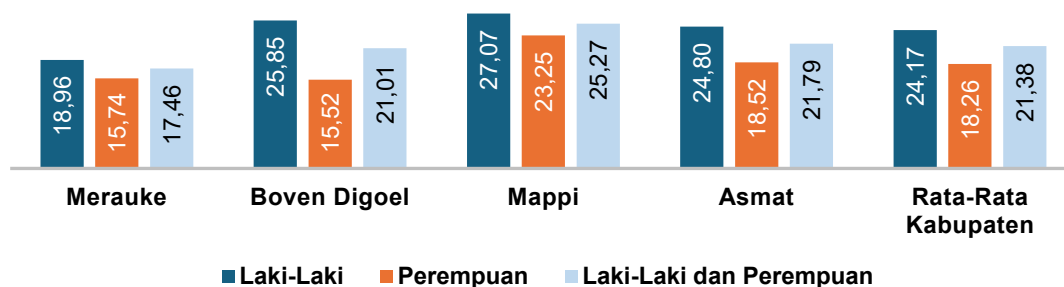
Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Merauke	94.14	87.54	90.75	66.42	68.92	67.49	74.18	55.6	65.24
Mappi	92.31	90.92	91.7	42.76	56.44	50.75	27.73	33.63	30.64
Asmat	77.57	76.20	76.95	19.04	48.02	35.33	30.27	26.93	28.42
Boven Digoel	87.58	86.63	87.11	62.75	70.62	66.51	29.31	42.82	35.77
Rata-Rata Kabupaten	87.90	85.32	86.63	47.74	61.00	55.02	40.37	39.75	40.02

Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

7) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Dengan tidak adanya data terpilah kabupaten mengenai Angka Putus Sekolah, digunakan persentase penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yang tidak bersekolah lagi. Kelemahannya persentase ini tidak bisa memilah keputussekolahan pada masing-masing jenjang pendidikan. Gambar di bawah menunjukkan Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi. Dari Gambar II.64 diketahui bahwa persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Pola itu serupa di semua kabupaten dan paling tinggi angkanya di Kabupaten Mappi.

Gambar II.64 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

8) Akreditasi Sekolah

Mengenai sekolah terakreditasi, Data Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah menunjukkan jumlah sekolah yang telah terakreditasi pada penilaian hingga tahun 2022 di wilayah Provinsi Papua Selatan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel II.75 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada SMK di Provinsi Papua Selatan, 2024. Data BANSM Kemendikbud tersebut menunjukkan bahwa persentase sekolah terakreditasi cukup baik untuk tingkat SMP dan SMA (di atas 90%). Jika dipilah per kabupaten, nampak bahwa proporsi sekolah terakreditasi relatif rendah di Kabupaten Asmat dan Boven Digoel.

Tabel II.63 Proporsi Sekolah Terakreditasi menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Selatan, 2023

Kabupaten	SD			SMP			SMA			SMK		
	Jumlah sekolah	Jumlah	%ase	Jumlah sekolah	Jumlah	%ase	sekolah	Jumlah	%ase	sekolah	jumlah	%ase
Merauke	208	203	98%	60	59	98%	22	22	100%	16	16	100%
Mappi	164	121	74%	28	26	93%	6	6	100%	4	3	75%
Asmat	136	88	65%	4	2	50%	4	4	100%	1	1	100%
Boven Digoel	106	83	78%	20	18	90%	4	3	75%	5	2	40%
Papua Selatan	614	495	81%	112	105	94%	36	35	97%	26	22	85%

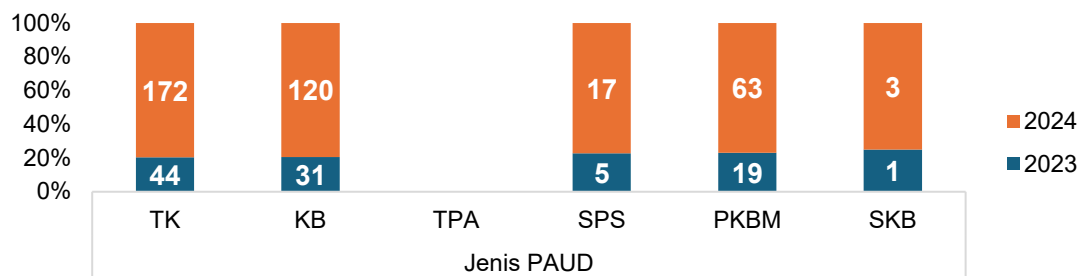
Sumber: Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah 2022 – BANSM kemdikbud.go.id

9) Perkembangan Satuan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan data perkembangan jumlah PAUD menurut jenis di Papua Selatan tahun 2023-2024, capaian tertinggi pada tahun 2023 adalah TK

dengan jumlah 44 lembaga, diikuti oleh KB dengan 31 lembaga, PKBM dengan 19 lembaga, SPS dengan 5 lembaga, dan SKB dengan 1 lembaga. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan di semua jenis PAUD. TK kembali mencatat angka tertinggi dengan 172 lembaga, disusul oleh KB dengan 120 lembaga, PKBM dengan 63 lembaga, SPS dengan 17 lembaga, dan SKB dengan 3 lembaga.

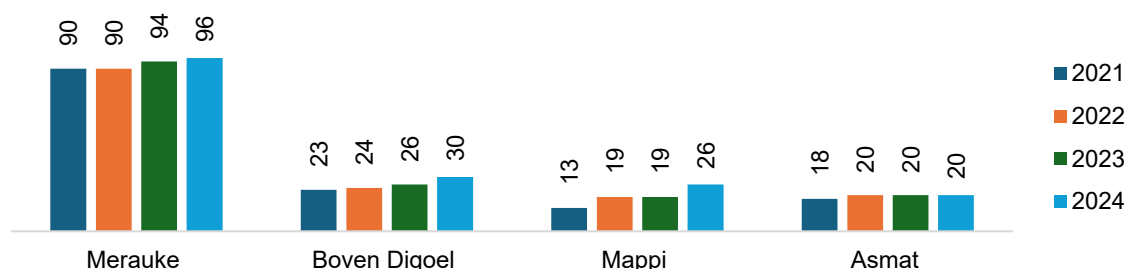
Gambar II.65 Perkembangan Jumlah PAUD Menurut Jenis di Papua Selatan Tahun 2023-2024



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan data perkembangan jumlah TK pada kabupaten di Papua Selatan tahun 2021-2024, capaian tertinggi secara konsisten dicapai oleh Kabupaten Merauke dengan jumlah TK sebanyak 90 pada tahun 2021 dan 2022, kemudian meningkat menjadi 94 pada tahun 2023, dan mencapai 96 pada tahun 2024. Di sisi lain, Kabupaten Mappi dan Asmat mencatat angka terendah pada tahun 2021 dengan masing-masing 13 dan 18 TK. Pada tahun 2024, Kabupaten Boven Digoel menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 23 TK di tahun 2021 menjadi 30 TK di tahun 2024, sementara Kabupaten Asmat tidak mengalami perubahan sejak tahun 2023 dengan jumlah tetap 20 TK.

Gambar II.66 Perkembangan Jumlah TK Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan, 2021-2024



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan data jumlah peserta didik serta rasio peserta didik per guru dan per sekolah di tingkat TK Provinsi Papua Selatan tahun 2024, Kabupaten Merauke mencatat capaian tertinggi dalam jumlah peserta didik dengan total 4.594 anak, diikuti oleh Asmat (1.051), Boven Digoel (1.031), dan Mappi (804).

Dalam hal rasio peserta didik per guru, Asmat memiliki rasio terendah sebesar 8,48 yang menunjukkan kondisi paling ideal, sementara Merauke mencatat rasio tertinggi sebesar 13,63. Untuk rasio peserta didik per sekolah, Asmat kembali menonjol dengan angka tertinggi (52,6), mengindikasikan beban lebih besar per sekolah dibanding kabupaten lain seperti Mappi yang memiliki rasio terendah (30,9).

Secara keseluruhan, Merauke unggul dalam jumlah peserta didik namun perlu perhatian pada rasio guru, sementara Asmat meski memiliki rasio guru terbaik, menghadapi tantangan dalam distribusi peserta didik per sekolah.

Tabel II.64 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat TK di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Peserta Didik	Rasio Peserta Didik Per Guru	Rasio Peserta Didik Per Sekolah
Merauke	4.594	13,63	47,9
Boven Digoel	1.031	11,72	34,4
Mappi	804	11,17	30,9
Asmat	1.051	8,48	52,6

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Sedangkan jika dihitung berdasarkan Rombongan Belajar (Rombel), tingkat TK di Provinsi Papua Selatan tahun 2024, Kabupaten Merauke memimpin dengan jumlah rombel terbanyak (285), diikuti oleh Asmat (64), Boven Digoel (67), dan Mappi (54).

Dalam hal rasio rombel per sekolah, Asmat menunjukkan angka tertinggi (3,2) yang mengindikasikan kepadatan organisasi kelas tertinggi, sementara Mappi memiliki rasio terendah (2,1) yang mencerminkan pengelolaan rombel yang lebih longgar.

Untuk rasio peserta didik per rombel, Merauke dan Asmat sama-sama mencatat angka tertinggi (16 siswa/rombel), menunjukkan beban kelas yang relatif lebih tinggi dibanding Boven Digoel dan Mappi yang memiliki rasio lebih rendah (15 siswa/rombel).

Pencapaian ini menggarisbawahi bahwa Merauke unggul dalam skala layanan pendidikan TK namun perlu mempertimbangkan optimalisasi jumlah rombel, kemudian Asmat membutuhkan perhatian khusus dalam hal pengaturan rombel per sekolah, dan Mappi menunjukkan model pengelolaan rombel yang paling efisien di antara kabupaten lainnya

Tabel II.65 Jumlah Rombel, Rasio Siswa per Rombel dan Rasio Rombel per Sekolah pada Tingkat TK di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Rombel	Rasio Rombel Per Sekolah	Rasio Peserta Didik Per Rombel
Merauke	285	3,0	16
Boven Digoel	67	2,2	15
Mappi	54	2,1	15
Asmat	64	3,2	16

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

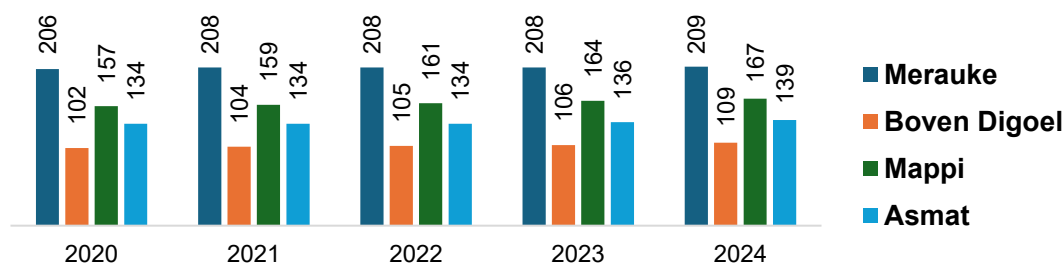
10) Perkembangan Satuan Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

a. Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan data perkembangan jumlah SD di Provinsi Papua Selatan periode 2020-2024, Kabupaten Merauke secara konsisten mempertahankan posisi tertinggi dengan jumlah SD terbanyak, yaitu 206 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 209 pada tahun 2024. Kabupaten Mappi menunjukkan perkembangan paling dinamis dengan peningkatan 10 unit SD (dari 157 di 2020 menjadi 167 di 2024), kemudian Boven Digoel mencatat pertumbuhan dengan penambahan 7 unit SD dalam 5 tahun (dari 102 menjadi 109). Adapun Asmat memiliki perkembangan paling lambat dengan hanya 5 unit penambahan SD (dari 134 menjadi 139) dan stagnasi di tahun 2020-2022.

Gambar II.67 Perkembangan Jumlah SD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020-2024



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan data peserta didik SD di Provinsi Papua Selatan tahun 2024, Kabupaten Merauke mencatat jumlah peserta didik tertinggi dengan 32.297 siswa, disusul oleh Mappi (26.481), Asmat (24.649), dan Boven Digoel (12.713). Dalam hal rasio peserta didik per guru, Asmat menghadapi tantangan terbesar dengan rasio 34,71 siswa per guru, jauh lebih tinggi dibanding kabupaten lain seperti Merauke yang memiliki rasio terbaik (18,23). Sementara itu, rasio peserta didik per sekolah juga menunjukkan Asmat sebagai wilayah dengan beban tertinggi (190,5 siswa per sekolah), diikuti oleh Merauke (154,5), Mappi (147,6), dan Boven Digoel dengan rasio terendah (116,6). Data ini mengungkapkan bahwa meskipun Merauke memiliki jumlah peserta didik terbanyak justru menunjukkan pengelolaan yang lebih baik dalam hal ketersediaan guru. Di sisi lain, Asmat memerlukan perhatian khusus untuk menambah jumlah guru dan sekolah guna memperbaiki rasio yang tidak ideal.

Tabel II.66 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat SD di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Peserta Didik	Rasio Peserta Didik Per Guru	Rasio Peserta Didik Per Sekolah
Merauke	32.297	18.226	154,5
Boven Digoel	12.713	20,88	116,6
Mappi	26.481	27,48	147,6
Asmat	24.649	34,71	190,5

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan data rombongan belajar (rombel) SD di Provinsi Papua Selatan tahun 2024, Kabupaten Merauke memiliki jumlah rombel terbanyak dengan 1.568 rombel, diikuti oleh Mappi (1.188 rombel), Asmat (1.017 rombel), dan Boven Digoel (748 rombel). Dalam hal rasio rombel per sekolah, Merauke mencatat angka tertinggi sebesar 7,50

rombel per sekolah, menunjukkan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya seperti Boven Digoel yang memiliki rasio terendah sebesar 6,86.

Terkait rasio peserta didik per rombel, Asmat menghadapi tantangan serius dengan rata-rata 26,04 siswa per rombel dan merupakan angka tertinggi di antara semua kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan kepadatan kelas yang perlu segera ditangani. Sementara itu, Boven Digoel mencatat rasio paling ideal dengan 17,00 siswa per rombel, diikuti oleh Merauke (20,60) dan Mappi (20,75).

Data ini mengungkapkan bahwa meskipun Merauke dan Mappi memiliki jumlah rombel yang besar, beban per rombel mereka relatif lebih terkendali dibanding Asmat. Di sisi lain, Boven Digoel menunjukkan pengelolaan rombel yang efisien dengan rasio siswa per rombel terendah. Asmat memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi kepadatan rombel guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal bagi peserta didik.

Tabel II.67 Jumlah Rombel, Rasio Peserta Didik per Rombel dan Rasio Rombel per Sekolah pada Tingkat SD di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2024

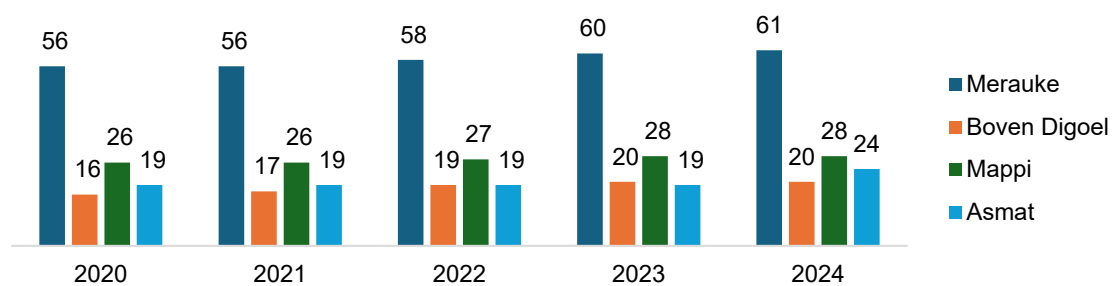
Kabupaten	Jumlah Rombel	Rasio Rombel Per Sekolah	Rasio Peserta Didik Per Rombel
Merauke	1.568	7,50	20,60
Boven Digoel	748	6,86	17,00
Mappi	1.188	7,11	20,75
Asmat	1.017	7,32	26,04

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapodik.kemdikbud.go.id/>

b. Sekolah Menengah Pertama

Berdasarkan data perkembangan jumlah SMP di Papua Selatan periode 2020-2024, terlihat beberapa pola pertumbuhan yang berbeda di setiap kabupaten. Kabupaten Merauke tetap menjadi yang terbesar dengan peningkatan dari 56 SMP di tahun 2020 menjadi 61 di tahun 2024, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan menengah pertama. Boven Digoel juga mencatat peningkatan selama lima tahun, meskipun mengalami stagnasi di dua tahun terakhir, sementara Mappi tumbuh secara bertahap dengan total penambahan 2 sekolah. Yang paling menonjol adalah perkembangan di Asmat yang setelah tiga tahun stagnan di angka 19 sekolah, meningkat menjadi 24 sekolah di tahun 2024.

Gambar II.68 Perkembangan Jumlah SMP Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan, 2020-2024



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan data peserta didik SMP di Provinsi Papua Selatan tahun 2024, terlihat beberapa kondisi kritis yang perlu menjadi perhatian. Kabupaten Merauke mencatat jumlah peserta didik tertinggi dengan 12.905 siswa, namun menghadapi tantangan serius dalam rasio peserta didik per sekolah yang mencapai 211,6 dan menjadi angka tertinggi kedua setelah Asmat. Yang memprihatinkan adalah kondisi di Kabupaten Asmat yang meskipun memiliki jumlah peserta didik terkecil kedua (4.196 siswa), justru mencatat rasio paling buruk untuk peserta didik per guru (20,55) dan peserta didik per sekolah (303,1), menunjukkan kekurangan fasilitas pendidikan yang tersedia. Di sisi lain, Kabupaten Mappi menunjukkan performa terbaik dengan rasio peserta didik per guru paling ideal (10,93) dan rasio peserta didik per sekolah yang relatif lebih baik (149,9), meskipun jumlah peserta didiknya cukup besar (7.274 siswa). Sementara itu, Boven Digoel yang memiliki jumlah peserta didik terkecil (4.264 siswa) justru mencatat rasio peserta didik per sekolah yang hampir sama buruknya dengan Merauke (213,2).

Tabel II.69 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat SMP di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Peserta Didik	Rasio Peserta Didik Per Guru	Rasio Peserta Didik Per Sekolah
Merauke	12.905	14,32	211,6
Boven Digoel	4.264	13,12	213,2
Mappi	7.274	10,93	149,9
Asmat	4.196	20,55	303,1

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan data rombongan belajar (rombel) SMP di Provinsi Papua Selatan tahun 2024, terlihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan terutama di Kabupaten Asmat. Dengan jumlah rombel sebanyak 157, Asmat mencatat rasio peserta didik per rombel yang sangat tinggi (46,33 siswa/rombel), hampir dua kali lipat dibanding kabupaten lain. Kondisi ini menunjukkan kepadatan kelas yang sangat tidak ideal dan membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, Merauke dan Boven Digoel menunjukkan kesamaan pola dengan rasio peserta didik per rombel sekitar 27,5, meskipun Merauke memiliki jumlah rombel terbanyak (471). Yang menarik adalah Kabupaten Mappi yang mencatat performa terbaik dengan rasio peserta didik per rombel hanya 16,72 jauh lebih baik dibanding kabupaten lain, sekaligus memiliki rasio rombel per sekolah tertinggi (8,96).

Tabel II.70 Jumlah Rombel, Jumlah Peserta Didik per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMP di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2024

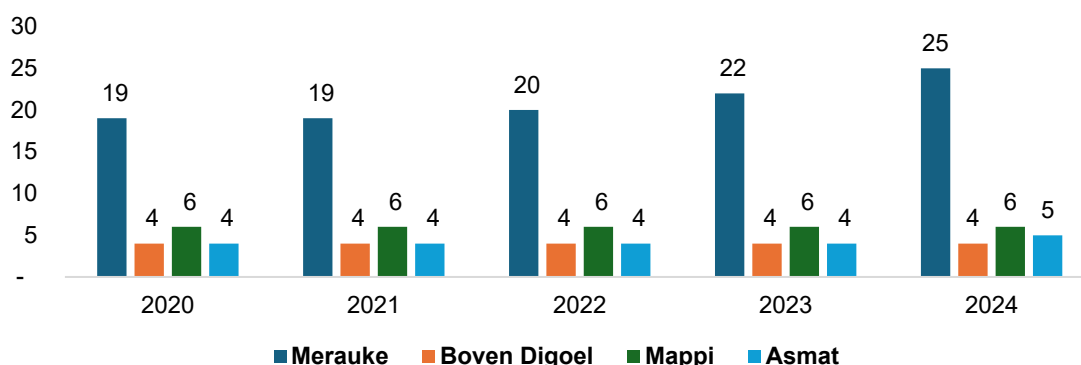
Kabupaten	Jumlah Rombel	Rasio Rombel Per Sekolah	Rasio Peserta Didik Per Rombel
Merauke	471	7,72	27,40
Boven Digoel	155	7,75	27,51
Mappi	251	8,96	16,72
Asmat	157	6,54	46,33

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapodik.kemdikbud.go.id/>

11)Perkembangan Satuan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Berdasarkan data perkembangan jumlah SMA di Provinsi Papua Selatan selama lima tahun terakhir, terlihat ketimpangan yang sangat menonjol antar kabupaten. Merauke sebagai kabupaten paling maju menunjukkan perkembangan positif dengan penambahan 6 unit SMA (dari 19 di 2020 menjadi 25 di 2024), mencerminkan komitmen terhadap perluasan akses pendidikan menengah. Namun kondisi sangat memprihatinkan terjadi di Boven Digoel dan Mappi yang sama-sama mengalami stagnasi, dimana Boven Digoel tetap memiliki 4 unit SMA sejak 2020, sementara Mappi bertahan yaitu sebanyak 6 SMA. Asmat yang awalnya stagnan di 4 SMA, baru menunjukkan kemajuan dengan penambahan 1 SMA di tahun 2024.

Gambar II.71 Perkembangan Jumlah SMA Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020-2024



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Data peserta didik SMA di Provinsi Papua Selatan tahun 2024 menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terutama dalam hal rasio peserta didik terhadap fasilitas pendidikan. Asmat menjadi kabupaten dengan situasi yang belum optimal, di mana meskipun hanya memiliki 173 peserta didik (terendah), tetapi mencatat rasio peserta didik per sekolah yang sangat tinggi (567,6) dan rasio peserta didik per guru sebesar 24,68, mengindikasikan kekurangan sekolah dan guru.

Merauke dan Boven Digoel menunjukkan pola serupa dengan rasio peserta didik per sekolah yang hampir sama (sekitar 317), meskipun Merauke memiliki jumlah peserta didik jauh lebih besar (7.935 berbanding 1.271). Yang mengejutkan, Mappi justru menampilkan kondisi ideal dengan rasio peserta didik per guru hanya 1,29 dan rasio per sekolah 28,8, angka yang sangat baik dibanding kabupaten lain.

Tabel II.72 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat SMA di Provinsi Papua Selatan, 2024

Kabupaten	Jumlah Peserta Didik	Rasio Peserta Didik Per Guru	Rasio Peserta Didik Per Sekolah
Merauke	7.935	14,25	317,4
Boven Digoel	1.271	14,61	317,8
Mappi	2.838	1,29	28,8
Asmat	173	24,68	567,6

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Data rombongan belajar (rombel) SMA di Papua Selatan tahun 2024 mengungkap situasi kritis yang memerlukan perhatian segera. Asmat kembali mencatat kondisi terburuk dengan rasio peserta didik per rombel mencapai 50,68 siswa/kelas, angka ini jauh melampaui standar

ideal dan mencerminkan kepadatan kelas. Sementara itu, Merauke dan Boven Digoel menunjukkan rasio yang relatif seimbang sekitar 27-30 siswa/rombel, meskipun Merauke menangani beban lebih besar dengan 266 rombel. Adapun capaian kabupaten Mappi menunjukkan anomali dengan rasio peserta didik per rombel hanya 1,94 per rombel.

Tabel II.73 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMA di Provinsi Papua Selatan 2024

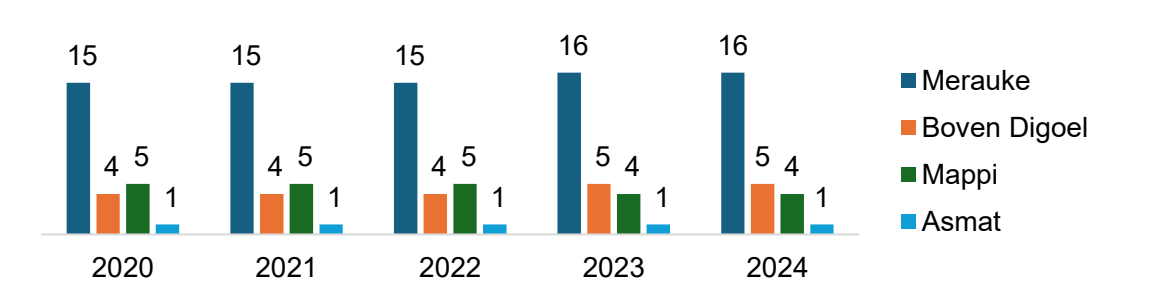
Kabupaten	Jumlah Rombel	Rasio Rombel Per Sekolah	Rasio Peserta Didik Per Rombel
Merauke	266	10,64	29,83
Boven Digoel	46	11,50	27,63
Mappi	89	14,83	1,94
Asmat	56	11,20	50,68

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

12)Perkembangan Satuan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Data perkembangan jumlah SMK di Provinsi Papua Selatan selama lima tahun terakhir menunjukkan stagnasi yang signifikan dan ketimpangan antar kabupaten. Merauke menjadi wilayah dengan jumlah SMK tertinggi, meskipun hanya mengalami penambahan 1 SMK (dari 15 pada 2020 menjadi 16 di 2024). Boven Digoel dan Mappi masing-masing memiliki 5 dan 4 SMK, dengan pertumbuhan minimal Boven Digoel menambah 1 SMK pada 2023. Asmat mencatat kondisi paling memprihatinkan, dengan jumlah 1 SMK sepanjang periode 2020-2024, mengindikasikan pembangunan pendidikan kejuruan yang terabaikan.

Gambar II.74 Perkembangan Jumlah SMK di Provinsi Papua Selatan, 2020-2024



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan data tahun 2024, kondisi SMK di Provinsi Papua Selatan menunjukkan disparitas yang sangat besar antar kabupaten. Merauke

sebagai kabupaten dengan jumlah peserta didik terbanyak (4.013 siswa) memiliki rasio yang relatif seimbang dengan 9,49 siswa per guru dan 251 siswa per sekolah. Boven Digoel mengikuti pola serupa dengan 1.140 siswa, rasio 10,09 siswa per guru, dan 228 siswa per sekolah. Mappi mencatat kondisi terbaik dengan rasio ideal 2,45 siswa per guru dan 64,3 siswa per sekolah meskipun memiliki jumlah peserta didik cukup besar (1.497 siswa).

Namun, Asmat menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan dengan hanya 257 peserta didik, kabupaten ini mencatat rasio terburuk di mana setiap guru harus menangani 48,29 siswa, dimana capaian ini lima kali lebih berat dibanding Merauke. Yang lebih mengkhawatirkan adalah rasio 1.497 siswa per sekolah di Asmat yang secara teknis tidak mungkin, mengindikasikan kemungkinan hanya ada satu SMK yang beroperasi untuk menampung seluruh peserta didik.

Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan ekstrem dalam sistem pendidikan kejuruan di Papua Selatan. Sementara Mappi berhasil menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Perbedaan yang begitu besar antara kabupaten maju dan tertinggal ini memerlukan intervensi segera dari pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan kejuruan yang lebih adil di seluruh wilayah Papua Selatan.

Tabel II.75 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada SMK di Provinsi Papua Selatan, 2024

Kabupaten	Jumlah Peserta Didik	Rasio Peserta Didik Per Guru	Rasio Peserta Didik Per Sekolah
Merauke	4.013	9,49	251
Boven Digoel	1.140	10,09	228
Mappi	1.497	2,45	64,3
Asmat	257	48,29	1.497

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Data rombongan belajar SMK di Papua Selatan tahun 2024 menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terutama di Kabupaten Asmat. Dengan hanya 9 rombel yang tersedia, Asmat mencatat rasio peserta didik per rombel yang berada pada kategori belum baik, mencapai 166,33 siswa per kelas. Kondisi ini menggambarkan kepadatan kelas yang jauh melampaui standar ideal dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Di sisi lain,

Mappi menunjukkan performa terbaik dengan rasio peserta didik per rombel sebesar 5,04, menciptakan kondisi belajar yang sangat ideal. Merauke sebagai kabupaten dengan rombel terbanyak (201) memiliki rasio yang relatif baik (19,97 siswa/rombel), sementara Boven Digoel mencatat 25,33 siswa per rombel, angka yang masih wajar namun perlu perbaikan.

Tabel II.76 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Selatan 2024

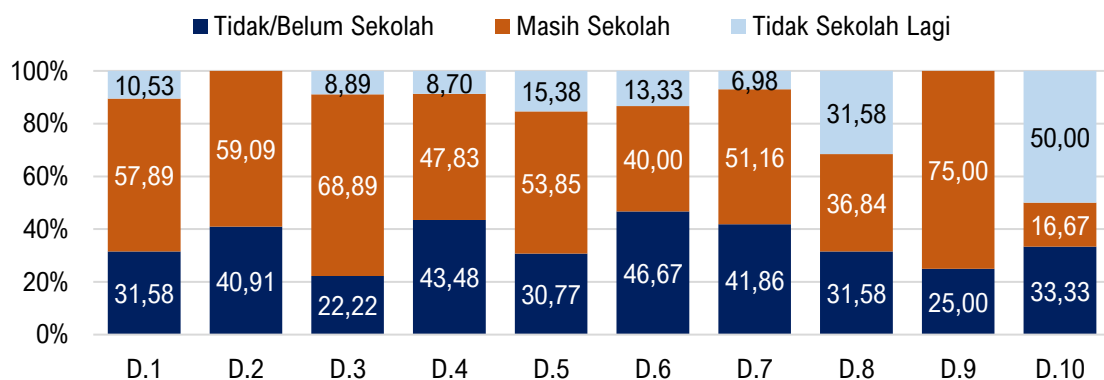
Kabupaten	Jumlah Rombel	Rasio Rombel Per Sekolah	Rasio Peserta Didik Per Rombel
Merauke	201	12,56	19,97
Boven Digoel	45	9,00	25,33
Mappi	51	12,75	5,04
Asmat	9	9,00	166,33

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

13) Pendidikan Khusus

Gambar II.77 menunjukkan persentase penduduk dengan disabilitas sedang dan berat berdasarkan partisipasi sekolah di Papua Selatan berdasarkan Regsosek (2022). Dari total 427.044 penduduk di Papua Selatan yang mengalami disabilitas sedang dan berat, diantaranya terdapat 254 anak usia sekolah (7-18 tahun).

Gambar II.77 Persentase Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Partisipasi Sekolah di Papua Selatan



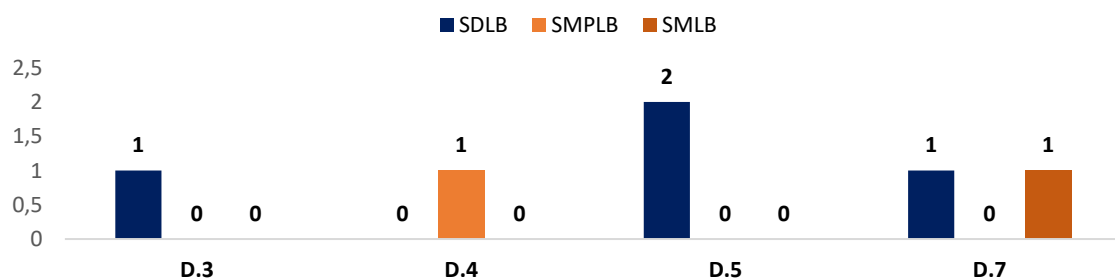
Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Mayoritas anak usia sekolah yang disabilitas sedang dan berat yang masih bersekolah, yaitu sebesar 135 penduduk (53,15%). Sisanya, sebanyak 89 penduduk (35,04%) tidak/belum sekolah dan 30 penduduk (11,81%) tidak sekolah lagi. Mereka yang tidak bersekolah, secara

proporsinya paling banyak berada di kelompok rentan (< 60% termiskin). Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan pendidikan penduduk dengan disabilitas bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja tetapi juga soal akses dan fasilitas yang kurang memadai sehingga baik kelompok miskin maupun rentan tidak/belum bersekolah.

Gambar II.78 menunjukkan Sebaran penduduk dengan disabilitas sedang dan berat yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Papua Selatan berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.78 diketahui hanya terdapat 6 penduduk dari total 135 penduduk disabilitas sedang dan berat yang masih bersekolah, bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Padahal penduduk dengan disabilitas sedang dan berat membutuhkan pendamping atau sistem pendidikan khusus.

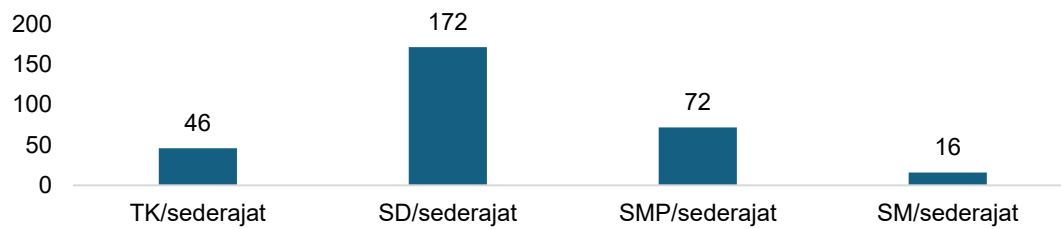
Gambar II.78 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat yang Bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Papua Selatan



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Pendidikan Khusus yang terdapat di Provinsi Papua Selatan berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada 1 sekolah, bertempat di Kabupaten Merauke. Jumlah peserta didik di sekolah ini 131 orang, terdiri dari 79 laki-laki dan 52 perempuan (Dapodikdasmen 2023), dengan jumlah guru sebanyak 27 orang. Dengan demikian di sekolah ini rasio 1 guru untuk 5 peserta didik. Jumlah rombongan belajar adalah 33 rombel (Dapodik Kemendikbudristek 2023), sehingga jumlah peserta didik per rombel adalah 4 orang. SLB ini tercatat terakreditasi tahun 2022 dengan peringkat B dalam data akreditasi BANSM Kemendikbud.

Gambar II.79 Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 7-18 tahun yang Bersekolah, Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Pada tahun 2023, Provinsi Papua Selatan mencatat perkembangan partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas usia 7-18 tahun di berbagai jenjang pendidikan. Secara keseluruhan, terdapat 306 anak penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan, dengan distribusi tertinggi di jenjang SD/ sederajat sebanyak 172 siswa, disusul oleh SMP/ sederajat (72 siswa), TK/ sederajat (46 siswa), dan SM/ sederajat (16 siswa).

Pencapaian ini menunjukkan bahwa program pendidikan inklusif di Papua Selatan telah berhasil menjangkau banyak anak di jenjang dasar, terutama di tingkat SD. Namun, penurunan signifikan di jenjang SM menjadi perhatian khusus, mengindikasikan adanya tantangan dalam akses dan kelanjutan pendidikan bagi penyandang disabilitas di tingkat menengah. Sementara itu, partisipasi di TK mencerminkan kesadaran yang baik tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

1) Jaminan Sosial

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jaminan sosial (*social security*) merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial (*social welfare system*) dan diberikan kepada masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko ketuaan, kematian, ketidakmampuan dan pengangguran.

Tabel II.80 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Kategori	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Jaminan Pensiun/ Veteran	Merauke	10,41	11,65	9,80	8,90	15,90
	Boven Digoel	11,91	10,23	11,93	9,14	9,48
	Mappi	1,07	0,02	5,14	4,59	4,35
	Asmat	3,4	5,24	0,41	5,23	5,18
	Rata-rata 4 Kabupaten	6,7	6,79	6,82	6,97	8,73
Jaminan Hari Tua	Merauke	4,67	4,95	5,41	5,65	14,45
	Boven Digoel	10,63	27,54	12,24	8,43	9,00
	Mappi	0,64	0,02	5,23	3,04	n/a
	Asmat	2,36	5,16	0,24	2,32	4,04
	Rata-rata 4 Kabupaten	4,58	9,42	5,78	4,86	9,16
Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja	Merauke	3,46	6,15	5,48	4,08	13,55
	Boven Digoel	15,8	28,17	12,47	10,16	11,92
	Mappi	0,60	0	5,48	0,96	3,76
	Asmat	2,11	4,73	0	1,49	3,40
	Rata-rata 4 Kabupaten	5,49	9,76	5,86	4,17	8,16
Jaminan / Asuransi / Kematian	Merauke	3,03	5,26	6,02	3,82	14,65
	Boven Digoel	9,89	27,94	11,8	8,44	9,99
	Mappi	0,39	0	5,14	0,74	2,75
	Asmat	2,07	4,83	0,24	1,79	3,44
	Rata-rata 4 Kabupaten	3,85	9,51	5,8	3,70	7,71
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Merauke	2,61	2,84	2,44	1,38	3,08
	Boven Digoel	7,02	7,54	6,97	1,39	n/a
	Mappi	0,13	0	0	0,27	n/a
	Asmat	0,75	1,07	0	0	0
	Rata-rata 4 Kabupaten	2,63	2,86	2,35	0,76	1,54

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2022 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua”)

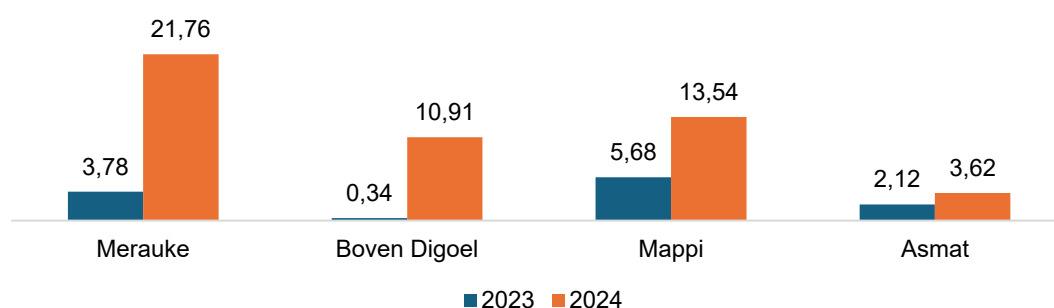
Berdasarkan penyajian tabel di atas diketahui bahwa cakupan seluruh program jaminan sosial di Provinsi Papua Selatan mengalami fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan peninjauan terhadap kabupaten pada tahun 2024, diketahui bahwa kabupaten yang memiliki cakupan jaminan sosial paling tinggi untuk semua kategori adalah Kabupaten Merauke, baik untuk jaminan pensiun/veteran (15,90%), jaminan hari tua (14,45%), jaminan asuransi kecelakaan kerja (13,55%), jaminan/asuransi kematian (14,65%), maupun pesangon pemutusan

hubungan kerja (3,08%). Pada 4 tahun sebelumnya (2020-2023, posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Boven Digoel untuk semua kategori Jaminan Sosial, kecuali Jaminan Pensiun/ Veteran pada Tahun 2021.

2) Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang merupakan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Undang-Undang No 40 Tahun 2004). Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu dari upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar. Bentuk bantuan sosial yang dibahas dalam subbab ini antara lain berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Gambar II.75a Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima Program Bantuan Pangan (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023-2024

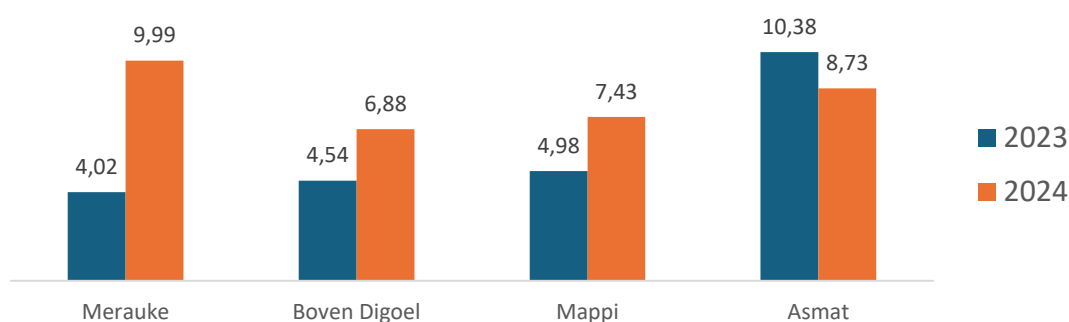


Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2023

Gambar 75a dan Gambar II.75b menunjukkan persentase rumah tangga yang pernah menerima Program Bantuan Pangan (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa rata-rata cakupan penerima seluruh program bantuan sosial masih sangat kecil (<11%) pada tahun 2023 namun mengalami peningkatan pada tahun 2024, kecuali PKH untuk Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat memiliki cakupan PKH yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya pada tahun 2023 yaitu mencapai 10,38%, namun menurun menjadi 8,73% di tahun 2024. Cakupan penerima BPNT terendah adalah di tahun 2023 adalah Kabupaten Boven Digoel (0,34%) sedangkan di tahun berikutnya posisi terendah diduduki oleh kabupaten Asmat (3,62%). Sedangkan cakupan penerima PKH terendah di tahun 2023 adalah Merauke

(4,02%), dan di tahun 2024 diduduki oleh kabupaten Boven Digoel (6,88%). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat Papua Selatan dalam jaminan dan bantuan sosial belum sepenuhnya terpenuhi melalui program bantuan sosial yang sebelumnya diimplementasikan (PKH, BPNT, dll), sehingga diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam mengisi gap akses jaminan dan bantuan sosial tersebut, khususnya afirmasi jaminan dan bantuan sosial untuk OAP.

Gambar II.81 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023-2024

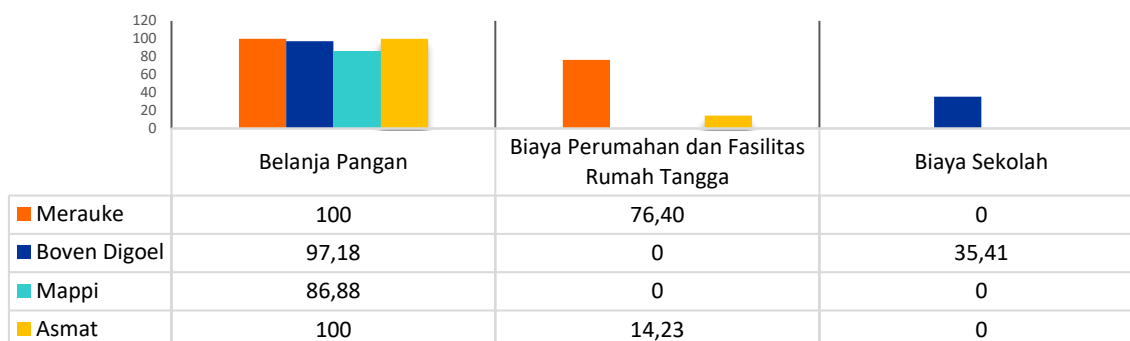


Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret, 2023

Mengenai tempat menerima bantuan PKH terdapat preferensi berbeda dari para penerima dan penyalur bantuan PKH antar Kabupaten dalam memilih tempat penyaluran. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik dan kemudahan akses di setiap daerah yang berbeda-beda. Pada tahun 2023, mayoritas tempat penerimaan bantuan PKH di Kabupaten Merauke dan Mappi adalah kantor bank (Merauke: 55,71% dan Mappi: 72,80%), mayoritas tempat penerimaan bantuan PKH di Asmat adalah kantor Pos (64,13%), sedangkan penyaluran PKH di Boven Digoel mayoritas dilakukan oleh pendamping/ketua kelompok (49,42%).

Apabila ditinjau berdasarkan pemanfaatan bantuan PKH tahun 2023, terdapat kecenderungan penerima bantuan PKH untuk memanfaatkannya dalam belanja pangan yaitu sebesar 100% di Merauke dan Asmat, 97,18% di Boven Digoel, serta 86,88% di Mappi. Selain untuk belanja pangan, bantuan PKH juga dimanfaatkan untuk biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga (Merauke: 76,40% dan Asmat: 14,23%), serta untuk biaya sekolah anak (Boven Digoel: 35,41%).

Gambar II.76 Persentase Rumah Tangga yang Masih Tercatat Penerima PKH Menurut Pemanfaatan Bantuan PKH Tahun 2023

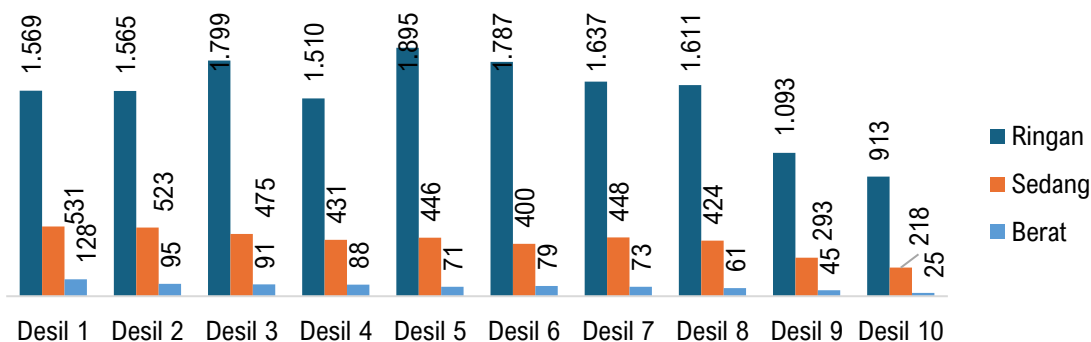


Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2023

3) Penyandang Disabilitas di Papua Selatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Maka dari itu, melalui undang-undang ini pemerintah menjamin kelangsungan hidup warga penyandang disabilitas agar memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Demikian halnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 juga memiliki fokus untuk meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas, serta perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan inklusif. Pendekatan ini mencakup penyelarasan anggaran, integrasi program, serta peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan.

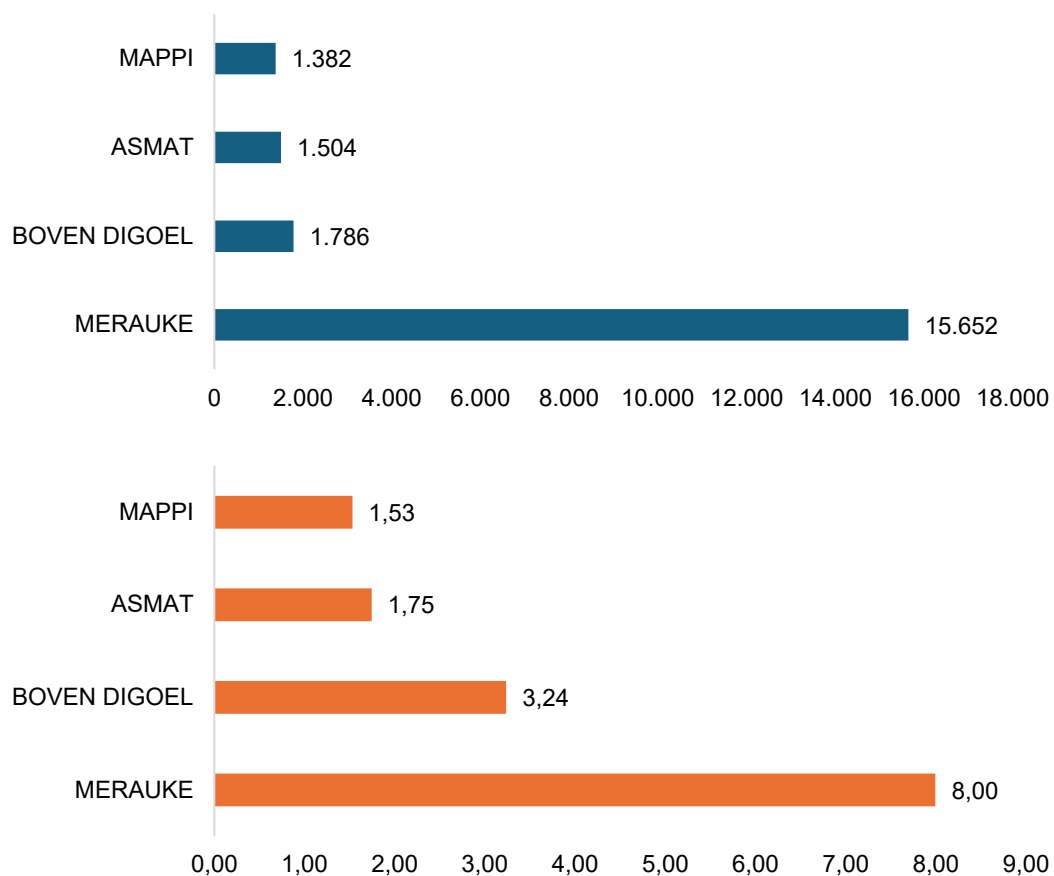
Gambar II.82 Sebaran Penyandang Disabilitas Sedang-Berat Berdasarkan Desil



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Untuk membangun proses pembangunan yang inklusif, Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu memetakan penyandang disabilitas di wilayahnya. Data regsosek menyebutkan, dari total penduduk disabilitas ringan, sedang dan berat di Papua Selatan, terdapat 2.228 atau 10,96% Penyandang Disabilitas yang berada pada 10% penduduk termiskin. Hal ini diketahui bahwa Kelompok miskin cenderung memiliki akses layanan kesehatan dan gizi yang lebih buruk, yang meningkatkan risiko disabilitas. Bahkan, kondisi pekerjaan informal yang tinggi risiko juga dapat mendorong terjadinya disabilitas.

Gambar II.83 Kab/Kota dengan Jumlah Penyandang Disabilitas dan % Disabilitas per Kab/Kota terhadap Total Penduduk

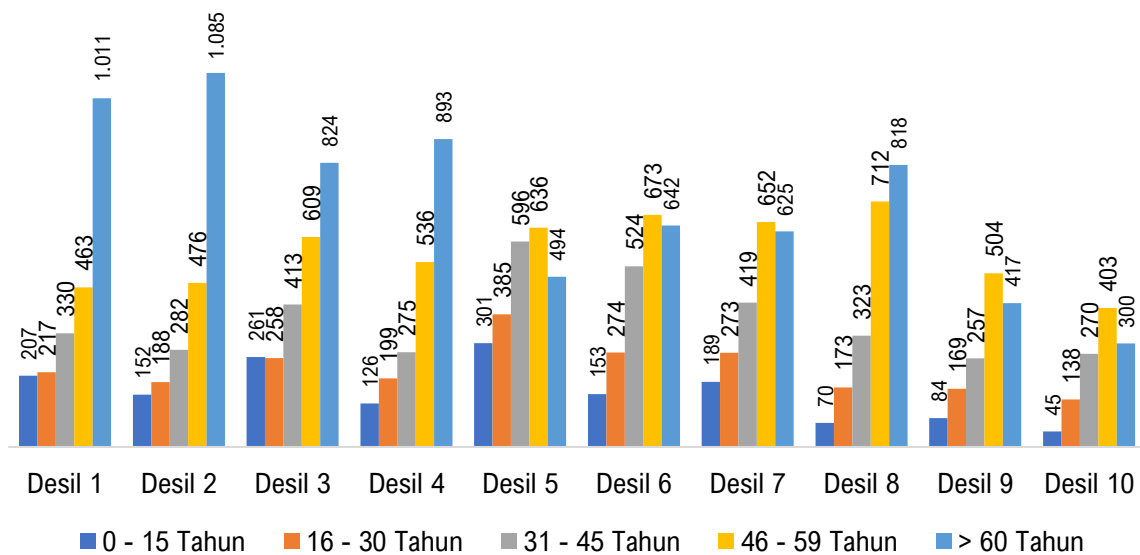


Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Data juga menyebutkan bahwa Jumlah penyandang disabilitas terbanyak berada di Kab Merauke, termasuk secara relative terhadap total penduduk per Kab/Kota di Papua Selatan. Lokasi-Lokasi tersebut perlu memperhatikan layanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Buruknya layanan dasar bagi disabilitas menyebabkan akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum,

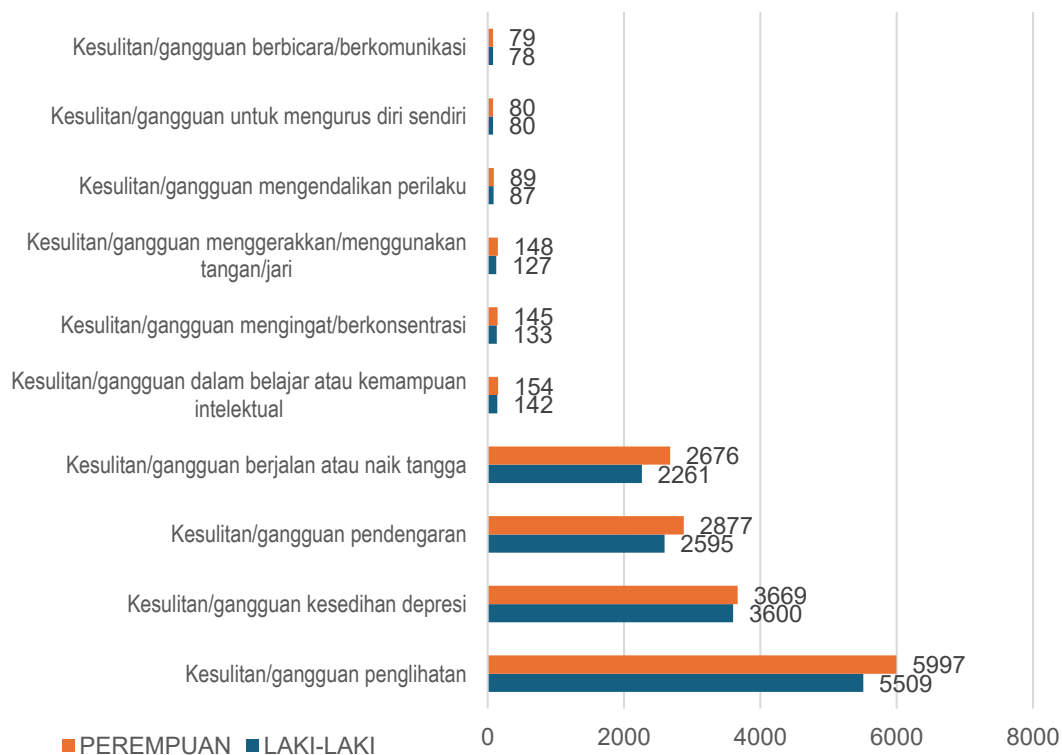
sehingga berdampak pada kualitas hidup dan kesempatan kerja mereka. Hambatan fisik, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, dan stigma negatif juga menjadi masalah utama. Demikian halnya layanan dasar juga perlu menjangkau pada Penyandang Disabilitas dengan usia lanjut khususnya pada kelompok-kelompok miskin, sebagaimana yang tergambar dalam data berikut

Gambar II.84 Kelompok Usia Penyandang Disabilitas Ringan, Sedang dan Berat



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

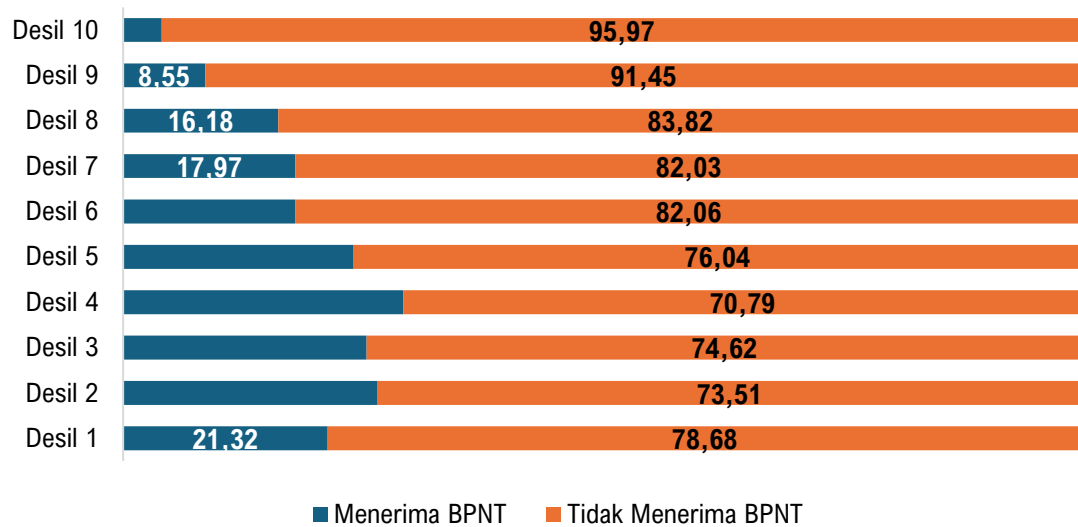
Gambar II.85 Ragam Penyandang Disabilitas Ringan, Sedang dan Berat



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

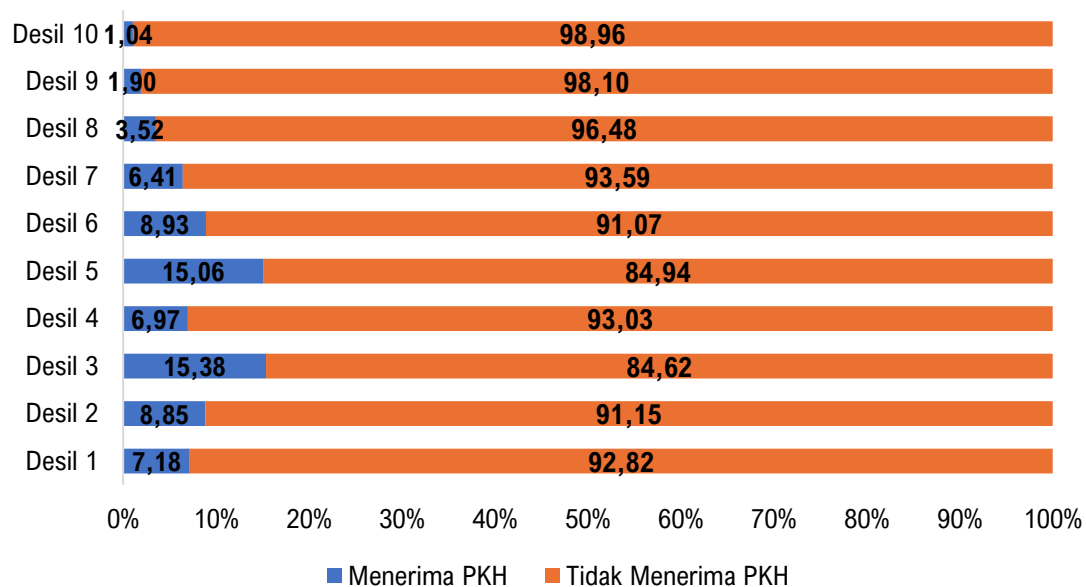
Dari sisi kesehatan, penyandang disabilitas di Papua Selatan mayoritas memiliki kesulitan penglihatan, depresi dan pendengaran. Bahkan, Perempuan dengan disabilitas juga lebih memdominasi pada jenis ragam tersebut. Harapannya melalui tampilan data regsosek ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat mendukung layanan kesehatan mata dan pendengaran, dan untuk Perempuan penyandang disabilitas, dapat diintegrasikan dengan dengan penanganan kesehatan mental berbasis gender dan disabilitas, misalnya program konseling komunitas untuk Perempuan dan Disabilitas.

Gambar II.86 Data KK Disabilitas dengan Kepemilikan BPNT



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

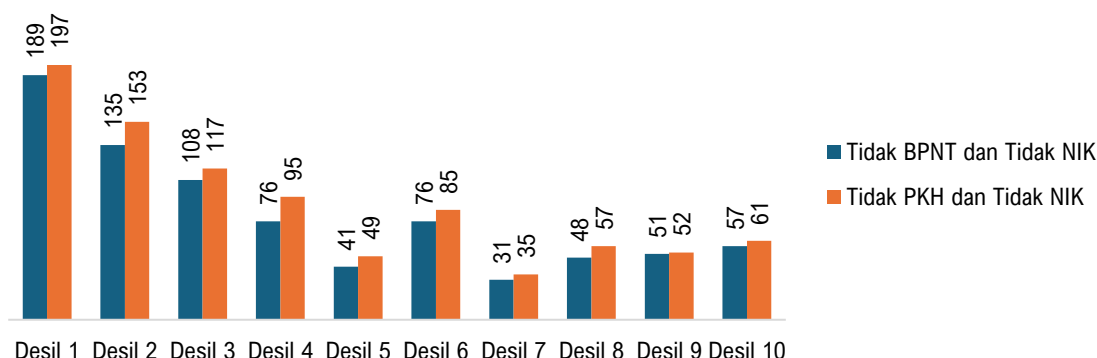
Gambar II.87 Data KK Disabilitas dengan Kepemilikan PKH



Sumber Data Regsosek yang di olah.

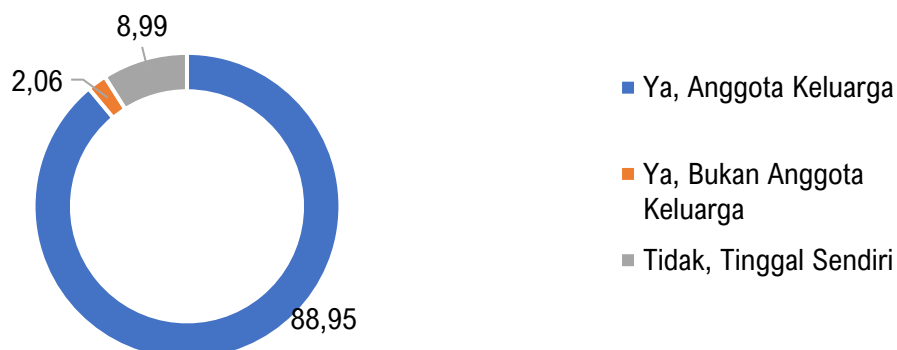
Dari total 11.440 KK Disabilitas (Ringan, Sedang dan Berat), terdapat 23,60% penerima BPNT dan 16,75% penerima PKH. Kepemilikan BPNT lebih tinggi dibandingkan kepemilikan PKH. Namun, exclusion error pada penerima BPNT lebih tinggi dibandingkan PKH. Pada Desil 9 Penerima BPNT, masih ada 8,55% yang menerima BPNT.

Gambar II.88 Data Disabilitas yang Tidak Memiliki BPNT, PKH dan NIK



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

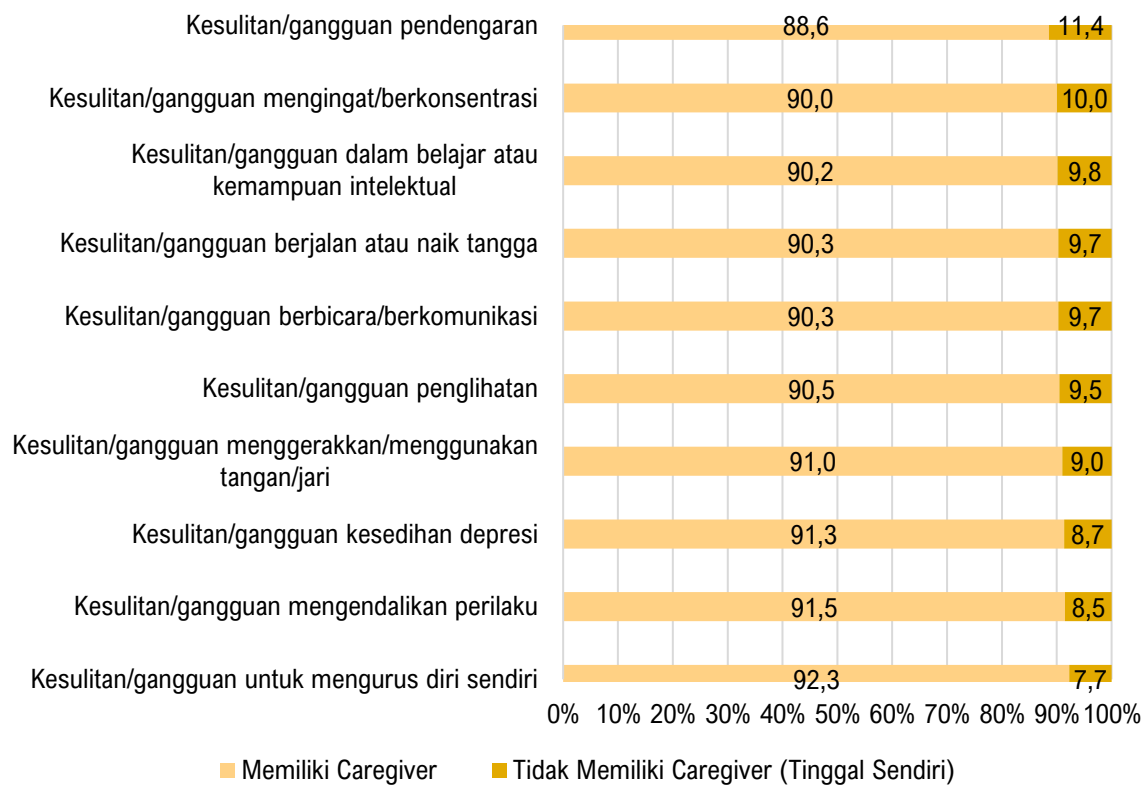
Penduduk disabilitas yang mendapatkan program perlindungan sosial, harus terdata sehingga perlu memiliki NIK. Namun, masih ada 1.070 KK disabilitas yang berada pada 40% termiskin (Desil 4 ke Bawah) yang tidak memiliki NIK dan Program Bantuan Sosial (PKH dan BPNT). Mereka didominasi pada kelompok penduduk 10% termiskin (miskin ekstrim). Maka, peningkatan sasaran pada kelompok disabilitas yang paling membutuhkan perlu diprioritaskan dimulai dari pendataan.



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Penduduk dengan Disabilitas banyak yang memiliki atau tinggal dengan caregiver/ pemberi rawat/pengasuh/wali, yaitu sebanyak 91% (termasuk dengan keluarga dan bukan keluarga) dari total disabilitas. Sementara itu, terdapat 8,99% atau 885 disabilitas yang tidak memiliki caregiver. Ragam disabilitas yang paling banyak tidak memiliki caregiver adalah yang memiliki gangguan pendengaran (11,4%), gangguan konsentrasi (10%) dan gangguan belajar (9,8%).

Gambar II.89 Tabel Penduduk Disabilitas Memiliki Caregiver dan Tidak Memiliki Caregiver

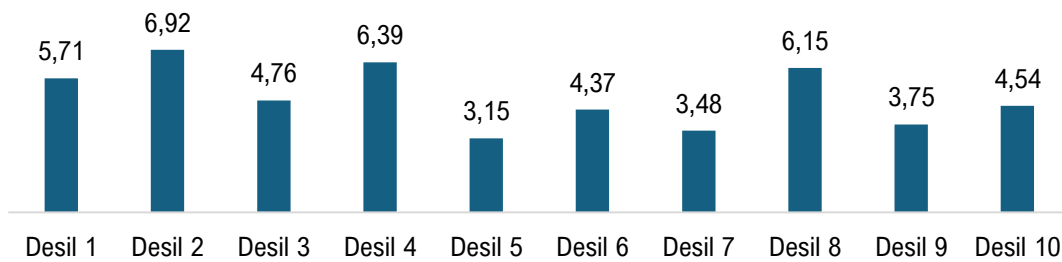


Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

4) Lansia Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat

Pemerintah telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN 2025-2030, salah satunya dengan menempatkan lansia sebagai salah satu subyek pembangunan agar lansia dapat mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui 5 strategi nasional yakni (1) peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu (2) peningkatan derajat kesehatan dan kualitas lansia (3) pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lansia (4) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan (5) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak lansia.

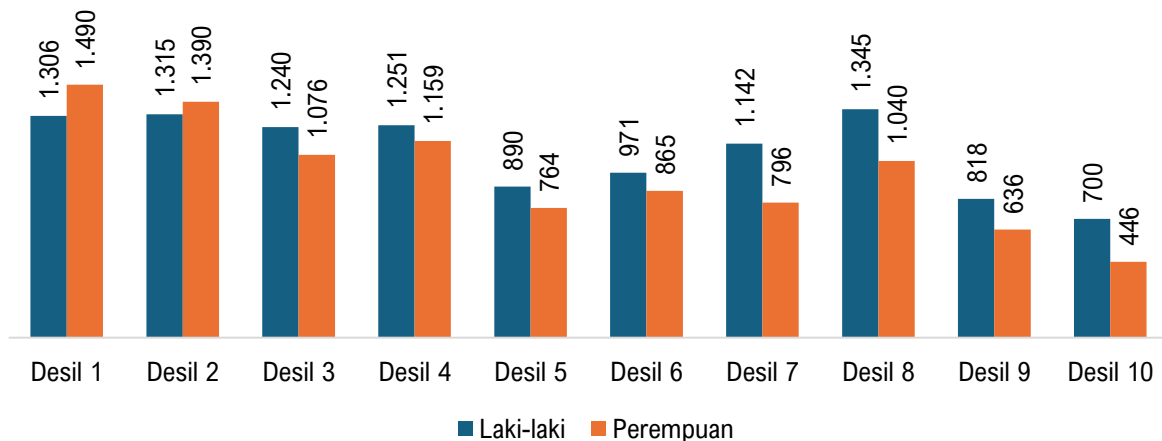
Gambar II.90 Persentase Penduduk Usia 60 Tahun Terhadap Total Penduduk Berdasarkan Desil di Papua Selatan



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, dimana jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia anak-anak dan lansia. Sementara usia lansia akan membesar pada tahun 2035-2040. Di Provinsi Papua Barat, berdasarkan Data Regsosek Jumlah lansia (60 tahun ke atas) di Papua Selatan sebesar 20.640 penduduk, Diantaranya, tersebar di seluruh kelompok pendapatan di Papua Selatan. Dari antar desil tersebut, mayoritas berada pada Desil 1, 2, 4 dan 8. Tingginya lansia di desil rendah mengindikasikan bahwa ada indikasi tinggal sendiri atau tidak bekerja lagi, mengalami kerentanan ekonomi dan Kesehatan, serta tantangan akses kesehatan, sosial, dan jaminan hari tua.

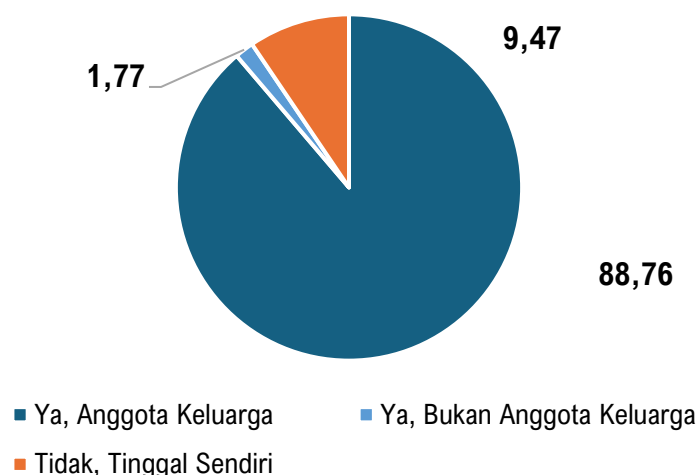
Gambar II.91 Sebaran Penduduk Usia 60 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Meskipun secara total, lansia laki-laki jumlahnya mendominasi. Tetapi, pada kelompok Desil 1–2 yang mendominasi adalah perempuan. Terlebih lagi, 22,14% lansia Perempuan berstatus janda sementara itu 9,62% lansia laki-laki berstatus duda terhadap total lansia di Papua Selatan.

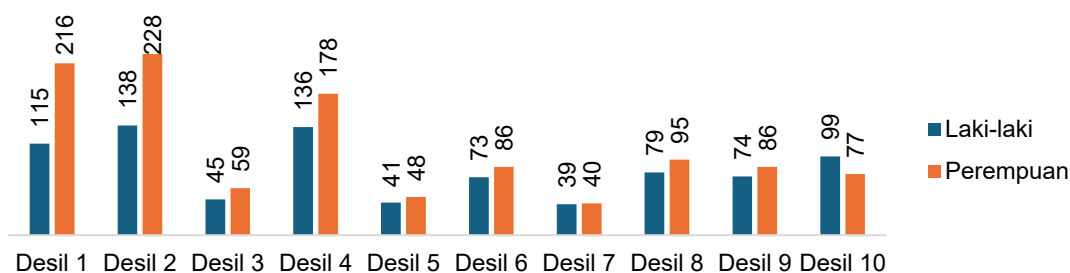
Gambar II.92 Pemberi Rawat Lansia



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

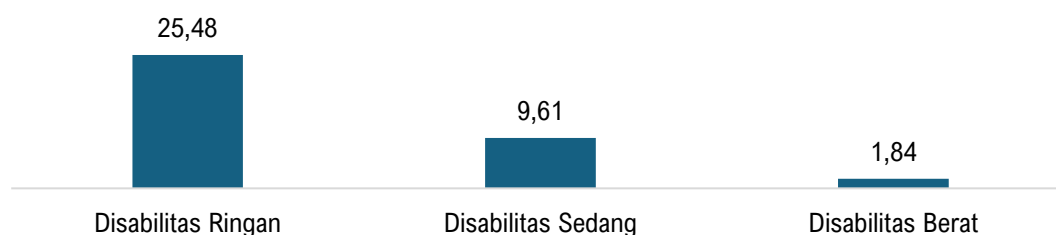
Mayoritas Lansia di Papua Selatan dirawat oleh Anggota Keluarga dan sebagian kecil dirawat oleh bukan anggota keluarga. Namun, terdapat 9,47% Lansia yang tinggal sendiri. Secara jumlahnya, mayoritas berada pada Desil 1 – 2 Termiskin dengan jenis kelamin perempuan di Papua Selatan. Kelompok ini sangat membutuhkan dukungan sosial tambahan, termasuk layanan perawatan lansia berbasis komunitas atau bantuan sosial.

Gambar II.93 Jumlah Lansia Tinggal Sendiri



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

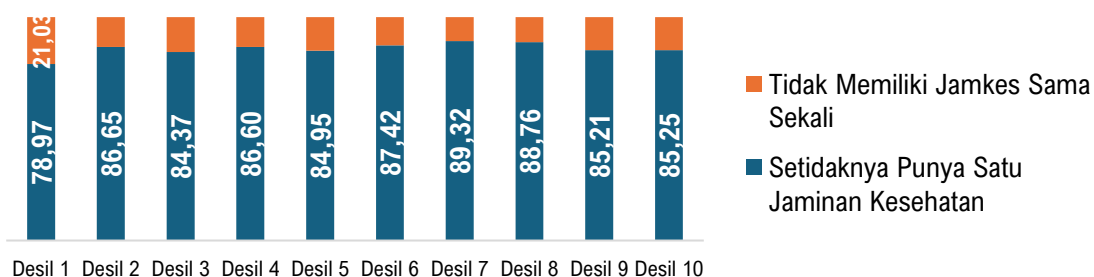
Gambar II.94 Persentase Lansia yang Mengalami Disabilitas terhadap Total Lansia



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Sebagian besar lansia mengalami disabilitas ringan hingga sedang, yang memerlukan dukungan aksesibilitas dan layanan kesehatan primer. Gangguan penglihatan dan pendengaran adalah tantangan utama yang dialami lansia sehingga Pemerintah Prov Papua Selatan dapat: a) Menyediakan akses alat bantu (kacamata, tongkat, alat bantu dengar); b) Membangun lingkungan ramah lansia, termasuk transportasi dan fasilitas umum yang aksesibel; dan c) menyediakan layanan skrining dan rehabilitasi fungsional secara berkala.

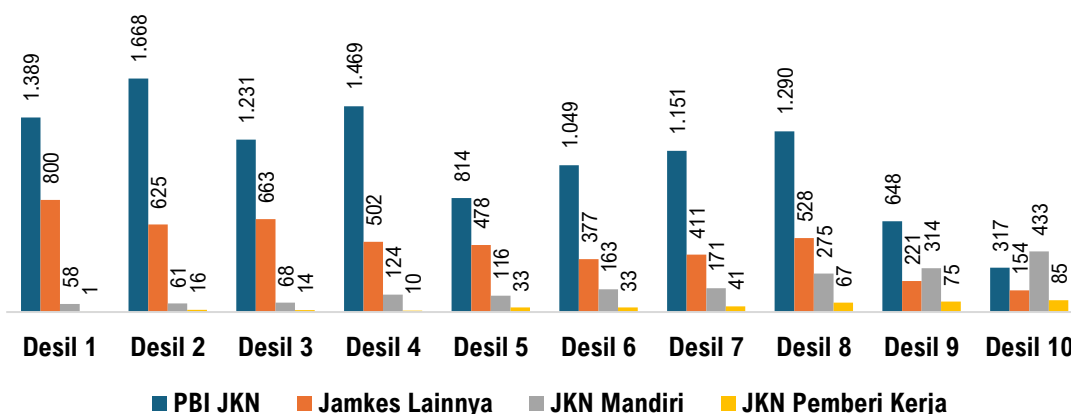
Gambar II.95 Kepemilikan Jaminan Kesehatan Lansia Usia >60 Tahun



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Meskipun sebagian besar lansia >60 tahun memiliki jaminan kesehatan, masih terdapat sekitar 1 dari 5 lansia miskin yang tidak terlindungi, dan kepemilikan jaminan didominasi oleh PBI JKN di kelompok ekonomi bawah. Dari angka kepemilikan jaminan Kesehatan tersebut, juga turut mencerminkan ketimpangan akses yang perlu diatasi melalui perluasan cakupan dan edukasi kepesertaan.

Gambar II.96 Kepemilikan Jenis Jaminan Kesehatan Berdasarkan Desil



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Provinsi Papua menunjukkan perkembangan positif dalam kerukunan umat beragama selama empat tahun terakhir. Berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUM), skor rata-rata dimensi toleransi berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, dengan puncak tertinggi di tahun 2022 sebesar 81,47 (sangat tinggi). Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 77,62, indeks ini kembali menunjukkan peningkatan di tahun 2024 dengan capaian 79,07 yang tetap berada dalam kategori tinggi.

Tabel II.97 Perkembangan Indeks Kerukunan Beragama Provinsi Papua Tahun 2021-2024

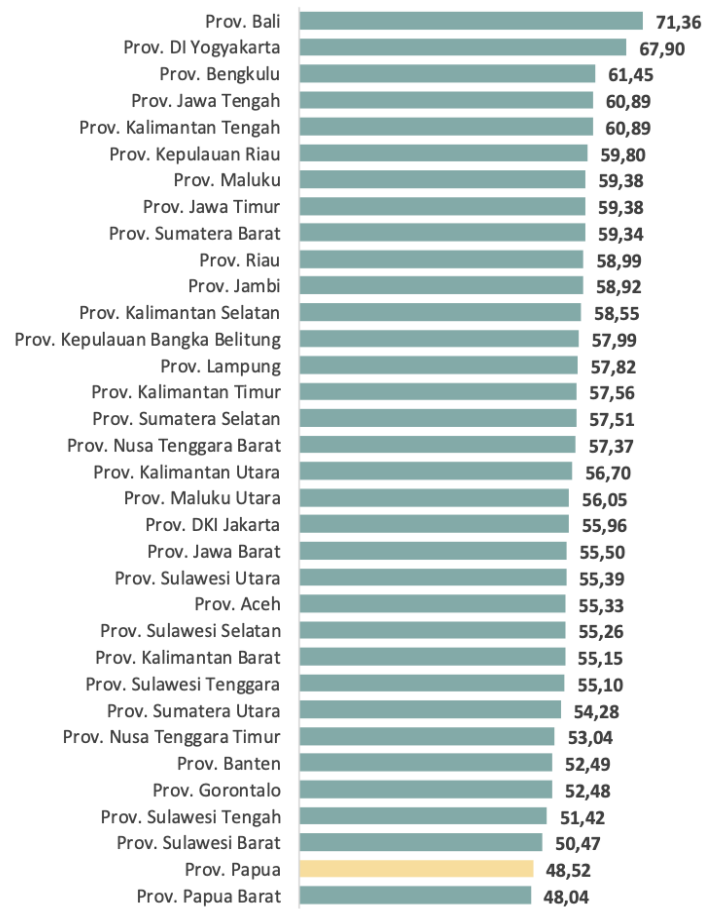
IKUM	2021	2022	2023	2024
Rerata Dimensi Toleransi	74,80	81,47	77,62	79,07
Kategori Toleransi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur komprehensif yang menilai kemajuan pembangunan kebudayaan suatu wilayah berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi budaya. IPK bertujuan untuk memetakan sejauh mana kebijakan dan program kebudayaan berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan berbasis budaya. Sampai dengan tahun 2023, tercatat Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan baru mencapai 48,52.

Gambar II.98 Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Tahun 2023



Catatan : Masih Tergabung dalam Perhitungan Prov. Papua

Sumber: Neraca Pendidikan Indonesia, 2023

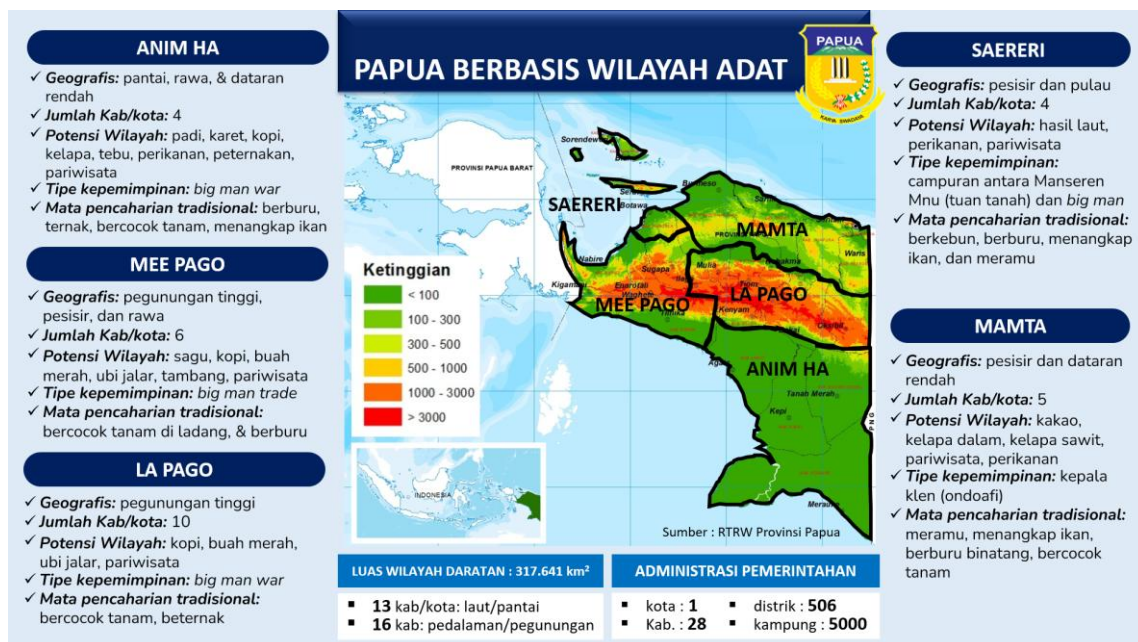
3) Kondisi Kebudayaan Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan merupakan bagian dari wilayah adat Anim Ha dengan karakteristik geografis pesisir dan dataran rendah, tipe kepemimpinan “kepala klen” (ondoafi), serta mata pencaharian tradisional meramu, menangkap ikan, berburu binatang dan bercocok tanam (lihat Gambar II.99). Pembagian wilayah adat ini dilakukan berdasarkan indikator kesamaan dalam aspek hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, geografis, dan lainnya.

Mengutip dari website DPMKOAP Provinsi Papua, Marind Anim adalah suku yang menjadi tuan rumah di tanah datar ini. Suku Marind Anim menghuni empat penjuru mata angin dengan tujuh marga besar, yaitu Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize, dan Basik-basik.

Seperti dituliskan J. Van Baal dalam karyanya, *‘Dema” Description and Analysis of Marind Anim Culture’*, dahulu Suku Marind atau Malind punya kepercayaan terhadap dema, yakni roh yang dipercaya bisa menjelma sebagai apa pun di alam ini, baik manusia, binatang, tumbuhan, atau batu. Semua alam semesta berasal dari dema. Dema ini berupa kekuatan gaib dalam alam, atau berupa roh-roh orang mati. Semua itu terkait pula dengan konsep mereka tentang totemisme. Karena itu ada dema-dema alam yang dipuja selain dema-dema totemnya sendiri. Ada dema yang memunculkan diri di hadapan manusia berbentuk manusia pula atau berbentuk hewan. Ada yang disebut yorma (dema laut), wonatai (totem buaya), yawi (dema kelapa) dan lain-lain. Hari berganti bulan, tahun berganti abad, keharmonisan masyarakat Malin dengan alam terus terjaga. Perilaku berburu, meramu dan bercocok tanam masih dipertahankan hingga saat ini. Satu hal lagi, sagu merupakan sumber makanan pokok penduduk Malind Anim. Sagu juga digunakan dalam ritual peradilan adat, musyawarah dan adat perkawinan. Orang Marind sangat terkenal dengan makanan khas yang berasal dari olahan sagu, bercitarasa sedap dan lezat. Pohon sagu juga bisa digunakan untuk perahu dan bahan bangunan rumah. Sagu sangat menunjang kehidupan orang marind, itulah sebabnya mereka menganggap sagu sebagai ‘raja’, yang harus dihormati dan dipelihara.

Gambar II.99 Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua



Sumber: RPJMD Provinsi Papua 2018-2023

Suku Marind Anim mendiami dataran luas di bagian selatan, mulai dari Selat Muli (Selat Marianne) sampai ke daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Sebagian dari mereka tersebar pula di sekitar daerah aliran sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Maro. Daerah tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Okaba, Merauke, sebagian Kecamatan Kimam dan Muting di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Daerah ini merupakan dataran rendah bersavana dengan floranya yang mirip flora benua Australia dan dataran berawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu di sungai-sungai. Jumlah populasinya sekitar 5.000-7.000 jiwa.

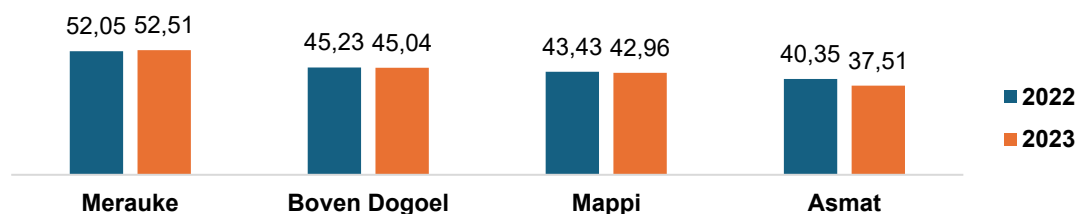
Suku lainnya yang berada di wilayah Anim Ha adalah Suku Asmat. Suku asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. populasi suku asmat terbagi dua yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal cara hidup, struktur sosial dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian yaitu suku bisman yang berada di antara sungai sinesty dan sungai nin serta Suku Simai. Suku Asmat meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan Dewa Fumeripitsy yang turun dari dunia gaib yang berada di seberang laut di belakang ufuk, tempat matahari terbenam tiap hari. Menurut keyakinan mereka, dewa nenek-moyang itu dulu mendarat di bumi di suatu tempat yang jauh di pegunungan. Dalam perjalanannya turun ke hilir sampai ia tiba di tempat yang kini didiami oleh orang Asmat hilir, ia mengalami banyak petualangan. Suku Asmat ada yang tinggal di daerah pesisir pantai, jarak mereka antara satu lokasi dengan lokasi pemukiman lainnya berkisar 100 km hingga 300 km. Bahkan yang berada di daerah pedalaman, dikelilingi oleh hutan heterogen yang berisi tanaman rotan dan kayu (gaharu) waktu tempuhnya mencapai 1 hari 2 malam untuk mencapai daerah pemukiman satu dengan yang lainnya. Sedangkan jarak antara perkampungan dengan kecamatan sekitar 70 km. Dengan kondisi geografis demikian, maka berjalan kaki merupakan satu-satunya cara untuk mencapai daerah perkampungan satu dengan lainnya. Orang-orang Asmat pandai membuat hiasan ukiran tanpa membuat sketsa terlebih dahulu. Ukiran-ukiran yang mereka buat memiliki makna, yaitu persembahan dan ucapan terima kasih kepada nenek moyang. Bagi Suku Asmat, mengukir bukan pekerjaan biasa, melainkan jalan bagi mereka untuk berhubungan dengan para leluhur.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang beragam dalam perlindungan anak berdasarkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) selama periode 2022-2023. Secara umum, hanya Kabupaten Merauke yang mengalami peningkatan skor dari 52,05 menjadi 52,51, sementara tiga kabupaten lainnya mencatat penurunan: Boven Digoel turun dari 45,23 ke 45,04, Mappi dari 43,43 ke 42,96, dan Asmat mengalami penurunan paling signifikan dari 40,35 menjadi 37,51.

Gambar II.100 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2023

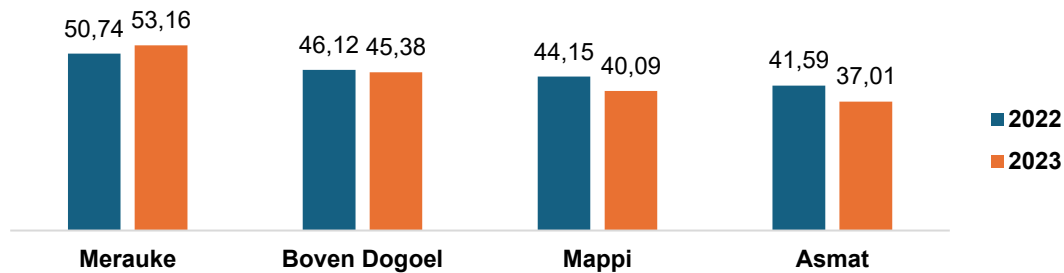


Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2022-2023

2) Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)

Provinsi Papua Selatan mencatat dinamika yang beragam dalam perlindungan hak anak selama periode 2022-2023 berdasarkan Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA). Kabupaten Merauke menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan skor dari 50,74 menjadi 53,16, menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami kemajuan signifikan. Namun, tiga kabupaten lainnya justru mengalami penurunan: Boven Digoel turun tipis dari 46,12 ke 45,38, sementara Mappi dan Asmat mengalami penurunan yang cukup tajam masing-masing dari 44,15 menjadi 40,09 dan dari 41,59 menjadi 37,01.

Gambar II ... Capaian Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2023

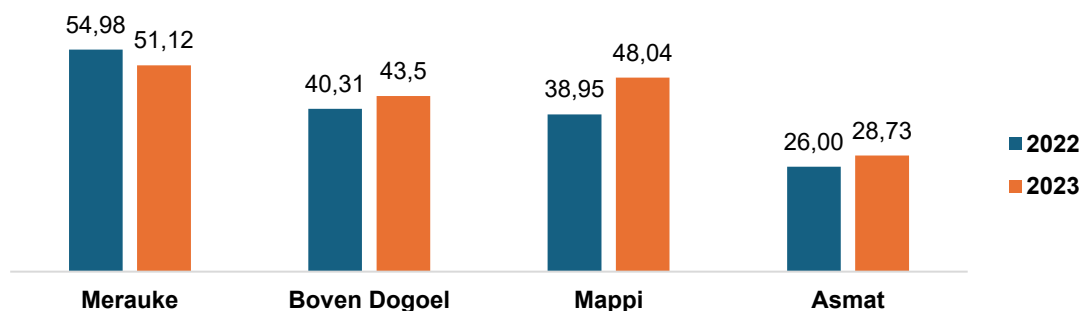


Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2022-2023

3) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Provinsi Papua Selatan mencatat perkembangan yang beragam dalam perlindungan anak berkebutuhan khusus selama periode 2022-2023. Kabupaten Merauke, meskipun masih memimpin dengan skor 51,12 pada 2023, mengalami penurunan sebesar 3,86 poin dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tiga kabupaten lain menunjukkan peningkatan yang menggembirakan: Boven Digoel naik 3,19 poin menjadi 43,50, Mappi melonjak 9,09 poin mencapai 48,04, dan Asmat meskipun masih berada di posisi terbawah dengan skor 28,73, berhasil mencatat kenaikan 2,73 poin. Secara keseluruhan, skor rata-rata provinsi mengalami peningkatan dari 40,06 menjadi 42,85, dengan kesenjangan antar kabupaten yang menyempit dari 28,98 poin menjadi 22,39 poin.

Gambar II.101 Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi Menurut Kabupaten di Papua Selatan Tahun 2022-2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2022-2023

4) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Provinsi Papua mencatat penurunan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) selama periode 2022-2023 berdasarkan kedua versi metadata. Metadata lama menunjukkan penurunan dari 67,35 menjadi 65,69 (-1,66 poin),

sementara metadata baru mencatat penurunan lebih kecil dari 67,85 ke 67,12 (-0,73 poin). Perbedaan hasil ini mengindikasikan adanya pengaruh perubahan metodologi pengukuran terhadap capaian IKK, sekaligus menunjukkan tren penurunan yang konsisten meskipun dengan intensitas berbeda.

Tabel II.68 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Papua berdasarkan Metadata Lama dan Baru, Tahun 2022-2023

NO	IKK/Dimensi/Indikator	Metadata Lama			Metadata Baru		
		2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
Indeks Kualitas Keluarga (IKK)		67,35	65,69	-1,66	67,85	67,12	-0,73
I	Dimensi Kualitas Legalitas Struktur	63,41	56,99	-6,42	59,36	55,47	-3,89
1.	Kepemilikan Buku Nikah	-	-	-	51,53	52,68	1,15
2	Presentase Rumah Tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	49,73	48,83	0.90	49,73	48,83	-0.90
3	Presentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami,istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	88,54	82,58	-5,96	88,54	82,58	-5,96
II	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	79,68	72,39	-7,29	79,03	78,6	-0,43
4	Presentase rumah tangga yang tidak ada saat dimana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya	89,47	87,78	-1,69	89,47	87,78	-1,69
5	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan	23,9	25,36	1,46	23,9	23,36	1,46
6	PoU semua umur	36,18	35,63	-0,55	36,18	35,63	-0,55
7	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	84,7	86,32	1,62	84,7	86,32	1,62
8	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	0,6	0,55	-0,05	1,07	1,10	0,03
9	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)	12,31	13,35	1,04	12,31	13,35	1,04
10	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	69,21	78,47	9,26	69,74	71,23	1,49
10	Presentase rumah tangga yang memiliki rumah	88,62	87,73	-0.89	88,62	87,73	-0,89
11	Persentase rumah tangga yang tidak miskin di	79,28	81,42	2,14	79,28	81,42	2,14

NO	IKK/Dimensi/Indikator	Metadata Lama			Metadata Baru		
		2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
	Kabupaten/Kota dan Provinsi						
12	Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	42,37	41,99	-0,38	49,71	53,23	3,56
13	Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)	88,52	83,8	-4,72	79,26	75,49	-3,77
14	Presentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	2,84	1,56	-1,28	2,84	1,56	-1,28
15	Presentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja	54,75	51,38	-3,37	65,1	66,38	1,28
IV	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP)	59,97	75,79	15,82	67,82	69,09	1,27
16	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pangasuhan dalam setahun terakhir	61,01	61	-0,10	-	-	-
17	Presentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	2,76	1,49	-1,27	2,76	1,49	-1,27
18	Presentase rumah tangga yang ada ART berpergian selama setahun terakhir	16,74	17,99	1,25	16,74	17,99	1,25
19	Presentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua	97,11	97,08	-0,03	97,11	97,08	-0,03
V	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB)	51,96	69,89	17,93	51,96	49,04	-2,92
20	Presentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	10,45	11,96	1,51	10,45	11,96	1,51
21	Presentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap	52,43	40,36	-12,07	52,43	40,36	-12,07
22	Presentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	85,22	84,79	-0,43	85,22	84,79	-0,43
23	Presentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	14,68	16,4	1,72	14,68	16,4	1,72
24	Presentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	75,97	70,06	-5,91	75,97	70,06	-5,91
25	Presentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17	3,5	4,32	0,82	3,5	4,32	0,82

NO	IKK/Dimensi/Indikator	Metadata Lama			Metadata Baru		
		2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
	tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet						

Sumber : Kementerian PPPA, 2023.

Selain mengembangkan Indikator Kualitas Keluarga yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN juga mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga terdiri dari 3 dimensi (dimensi ketentraman, dimensi kebahagiaan, dan dimensi kemandirian), dengan capaian pembangunan keluarga dalam skala 0 s.d 100 dengan kategori rentan (dibawah 40), berkembang (40 s.d 70, serta tangguh (diatas 70). Dalam laporan yang dikeluarkan oleh BKKBN, untuk Provinsi Papua Selatan, masih di hitung dengan capaian provinsi induk di Provinsi Papua (29 Kabupaten/Kota). Meskipun demikian, penggunaan data ini dapat tetap menjadi pertimbangan, dengan mengasumsikan tidak ada perbedaan signifikan terhadap capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Papua Selatan saat ini.

Provinsi Papua menunjukkan peningkatan dalam Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) dari 46,32 pada 2022 menjadi 52,47 pada 2023, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional yang meningkat dari 56,07 menjadi 61,43. Analisis per dimensi mengungkap pencapaian yang beragam: Dimensi Ketentraman meningkat dari 52,27 menjadi 56,07, mendekati angka nasional yang stabil di 58,23. Namun, Dimensi Kemandirian justru mengalami penurunan dari 40,50 menjadi 35,67, sementara nasional meningkat dari 52,41 ke 53,58. Di sisi lain, Dimensi Kebahagiaan mencatat lonjakan signifikan dari 46,18 menjadi 65,66, meski masih di bawah capaian nasional (71,26).

Tabel II.69 Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Papua menurut Dimensi Tahun 2022-2023

Tahun Capaian	Indeks Pembangunan Keluarga		Dimensi Ketentraman		Dimensi Kemandirian		Dimensi Kebahagiaan	
	Papua	Nasional	Papua	Nasional	Papua	Nasional	Papua	Nasional
2022	46,32	56,07	52,27	58,23	40,50	52,41	46,18	57,56
2023	52,47	61,43	56,07	58,23	35,67	53,58	65,66	71,26

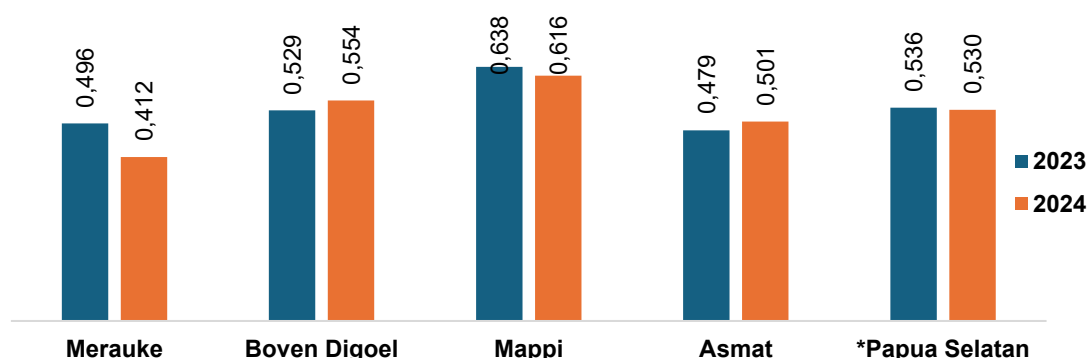
Sumber : Diolah dari Laporan Kependudukan BKKBN 2022-2023

5) Indeks Ketimpangan Gender

Sementara untuk mengetahui sejauh mana perempuan dan laki laki memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam pembangunan, indikator ketimpangan gender (IKG) merupakan salah satu tolok ukur. Indeks ini digunakan untuk mengukur kesenjangan gender dalam berbagai dimensi, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG memberikan gambaran tentang seberapa jauh pembangunan manusia terhambat karena kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. IKG juga mencerminkan hilangnya potensi Pembangunan manusia akibat ketimpangan gender dalam berbagai bidang. IKG diukur berdasarkan tiga dimensi utama yakni Kesehatan Reproduksi (angka kematian ibu, penggunaan kontrasepsi, dan presentase kelahiran yang dilayani tenaga Kesehatan), Pemberdayaan Gender (Indikator seperti tingkat partisipasi Perempuan dalam politik, Pendidikan, Perempuan dan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi) dan Pasar Tenaga Kerja (Indikator seperti tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran perempuan, dan kesetaraan upah antara laki-laki dan Perempuan).

Provinsi Papua Selatan mencatat perbaikan dalam kesetaraan gender dengan Indeks Ketimpangan Gender provinsi yang menurun dari 0,536 (2023) menjadi 0,530 (2024). Capaian ini didorong oleh kemajuan signifikan di Kabupaten Merauke yang berhasil menurunkan indeks dari 0,496 menjadi 0,412 dan Mappi yang turun dari 0,638 ke 0,616. Namun, dua kabupaten lainnya menunjukkan tren yang kurang menguntungkan: Boven Digoel mengalami peningkatan dari 0,529 menjadi 0,554, sementara Asmat naik tipis dari 0,479 ke 0,501.

Gambar II.102 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2025

6) Indeks Pembangunan Gender

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang menekankan status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Berdasarkan pada tabel diatas, trend positif yang meningkat trend positif meningkat dari tahun ke tahun pada angka IPM dan IPG, namun demikian ada kesenjangan pada IPM Perempuan, hal ini dikontribusikan dari ketimpangan perempuan di dalam memperoleh pendapatan yang ditunjukkan pendapatan per kapita perempuan yang jauh lebih rendah dibanding laki laki, serta ketimpangan perempuan terhadap akses pendidikan dasar. Data menunjukkan perempuan mengalami putus sekolah di tingkat SMP/ sederajat. Dalam hal pendidikan dasar, wilayah Asmat, Mappi dan Boven Digoel perlu mendapatkan perhatian khusus.

Tabel II.70 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Selatan Menurut Komponen Pembentuk Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita d disesuaikan dengan (Rp)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Provinsi Papua Selatan	64,53	68,42	12,78	12,55	8,8	7,9	15.251	5.698	73,11	61,24	83,76
Merauke	65,80	69,74	14,50	14,48	9,5 2	9,11	17.266	5.698	77,45	69,57	89,93
Boven Digoel	59,37	63,08	11,95	11,60	9,7 6	8,87	13.004	4.428	69,17	55,88	80,79
Mappi	64,10	67,98	11,10	11,90	7,9	6,45	10.854	5.079	66,77	57,36	85,91
Asmat	57,54	61,16	9,90	9,58	6,8 1	5,10	10.273	1.731	60,32	35,01	58,04

Sumber: BPS Nasional, 2024

(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IPG seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Hasil diskusi Pra Musrembang Tematik GEDSI pada penyusunan RPJMD Papua Selatan juga menyebutkan tantangan wilayah tersebut disebabkan oleh faktor kemiskinan, kesulitan geografis, kurangnya

dukungan jaminan perlindungan dan bantuan sosial. Berbagai kelompok masyarakat yang hadir dalam Pra Musrembang Tematik Gender dan Inklusi Sosial tersebut mengusulkan perlunya pembangunan infrastruktur pendidikan dan ketersediaan guru di wilayah yang sulit, serta disikapi dengan kebijakan-kebijakan afirmasi seperti beasiswa pendidikan bagi kelompok rentan termasuk perempuan dan disabilitas.

Tabel II.71 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	87,84	88,04	89,30	89,64	89,83
Boven Digoel	79,18	79,06	79,90	80,46	80,79
Mappi	83,48	83,78	84,88	85,16	85,91
Asmat	53,59	53,72	55,34	55,99	58,04
Papua Selatan*	76,02	76,15	77,36	77,81	83,76
Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber: BPS Nasional, 2024
 (*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IPG seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Tabel Indeks Pembangunan Gender 2020-2024 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Selatan, dimana Angka Provinsi Papua Selatan yang digunakan adalah rata-rata dari 4 kabupaten, karena belum tersedia data terpisah provinsi baru pasca pembentukan DOB. Berdasarkan tersebut diketahui terdapat peningkatan rata-rata IPG Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dari 76,07 pada tahun 2019 menjadi 83,76 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, namun rata-rata IPG ini masih di bawah capaian IPG Nasional yang telah mencapai 91,85 pada tahun 2024, sehingga diperlukan akselerasi peningkatan IPG di Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki IPG paling tinggi di Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke (tahun 2024 89,83) dan Kabupaten Mappi (tahun 2024: 85,91). Adapun IPG yang paling rendah terdapat di Kabupaten Asmat yaitu 55,99 pada tahun 2023 dan 58,04 pada tahun 2024.

7) Indeks Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas

pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pembangunan gender di Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari berbagai upaya pemberdayaan gender. Dalam meninjau sejauh mana pemberdayaan gender di daerah digunakan komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk mengukur seberapa besar perempuan dapat mencapai kapabilitasnya dalam berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang ekonomi dan politik. Indeks ini mengukur partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan Keputusan, diantaranya keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan.

IDG Papua Selatan dihitung dari rata-rata IDG 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan tabel berikut, diketahui terdapat peningkatan IDG Papua Selatan dari 60,46 pada tahun 2019 menjadi 64,00 pada tahun 2024. Meskipun begitu, IDG pada tahun 2023 tercatat menurun dibandingkan tahun 2021 dan 2022 yang mencapai angka 61. Capaian IDG Papua Selatan masih lebih rendah dibandingkan capaian IDG nasional yang mencapai 77,62 pada tahun 2024.

Tabel II.72 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2024

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	57,35	55,59	58,12	59,71	58,74	72,79
Boven Digoel	54,07	53,87	52,17	55,83	52,35	54,89
Mappi	55,56	55,98	58,91	52,82	56,55	57,73
Asmat	74,86	77,13	78,37	78,16	73,68	78,04
Rata-rata 4 Kabupaten	60,46	60,64	61,89	61,63	60,33	64,00
Nasional	75,24	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber: BPS Nasional, 2024

(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IPG seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

8) Keterlibatan perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di Parlemen menjadi salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keterwakilan dan pemberdayaan perempuan di sektor publik. Indikator ini memperlihatkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambilan keputusan dalam proses politik formal, khususnya di lembaga legislatif. Data yang disajikan menggunakan data dari masing-masing sekretariat DPR, DPRD per akhir tahu, dan terdapat kemungkinan terjadinya perubahan di tahun tertentu akibat dari

sengketa pemilu setelah hasil pemilu. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta keterkaitannya dengan pemberdayaannya.

Tabel II.73 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	6,67	6,67	6,67	6,67	20,00
Boven Digoel	5,56	5,00	5,00	5,00	5,00
Mappi	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Asmat	28,00	28,00	47,06	32,00	30,43

Sumber: BPS Nasional, 2024

Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang beragam dalam representasi perempuan di parlemen selama lima tahun terakhir. Kabupaten Asmat mencatat persentase tertinggi dengan fluktuasi dari 28% (2020-2021), melonjak menjadi 47,06% (2022), kemudian turun menjadi 32% (2023) dan 30,43% (2024). Merauke mengalami peningkatan signifikan pada 2024 menjadi 20%, setelah bertahan di angka 6,67% sejak 2020. Sementara itu, Boven Digoel stagnan di 5% sejak 2021 dan Mappi konsisten di 8% sepanjang periode.

9) Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Provinsi Papua Selatan mencatat pertumbuhan positif dalam partisipasi perempuan di sektor profesional, dengan peningkatan dari 34,71% (2020) menjadi 40,83% (2024), meskipun masih di bawah rata-rata nasional yang stabil di kisaran 49-50%. Capaian ini didorong oleh peningkatan signifikan di Merauke (46,46%) dan Boven Digoel (43,49%), serta perbaikan di Asmat (33,78%) setelah penurunan drastis pada 2022-2023. Mappi menjadi satu-satunya kabupaten dengan pertumbuhan terbatas (30,6%), mencerminkan ketimpangan antarwilayah.

Tabel II.74 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	34,62	40,42	47,69	42,12	46,46
Boven Digoel	33,06	33,14	44,50	35,81	43,49
Mappi	27,98	35,07	23,05	28,92	30,6
Asmat	43,16	44,22	25,64	25,18	33,78
*Papua Selatan	34,71	38,21	35,22	33,01	40,83
Nasional	48,76	49,99	48,65	49,53	50,13

Sumber: BPS Nasional, 2024

(*) Angka Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2023 merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

10) Sumbangan Pendapatan Perempuan

Provinsi Papua Selatan menunjukkan stabilitas dalam kontribusi pendapatan perempuan terhadap ekonomi keluarga, dengan rata-rata provinsi berkisar antara 37,80% hingga 39,39% selama lima tahun terakhir - secara konsisten berada di atas rata-rata nasional yang stabil di kisaran 37,09-37,31%. Mappi dan Asmat secara konsisten menjadi kontributor utama dengan capaian di atas 40%, sementara Merauke dan Boven Digoel berada di kisaran 34-38%.

Tabel II.75 Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	36,88	37,32	37,31	37,26	37,34
Boven Digoel	35,10	35,54	35,89	35,87	34,89
Mappi	41,93	42,36	40,85	42,01	42,27
Asmat	40,35	40,92	40,89	42,41	41,88
*Papua Selatan	38,57	39,04	38,74	39,39	37,80
Nasional	37,26	37,22	37,17	37,09	37,31

Sumber: BPS Nasional, 2024

(*) Angka Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2023 merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

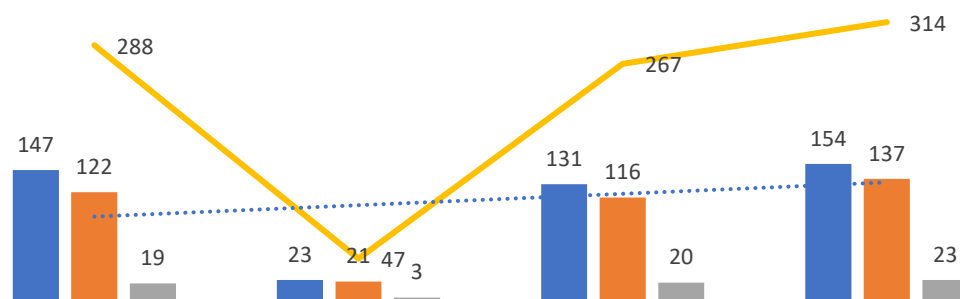
11) Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlindungan khusus dan masalah lainnya. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi CEDAW, atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah: (a) mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender; serta (c) memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Gambar dibawah ini menunjukkan sebaran jumlah kejadian kasus kekerasan di Provinsi Papua Selatan dari 2023- akhir Maret 2025.

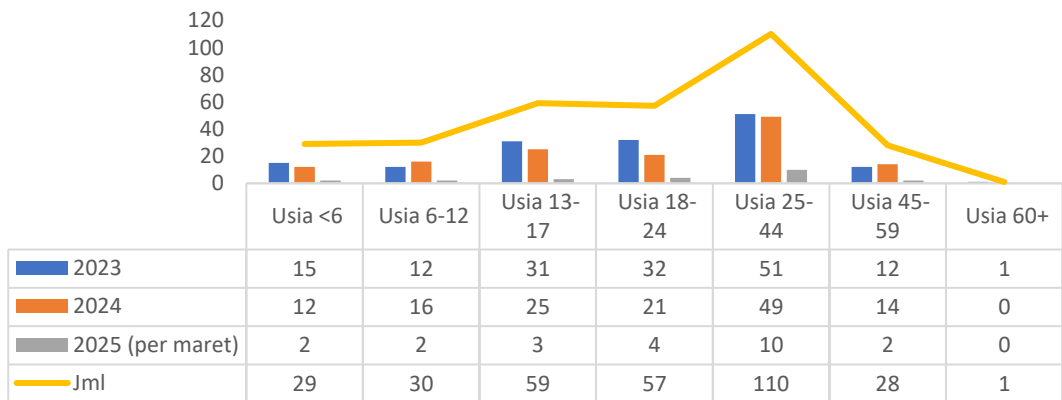
Berrdasarkan grafik menunjukkan ada trend penurunan pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2023 ke 2024, Adapun jumlah kasus tidak selalu mencerminkan keadaan situasi kekerasan yang sebenarnya, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, dimana yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan keadaan yang sesungguhnya. Situasi ini dapat terjadi karena masih minimnya informasi mengenai layanan pengaduan, terbatasnya kapasitas layanan maupun karena budaya tabu untuk menceritakan kasus kekerasan yang terjadi di ranah privat.

Gambar II.103 Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Papua Selatan 2023-2025



Dari data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Selatan dapat terlihat bahwa perempuan lebih rentan mengalami kekerasan di bandingkan laki-laki. Sementara dari sisi usia – kekerasan berbasis gender terjadi pada hampir semua kelompok usia, dengan korban paling banyak berada pada rentang usia 25-44 tahun diikuti pada kelompok usia 18-24 tahun dan kelompok usia 13-17 tahun. Dan apabila dilihat dari bentuk kekerasan, kekerasan yang paling sering dialami oleh kelompok perempuan dan anak merupakan kekerasan verbal / psikologis diikuti kekerasan dengan kekerasan fisik dan seksual.

Gambar II.104 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan Usia



Tabel II.76 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan Bentuk Kekerasan yang dialami Di Provinsi Papua Selatan 20223-2025

No	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploritasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
2023	66	77	48	2	0	34	2
2024	63	65	43	0	3	33	5
2025	12	12	5	2	0	8	0
Jumlah	141	154	96	4	3	75	7

Selanjutnya lokus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Papua Selatan, yang paling banyak dialami oleh Perempuan dan anak adalah di ruang privat yakni di dalam rumah dan tempat kerja. Kekerasan fisik di rumah tangga bisa berupa pemukulan, penyiksaan, atau tindakan yang menyebabkan luka fisik. Kekerasan psikologis meliputi ancaman, penghinaan, atau pelecehan verbal yang menyebabkan tekanan mental dan emosional hingga Kekerasan ekonomi terjadi yakni kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan melakukan pembatasan akses korban terhadap sumber daya ekonomi Adapun Kekerasan seksual selain dapat terjadi di lingkungan rumah tangga juga acapkali terhadi di tempat kerja yakni berupa pelecehan, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual..

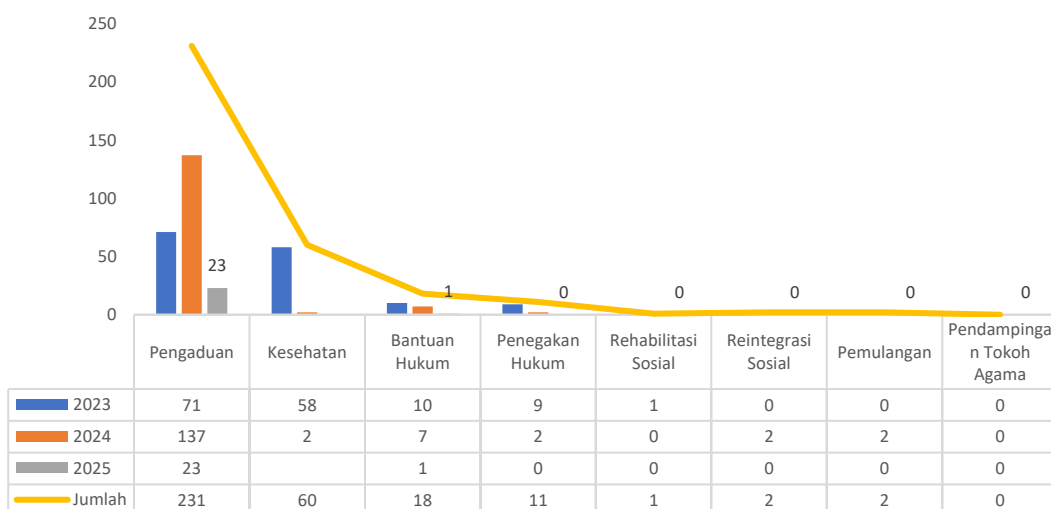
Tabel II.77 Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2023-2025

Tahun	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Kilat
2023	131	7	7	3	6	0
2024	110	6	10	3	8	0
2025	13	0	10	0	0	0
Jumlah	254	13	27	6	14	0

Dari data nampak jenis layanan yang sering di akses oleh korban adalah layanan Pengaduan sebanyak, dan layanan kesehatan serta layanan

bantuan hukum. Tabel diatas menggambarkan masih terbatasnya layanan yang terintegrasi antar layanan bagi korban kekerasan. Tinggi dan Rendahnya pelaporan kasus/ jumlah perempuan dan anak korban kekerasan juga berkaitan dengan ketersediaan layanan dan organisasi pengada layanan di suatu wilayah, serta berhubungan dengan ketersediaan Infrastruktur yang memudahkan untuk melapor (Jalan Raya, Kendaraan, Jaringan Internet, dan Listrik). Sehingga untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan, dan anak dari kasus kekerasan pemerintah daerah perlu secara konsisten memfasilitasi keberadaan layanan perlindungan anak dan perempuan dengan pendirian UPTD PPA, PATBM dan menyediakan layanan hukum, layanan psikologis, dan layanan medikolegal gratis bagi korban kekerasan salah satunya dengan memastikan ketersediaan pendamping dan pemberi bantuan hukum,serta psikolog. Mengembangkan program percepatan untuk penguatan infrastruktur layanan dan informasi, yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai upaya pemenuhan hak korban. Selain itu Daerah juga perlu menguatkan Jaringan penanganan di daerah dan lembaga penyedia layanan lainnya yang menjadi jembatan bagi penanganan kekerasan seperti - Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) - Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Bina Keluarga Remaja (BKR) - Layanan Sahabat Perempuan, Anak (SAPA) 129 - Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Gambar II.105 Jumlah Korban berdasarkan Jenis Pelayanan



12) Indeks Pembangunan Pemuda

Untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, dilakukan perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Dengan adanya IPP diharapkan terdapat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. IPP merupakan komposit dari domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan distriminasi, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.78.

Tabel II.78 Domain dan Indikator Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda

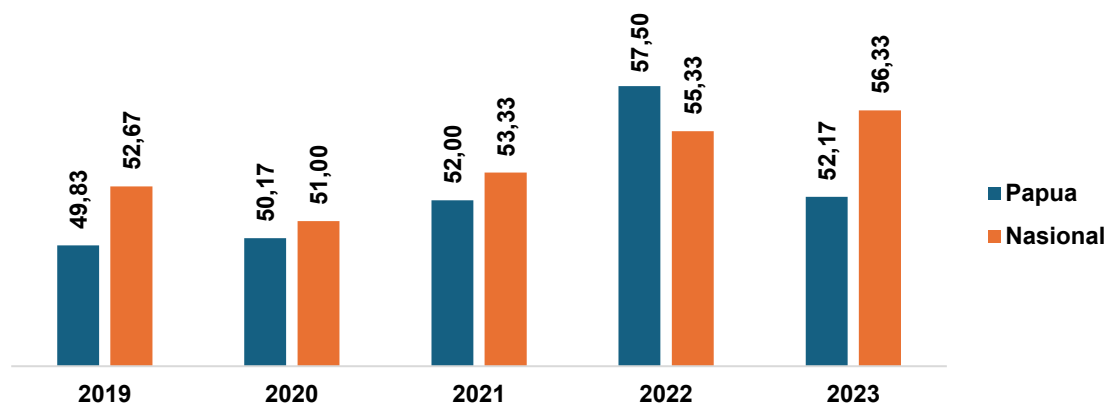
Domain	Indikator
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
	APK Sekolah Menengah
	APK Perguruan Tinggi
Kesehatan dan Kesejahteraan	Angka kesakitan pemuda
	Persentase korban kejahatan
	Persentase pemuda yang merokok
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil
Lapangan dan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda wirausaha kerah putih
	Tingkat pengangguran terbuka
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi
	Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat
Gender dan Diskriminasi	Angka perkawinan usia anak
	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas
	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2022 (<https://ipp.sarikata.com/?t=2021>)

Sampai dengan tahun 2024 data capaian Indeks Pembangunan Pemuda provinsi Papua Selatan belum dapat diukur, sehingga dalam mengukur capaian kinerja indikator ini pemerintah daerah Papua Selatan masih merujuk pada capaian provinsi Papua sebagai provinsi induk. Hasil publikasi capaian menunjukkan provinsi Papua mengalami penurunan signifikan dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dari 57,50 pada tahun 2022 menjadi 52,17 di tahun 2023, dengan penurunan sebesar 5,33 poin. Tren ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemberdayaan pemuda di Papua sehingga yang memerlukan evaluasi

menyeluruh terhadap program-program pembangunan pemuda yang telah diimplementasikan.

Gambar II.106 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2017-2023



Sumber : Kemenpora Indonesia, 2024

Provinsi Papua mencatat perkembangan yang beragam dalam pembangunan pemuda pada tahun 2023, dengan capaian berbeda di setiap dimensi. Pada dimensi Pendidikan, skor mengalami penurunan signifikan dari 60,00 (2022) menjadi 53,30, jauh di bawah rata-rata nasional yang stabil di 70,00. Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam akses dan kualitas pendidikan bagi pemuda Papua. Di sisi lain, dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan tetap stabil di 82,50, masih di atas nasional (70,00), mencerminkan keberhasilan program kesehatan dasar untuk pemuda.

Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja turun drastis dari 55,00 (2022) menjadi 45,00, menyamai angka nasional. Penurunan ini mengindikasikan memburuknya peluang ekonomi bagi pemuda. Sementara itu, Partisipasi dan Kepemimpinan juga mengalami penurunan dari 53,30 menjadi 50,00, meski masih lebih tinggi dari nasional (43,33). Dimensi Gender dan Diskriminasi kembali turun ke level terendah (30,00), jauh di bawah nasional (53,33), menegaskan adanya ketimpangan gender yang serius di kalangan pemuda Papua.

Tabel II.79 Dimensi Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Domain	Tahun	Papua	Indonesia
Pendidikan	2019	56,67	70,00
	2020	56,67	70,00
	2021	56,67	70,00
	2022	60,00	70,00

Domain	Tahun	Papua	Indonesia
	2023	53,30	70,00
Kesehatan dan Kesejahteraan	2019	67,50	55,00
	2020	67,50	55,00
	2021	75,00	60,00
	2022	82,50	65,00
	2023	82,50	70,00
Lapangan dan Kesempatan Kerja	2019	45,00	45,00
	2020	50,00	40,00
	2021	45,00	40,00
	2022	55,00	45,00
	2023	45,00	45,00
Partisipasi dan Kepemimpinan	2019	46,67	46,67
	2020	46,67	46,67
	2021	53,33	43,33
	2022	53,30	43,33
	2023	50,00	43,33
Gender dan Diskriminasi	2019	33,33	46,67
	2020	30,00	43,33
	2021	30,00	53,33
	2022	36,70	53,33
	2023	30,00	53,33

Sumber : Kemenpora Indonesia, 2024

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1) Angka Ketergantungan

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting karena semakin tinggi persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel II.80 Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Kategori	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (ribu jiwa)					
0-4	25,18	8,11	14,59	18,30	66,19

Kategori	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
5-9	32,03	12,09	18,07	23,34	85,53
10-14	24,56	8,69	15,78	12,82	61,85
15-19	17,58	4,62	10,24	10,16	42,60
20-24	15,33	4,16	7,87	8,38	35,73
25-29	18,06	4,98	7,70	7,28	38,01
30-34	17,43	4,94	7,57	7,47	37,40
35-39	17,84	5,48	7,63	7,45	38,40
40-44	16,63	4,37	6,55	6,16	33,71
45-49	12,75	3,52	5,47	5,54	27,29
50-54	11,53	3,04	4,17	3,88	22,61
55-59	8,69	1,92	3,21	3,24	17,06
60-64	8,20	1,48	2,57	1,97	14,21
65-69	5,39	0,77	1,64	1,29	9,09
70-74	4,10	0,53	1,12	0,70	6,44
75+	4,12	0,35	0,94	0,54	5,95
Penduduk Usia Belum Produktif (<15 tahun)	81,77	28,89	48,44	54,46	213,57
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	144,04	38,51	62,98	61,53	307,02
Penduduk Usia Tidak Produktif (≥65 tahun)	13,61	1,65	3,7	2,53	21,48
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	66,22	79,30	82,79	92,62	76,56

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023

Tabel II.80 menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Papua Selatan dan setiap kabupaten di Papua Selatan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan Papua Selatan sangat tinggi yaitu sebesar 76,66. Angka ini mempunyai arti bahwa setiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung beban 77 jiwa penduduk yang tidak produktif. Tingginya rasio ketergantungan ini disebabkan karena tingginya penduduk usia belum produktif (<15 tahun) dan tingginya angka kelahiran di Provinsi Papua Selatan. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi di Papua Selatan adalah Kabupaten Asmat (92,62) dan Mappi (82,79). Adapun wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling rendah di Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke (66,22) dan Boven Digoel (79,30).

Tingginya rasio ketergantungan di Provinsi Papua Selatan menunjukkan terbatasnya keleluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri, seperti untuk mengakses pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, maupun akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Hal ini disebabkan karena penduduk usia produktif di Provinsi Papua Selatan perlu membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2) Kepemudaan dan Olahraga

a. Pembangunan Olahraga

Salah satu indikator yang dapat mengukur pembangunan olahraga adalah Indeks Pembangunan Olahraga (*Sport Development Index*) yang merupakan indeks komposit dari berbagai dimensi yaitu, SDM, ruang terbuka, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa.

Tabel II.81 Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Dimensi	Definisi	2024
SDM	rasio antara jumlah ketenagaan olahraga (guru, pelatih, instruktur, dan relawan) dengan jumlah penduduk berusia 5 tahun ke atas pada suatu daerah	0,055
Ruang terbuka	tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik indoor maupun outdoor	0,048
Partisipasi	Keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir	0,300
Kebugaran	Kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti.	0,326
Literasi Fisik	pengetahuan, sikap, dan kompetensi fisik dari individu untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat	0,642
Kesehatan	Sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif.	0,413
Perkembangan Personal	Nilai-nilai kehidupan seperti persahabatan, kepemimpinan, respek pada aturan, menghormati lawan, dan keberanian mengambil risiko sebagai dampak perkembangan personal olahraga	0,527
Ekonomi	Eksternalitas di bidang ekonomi yang tumbuh sebagai dampak aktivitas olahraga	0,511
Performa	Dalam konteks olahraga prestasi, perolehan medali menjadi ukuran yang absolut	0,004
Indeks Pembangunan Olahraga		0,314

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2021-2022 (dalam “Laporan Nasional Sport Development Indexx”)

Provinsi Papua Selatan mencatat Indeks Pembangunan Olahraga sebesar 0,314 pada tahun 2024, dengan capaian beragam di berbagai dimensi. Dimensi Literasi Fisik menjadi yang tertinggi dengan nilai 0,642, menunjukkan pemahaman masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik sudah baik. Aspek Perkembangan Personal (0,527) dan Dampak Ekonomi (0,511) juga menunjukkan hasil positif, mencerminkan kontribusi olahraga dalam membangun karakter dan perekonomian daerah. Namun, beberapa tantangan masih perlu diperhatikan, seperti ketersediaan SDM olahraga yang hanya mencapai 0,055, keterbatasan ruang terbuka olahraga (0,048), serta partisipasi masyarakat (0,300) dan tingkat kebugaran (0,326) yang masih perlu ditingkatkan. Capaian

terendah terdapat pada Performa Prestasi dengan nilai 0,004, mengindikasikan perlunya pembinaan atlet yang lebih serius. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan olahraga di Papua Selatan telah memberikan dampak positif, terutama dalam literasi fisik dan ekonomi, namun memerlukan perhatian lebih pada peningkatan fasilitas, SDM, dan prestasi olahraga untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa depan.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1) Indeks Inovasi Daerah

Provinsi Papua Selatan menunjukkan peningkatan dalam Indeks Inovasi Daerah dengan skor yang naik dari 1,20 pada tahun 2023 menjadi 1,80 di tahun 2024. Meskipun demikian, kedua tahun tersebut masih berada dalam kategori "Kurang Inovatif", mengindikasikan bahwa kapasitas inovasi di wilayah ini belum mencapai tingkat yang memadai. Kenaikan sebesar 0,60 poin dalam satu tahun merupakan kemajuan yang patut diapresiasi, mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam ekosistem inovasi daerah.

Tabel II.82 Capaian Indeks Inovasi Daerah Papua Selatan Tahun 2023-2024

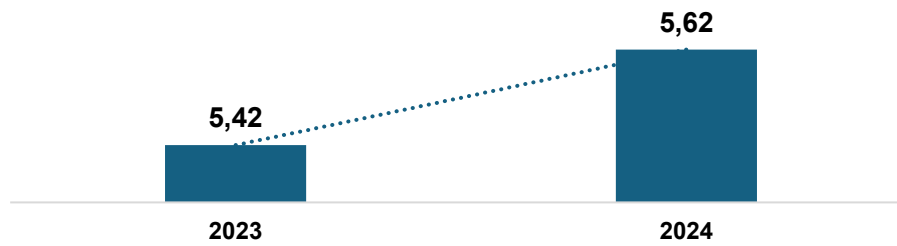
Uraian	2023	2024
Skor	1,20	1,80
Predikat	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

2) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Provinsi Papua Selatan mencatat pertumbuhan positif dalam kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2023, rasio PDRB industri pengolahan sebesar 5,42%, kemudian meningkat menjadi 5,62% di tahun 2024. Kenaikan sebesar 0,20 poin persen ini menunjukkan adanya perluasan aktivitas industri meskipun masih dalam skala terbatas.

Gambar II.107 Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2024

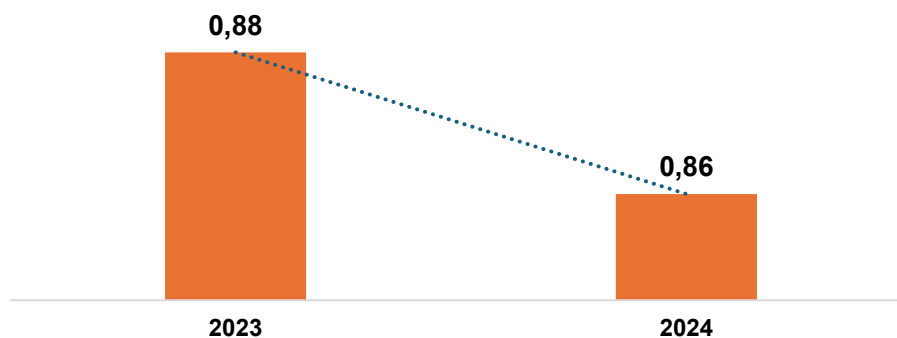


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2025

3) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Provinsi Papua Selatan mengalami sedikit penurunan kontribusi sektor akomodasi dan penyediaan makan minum terhadap perekonomian daerah. Rasio PDRB sektor ini turun dari 0,88% (2023) menjadi 0,86% (2024), dengan penurunan sebesar 0,02 poin persen. Penurunan yang sangat kecil ini menunjukkan kondisi sektor yang relatif stabil meski belum menjadi penggerak utama ekonomi.

Gambar II.108 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2025

4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK merupakan angka persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

TPAK Provinsi Papua Selatan menunjukkan tren fluktuatif dengan puncak tertinggi 73,29% (2021) dan terendah 63,99% (2023), sebelum kembali pulih ke 71,67% (2024). Kabupaten Asmat konsisten memimpin dengan TPAK tertinggi (81,78% pada 2020), meski sempat turun drastis di 2023 (59,71%). Boven Digoel dan Merauke juga mencatat TPAK relatif tinggi (rata-rata di atas 70%), sementara Mappi menjadi satu-satunya kabupaten dengan TPAK stabil di kisaran 55-64%.

Tabel II.83 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten di Papua Selatan Tahun 2020-2024 (%)

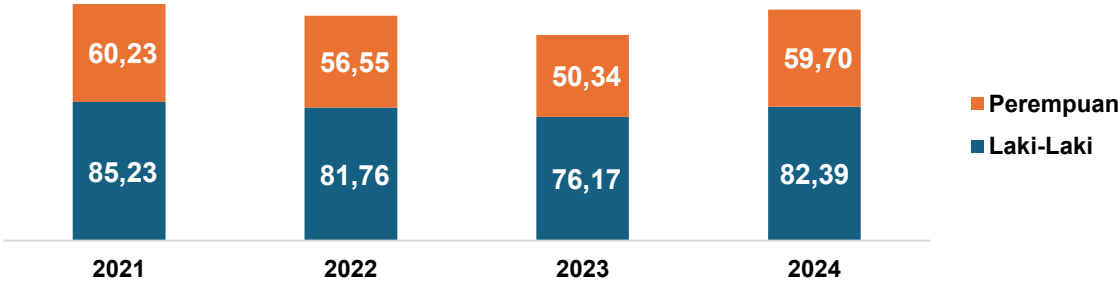
Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	70,12	70,69	62,43	68,72	73,56
Boven Digoel	75,48	79,72	75,62	71,84	72,15
Mappi	64,09	61,60	60,42	55,69	61,16
Asmat	81,78	81,16	80,35	59,71	77,83
Provinsi Papua Selatan	72,87	73,29	69,71	63,99	71,67

Sumber: BPS, 2025

*Catatan: Angka Provinsi Tahun 2020-2023 menggunakan angka rata-rata Kabupaten

TPAK di Papua Selatan menunjukkan disparitas gender yang signifikan selama 2021-2024. Laki-laki secara konsisten memiliki partisipasi lebih tinggi (rata-rata 81,39%) dibanding perempuan (rata-rata 56,71%), dengan selisih mencapai 25,9 poin persentase di 2023. Meski sempat turun di 2023, TPAK laki-laki kembali meningkat ke 82,39% pada 2024, sementara perempuan mengalami fluktuasi dari 60,23% (2021) menjadi 59,70% (2024).

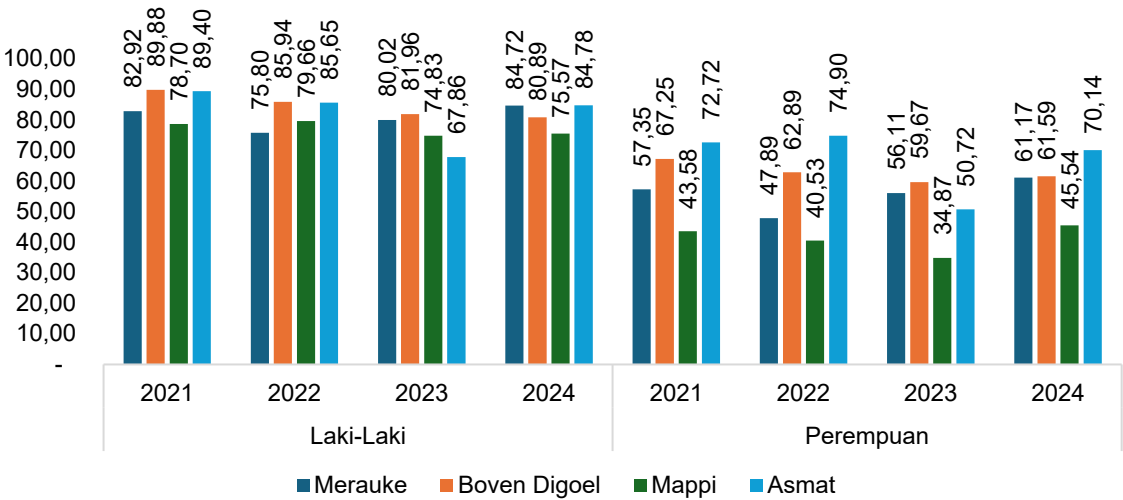
Gambar II.109 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2024



*Catatan: Angka Provinsi Tahun 2020-2023 menggunakan angka rata-rata Kabupaten
Sumber: BPS, 2025

TPAK di Papua Selatan menunjukkan pola ketimpangan gender yang konsisten di seluruh kabupaten. Boven Digoel dan Asmat mencatat partisipasi tertinggi untuk laki-laki (rata-rata di atas 80%), sementara Mappi memiliki angka terendah untuk perempuan (hanya 34,87% di 2023). Selisih gender terbesar terjadi di Mappi (hingga 40 poin), sedangkan Asmat menunjukkan fluktuasi yang cukup ekstrim dimana TPAK perempuan sempat mencapai 74,90% (2022) kemudian terus menurun ke 50,72% (2023).

Gambar II.110 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Pembangunan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2024



Sumber: BPS, 2025

*Catatan: Angka Provinsi Tahun 2020-2023 menggunakan angka rata-rata Kabupaten

5) Pekerjaan Utama Penduduk

Tahun 2024 sektor ketenagakerjaan Papua Selatan didominasi oleh pekerja buruh/karyawan/pegawai (71.860 jiwa) dan usaha mandiri (73.630 jiwa), dengan partisipasi laki-laki secara signifikan lebih tinggi dibanding perempuan di semua kategori. Laki-laki mendominasi sebagai buruh/karyawan (49.537 jiwa) dan pengusaha mandiri (47.336 jiwa), sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam usaha mandiri (26.294 jiwa) dibanding sebagai karyawan (22.323 jiwa). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan gender dimana pekerjaan dengan buruh tetap hanya 414 perempuan yang terlibat, jauh di bawah laki-laki (2.867 jiwa), kemudian sektor non-pertanian perempuan hanya menyumbang 280 pekerja, berbanding 3.276 laki-laki.

Tabel II.84 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa)

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
Berusaha Sendiri	47,336	26,294	73,63
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	23,386	7,774	31,16
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2,867	414*	3,281
Buruh/karyawan/pegawai	49,537	22,323	71,86
Pekerja bebas di Pertanian	979*	214*	1,193
Pekerja bebas di Non Pertanian	3,276	280*	3,556

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

6) Jumlah Angkatan Kerja

Hasil capaian indikator penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Selatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 329.497 orang, sebanyak 236.140 orang termasuk dalam angkatan kerja, dengan rincian 143.146 laki-laki dan 92.994 perempuan. Dari angkatan kerja tersebut, 226.586 orang telah bekerja (138.095 laki-laki dan 88.491 perempuan), sementara 9.554 orang menganggur (5.051 laki-laki dan 4.503 perempuan).

Tabel II.85 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
I .Angkatan Kerja	143.146	92.994	236.140
Bekerja	138.095	88.491	226.586
Pengangguran Terbuka	5.051	4.503	9.554
II. Bukan Angkatan Kerja	30.587	62.770	93.357
Sekolah	13.716	13.624	27.340
Mengurus Rumah Tangga	6.197	45.485	51.682
Lainnya	10.674	3.661	14.335
Papua Selatan	173.733	155.764	329.497

Sumber: BPS Provinsi Papua, (dalam dokumen Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025)

Di luar angkatan kerja, terdapat 93.357 orang, terdiri dari 30.587 laki-laki dan 62.770 perempuan. Sebanyak 27.340 orang (13.716 laki-laki dan 13.624 perempuan) masih bersekolah, 51.682 orang (6.197 laki-laki dan 45.485 perempuan) mengurus rumah tangga, dan 14.335 orang (10.674 laki-laki dan 3.661 perempuan) terlibat dalam kegiatan lainnya.

Pada tahun 2024, data ketenagakerjaan di Papua Selatan menunjukkan bahwa dari total 236.140 penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja, sebanyak 226.586 orang (95,95%) telah bekerja, sementara 9.554 orang (4,05%) termasuk dalam kategori pengangguran. Pengangguran tersebut terdiri dari 2.600 orang yang

pernah bekerja sebelumnya dan 6.954 orang yang belum pernah bekerja sama sekali.

Tingkat ketenagakerjaan bervariasi berdasarkan kelompok usia. Kelompok usia 40-44 tahun mencatat persentase pekerja tertinggi sebesar 98,89%, diikuti oleh kelompok 60+ tahun (98,49%) dan 35-39 tahun (96,96%). Di sisi lain, kelompok usia 20-24 tahun memiliki tingkat pengangguran tertinggi sebesar 11,13%, dengan mayoritas pengangguran berasal dari mereka yang belum pernah bekerja (1.946 orang dari total 2.307 pengangguran).

Secara umum, semakin muda kelompok usia, semakin tinggi persentase pengangguran, seperti terlihat pada kelompok 15-19 tahun (6,3%) dan 20-24 tahun (11,13%). Sebaliknya, kelompok usia di atas 30 tahun menunjukkan tingkat ketenagakerjaan yang sangat tinggi, dengan persentase bekerja di atas 92%. Data ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di Papua Selatan lebih stabil untuk penduduk berusia di atas 30 tahun, sementara kelompok usia muda masih menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja.

Tabel II.86 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir, Tahun 2024

Kelompok Umur	Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah		
15-19	11.846	27	769	796	12.642	93,7
20-24	18.423	361	1946	2307	20.730	88,87
25-29	30.165	572	1823	2395	32.560	92,64
30-34	29.001	624	345	969	29.970	96,77
35-39	32.673	170	860	1030	33.703	96,96
40-44	29.826	165	171	336	30.162	98,89
45-49	22.053	162	350	512	22.565	97,73
50-54	18.899	158	312	470	19.369	97,57
55-59	12.519	228	187	415	12.934	96,79
60+	21.181	133	191	324	21.505	98,49
Papua Selatan	226.586	2.600	6.954	9.554	236.140	95,95

Sumber: BPS Provinsi Papua, (dalam dokumen Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025)

Provinsi Papua Selatan mencatat capaian positif di sektor ketenagakerjaan pada tahun 2024 dengan total 236.140 penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tergabung dalam angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 226.586 orang (95,95%) berhasil terserap dalam dunia kerja, sementara sisanya 9.554 orang (4,05%) masih berstatus pengangguran. Data ini menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi di wilayah tersebut.

Analisis per kabupaten menunjukkan variasi yang menarik. Kabupaten Merauke menempati posisi teratas dengan jumlah angkatan kerja terbanyak mencapai 116.240 orang, namun sekaligus menyumbang angka pengangguran tertinggi sebesar 5.893 orang. Kabupaten Boven Digoel justru mencatat kinerja terbaik dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 96,74% dari total 29.491 angkatan kerja. Sementara itu, Kabupaten Asmat menonjol dengan tingkat pekerjaan tertinggi sebesar 97,95% meskipun seluruh 1.008 penganggurannya berasal dari kelompok yang belum pernah bekerja.

Tabel II.87 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir, Tahun 2024

Kabupaten	Angkatan Kerja				Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran				
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah		
Merauke	110.347	2.055	3.838	5.893	116.240	94,93
Boven Digoel	28.530	163	798	961	29.491	96,74
Mappi	39.539	382	1.310	1.692	41.231	95,90
Asmat	48.170	-	1.008	1.008	49.178	97,95
Papua Selatan	226.586	2.600	6.954	9.554	236.140	95,95

Sumber: BPS Provinsi Papua, (dalam dokumen Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025)

7) Lapangan Pekerjaan Utama

Provinsi Papua Selatan menunjukkan komposisi ketenagakerjaan yang menarik berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada tahun 2024. Secara keseluruhan, sektor jasa mendominasi pasar kerja dengan menyerap 3.169.500 pekerja (144,44%), disusul oleh sektor industri pengolahan sebanyak 2.604.288 pekerja (118,68%), dan sektor pertanian dengan 1.821.730 pekerja (83,02%).

Tabel II.88 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Kabupaten	Satuan	Lapangan Pekerjaan Utama			Rata-Rata
		Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	
Merauke	Jiwa	2.067.262	2.812.003	3.247.304	2.616.725
	Persen	79,00	107,46	124,10	103,52
Boven Digoel	Jiwa	813.224	1.816.465	2.562.459	1.477.257
	Persen	55,05	122,96	173,46	117,16
Mappi	Jiwa	1.959.684	2.492.713	2.719.661	2.021.067
	Persen	96,96	123,34	134,57	118,29
Asmat	Jiwa	1.630.367	1.972.352	3.775.421	1.990.045
	Persen	81,93	99,11	189,72	123,58
Papua Selatan	Jiwa	1.821.730	2.604.288	3.169.500	2.194.359
	Persen	83,02	118,68	144,44	115,38

Sumber: BPS Provinsi Papua, (dalam dokumen Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025)

Pola ketenagakerjaan bervariasi di tiap kabupaten. Kabupaten Merauke, sebagai wilayah terbesar, memiliki struktur ketenagakerjaan yang relatif seimbang dengan dominasi sektor jasa (3.247.304 pekerja). Sementara itu, Kabupaten Boven Digoel menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor jasa yang menyerap 2.562.459 pekerja (173,46%), jauh melampaui sektor lainnya. Kabupaten Mappi menampilkan karakteristik unik dengan kontribusi signifikan dari sektor pertanian (1.959.684 pekerja atau 96,96%) yang hampir menyamai sektor jasa. Kabupaten Asmat menjadi yang paling mencolok dengan dominasi ekstrim sektor jasa yang mencapai 3.775.421 pekerja (189,72%), hampir dua kali lipat dari sektor lainnya.

Provinsi Papua Selatan menunjukkan disparitas upah yang mencolok antara pekerja formal dan informal pada tahun 2024. Pekerja formal menerima upah rata-rata Rp.14 juta per bulan, lima kali lipat lebih tinggi dibanding pekerja informal yang hanya Rp.2,2 juta. Sektor industri formal menjadi penyumbang upah tertinggi (Rp.14,6 juta), sementara di sektor informal justru jasa yang mendominasi dengan upah Rp.3,1 juta. Tiap kabupaten menunjukkan pola unik, Merauke dengan upah pertanian formal tertinggi (Rp.4,1 juta), Boven Digoel dengan disparitas terbesar (upah formal 5x informal), serta Asmat dimana industri formal membayar Rp.4,3 juta namun jasa informal mendominasi. Data ini mengungkap tiga masalah utama yaitu kesenjangan upah ekstrim antar status pekerja, ketimpangan antar sektor, dan variasi regional yang signifikan, yang memerlukan intervensi kebijakan khusus untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih adil di Papua Selatan.

Tabel II.89 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Informal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Kabupaten	Kategori	Lapangan Pekerjaan Utama			Total
		Pertanian	Industri/ Manufaktur	Jasa	
Merauke	formal	4.141.428	3.684.357	3.738.040	3.771.751
	informal	2.067.262	2.812.003	3.247.304	2.616.725
Boven Digoel	formal	4.205.455	4.083.736	2.859.709	3.385.306
	informal	813.224	1.816.465	2.562.459	1.477.257
Mappi	formal	2.737.828	2.563.043	3.238.369	3.169.926
	informal	1.959.684	249.271	2.719.661	2.021.067
Asmat	formal	2.534.151	4.343.488	3.773.251	3.762.448
	informal	1.630.367	1.972.352	3.775.421	1.990.045
Papua Selatan	formal	13.618.862	14.674.624	13.609.369	14.089.431
	informal	1.821.730	2.604.288	3.169.500	2.194.359

* Pekerja Formal: Buruh/Karyawan/Pegawai

** Pekerja Informal: Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian

Sumber: BPS Provinsi Papua (dalam dokumen Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025)

Data upah pekerja informal di Papua Selatan tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Rata-rata, pekerja dengan pendidikan SMA ke atas memperoleh upah tertinggi sebesar Rp.2.999.126 per bulan, sementara yang tidak pernah sekolah atau belum tamat SD hanya menerima Rp.1.600.036. Pola ini terlihat konsisten di seluruh kabupaten, dengan Mappi mencatat disparitas terbesar. Pekerja berpendidikan SMA di Mappi memperoleh Rp.3.461.520, hampir dua kali lipat dibandingkan mereka yang tidak tamat SD.

Kabupaten Merauke dan Asmat menunjukkan tren serupa, di mana setiap kenaikan jenjang pendidikan diikuti peningkatan upah sekitar Rp.400.000 – Rp.1.000.000 per bulan. Sementara itu, Boven Digoel menjadi wilayah dengan upah terendah di semua tingkat pendidikan, mencerminkan tantangan ekonomi yang lebih besar.

Tabel II.90 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Pendidikan Tertinggi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Kabupaten	Pendidikan Tertinggi				Total
	Tidak Pernah Sekolah / Belum Tamat SD	SD/MI	SMP/MTs	SMA ke atas	
Merauke	1.815.631	2.356.633	3.128.143	3.015.925	2.616.725
Boven Digoel	962.606	1.219.594	1.898.573	2.059.604	1.477.257
Mappi	1.753.044	1.612.530	2.532.151	3.461.520	2.021.067
Asmat	1.522.429	2.263.067	3.068.948	3.182.262	1.990.045
Papua Selatan	1.600.036	1.939.996	2.857.462	2.999.126	2.194.359

* Pekerja Informal: Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

8) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang menentukan daya saing wilayah Provinsi Papua Selatan. Apabila tenaga kerja suatu daerah berkualitas dan berpendidikan tinggi, maka tingkat produktifitas tenaga kerja akan semakin membaik. Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa mayoritas angkatan kerja di Provinsi Papua Selatan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah (tidak/belum tamat

SD/memiliki ijazah SD) yaitu sebesar 51,39% atau 134.089 orang. Dari 134.089 orang tersebut, sebanyak 131.502 orang atau 98,07% telah bekerja. Angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas) tergolong rendah yaitu sebesar 10,67% atau 27.844 orang angkatan kerja. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki proporsi angkatan kerja berpendidikan tinggi terbesar adalah Kabupaten Merauke yaitu sebesar 12,16% atau 15.459 jiwa. Adapun kabupaten dengan angkatan kerja berpendidikan tinggi paling sedikit adalah Kabupaten Mappi yaitu hanya mencapai 6,79% atau 2.819 orang angkatan kerja.

Tabel II.91 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023

Kabupaten	Jenis Kegiatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Merauke	Angkatan Kerja	73.091	40.530	113.621	-	-	124.166	77.862	49.315	127.177	72.305	42.006	114.311	65.765	41.347	107.112
	- Bekerja	71.602	39.057	110.659	-	-	119.908	76.269	48.122	124.391	69.784	41.512	111.296	63.937	39.306	103.243
	- Pengangguran	1.489	1.437	2.962	-	-	4.258	1.593	1.193	2.786	2.521	494	3.015	1.828	2.041	3.869
	Bukan Angkatan Kerja	13.677	39.669	53.346	-	-	52.907	16.041	36.680	52.721	23.082	45.704	68.786	16.422	32.336	48.758
	- Sekolah	6.389	7.967	14.356	-	-	12.644	3.863	4.873	8.736	6.510	8.025	14.535	6.491	6.367	12.858
	- Mengurus Rumah Tangga	4.192	30.383	34.575	-	-	32.244	2.691	28.293	30.984	6.534	34.872	41.406	4.397	22.413	26.810
	- Lainnya	3.096	1.319	4.415	-	-	8.019	9.487	3.514	13.001	10.038	2.807	12.845	5.534	3.556	9.090
	Jumlah	86.768	80.199	166.967	-	-	177.073	93.903	85.995	179.898	95.387	87.710	183.097	82.187	73.683	155.870
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	82,24	50,54	68,05	-	-	70,12	-	-	-	75,8	47,8	62,43	80,02	56,11	68,72
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	97,81	-	-	97,36	-	-	96,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,04	3,63	2,61	-	-	-	-	-	2,19	-	-	2,64	-	-	3,61
Boven Digoel	Angkatan Kerja	23.086	12.452	35.538	-	-	-	-	-	-	24.116	14.314	38.430	-	-	-
	- Bekerja	22.388	12.054	34.442	21.056	11.927	32.983	21.819	14.050	35.869	22.140	14.152	36.292	16.694	10.420	27.384
	- Pengangguran	698	398	1.096	2.104	800	2.904	2.086	504	2.590	1.976	162	2.138	626	240	866
	Bukan Angkatan Kerja	3.234	8.678	11.912	-	-	-	-	-	-	3.946	8.445	12.391	-	-	-
	- Sekolah	1.487	1.183	2.670	691	1.304	1.995	838	956	1.794	1.808	1.551	3.359	1.565	1.127	2.692
	- Mengurus Rumah Tangga	1.321	7.269	8.590	889	7.337	8.226	1.055	5.784	6.839	1.644	6.816	8.460	843	5.609	6.452
	- Lainnya	426	226	652	1.162	275	1.437	800	348	1.148	494	78	572	1.464	468	1.932
	Jumlah	26.320	21.130	47.450	25.902	21.643	47.545	26.598	21.642	48.240	28.062	22.759	50.821	21.462	17.864	39.326
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	87,71	58,93	74,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,02	3,2	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mappi	Angkatan Kerja	27.549	17 750	45 299	27.285	15.718	43.003	27.225	14.311	41.536	27.225	14.311	41.536	-	-	-
	- Bekerja	26.352	16 906	43 258	25.280	15.240	40.520	25.927	13.902	39.829	25.927	13.902	39.829	24.133	10.583	34.716
	- Pengangguran	1.197	844	2 041	2.005	478	2.483	1.298	409	1.707	1.298	409	1.707	1.246	285	1.531
	Bukan Angkatan Kerja	5.700	15 069	20 769	6.776	17.320	24.096	7.370	18.527	25.897	7.370	18.527	25.897	-	-	-
	- Sekolah	2.193	2 366	4 559	2.753	2.477	5.230	1.738	1.968	18.737	1.738	1.968	18.737	2.193	2.362	4.555
	- Mengurus Rumah Tangga	1.216	11 790	13 006	1.921	13.122	15.043	3.183	15.554	3.454	3.183	15.554	3.454	1.680	12.287	13.967

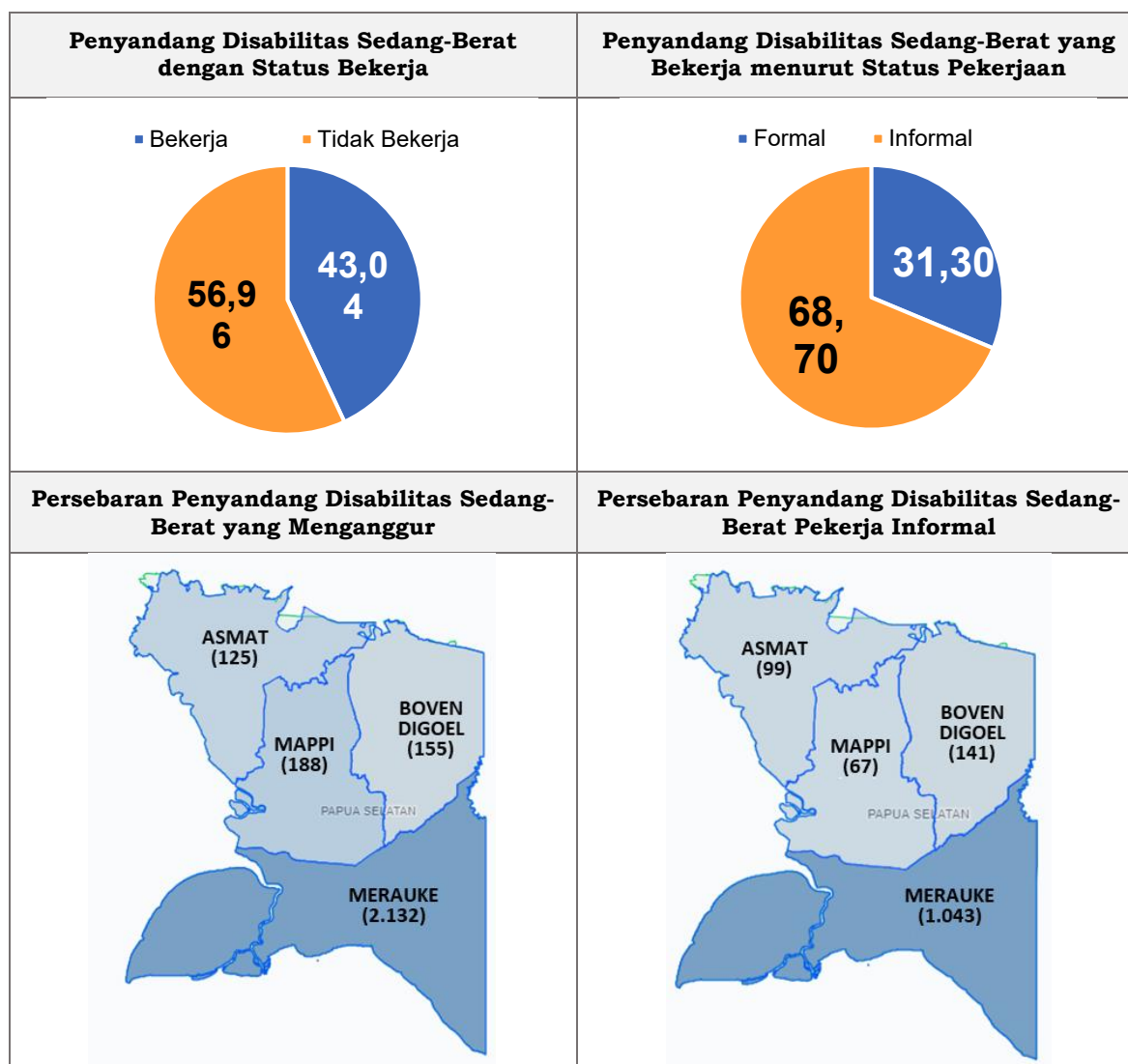
Kabupaten	Jenis Kegiatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
	- Lainnya	2.291	913	3 204	2.102	1.721	3.823	2.449	1.005	67.433	2.449	1.005	67.433	4.664	5.652	10.316
	Jumlah	33.249	32 819	66 068	34.061	33.038	67.099	34.595	32.838	67.433	34.595	32.838	67.433	33.916	31.169	65.085
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asmat	Angkatan Kerja	27.521	23.292	50.813	29.044	23.367	52.411	29.974	23.780	53.754	-	-	-	-	-	-
	- Bekerja	27.224	23.051	50.275	28.209	22.956	51.165	29.734	23.780	53.514	-	-	-	-	-	-
	- Pengangguran	297	241	538	835	411	1.246	240	0	240	-	-	-	-	-	-
	Bukan Angkatan Kerja	2.640	7.510	10.150	4.003	7.673	11.676	3.554	8.923	12.477	-	-	-	-	-	-
	- Sekolah	1.128	1.169	2.297	2.264	1.688	3.952	1.673	1.992	3.665	-	-	-	-	-	-
	- Mengurus Rumah Tangga	1.007	6.062	7.069	456	5.246	5.702	348	6.025	6.373	-	-	-	-	-	-
	- Lainnya	505	279	784	1.283	739	2.022	1.533	906	2.439	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	30.161	30.802	60.963	33.047	31.040	64.087	37.082	41.626	66.231	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka 20224)

9) Pekerja dengan Disabilitas

Gambar II.111 menunjukkan kondisi pekerja disabilitas di Papua Selatan berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.111 diketahui bahwa dari total 4.566 penduduk disabilitas sedang dan berat yang berusia 15 tahun ke atas, diantaranya terdapat 2.600 (56,96%) yang tidak bekerja. Mereka yang tidak bekerja paling banyak di Kabupaten Merauke, sebagai ibukota provinsi Papua Selatan. Selain itu, dari total 1.956 penduduk disabilitas sedang dan berat yang bekerja berusia 15 tahun ke atas, diantaranya terdapat 1.350 (68,70%) yang bekerja di sektor informal yang rentan dan berisiko terhadap guncangan ekonomi. Penyandang disabilitas sedang-berat pekerja informal terbanyak terdapat di Kabupaten Merauke.

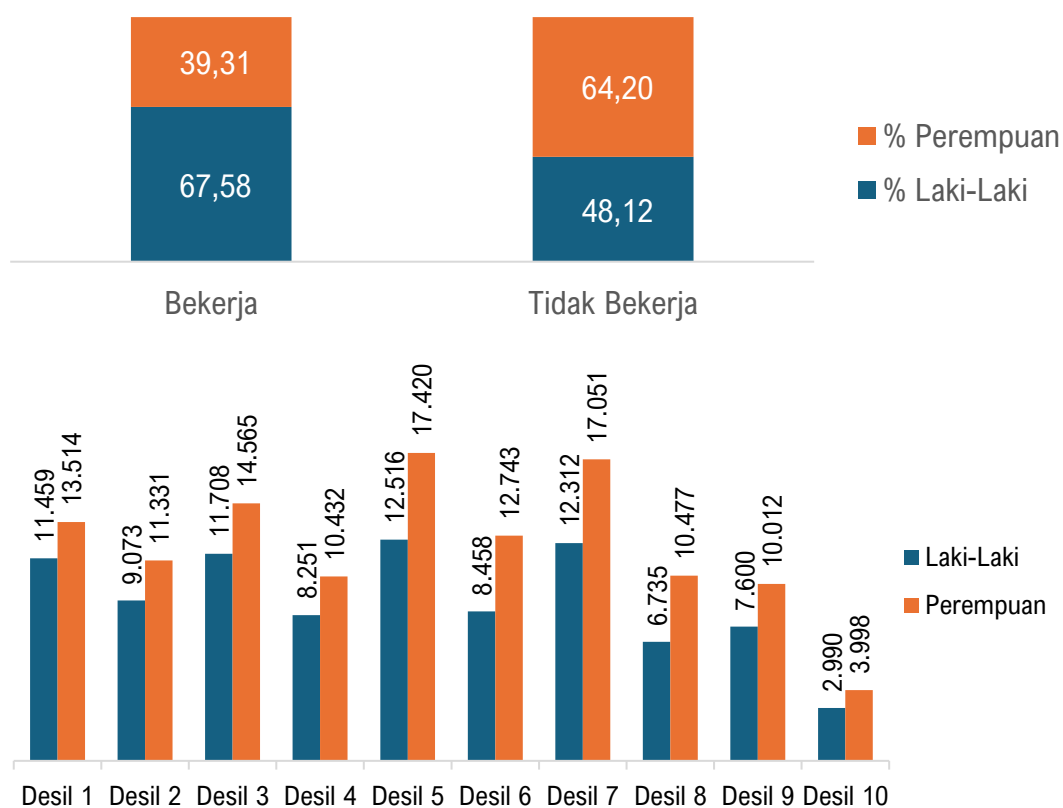
Gambar II.111 Kondisi Pekerja Disabilitas di Papua Selatan



Sumber: Regsosek 2022 (dalam SEPAKAT)

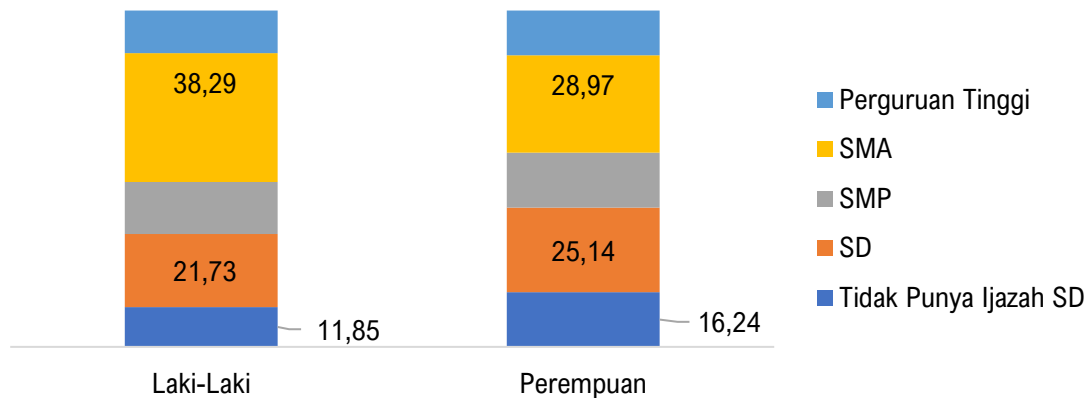
Perempuan di Papua Selatan menghadapi tantangan pengangguran yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Masalah ini semakin parah bahwa pengangguran banyak terjadi pada kelompok menengah ke bawah. Kesenjangan gender di dunia kerja di Papua Selatan perlu diperhatikan lebih lanjut terutama pada akses terhadap pekerjaan yang layak, ketersediaan pelatihan, ekonomi, dan dukungan pengasuhan anak. Data Regsosek berikut nampak bahwa ketimpangan Perempuan dan Laki-laki di Papua Selatan cukup tinggi, Dimana Perempuan tidak bekerja lebih banyak 64,20% di banding laki laki sebanyak 39,31%.

Gambar II.112 Penduduk dengan Status Bekerja Berdasarkan Gender



Sumber: Regsosek 2022 diolah SEPAKAT

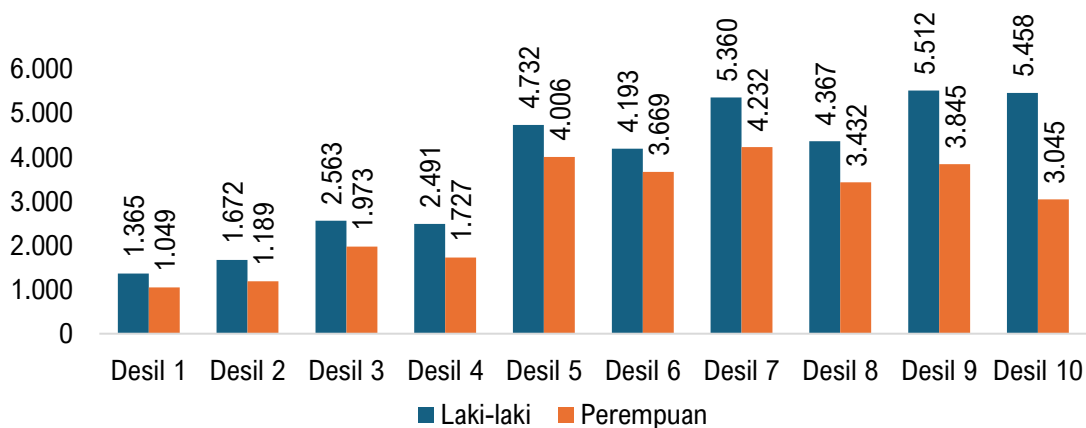
Gambar II.113 Ijazah Tertinggi Berdasarkan Gender usia 15 Tahun ke Atas di Papua Selatan



Sumber: Regsosek 2022 diolah SEPAKAT

Kesempatan Perempuan untuk mendapatkan akses pada pekerjaan dapat dipengaruhi dari tingkat Pendidikan dan ketrampilan. Data Regsosek menunjukkan bahwa Perempuan di Papua Selatan mengalami ketertertinggalan dalam akses pendidikan, Dimana sebanyak 16,24% Perempuan banyak yang tidak punya ijazah SD dan lulusan SD sementara sebanyak 28,97% pada jenjang Pendidikan menengah. Kesenjangan dalam hal Pendidikan ini dipengaruhi oleh ekonomi, tetapi gender tetap menjadi faktor penentu penting. Kebijakan afirmatif diperlukan untuk memastikan anak perempuan di Papua Selatan tetap berada di sekolah, terutama pada kelompok miskin dan rentan.

Gambar II.114 Lulusan SMA Berdasarkan Gender dan Desil di Papua Selatan



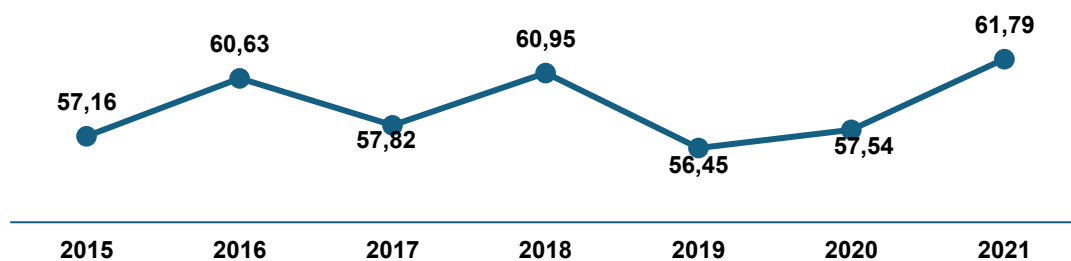
Sumber: Regsosek 2022 diolah SEPAKAT

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1) Indeks Ekonomi Hijau

Konsep green economy digunakan oleh banyak negara sebagai konsep pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memastikan aspek alam tetap terjaga. Indeks green economy (GEI) dibentuk untuk memberikan evaluasi capaian pembangunan ekonomi lebih hijau. Konsep green economy saat ini telah menjadi fokus pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan unsur lingkungan. Ekonomi dapat bertumbuh dengan tidak menambah kerusakan pada lingkungan.

Gambar II Tren Indeks Ekonomi Hijau Papua Tahun 2015-2021



Sumber : Publikasi Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dengan mempertimbangkan keberadaan Provinsi Papua Selatan sebagai daerah DOB, maka pengukuran Indeks Ekonomi Hijau Papua Selatan masih mengacu pada capaian Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk. Adapun ditahun 2015 tercatat bahwa Nilai Indeks Ekonomi Hijau Papua berada pada angka 57,16 dan kemudian mencatatkan peningkatan menjadi 61,79 pada tahun 2021.

2) Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.92 Nilai Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Berdasarkan Provinsi Tahun 2023-2024

No.	Provinsi	IBEI 2022	IBEI 2023
1	Sulawesi Selatan	78.59	80.86
2	Jawa Timur	73.52	71.63
3	Nusa Tenggara Timur	69.81	68.5
4	Sulawesi Utara	42.73	67.98
5	Maluku	72.59	67.22
6	Jawa Tengah	58.84	65.3
7	Nusa Tenggara Barat	46.63	61.83
8	Sulawesi Tenggara	60.19	60.57
9	Sulawesi Tengah	50.16	59.87
10	Sumatera Utara	50.12	58.77
11	Papua Barat	50.47	57.85
12	Aceh	46.5	55.01
13	Jawa Barat	49.44	54.65
14	Maluku Utara	50.4	54.57
15	Gorontalo	44.85	47.55
16	Pulau Riau	42.52	45.49
17	Kalimantan Barat	41.94	39.54
18	Kalimantan Timur	33.46	37.33
19	Riau	27.09	32.87
20	Bengkulu	34.79	31.47
21	Pulau Bangka Belitung	29.17	31.27
22	Sulawesi Barat	33.77	31.23
23	Kalimantan Utara	34.19	30.66
24	Bali	33.84	30.28
25	Sumatera Barat	26.29	29.73
26	Papua	34.27	29.68
27	Banten	30.09	29.05
28	Kalimantan Selatan	26.64	28.97
29	Kalimantan Tengah	24.79	27.57
30	Lampung	33.97	27.65
31	DKI Jakarta	27.59	26.9
32	South Sumatera	21.38	21.01
33	Jambi	15.35	18.01
34	DI Yogyakarta	10.67	11.47

Sumber : Dewi Yashinta Kumala, dkk (2025)

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep ini telah menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan global, terutama karena laut dan ekosistem pesisir memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas lingkungan serta menyediakan sumber daya yang esensial bagi kehidupan manusia. Secara khusus, ekonomi biru mencakup sektor-sektor strategis seperti pariwisata bahari, energi terbarukan, dan konservasi ekosistem laut dan perikanan berkelanjutan.

Indeks Blue Economy Indonesia (IBEI) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam menerapkan prinsip

ekonomi biru secara berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis sumber daya kelautan.

Dengan mempertimbangkan keberadaan Provinsi Papua Selatan sebagai daerah DOB, maka pengukuran Nilai Indonesia Blue Economy Index (IBEI) masih mengacu pada capaian Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk. Adapun ditahun 2022 tercatat bahwa Nilai Indonesia Blue Economy Index (IBEI) berada pada angka 34,27 dan kemudian mencatatkan penurunan menjadi 29,68 pada tahun 2023.

2.1.3.4. Transformasi Digital

1) Indeks Masyarakat Digital

Provinsi Papua Selatan mencatat kemajuan positif dalam pembangunan masyarakat digital selama periode 2023-2024. Indeks Masyarakat Digital mengalami peningkatan sebesar 3,02 poin dari 37,09 menjadi 40,11. Pencapaian ini didorong oleh perkembangan signifikan pada Pilar Keterampilan Digital yang naik dari 54,51 menjadi 55,89 dan Pilar Pekerjaan Digital yang meningkat cukup tajam dari 33,36 ke 38,4. Pilar Pemberdayaan Digital juga menunjukkan kemajuan meskipun masih relatif rendah, dari 24,66 menjadi 25,96. Namun demikian, terdapat penurunan yang perlu menjadi perhatian pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem Digital yang turun dari 50,35 menjadi 41,67.

Tabel II.93 Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Papua Selatan Tahun 2023-2024

Tahun	Indeks Masyarakat Digital	Pilar Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
2023	37,09	50,35	54,51	24,66	33,36
2024	40,11	41,67	55,89	25,96	38,40

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Republik Indonesia

Peningkatan indeks secara keseluruhan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital, meskipun masih terdapat tantangan di bidang infrastruktur. Capaian di bidang keterampilan dan pekerjaan digital menjadi modal penting untuk pengembangan ekonomi digital ke depan. Sementara itu, penurunan di pilar infrastruktur mengindikasikan perlunya investasi dan kebijakan yang lebih fokus untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih kuat.

Perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk terus mendorong peningkatan di semua pilar guna mewujudkan masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing di Provinsi Papua Selatan.

2) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Provinsi Papua menunjukkan peningkatan dalam Indeks IPTEK (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi) dari 3,22 pada tahun 2022 menjadi 3,44 pada tahun 2023. Meski mengalami kemajuan, capaian ini masih jauh di bawah rata-rata nasional yang stabil di kisaran 5,85 hingga 5,90 selama periode yang sama. Dari tiga subindeks yang diukur, Papua mencatat kemajuan di dua aspek. Subindeks Akses dan Infrastruktur meningkat dari 3,38 menjadi 3,68, sementara Penggunaan Teknologi naik dari 2,18 ke 2,47. Namun, subindeks Keahlian justru mengalami penurunan tipis dari 4,97 menjadi 4,89. Perbandingan dengan angka nasional menunjukkan disparitas yang signifikan. Pada tahun 2023, skor Papua untuk Akses dan Infrastruktur (3,68) masih tertinggal 2,13 poin dari nasional (5,81). Begitu pula dengan subindeks Penggunaan yang selisihnya mencapai 3,44 poin dari rata-rata nasional (5,91). Subindeks Keahlian menjadi aspek yang paling mendekati capaian nasional, meski masih terdapat selisih 1,15 poin.

Tabel II.94 Skor Subindeks dan IPTIK Provinsi Papua dan Nasional, 2012-2023

Subindeks/ Indeks	Papua		Nasional	
	2022	2023	2022	2023
Akses dan Infrastruktur	3,38	3,68	5,80	5,81
Penggunaan	2,18	2,47	5,82	5,91
Keahlian	4,97	4,89	6,00	6,04
IPTIK	3,22	3,44	5,85	5,90

Sumber: Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2023, BPS RI 2024

3) Pengguna Telepon Nirkabel

Secara umum persentase pengguna telepon nirkabel selalu meningkat di seluruh kabupaten sepanjang tahun 2020-2024. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten dengan proporsi pengguna telepon tertinggi di tahun 2024 (77,75%) sementara Provinsi Asmat merupakan kabupaten dengan proporsi pengguna telepon nirkabel terendah di tahun 2024 (25,11%).

Tabel II.88 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Menggunakan Telepon di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	72,21	63,87	74,07	76,59	77,75
Boven Digoel	59,29	51,04	62,12	61,57	68,87
Mappi	28,77	24,17	44,70	39,57	37,82
Asmat	15,62	20,99	19,10	26,70	25,11
*Papua Selatan	43,97	40,02	50,00	51,11	52,39

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2020-2024

*) Capaian rata-rata Kabupaten

Tabel berikut menunjukkan jumlah dan persentase kampung/kelurahan berdasarkan jenis sinyal internet yang diterima. Antara tahun 2020 hingga 2024, pertumbuhan jenis sinyal internet dengan kualitas 4G/LTE meningkat pesat di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan, hingga hanya 1-3% saja kampung di tiap kabupaten yang belum terlayani jaringan internet.

Tabel II.89 Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2020-2024

Kabupaten	Kualitas jaringan	2020		2021		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4G/LTE	88	69%	115	85%	136	92%
	3G/H+/H/EV DO	8	6%	7	5%	6	4%
	2.5G/E/GPRS	6	5%	1	1%	4	3%
	Tidak ada	25	20%	12	9%	2	1%
Boven Digoel	4G/LTE	30	41%	39	51%	93	97%
	3G/H+/H/EV DO	1	1%	3	4%	0	0%
	2.5G/E/GPRS	3	4%	4	5%	1	1%
	Tidak ada	39	53%	31	40%	2	2%
Mappi	4G/LTE	30	29%	54	50%	134	88%
	3G/H+/H/EV DO	2	2%	4	5%	12	8%
	2.5G/E/GPRS	8	9%	7	9%	2	1%
	Tidak ada	62	57%	43	50%	5	3%
Asmat	4G/LTE	12	17%	25	43%	169	95%
	3G/H+/H/EV DO	3	4%	1	2%	1	1%
	2.5G/E/GPRS	32	45%	17	29%	7	4%
	Tidak ada	24	34%	15	26%	1	1%

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2021-2023, Statistik Potensi Desa Provinsi Papua Selatan 2024

Catatan: Pendataan potensi desa tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023

4) Persentase Penduduk Yang Mengakses Internet

Tabel berikut menunjukkan persentase penduduk yang mengakses internet di Provinsi Papua Selatan. Secara umum proporsi penduduk yang mengakses internet di Provinsi Papua Selatan meningkat sebesar 86% dari 22,76% di tahun 2020 menjadi 42,22% pada tahun 2024. Penduduk di Kabupaten Mappi dan Asmat merupakan kabupaten dengan penduduk yang paling banyak belum mengakses internet dalam 5 tahun terakhir. Hingga tahun 2024, kurang dari seperempat penduduk di masing-masing kabupaten tersebut yang sudah mengakses internet. Peningkatan akses kepada internet perlu ditingkatkan dalam rangka penyebaran informasi melalui media online.

Tabel II.95b Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	46,32	54,46	55,94	60,22	67,67
Boven Digoel	27,38	33,63	41,46	50,77	55,45
Mappi	10,58	13,61	17,25	20,34	24,57
Asmat	6,74	16,97	13,78	19,98	21,20
*Papua Selatan	22,76	29,67	32,10	37,83	42,22

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2020-2024

*) Capaian rata-rata Kabupaten

Tabel berikut menyajikan persentase penduduk diatas 5 tahun yang menggunakan komputer. Secara umum terjadi sedikit penurunan pengguna komputer dari tahun 2024 (8,93%) dibandingkan tahun 2020 (7,41%). Hingga tahun 2024, Kabupaten Asmat memiliki proporsi pengguna komputer paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya (3,78%). Proporsi pengguna komputer di Papua Selatan secara umum masih rendah (<10%) mengindikasikan keperluan masyarakat terhadap alat komputasi masih relatif rendah.

Tabel II.96b Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Merauke	15,16	13,3	13,11	13,52	16,53
Boven Digoel	8,12	7,23	8,97	9,72	10,19
Mappi	2,78	5,15	6,73	7,14	5,20
Asmat	3,58	5,72	4,82	4,47	3,78
*Papua Selatan	7,41	7,85	8,40	8,71	8,93

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2020-2024

*) Capaian rata-rata Kabupaten

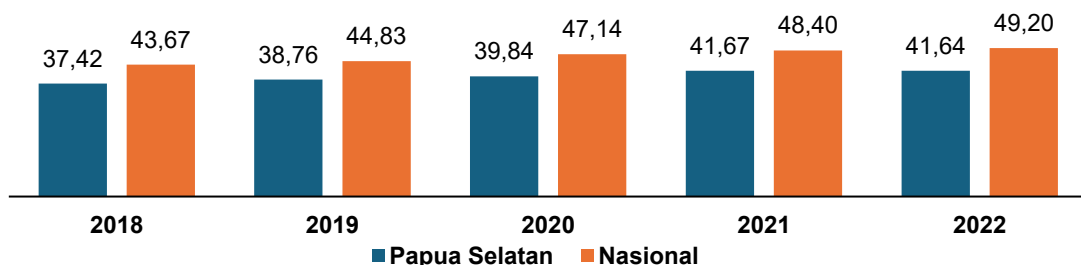
5) Indeks Transformasi Digital Nasional

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk mengukur kemajuan pembangunan digital secara komprehensif melalui 5 pilar utama yaitu Jaringan dan Infrastruktur, Pemerintah, Bisnis, Masyarakat, dan Ekosistem Digital. Pengukuran dilakukan dalam tiga tahapan yang meliputi tahap fondasi, adaptasi, dan akselerasi. Berikut penjelasan mengenai ke-5 pilar dimaksud:

- **Jaringan dan Infrastruktur**, merujuk pada komponen konektivitas mendukung implementasi teknologi digital, mencakup jaringan yang andal, pemanfaatan dan inklusivitas akses.
- **Pemerintah**, merujuk pada komponen yang berkaitan dengan peran dan tindakan pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi penggunaan teknologi digital untuk efektivitas pelayanan publik
- **Bisnis**, merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat dan mengubah sektor ekonomi secara keseluruhan
- **Masyarakat**, merujuk pada pemberdayaan Masyarakat untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari.
- **Ekosistem**, merujuk pada rangkaian interaksi dan keterkaitan antar stakeholder dalam lingkungan digital.

Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI, diperoleh Indeks TDN Papua Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 seperti ditampilkan dalam Gambar II.80 berikut:

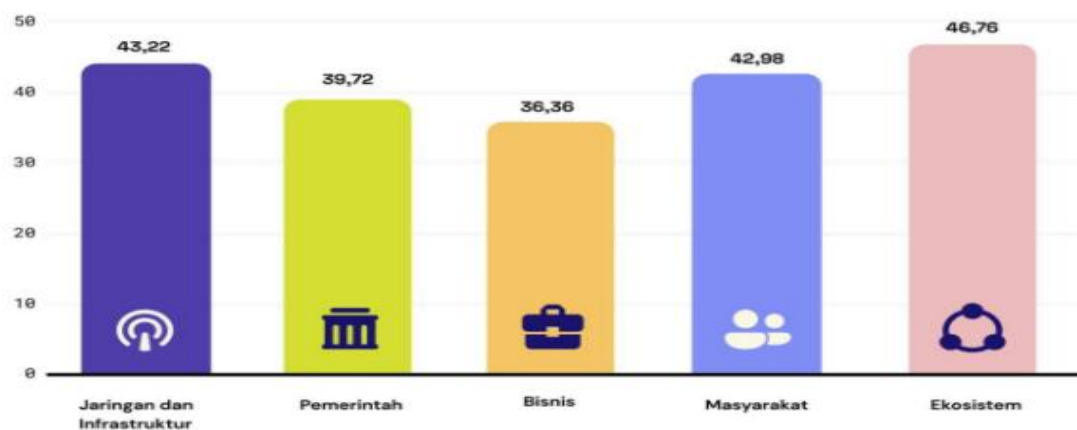
Gambar II.97 Indeks TDN Provinsi Papua Selatan dan Nasional, 2018-2022



Sumber: Buku Indeks Transformasi Digital Nasional, Kemdigi RI 2024

Gambar II.xx di atas menunjukkan peningkatan Indeks TDN Provinsi Papua Selatan meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2022, meskipun terdapat sedikit penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Peningkatan ini secara umum mengikuti pola peningkatan indeks secara nasional. Pada tahun 2022, Indeks TDN Papua Selatan mencapai 41,4, yang berdasarkan standar Kemdigi RI tergolong sebagai klasifikasi C. Jika dihitung skor agregatnya, terjadi peningkatan sebesar 4,22 poin antara tahun 2018 hingga 2022. Demikian juga skor per pilar dari indeks ini sebagian besar terklasifikasi C, yang capaian lengkapnya ditunjukkan pada Gambar II.81 di bawah ini.

Gambar II.81 Skor Indeks TDN per Pilar Provinsi Papua Selatan Tahun 2022



Dikutip dari Buku Indeks Transformasi Digital Nasional, Kemdigi RI 2024

Pilar **Jaringan dan Infrastruktur** di Provinsi Papua Selatan menunjukkan nilai yang tergolong tinggi dibandingkan 4 pilar lainnya, menunjukkan pembangunan *basic connectivity* yang semakin baik meskipun dihadapkan pada tantangan geografis yang sulit, dengan banyaknya rawarawa dan sungai besar. Dselain itu, ketersediaan pasokan listrik juga terbatas pada sebagian wilayah papua Selatan. Aspek yang diukur pada pilar ini antara lain kecepatan pengunduhan dan jumlah pengguna internet yang mengalami peningkatan. Namun penyediaan internet di ruang publik seperti wi-fi masih terbatas sehingga mempengaruhi produktivitas masyarakat di ruang digital. Pada pilar **masyarakat**, indeks ini menunjukkan kemampuan digital masyarakat tergolong cukup, namun dibandingkan provinsi lain.masih relatif rendah di samping juga belum optimalnya tingkat sekolah berfasilitas digital.

Pilar **bisnis** di Provinsi Papua Selatan memiliki nilai di bawah rata-rata nasional dari tahun 2018 hingga 2022. Kondisi ini menjelaskan mayoritas usaha yang dikembangkan masyarakat belum memanfaatkan alat digital secara optimal dalam kegiatan bisnis, yang diperoleh dari penilaian terhadap indikator pengeluaran perangkat lunak di perusahaan, pengeluaran *research and development* serta masih rendahnya kemampuan inovasi dalam pengembangan bisnis.

Pilar **pemerintah** merupakan sektor yang nilainya terendah di Papua Selatan, dengan masih banyaknya aspek pemerintahan untuk menuju ke arah digital yang belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tiap tahun yang masih rendah, yakni pada aspek penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK SPBE. Selain itu, indikator lainnya yang relatif rendah antara lain *e-goverment index*, *e-participation index*, *online service index* serta layanan pemerintahan digital yang belum terintegrasi secara optimal.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Selama Tahun 2023, proporsi PMTB terhadap PDRB Papua Selatan adalah 35,21 persen. Komponen ini merupakan penyumbang PDRB Papua terbesar kedua setelah PKRT. Bila dilihat menurut sub komponen pembentuknya, PMTB bangunan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan PMTB non bangunan. Selama Tahun 2023, PMTB bangunan menyumbang 75,09 persen terhadap total PMTB. Sementara itu, PMTB non-bangunan berkontribusi sebesar 24,91 persen.

Tabel II.98b Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2023

No.	Uraian	2022***	2023***
1.	Nilai Nominal MPTB (Miliar Rp.)		
	a. ADHB	10,267,53	11,041,32
	b. ADHK 2010	5,973,46	6,218,20
2.	Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	35,68	35,21
3.	Proporsi Terhadap Total PMTB (% ADHB)		
	a. Bangunan	74,91	75,09
	b. Non Bangunan	25,09	24,91
	c. Total PMTB	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua, 2023

***) Angka sangat-sangat sementara

2) Ekspor Barang dan Jasa

Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan kinerja ekspor selama periode 2022-2023. Nilai ekspor barang dan jasa berdasarkan harga berlaku (ADHB) turun dari Rp7.469,95 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp7.293,21 miliar di tahun 2023. Penurunan yang lebih tajam terlihat ketika menggunakan harga konstan (ADHK 2010), dimana nilai ekspor anjlok dari Rp5.216,30 miliar menjadi Rp4.787,37 miliar, menunjukkan adanya kontraksi riil setelah memperhitungkan faktor inflasi.

Kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan tren menurun, dari 25,96 persen di tahun 2022 menjadi 23,26 persen di tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa peran sektor ekspor dalam mendorong perekonomian daerah semakin berkurang. Lebih memprihatinkan lagi, laju pertumbuhan ekspor dalam nilai konstan tercatat minus 8,22 persen pada tahun 2023, menandakan perlambatan yang cukup signifikan dalam kinerja perdagangan luar negeri provinsi ini.

Tabel II.99b Ekspor Barang dan Jasa, Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2023

No.	Uraian	2022***	2023***
1.	Nilai Nominal Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rp.)		
	a. ADHB	7,469,95	7,293,21
	b. ADHK 2010	5,216,30	4,787,37
2.	Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	25,96	23,26
3.	Laju Pertumbuhan (% ADHK)	-	-8,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua, 2023

***) Angka sangat-sangat sementara

Kinerja ekspor Provinsi Papua Selatan menunjukkan tren yang sangat memprihatinkan dalam kurun waktu 2018-2023. Dari data yang tercatat, nilai ekspor provinsi ini mengalami penurunan drastis dari US\$51,2 juta pada tahun 2018 menjadi benar-benar nihil (US\$0) di tahun 2023. Penurunan paling tajam terjadi antara tahun 2019 ke 2020, dimana nilai ekspor anjlok dari US\$57,7 juta menjadi hanya US\$17,8 juta, atau turun sebesar 69% dalam satu tahun.

Tabel II.100b Nilai Ekspor Provinsi Papua Selatan dan Indonesia Tahun 2018-2023 (Juta US\$)

Tahun	Papua Selatan	Indonesia	Andil (%)
2018	51,2	180.012,70	0,028
2019	57,7	167.283,00	0,034

Tahun	Papua Selatan	Indonesia	Andil (%)
2020	17,8	163.191,80	0,011
2021	17,8	231.609,50	0,008
2022	7,0	291.979,10	0,002
2023	0,0	258.797,20	0,000

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua, 2023

Kondisi ini bertolak belakang dengan kinerja ekspor nasional yang justru menunjukkan peningkatan signifikan dari US\$180.012,70 juta (2018) menjadi US\$258.797,20 juta (2023), meskipun sempat mengalami fluktuasi. Akibatnya, kontribusi Papua Selatan terhadap total ekspor Indonesia terus merosot dari 0,028% di tahun 2018 menjadi 0,000% di tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa provinsi ini praktis kehilangan perannya dalam perdagangan internasional Indonesia.

3) Penanaman Modal

Data penanaman modal dapat dilihat dari realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri dan Dalam Negeri. Realisasi investasi modal luar negeri di Papua Selatan, ditinjau berdasarkan jumlah proyek mencapai 66 unit dengan realisasi investasi sebesar 86,3 juta US\$. Adapun realisasi investasi penanaman modal dalam negeri, memiliki 346 unit proyek dengan realisasi investasi sebesar 152,5 milyar rupiah.

Tabel II.101b Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2023 (Unit) (Juta US\$)

Uraian	Proyek (Unit)			Investasi (Juta US\$)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Realisasi Investasi Modal Luar Negeri						
Papua Selatan	-	-	66,0	-	-	86,3
Indonesia	27.271	32.681	70.898	31.093,1	45.605	50.267,5
Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri						
Papua Selatan	-	-	346	-	-	152,5
Indonesia	106.002	124.582	266.722	447.063,6	552.769,0	674.923,4

Catatan: 1) Tidak termasuk Sektor Minyak Bumi dan Gas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga
2) Proyek dalam unit

Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam BPS RI, 2024

4) Kelautan dan Perikanan

a. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Terdapat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Provinsi Papua Selatan yang berlokasi di Kabupaten Merauke dengan letak geografis antara 137°-141° BT dan 5°-9° LS. Dengan lokasinya yang strategis, Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang wilayahnya menghadap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.54/MEN/2014, estimasi potensi sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang, ikan karang konsumsi, lobster dan cumi-cumi. Di antara potensi tersebut, ikan pelagis kecil merupakan potensi yang terbesar, sedangkan produksi terkecil adalah lobster. Dari potensi perikanan tersebut, Kabupaten Merauke baru memanfaatkan sebesar 15% dari potensi lestari (potensi berkelanjutan) di WPP 718, sehingga terdapat peluang dan prospek untuk memanfaatkan potensi sebesar 85% sebagai penggerak ekonomi maritim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah: (1) kondisi sarana dan prasarana yang belum mendukung; (2) keterbatasan pendidikan dan kemampuan SDM setempat; (3) jenis alat tangkap dan perahu yang digunakan masih tradisional; (4) belum tersedia prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan; serta (5) adanya kapal asing yang melakukan illegal fishing dengan jumlah yang besar.

Berkaitan dengan rencana pembangunan SKPT, terdapat strategi pengembangan perikanan di Kabupaten Merauke untuk dua peruntukan, yaitu kawasan pendukung SKPT dan kawasan pusat SKPT. Kawasan pendukung SKPT berada di wilayah pesisir berada di Distrik Tabonji, Ilwayab, Kimaam, Waan, Okaba, Tubang, Malind, Naukenjerai, dan Semangga. Adapun kawasan pusat SKPT berada di Distrik Merauke. Dalam rangka pengembangan kelautan dan perikanan, lokasi sentra-sentra produksi perikanan tangkap yang potensial untuk dikembangkan di kawasan pendukung berada di Distrik Tabonji, Ilwayab, Kimaam, dan Waan. Kemudian sebagai pusat kawasan berada di Merauke yang berfungsi sebagai kawasan industri pengolahan; pemasaran dan distribusi kelautan dan perikanan terintegrasi yang dirancang dengan pendekatan konektivitas antar kawasan.

Gambar II.115 Masterplan SKPT Merauke



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015 (dalam dokumen “Masterplan SKPT Merauke”)

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep pengembangan perikanan di SKPT Merauke berbasis inti dan plasma yang dinamis. Kawasan sentra-sentra produksi perikanan tangkap sebagai **“plasma”** artinya kawasan tersebut sebagai sumber produksi perikanan tangkap bagi pengembangan perikanan, meliputi wilayah Distrik Merauke, Tabonji, Ilwayab, Kimaam, dan Waan. Untuk mendukung kinerja kawasan plasma ini dibangun pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana (dermaga, cold storage, pabrik es, suplai air, energi listrik). Sedangkan untuk mendukung kegiatan nelayan dibantu dengan sarana penangkapan ikan (perahu dan alat penangkapan ikan). Secara faktual, masyarakat Pulau Kolepon yang perlu dibantu dalam penyediaan armada kapal adalah sebesar 10.358 nelayan. Untuk memanfaatkan potensi hasil tangkapan perikanan sebesar 69.750 ton, maka diperkirakan membutuhkan motor tempel 5 GT dengan kapasitas 2 ton/motor tempel sebanyak 34.875 unit motor tempel. Oleh sebab itu, masing-masing lokasi pelabuhan perikanan membutuhkan 159 unit motor tempel/lokasi/tahun. Selain itu, alat tangkap yang digunakan antara lain pukat udang, tramell net, gill net, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring insang angkat, pancing, bubu dan jala. Selain itu, dengan adanya peluang ekspor berupa ikan dan udang hingga Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Thailand, Eropa dan Australia, maka perlu dilakukan pengembangan armada kapal 10-30 GT, sedangkan untuk

kapal insulated) untuk melakukan kegiatan collecting (mengumpulkan) produksi dari masing-masing sentral produksi.

Distrik Merauke yang berada di kawasan pelabuhan perikanan Merauke dan sekitarnya, ditetapkan sebagai **“inti”** atau pusat kawasan industri pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk perikanan, pendaratan ikan, pintu gerbang pasar luar daerah termasuk ekspor beserta pelayanannya. Sebagai kawasan inti, Distrik Merauke perlu dilengkapi dengan sarana industri pengolahan (cold storage, pabrik es, suplai air, energi listrik, pasar ikan) dan prasarana pelabuhan perikanan (dermaga, kawasan industri, jalan komplek). Dalam operasionalisasinya, produksi hasil penangkapan para nelayan ditampung di pelabuhan perikanan pada masing-masing sentra produksi. Pada periode tertentu, kapal pengangkut mengumpulkan produksi di masing-masing pelabuhan perikanan dan dibawa ke Kimaam (alternatif pertama) dan/atau ke Wanam (alternatif kedua). Selanjutnya, semua produksi yang sudah terkumpul diangkut melalui laut dan udara menuju Merauke.

b. Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke, Mappi dan Asmat. Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan sebesar 60.296 ton dengan nilai produksi Rp. 1,93 triliun (lihat Tabel II.102). Produksi perikanan tangkap terbesar terdapat di Kabupaten Merauke sebesar 46.286 ton dengan nilai Rp.1,50 triliun, atau 76,76% dari total produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan.

Berdasarkan lokasinya, perikanan tangkap dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu perikanan tangkap di laut dan perikanan perairan umum daratan (sungai, danau, dsb). Dalam Tabel II.102 dapat diketahui bahwa produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan perairan umum daratan. Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di laut sebesar 58.226 ton dengan nilai Rp.1,91 triliun, sedangkan produksi perikanan perairan umum daratan sebesar 2.070 ton dengan nilai Rp.19,18 miliar. Dalam hal ini, kabupaten Merauke merupakan wilayah penghasil perikanan tangkap terbesar, baik perikanan tangkap di laut maupun perikanan perairan umum daratan.

Gambar II.116 Kondisi Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Selatan



Sumber:

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Asmat (<https://www.asmatkab.go.id/gallery/perikanan>)
- (2) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua, 2016 (dalam dokumen "Papua in Picture: Anim Ha")

Tabel II.102 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Perairan Umum Daratan		Total	
	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)
Merauke	44.786	1.483.533.626	1.500	13.907.421	46.286	1.497.441.047
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	12.002	400.501.089	486	4.490.954	12.488	404.992.043
Asmat	1.438	23.751.885	84	785.426	1.522	24.537.311
Papua Selatan	58.226	1.907.786.600	2.070	19.183.801	60.296	1.926.970.401

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Tabel II.103 menunjukkan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di laut menurut komoditas utama di Provinsi Papua Selatan tahun 2020. Dalam Tabel II.103 diketahui bahwa komoditas utama dengan produksi terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah ikan cakalang (1.915 ton) dan ikan tuna (1.779 ton). Adapun nilai produksi perikanan tertinggi adalah ikan tuna yaitu sebesar Rp.149,17 miliar. Berdasarkan kabupaten, wilayah yang secara konstan berkontribusi dalam produksi ikan tangkap cakalang, tongkol dan tuna adalah Kabupaten Merauke. Meskipun demikian, Kabupaten Mappi unggul dalam produksi udang sebanyak 751 ton dengan nilai produksi Rp. 30,06 miliar.

Tabel II.103 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020

Kabupaten	Cakalang	Tongkol	Tuna	Udang	Lainnya	Total
Volume (Ton)						
Merauke	1.915	397	1.779	123	40.572	44.786
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	0	0	0	751	11.251	12.002
Asmat	0	0	0	0	1.438	1.438
Papua Selatan	1.915	397	1.779	874	53.261	58.226
Nilai (Rp.000)						
Merauke	57.629.559	12.526.014	149.172.077	6.373.224	1.257.832.752	1.483.533.626
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	0	0	0	30.056.000	370.445.089	400.501.089
Asmat	0	0	0	0	23.751.885	23.751.885
Papua Selatan	57.629.559	12.526.014	149.172.077	36.429.224	1.652.029.726	1.907.786.600

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

c. Perikanan Budidaya

Selain dari perikanan tangkap, produksi perikanan Provinsi Papua Selatan juga berasal dari perikanan budidaya. Pada tahun 2021, produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Papua Selatan terdapat di Kabupaten Merauke (1.500 ton dengan nilai produksi Rp.13,91 milyar) dan Kabupaten Mappi (486 ton dengan nilai produksi Rp.4,49 milyar), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.104. Berdasarkan produksi dan nilai produksi yang teridentifikasi, dapat diketahui pada tahun 2021 total produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Selatan sebesar 2.070 ton dengan nilai produksi Rp.19,18 milyar rupiah.

Tabel II.104 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Komoditas Utama			Total
	Udang	Ikan	Lainnya	
Volume (Ton)				
Merauke	0	1.500	0	1.500
Boven Digoel	0	0	0	0
Mappi	0	486	0	486
Asmat	0	84	0	84
Papua Selatan	0	2.070	0	2.070
Nilai (Rp.000)				
Merauke	0	13.907.421	0	13.907.421
Boven Digoel	0	0	0	0
Mappi	0	4.490.954	0	4.490.954
Asmat	0	785.426	0	785.426
Papua Selatan	0	19.183.801	0	19.183.801

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka”)

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Selatan dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.105. Berdasarkan Tabel II.105 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 986 ton produksi pembesaran, 10,53 juta ekor produksi pembenihan, serta 12 ribu ekor produksi ikan hias.

Tabel II.105 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1000 ekor)	Ikan Hias (1000 ekor)
Merauke	394	10.470	11
Boven Digoel	3	60	1
Mappi	498	0	0
Asmat	91	0	0
Papua Selatan	986	10.530	12

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka”)

Tabel II.106 menunjukkan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan komoditas utama di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.106 diketahui bahwa berdasarkan jenis ikan komoditas utama, budidaya ikan terbesar di Merauke tahun 2021 adalah budidaya ikan nila (943 ton dengan nilai produksi Rp.51,49 milyar), ikan mas (456 ton dengan nilai produksi Rp.23,63 milyar) dan ikan lele (151 ton dengan nilai produksi Rp.6,10 milyar). Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, produksi budidaya ikan nila terbesar terdapat di Kabupaten Mappi (408 ton), produksi budidaya ikan mas terbesar terdapat di Kabupaten Asmat (195 ton), sedangkan produksi budidaya ikan lele hanya terdapat di Kabupaten Mappi (78 ton) dan Merauke (73 ton).

Tabel II.106 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

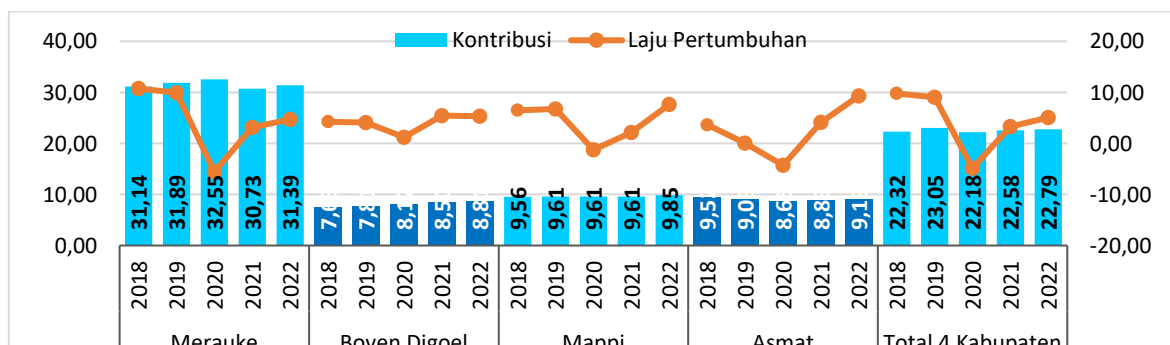
Kabupaten	Jenis Ikan					
	Gurame	Patin	Lele	Nila	Ikan Mas	Udang
Volume (Ton)						
Merauke	0	0	73	236	85	0
Boven Digoel	0	0	0	166	86	0
Mappi	0	0	78	408	90	0
Asmat	0	0	0	133	195	0
Papua Selatan	0	0	151	943	456	0
Nilai (Rp.000)						
Merauke	0	0	3.303.132	9.646.434	3.607.230	0
Boven Digoel	0	0	0	10.239.010	4.731.640	0
Mappi	0	0	2.796.800	21.880.416	4.203.940	0
Asmat	0	0	0	9.733.200	11.088.780	0
Papua Selatan	0	0	6.099.932	51.499.060	23.631.590	0

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

5) Pariwisata

Dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah diperlukan identifikasi semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata karena pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri. Terdapat 4 sektor utama yang menjadi komponen perhitungan pendapatan regional sektor pariwisata, yaitu: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum; (2) transportasi dan pergudangan; (3) informasi dan komunikasi; serta (4) perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2018-2022 pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten di Provinsi Papua Selatan berada dalam kondisi fluktuatif karena mengalami trend menurun pada 2018-2020 namun mengalami peningkatan pada 2020-2022 (lihat Gambar II.117 dan Tabel II.107).

Gambar II.117 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (data diolah)

Berdasarkan Tabel II.107 dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian kabupaten di Papua Selatan pada tahun 2018 adalah 22,32%, mengalami peningkatan menjadi 23,05% pada tahun 2019, namun terjadi penurunan kontribusi kembali menjadi 22,18% pada tahun 2020 sebagai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, sebagai dampak recovery ekonomi pasca pandemi, mulai terjadi perbaikan ekonomi di Papua Selatan termasuk peningkatan kontribusi pariwisata menjadi 22,58% pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan menjadi 22,79% pada tahun 2022.

Tabel II.107 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap Perekonomian (PDRB) di Papua Selatan 2016-2020 (%)

Wilayah	Sektor	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten					Laju Pertumbuhan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	Sektor Pariwisata	31,14	31,89	32,55	30,73	31,39	10,75	9,95	-5,56	3,15	4,73
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,13	14,32	14,46	14,29	14,29	9,68	9,01	0,03	0,30	4,54
	Transportasi dan Pergudangan	7,88	8,10	8,23	6,04	6,54	11,17	9,29	27,31	9,92	11,74
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,31	1,34	1,35	1,16	1,25	10,25	8,59	14,53	8,67	4,73
	Informasi dan Komunikasi	7,82	8,13	8,50	9,23	9,32	12,31	12,48	7,52	2,48	0,09
Boven Digoel	Sektor Pariwisata	7,63	7,81	8,12	8,50	8,81	4,25	4,09	1,19	5,42	5,34
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,37	5,51	5,80	6,15	6,37	1,87	1,35	-0,87	0,75	2,35
	Transportasi dan Pergudangan	1,73	1,76	1,75	1,75	1,84	4,95	5,14	1,31	0,24	0,26
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	2,06	-3,84	10,34	-3,13	-0,38
	Informasi dan Komunikasi	0,30	0,31	0,34	0,35	0,36	0,00	13,33	0,00	5,88	5,56
Mappi	Sektor Pariwisata	9,56	9,61	9,61	9,61	9,85	6,49	6,73	-1,26	2,16	7,65
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,71	6,77	7,08	7,06	7,07	6,82	7,06	3,28	1,93	5,22
	Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,09	1,75	1,76	1,97	5,73	5,88	17,01	2,75	17,66
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	8,49	8,50	-7,57	1,19	5,23
	Informasi dan Komunikasi	0,53	0,52	0,56	0,57	0,58	4,53	5,23	5,73	3,72	7,82
Asmat	Sektor Pariwisata	9,52	9,09	8,65	8,83	9,19	3,65	0,08	-4,28	4,15	9,33
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	5,86	5,73	5,81	5,83	2,96	-2,87	-1,61	3,66	5,26
	Transportasi dan Pergudangan	2,33	2,37	2,01	2,05	2,37	5,12	6,75	14,89	4,28	21,50
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	6,47	-1,05	0,19	0,28	6,80

Wilayah	Sektor	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten					Laju Pertumbuhan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Informasi dan Komunikasi	0,60	0,61	0,66	0,71	0,73	4,12	5,78	9,53	9,50	8,43
Total PDRB 4 Kabupaten	Sektor Pariwisata	22,32	23,05	22,18	22,58	22,79	9,78	9,02	-4,87	3,30	5,07
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,81	11,03	11,20	11,17	11,24	8,54	7,77	0,40	1,22	4,69
	Transportasi dan Pergudangan	5,61	5,78	4,38	4,69	5,05	10,24	8,71	-25,01	8,67	12,01
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,89	0,91	0,80	0,85	0,86	9,82	8,08	-13,41	7,98	4,67
	Informasi dan Komunikasi	5,02	5,33	5,80	5,86	5,65	12,01	12,21	7,51	2,61	0,31

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (data diolah)

Tabel II.108 Destinasi Wisata di Provinsi Papua Selatan

Kategori		Atraksi Wisata		Lokasi	
				Distrik	Kabupaten
1	Wisata Bahari	1	Pantai Lampu Satu	Merauke	Merauke
		2	Pantai Pombo (nama lain: "Pulau Ular")	Kimaam	
		3	Pantai Payum	Merauke	
		4	Pantai Onggaya	Naukenjerai	
		5	Pantai Onggari	Malind	
		6	Pantai Ndalir	Merauke dan Naukenjerai	
		7	Taman Wisata Pulau Kimaam	Kimaam	
		8	Rawa Biru	Sota	
		9	Pulau Ikan Ampira	Mandobo	Boven Digoel
		10	Pantai Bokap	Agats	Asmat
		11	Pantai Pek	Agats	
		12	Pantai Bayun	Pantai Kasuari	
2	Wisata Alam	1	Cagar Alam Kumbe		Merauke
		2	Taman Nasional Wasur		
		3	Rumah Semut (Musamus)		
		4	Kawasan Sungai Ampira	Mandobo	Boven Digoel
		5	Gunung Koreom	Ambatkwi	
		6	Pulau Terek	Subur	
		7	Agrowisata Kebun Raya Kelapa Sawit	Jair	
		8	Air Terjun Aman D. Tayon	Arimop	
		9	Air Terjun Kun	Iniyandit	
		10	Air Terjun Atakat	Iniyandit	
		11	Air Terjun Kali Komen	Waropko	
		12	Pemancingan Kali Munum Desa Patriot	Arimop	
		13	Danau Wegi Boma Bomakia II	Bomakia	Asmat
		14	Taman Nasional Lorenz	Sawa Erma	
		15	Pulau Tiga/Somel	Joerat	
		16	Pulau Sengsara/Fumaripits	Akat	
		17	Pulau Lak/Mamats	Sawa Erma	
		18	Rawa Baki	Sirets, Akat, Suru-suru	Mappi
		19	Ekowisata Folklor	Seluruh distrik	

Kategori		Atraksi Wisata		Lokasi	
				Distrik	Kabupaten
		20	Kampung Soba (dengan nama lain “kampung batu” di Kota Sejuta Rawa)	Kepi	
3	Wisata Budaya	1	Upacara Tanam Sasi		Merauke
		2	Jembatan Maro atau Tujuh Wali-Wali (TWW)		
		3	Wisata perbatasan	PLBN Sota	
		4	Rumah pohon dan kehidupan tradisional Suku Koroway dan Kombay	Yaniruma	Boven Digoel
		5	Pesta ulat sagu	Yaniruma	
		6	Museum Kebudayaan dan Kerajinan	Agats	
		7	Ukiran dan Kerajinan Asmat	Seluruh distrik	Asmat
		8	Rumah Panjang	Seluruh distrik	
		9	Perahu	Seluruh distrik	
		10	Tarian Sambutan, Tarian Memangil Roh	Seluruh distrik	
		11	Adventure dan Rumah di Atas Pohon	Suator	
		12	Kawasan sekolah budi pekerti khas Asmat	Sawa Erma	
		13	Pesta Budaya Asmat	Agats	
		14	Kampung Suku Korowai		Mappi
4	Wisata Sejarah	1	Tugu LB. Moerdani	Tanah Miring	Merauke
		2	Tugu Perbatasan		
		3	Tugu Kembaran Sabang-Merauke	Sota	
		4	Tugu Pepera	Merauke	
		5	Monumen Perjuangan Kemerdekaan		
		6	Puncak Adil Mandala		Boven Digoel
		7	Penjara Situs Boven Digoel	Mandobo	
		8	Tugu Monumen Bung Hatta	Mandobo	
		9	Tanah Tinggi Maryam	Mandobo	
		10	Rumah Pengasingan Bung Hatta		
		11	Patung Uni Mimio	Bomakia	
		12	Taman makam pahlawan (perintis)	Mandobo	
		13	Mappi Pos	Edera	Mappi
5	Wisata Religi	1	Tugu 100 Tahun Gereja Katolik		Merauke
		2	Gua Bunda Maria	Mandobo	Boven Digoel
		3	Goa Bunda Maria Autriop	Iniyandit	
		4	Gua Bunda Maria Kandon Kakuna	Mindiptana	

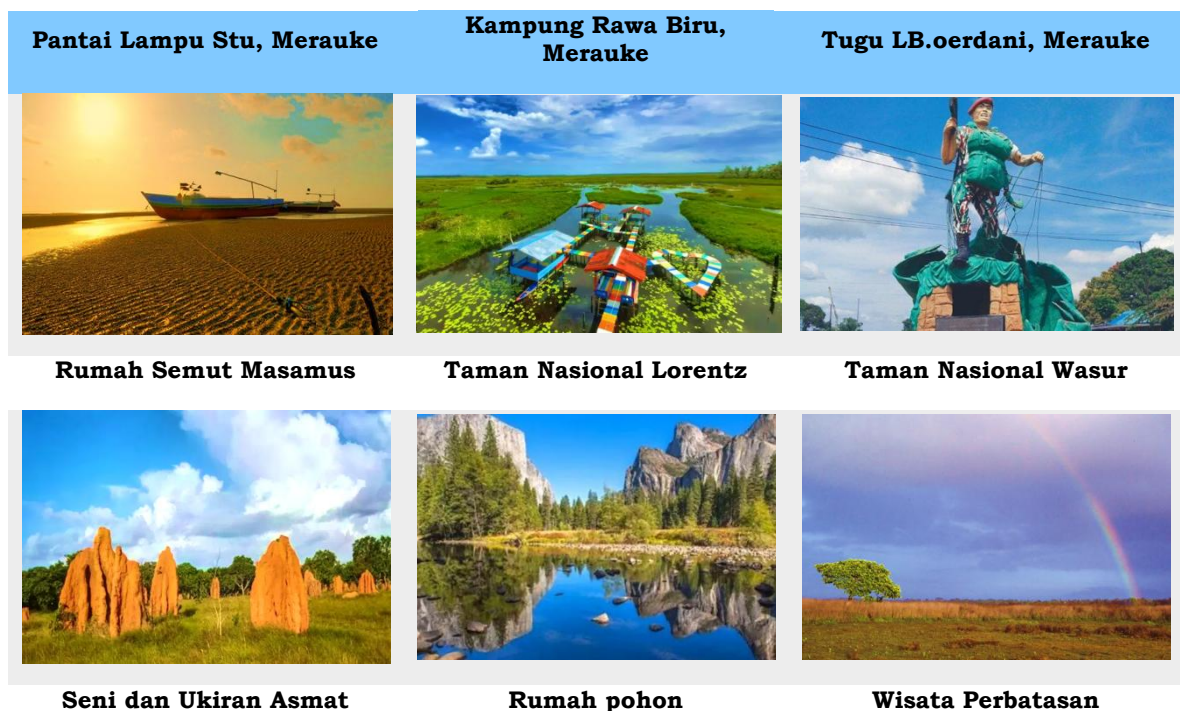
Sumber:

- (1) RTRW Provinsi Papua 2013-2033
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Asmat (<https://www.asmatkab.go.id/page/pariwisata>)
- (3) Website Pemerintah Kabupaten Boven Digoel (https://bovendigoelkab.go.id/halaman/pariwisata_kebudayaan)
- (4) Website Pemerintah Kabupaten Merauke (<https://portal.merauke.go.id/news/2267/wisata-pantai-di-kota-merauke.html>)

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Selatan dapat dikatakan belum optimal apabila dilihat dari besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua Selatan jika dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Provinsi Papua Selatan memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi

potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan ialah: Taman Nasional Lorentz di Asmat, dan Taman Nasional Wasur di Merauke. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Selatan dikelompokkan menjadi 4 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, dan obyek wisata alam. Selain itu, ada beberapa obyek wisata lainnya di Provinsi Papua Selatan yaitu Tugu Kembar Sabang Merauke di Merauke, Pantai Lampu Satu di Merauke, dan Museum Kebudayaan dan Kerajinan di Asmat. Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Gambar II.118 Beberapa Atraksi Wisata di Provinsi Papua Selatan





Selain akses konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Selatan sangat didukung oleh beberapa fasilitas penunjang kenyamanan dalam berwisata seperti sarana akomodasi/hotel. Berdasarkan Tabel II.109 diketahui terdapat peningkatan jumlah akomodasi di Provinsi Papua Selatan dari 34 unit pada tahun 2017 menjadi 47 unit pada tahun 2021. Kabupaten yang memiliki sarana akomodasi terbanyak adalah Kabupaten Merauke (tahun: 23 unit) dan Boven Digoel (tahun 2022: 15 unit) Adapun jumlah sarana akomodasi di wilayah lainnya masih terbatas yaitu sebanyak 3 unit di Kabupaten Mappi dan 6 unit di Kabupaten Asmat.

Tabel II.109 Banyaknya Sarana Akomodasi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten	Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	Akomodasi	16	18	18	18	23
	Kamar	363	362	410	434	483
	Tempat Tidur	480	486	550	599	627
Boven Digoel	Akomodasi	9	14	14	15	15
	Kamar	97	155	158	205	181
	Tempat Tidur	110	172	173	203	205
Mappi	Akomodasi	5	7	5	3	3
	Kamar	76	98	84	60	60
	Tempat Tidur	95	147	124	73	79
Asmat	Akomodasi	4	4	5	5	6
	Kamar	68	75	100	130	77
	Tempat Tidur	93	123	153	126	126
Papua Selatan	Akomodasi	34	43	42	41	47
	Kamar	604	690	752	829	801
	Tempat Tidur	778	928	1000	1001	1037

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

Tabel II.110 menunjukkan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.110 diketahui bahwa tamu asing dan domestic memiliki preverensi menginap lebih lama di hotel berbintang, dibandingkan dengan hotel non-bintang. Adapun rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di hotel berbintang adalah 3,25 hari, sedangkan rata-rata lama menginap di hotel non-bintang adalah 2,69 hari. Di hotel

berbintang, rata-rata lama menginap tamu asing di Provinsi Papua Selatan adalah 5,48 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik hanya mencapai 3,25 hari.

Tabel II.110 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Provinsi Papua Selatan (hari) Tahun 2021

Kabupaten	Hotel Bintang			Hotel Non-Bintang		
	Tamu Asing	Tamu Domestik	Asing+ Domestik	Tamu Asing	Tamu Domestik	Asing+ Domestik
Merauke	5,48	2,67	2,67	-	1,83	1,83
Boven Digoel	-	3,83	3,83	-	3,76	3,76
Mappi	-	-	-	-	2,62	2,62
Asmat	-	-	-	-	2,46	2,54
Rata-rata	5,48	3,25	3,25	-	2,67	2,69

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

Tabel II.111 menunjukkan persentase tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi lainnya menurut jenis hotel di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.111 diketahui terdapat penurunan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi di kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang menurun dari 54,87% pada tahun 2018 menjadi 31,91% pada tahun 2021. Adapun tingkat penghunian kamar hotel non-bintang menurun dari 38,61% pada tahun 2018 menjadi 13,33% pada tahun 2021. Penurunan tingkat penghunian hotel serta rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten dalam upaya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Tabel II.111 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel di Papua Selatan Tahun 2021

Kategori	Kabupaten	2018	2019	2020	2021
Hotel Berbintang	Merauke	54,87	n.a	31,56	42,88
	Boven Digoel	-	n.a	12,44	20,94
	Mappi	-	n.a	-	-
	Asmat	-	n.a	-	-
	Rata-rata 4 Kabupaten	54,87	n.a	22,00	31,91
Hotel Non Bintang	Merauke	27,90	n.a	7,60	13,98
	Boven Digoel	54,71	n.a	21,65	28,23
	Mappi	-	n.a	0,80	8,22
	Asmat	33,21	n.a	2,84	2,90
	Rata-rata 4 Kabupaten	38,61	n.a	8,22	13,33

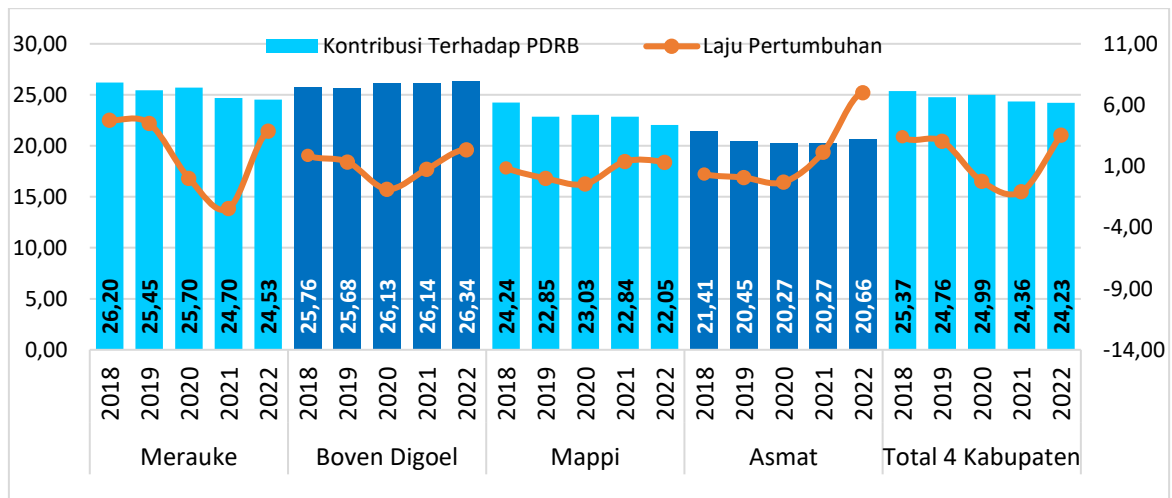
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

6) Pertanian

Pertanian mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Selatan sebagai penyangga ketahanan pangan sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Berdasarkan Gambar II.119 diketahui bahwa secara umum kontribusi sektor pertanian di Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan dari 25,37% pada tahun 2018 menjadi 24,23% pada tahun 2022. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, daerah yang mengalami penurunan kontribusi sektor pertanian adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Adapun Kabupaten Boven Digoel merupakan daerah yang mengalami peningkatan kontribusi sektor pertanian dari 25,76% pada tahun 2018 menjadi 26,34% pada tahun 2022. Penurunan kontribusi ini secara umum disebabkan karena (1) menurunnya produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; (2) kurangnya penerapan teknologi tepat guna; (3) rendahnya kapasitas petani di bidang usaha agribisnis; serta (4) belum adanya ketersediaan lahan khusus usaha agribisnis dan kurangnya pembukaan lahan pertanian potensial.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka sektor pertanian di Provinsi Papua Selatan perlu dioptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, diharapkan adanya percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, serta pengembangan kawasan strategis pertanian. Adapun pembahasan urusan pertanian lebih lanjut dalam subbab ini terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dalam hal ini, pembahasan akan berfokus pada komoditas lokal dan komoditas strategis pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi.

Gambar II.119 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

7) Tanaman Pangan

Tabel II.112 menunjukkan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.112 diketahui bahwa secara umum produksi tanaman pangan terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah padi (350 ribu ton), ubi kayu (40,66 ribu ton), serta ubi jalar (23,97 ribu ton). Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, hanya Kabupaten Merauke dan Boven Digoel saja yang dapat diidentifikasi produksi pertaniannya dengan adanya keterbatasan data. Terdapat perbedaan produksi komoditas tanaman pangan antara Kabupaten Merauke yang mengutamakan produksi padi (349,59 ribu ton), sedangkan Kabupaten Boven Digoel yang lebih dominan dalam produksi ubi kayu (25,53 ribu ton) dan ubi jalar (16,74 ribu ton).

Sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga ketahanan pangan dan mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Papua Selatan maka pengembangan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua Selatan perlu sejalan dengan arahan RTRW tentang penetapan kawasan budidaya peruntukkan pertanian pangan. Apabila diperlukan kedepannya dapat ditentukan penetapan Kawasan Strategis agropolitan/minapolitan/agribisnis dalam penyusunan RTRW Provinsi Papua Selatan.

Tabel II.112 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021 (ton)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat*	Papua Selatan
Padi	349.588,00	1.211,00	...	...	350.799,00
Ubi Kayu	15.136,35	25.530,00	...	...	40.666,35
Ubi Jalar	7.238,48	16.736,00	...	...	23.974,48
Talas	4.850,90	1.099,00	...	...	5.949,90
Jagung	4.050,66	...	...	...	4.050,66
Kacang Tanah	897,70	1.019,50	...	...	1.917,20
Gembili	1.899,90	...	...	...	1.899,90
Kacang Hijau	152,83	...	...	...	152,83
Kedelai	25,54	10,00	...	...	35,54

*Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Apabila dilakukan analisis terhadap capaian produksi pertanian tanaman pangan dan arahan RTRW Provinsi Papua sebagai provinsi induk, maka dapat diketahui bahwa -dari seluruh kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan- Kabupaten Mappi, Asmat dan Boven Digoel belum dapat memproduksi komoditas tanaman pangan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), hal ini tercermin juga dalam Indeks Ketersediaan (IK) pangan yang bernilai 0,00 di 3 (tiga) kabupaten tersebut (lihat Tabel II.22). Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat ketahanan pangan merupakan hal yang vital dalam pemenuhan kebutuhan penghidupan masyarakat.

8) Holtikultura

Tabel II.113 menunjukkan produksi sayuran berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.113 diketahui bahwa secara umum, produksi sayuran terbesa di Provinsi Papua Selatan adalah tomat (24,97 ribu quintal), sawi/petsai (17,73 ribu quintal), dan cabe rawit (17,03 ribu quintal). Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, hasil produksi Kabupaten Merauke mendominasi atau memiliki proporsi yang sangat besar terhadap produksi sayuran regional di Papua Selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan produksi holtikultura di Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat dalam rangka mencapai ketahanan pangan daerah.

Tabel II.113 Produksi Sayuran di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021 (kuintal)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Bawang Daun	2.744,00	...	...	...	2.744,00
Bawang Merah	2.768,00	...	...	...	2.768,00
Bawang putih	...	...	...	...	0,00
Bayam	4.685,00	...	...	...	4.685,00
Buncis	8.182,00	...	...	...	8.182,00
Cabe Besar	9.330,00	30,00	280,00	25,33	9.665,33
Cabe Rawit	15.544,00	1.456,00	0,00	30,00	17.030,00
Kacang Panjang	9.252,00	...	350,00	74,57	9.676,57
Kangkung	12.697,00	...	300,00	243,18	13.240,18
Kembang Kol	1.849,00	...	...	...	1.849,00
Kentang	...	...	...	...	0,00
Ketimun	7.984,00	...	...	22,31	8.006,31
Kubis	12.647,00	2.200,00	...	...	14.847,00
Labu siam	82,00	...	...	...	82,00
Sawi/Petsai	17.426,61	...	270,00	34,04	17.730,65
Terung	7.443,00	...	...	66,56	7.509,56
Tomat	20.420,00	4.320,00	210,00	27,50	24.977,50

*Kawasan peruntukkan pertanian hortikultura berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033
 Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Tabel II.114 menunjukkan produksi buah-buahan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2020. Berdasarkan Tabel II.114 diketahui bahwa komoditas buah-buahan yang paling banyak diproduksi di Provinsi Papua Selatan tahun 2020 adalah manga (59,63 ribu kuintal) dan jeruk siam/keprok/orang (41,14 ribu kuintal) yang Sebagian besar diproduksi di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke merupakan wilayah yang paling banyak memproduksi buah-buahan dengan hasil produksi unggulan yaitu manga (59,04 ribu kuintal), jeruk siam/keprok/orang (40,98 ribu kuintal), durian (7,3 ribu kuintal), dan melinjo (7,23 ribu kuintal).

Tabel II.114 Produksi Buah-buahan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (kuintal)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Alpukat	1.145,00	...	...	...	1.145,00
Anggur	8,00	...	...	...	8,00
Apel	0,00	...	...	...	0,00
Belimbing	1.559,00	...	...	...	1.559,00
Duku/ Langsat/ Kokosan	32,00	...	...	...	32,00
Durian	7.303,00	...	590,00	...	7.893,00
Jambu Air	2.598,00	...	...	...	2.598,00
Jambu Biji	3.737,00	...	...	77,80	3.814,80
Jengkol	8,00	...	...	...	8,00
Jeruk Besar	1.330,00	...	...	55,60	1.385,60
Jeruk siam/ Keprok/ Orange	40.984,00	...	160,00	...	41.144,00
Mangga	59.042,00	...	530,00	63,90	59.635,90

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Manggis	2.340,00	...	...	...	2.340,00
Markisa	0,00	...	...	...	0,00
Melinjo	7.227,00	...	...	...	7.227,00
Nanas	...	...	540,00	181,60	721,60
Pisang	...	...	1.990,00	2.429,00	4.419,00
Pepaya	...	...	0,00	98,10	98,10
Rambutan	...	598,50	500,00	48,80	1.147,30
Salak	...	14,48	...	...	14,48
Sirsak	...	9,78	...	...	9,78
Sukun	...	179,40	...	...	179,40

*Kawasan peruntukkan pertanian hortikultura berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033
 Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

9) Perkebunan

Tabel II.115 menunjukkan produksi perkebunan di Provinsi Papua Selatan pada Tahun 2020. Dalam Tabel II.115 dapat diketahui bahwa komoditas perkebunan yang paling banyak diproduksi di Provinsi Papua Selatan adalah sagu (5.317 ton), kelapa (4.273 ton), jambu mete (917 ton) dan pinang (123 ton). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi produksi perkebunan antar kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang mencerminkan kekhasan daerah. Kabupaten Merauke merupakan wilayah penghasil kelapa (3.408 ton), jambu mete (917 ton), kapuk randu (68 ton), pinang (53 ton), sagu (13 ton), dan lada (2 ton). Kabupaten Boven Digoel merupakan wilayah penghasil kelapa (175 ton) dan kakao (4 ton). Kabupaten Mappi merupakan wilayah penghasil kelapa (475 ton), pinang (70 ton), kakao (8 ton), cengkeh (7 ton) dan kapuk rindu (2 ton). Adapun Kabupaten Asmat merupakan wilayah penghasil sagu (5.304 ton) dan kelapa (215 ton).

Tabel II.115 Produksi Perkebunan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (ton)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat	Papua Selatan
Kelapa Sawit	0	0	0	0	0
Kelapa	3.408	175	475	215	4.273
Karet	0	0	0	0	0
Kopi	0	0	0	0	0
Kakao	0	4	8	0	12
Tebu	0	0	0	0	0
Teh	0	0	0	0	0
Tembakau	0	0	0	0	0
Sagu	13	0	0	5.304	5.317
Pinang	53	0	70	0	123
Vanili	0	0	0	0	0

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat	Papua Selatan
Jambu Mete	917	0	0	0	917
Lada	2	0	0	0	2
Kapuk Randu	68	0	2	0	70
Cengkeh	0	0	7	0	7

*Kawasan peruntukkan perkebunan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

10) Peternakan

Tabel II.116 menunjukkan populasi ternak dan unggas di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.116 diketahui bahwa populasi ternak dan unggas yang paling banyak di Provinsi Papua Selatan tahun 2022 adalah ayam kampung (2,13 juta ekor), itik (47.470 ekor), sapi (44.460 ekor), dan babi (15.140 ekor). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang paling banyak terdapat ternak dan unggas adalah Kabupaten Merauke, sedang 3 (tiga) kabupaten lainnya (terutama Kabupaten Asmat) relatif memiliki ternak yang sedikit dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Tabel II.116 Populasi Ternak dan Unggas (ekor) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat	Papua Selatan
Sapi	43.220	878	60	302	44.460
Kerbau	661	0	0	0	661
Kuda	2.902	35	0	0	2.937
Babi	13.547	1.153	130	310	15.140
Domba	15.835	6.332	3.151	2.205	27.523
Ayam Kampung	2.075.619	12.440	33.617	8.455	2.130.131
Itik	41.923	1.890	1.952	1.705	47.470

*Kawasan peruntukkan peternakan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Dalam Angka")

Tabel II.117 menunjukkan produksi daging ternak/unggas dan telur di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.117 diketahui bahwa ayam kampung merupakan komoditas peternakan yang paling banyak memenuhi konsumsi daging di Provinsi Papua Selatan yaitu 3,57 ton daging dan 2,87 butir telur. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi produksi daging antar kabupaten yang mencerminkan preferensi peternak dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi hewani. Dalam hal ini, terdapat pola produksi daging yang berbeda terjadi di Kabupaten Boven Digoel dengan adanya mayoritas produksi daging babi (53,03 ton) dibandingkan dengan daging sapi (53,01 ton) dan daging ayam (20,88 ton).

Tabel II.117 Produksi Daging Ternak dan Telur Unggas di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Komoditas	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
DAGING (KG)					
Sapi	702.650	53.010	5.049	3.967	764.676
Kerbau	19.261	0	0	0	19.261
Kuda	17.250	0	0	0	17.250
Kambing/Domba	23.909	3.150	316	89	27.464
Babi	23.096	53.029	24.705	9.480	110.310
Ayam Kampung	3.484.135	20.882	56.430	14.193	3.575.639
Ayam Petelur	144.927	9.755	391	2.927	157.999
Itik	26.408	1.222	1.246	1.125	30.001
TELUR (KG)					
Ayam Kampung	2.793.584	16.743	45.245	11.380	2.866.952
Itik	338.624	12.600	14.297	9.360	374.881

*Kawasan peruntukkan peternakan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033
Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Dalam Angka")

11) Kehutanan

Kondisi hutan di Provinsi Papua Selatan dibagi menjadi dua jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Luasan hutan lindung di Provinsi Papua Selatan yaitu seluas 1.687.302 Ha. Untuk Hutan Produksi, Provinsi Papua Selatan memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

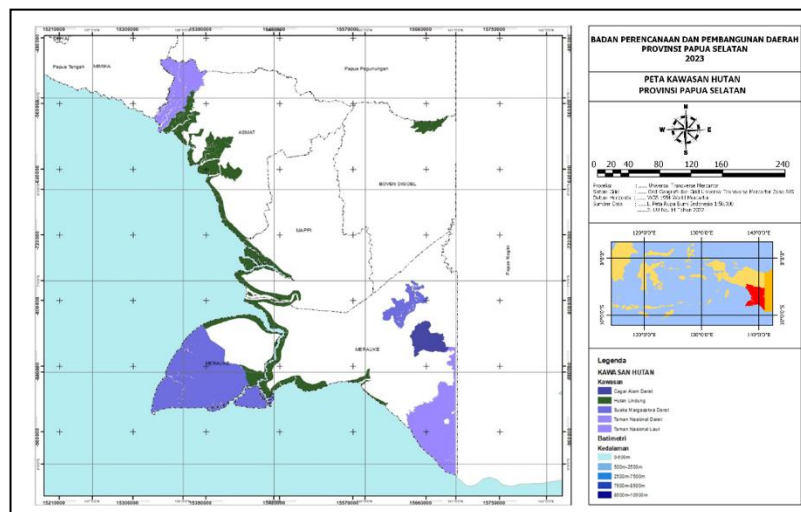
Tabel II.118 Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (Hektar)

Kabupaten	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
Merauke	268.734	1.405.767	978.542	213.723	1.237.698	4.119.825
Boven Digoel	83.772	0	1.292.101	403.213	173.785	1.956.482
Mappi	210.729	0	586.285	796.061	48.459	2.128.312
Asmat	1.124.067	278.888	105.556	1.031.620	42.352	2.594.449
Papua Selatan	1.687.302	1.684.655	2.962.484	2.444.617	1.502.294	10.799.068

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2023

Adapun kondisi luasan kawasan hutan di Provinsi Papua Selatan menurut Kabupaten dapat dilihat pada Tabel II.118 diketahui bahwa luasan kawasan hutan di Provinsi Papua Selatan untuk Hutan Produksi Terbatas yaitu sebesar 2.962.484 Ha, dengan Kabupaten Boven Digoel memiliki luasan terbesar yaitu 1.292.101 Ha. Hutan Produksi Tetap memiliki luasan sebesar 2.444.617 Ha, dengan Kabupaten Asmat memiliki luasan terbesar yaitu 1.031.620 Ha. Berikutnya Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Papua Selatan memiliki luasan sebesar 1.502.294 Ha dengan daerah yang memiliki luasan paling besar yaitu Kabupaten Merauke sebesar 1.237.698 Ha.

Gambar II.120 Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan



Sumber: Peta RTRW Provinsi Papua, 2013, Data RBI dan Pengolahan Data Tahun 2022

12) Perindustrian

Industri pengolahan merupakan bentuk kapitalisasi faktor dan sistem produksi yang memutar pergerakan roda ekonomi. Semakin besar modal yang digunakan, semakin besar dan kompleks pula skala industri yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan harapan efisiensi pada penggunaan

faktor-faktor ekonomi. Peningkatan sektor ekonomi harus mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Semakin panjang rantai produksi yang dilakukan secara lokal, semakin besar pula dampak pertambahan nilai ekonomi yang dirasakan oleh daerah. Pengembangan industri juga harus memerhatikan kelestarian alam dengan tidak bersifat ekstraktif, serta menggunakan sumber energi terbarukan. Pengolahan limbah industri juga perlu diperhatikan secara ketat agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Tabel II.119 memperlihatkan jumlah perusahaan, pekerja, nilai investasi dan produksi yang dihasilkan oleh industri besar dan sedang di tiap Kabupaten Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke dan Boven Digoel memiliki jumlah industri yang sama. Namun demikian besarnya investasi, jumlah pekerja, dan nilai produksi yang dimiliki oleh Industri di Boven Digoel jauh lebih besar dibandingkan Industri di Merauke.

Tabel II.119 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Papua

Kabupaten	Jumlah Industri	Jumlah pekerja	Investasi (ribu rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)
Merauke	2	110	n.a.	34.256.269
Boven Digoel	2	2.732	9.986.204	8.359.138.442
Papua Selatan	4	2.842	9.986.204	8.393.394.711

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2023

Tabel II.120 menyajikan data jumlah industri mikro menurut kabupaten dan modal usaha di Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke memiliki jumlah usaha paling tinggi dengan Kabupaten Asmat dengan jumlah usaha yang paling sedikit. Sebagian besar usaha berasal dari modal yang dimiliki sendiri. Kabupaten Merauke memiliki industri dengan modal usaha non-milik sendiri terbanyak di Provinsi Papua Selatan. Hal ini menunjukkan tingkatan kerja sama modal industri di Kabupaten Merauke lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya.

Tabel II.120 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Sumber Modal Usaha di Papua Selatan, 2020

Kabupaten	Banyaknya Usaha	Sepenuhnya Milik Sendiri	Sumber Modal Utama Lainnya					Tenaga Kerja
			Bank	Koperasi	Perorangan	Program Pemerintah	Lainnya	
Merauke	1572	1312	193	1	15	27	24	3313
Boven Digoel	289	269	20	20				512
Mappi	446	404	42	34		8		667
Asmat	61	59	2	2				85

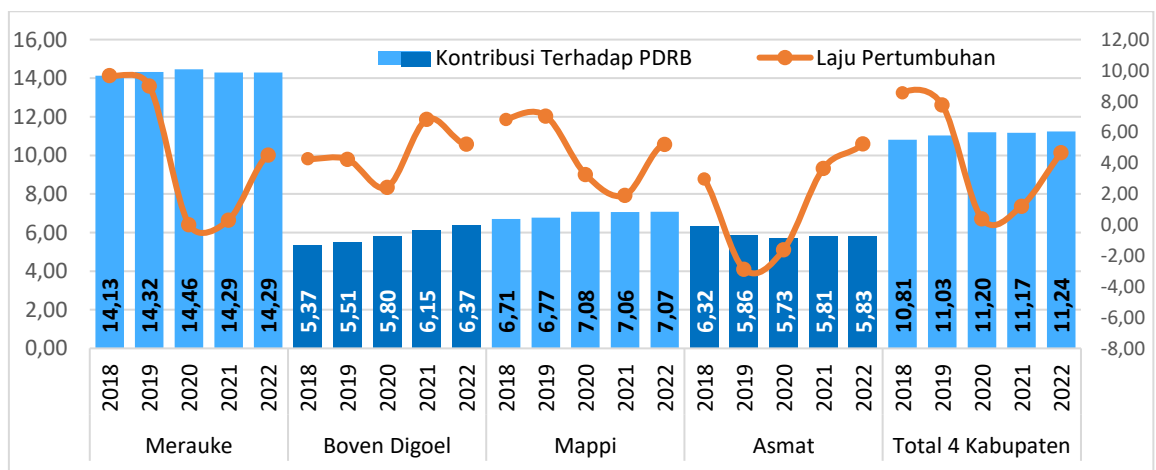
Kabupaten	Banyaknya Usaha	Sepenuhnya Milik Sendiri	Sumber Modal Utama Lainnya					Tenaga Kerja
			Bank	Koperasi	Perorangan	Program Pemerintah	Lainnya	
Papua Selatan	2368	2044	257	57	15	35	24	4577

Sumber: Profil Industri Mikro dan Kecil Papua Tahun 2020

13) Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB secara umum mengalami tren yang cenderung meningkat dari 10,81% pada tahun 2018 menjadi 11,24% pada tahun 2022 (lihat Gambar II.121 dan Tabel II.121). Meskipun demikian, laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dari 8,54% pada tahun 2018 menjadi 4,69% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan di Provinsi Papua Selatan meskipun terdapat potensi perdagangan yang sangat besar.

Gambar II.121 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2019-2023

Tabel II.121 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten					Laju Pertumbuhan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	14,13	14,32	14,46	14,29	14,29	9,68	9,01	0,03	0,30	4,54
Boven Digoel	5,37	5,51	5,80	6,15	6,37	4,27	4,24	2,44	6,84	5,24
Mappi	6,71	6,77	7,08	7,06	7,07	6,82	7,06	3,28	1,93	5,22
Asmat	6,32	5,86	5,73	5,81	5,83	2,96	-2,87	-1,61	3,66	5,26
Total 4 Kabupaten	10,81	11,03	11,20	11,17	11,24	8,54	7,77	0,40	1,22	4,69

Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2019-2023

Pengembangan sektor perdagangan di Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana perdagangan seperti pasar, toko, kios dan warung sebagai lokasi transaksi antara penjual dan pembeli. Tabel II.122 menunjukkan jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.122 diketahui terdapat 151 kelompok pertokoan, 17 pasar dengan bangunan permanen, 41 pasar dengan bangunan semi permanen, 7 pasar tanpa bangunan, 83 minimarket, serta 36 restoran/rumah makan di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Kabupaten yang memiliki sarana perdagangan paling sedikit adalah Kabupaten Mappi yang terdiri atas 11 pasar, 7 minimarket dan 3 restoran/rumah makan.

Tabel II.122 Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Sarana Perdagangan, 2021

Sarana Perdagangan	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Kelompok Pertokoan	129	4	0	18	151
Pasar dengan Bangunan Permanen	7	3	4	3	17
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	12	16	6	7	41
Pasar Tanpa Bangunan	1	4	1	1	7
Minimarket/swalayan / supermarket	32	16	7	28	83
Restoran / Rumah Makan	30	0	3	3	36

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (dalam dokumen “Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021”)

14) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Tabel II.123 menunjukkan jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.123 diketahui terdapat 258 unit koperasi di Papua Selatan. Meskipun demikian perlu dikaji lebih lanjut karena jumlah ini belum memisahkan antara koperasi aktif dan koperasi yang tidak aktif.

Tabel II.123 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Kategori	Merauke		Boven Digoel		Mappi		Asmat		Papua Selatan	
	unit	%	unit	%	unit	%	unit	%	unit	%
Koperasi Unit Desa (KUD)	10	6,54	2	3,70	2	16,67	0	0,00	14	5,43
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)	12	7,84	0	0,00	1	8,33	0	0,00	13	5,04
Koperasi Karyawan (KOPKAR)	7	4,58	0	0,00		0,00	0	0,00	7	2,71
Koperasi Wanita (KOPWAN)	4	2,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1,55
Koperasi Serba Usaha (KSU)	48	31,37	0	0,00	1	8,33	0	0,00	49	18,99
Koperasi Peranserta Masyarakat Adat (KOPERMAS)	0	0,00	0	0,00	7	58,33	0	0,00	7	2,71
Lainnya	72	47,06	52	96,30	1	8,33	39	100,00	164	63,57
JUMLAH	153	100,00	54	100,00	12	100,00	39	100,00	258	100,00

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka”)

Dalam Tabel II.123 juga dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis usahanya, koperasi dengan distribusi merata di setiap kabupaten adalah Koperasi Unit Desa (KUD) meskipun jumlah agregatnya masih sedikit dibandingkan koperasi jenis usaha lainnya. Apabila meninjau berdasarkan wilayah, Kabupaten Merauke memiliki jumlah koperasi terbanyak yaitu 153 koperasi, sedangkan wilayah dengan jumlah koperasi terkecil adalah Boven Digoel yaitu hanya 12 koperasi.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Kondisi Infrastruktur

Tabel II.124 menunjukkan proporsi Panjang jaringan jalan di Provinsi Papua tahun 2017-2021. Data menunjukkan terdapat peningkatan panjang jalan dari kualitas rusak berat menjadi kualitas sedang dan rusak ringan. Pada tahun 2021, panjang jalan dengan kualitas sedang dan rusak ringan meningkat sebesar 270% dan 170%. Jumlah jalan dengan kualitas rusak berat mengalami penurunan jumlah sebesar 60%. Sementara proporsi kualitas jalan dari dominasi kualitas jalan rusak berat sebesar lebih dari 50% mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 21% diiringi dengan peningkatan proporsi jalan kualitas rusak ringan dan sedang dari 12% dan 18% menjadi 32,4% dan 30,2%.

Tabel II.124 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jaringan Jalan di Provinsi Papua Selatan 2018-2021

	Kondisi Jalan	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan (km)	Baik	950,835	878,639	865,841	797,419	831,496
	Sedang	616,761	626,761	569,686	1711,784	1668,254
	Rusak	915,856	1050,685	884,337	1576,214	1555,086
	Rusak Berat	2482,53	2409,878	2653,439	1069,991	1100,572
Persentase	Baik	19,1%	17,7%	17,4%	15,5%	16,1%
	Sedang	12,4%	12,6%	11,5%	33,2%	32,4%
	Rusak	18,4%	21,2%	17,8%	30,6%	30,2%
	Rusak Berat	50,0%	48,5%	53,4%	20,8%	21,3%
Total		4965,982	4965,963	4973,303	5155,408	5155,408

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten, 2022 (dalam dokumen Kabupaten dalam Angka 2022)

Tabel II.125 menunjukkan kondisi jaringan jalan kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.125 diketahui bahwa Kabupaten Asmat memiliki jalan dengan kualitas rusak berat terpanjang dan proporsi terbanyak (32%). Sementara Kabupaten Boven Digoel memiliki jalan dengan kualitas rusak (ringan) terpanjang dan proporsi terbanyak. Perbaikan jalan pada kedua kabupaten ini menjadi salah satu pilihan prioritas dalam percepatan peningkatan akses jalan dan serta memudahkan pelaksanaan pembangunan.

Tabel II.125 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan 2022

No	Kabupaten	Panjang jalan tiap Kondisi Jaringan Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Merauke	367,35	642,00	155,57	148,95
2	Boven Digoel	138,74	180,72	945,20	3,28
3	Mappi	69,1	845,6	109	61,86
4	Asmat	256,31	-	345,32	284,85

Sumber: BPS Kabupaten, 2022 (dalam dokumen Kabupaten dalam Angka 2022)

Ketersediaan sarana transportasi jalan merupakan hal yang harus diperhatikan seiring dengan meningkatkan jumlah kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Papua Selatan jumlah jalan yang tersedia untuk mendukung pergerakan kendaraan tersebut juga sebaiknya dapat ditingkatkan. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, begitu pula dengan jalan yang tersedia. Namun peningkatan jumlah kendaraan terjadi lebih pesat dibandingkan pertumbuhan jumlah jalan dimana

terjadi penurunan rasio antara panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan. Semakin kecil nilai rasio maka semakin sedikit alokasi jalan yang tersedia untuk tiap kendaraan.

Tabel II.126 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Papua Selatan

Indikator	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan	4965,98	4965,96	4973,30	5155,41
Jumlah Kendaraan	105528	126618	n.a.	134958
Rasio	4,71%	3,92%	n.a.	3,82%

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2018-2022

2) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan papan dasar. Capaian kesejahteraan dan kelayakan hunian di daerah menggunakan tolak ukur kuantitas dan kualitas tempat hunian. Tinjauan kelayakan hunian melihat tiga komponen dalam bangunan hunian yaitu persentase hunian berdasarkan jenis atap, tembok, dan lantai terluas.

Tabel II.127 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis atap terluas hunian. Mayoritas atap hunian di Papua Selatan menggunakan atap seng untuk huniannya dengan persentase rata-rata sekitar 83% hunian di Papua Selatan. Jenis atap lainnya dengan jumlah penggunaan yang signifikan adalah atap berjenis jerami. Jenis ini secara signifikan digunakan pada hunian di Kabupaten Mappi (20,66%) dan Asmat (13,93%).

Tabel II.127 Persentase Rumah Tangga Kabupaten/ Kota dan Jenis Atap Terluas 2022

Kabupaten	Beton	Genteng	Asbes	Seng	Bambu	Kayu	Jerami	Lainnya
Merauke	0,09	3,11	2,07	92,18	0,08	0,00	2,24	0,23
Boven Digoel	0,00	1,10	0,19	81,46	0,00	0,06	11,00	0,28
Mappi	0,00	1,38	0,00	77,52	1,00	0,19	20,66	0,25
Asmat	0,00	0,50	0,00	81,46	1,48	2,56	13,93	0,06
Rata-rata	0,00	1,50	0,60	83,20	0,60	0,70	12,00	0,20

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

Tabel II.128 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis tembok hunian. Mayoritas tembok hunian di Papua Selatan menggunakan jenis tembok kayu atau papan dengan rata-rata proporsi sebesar 60,45%. Penggunaan tembok papan terbanyak dengan proporsi 90% terdapat di Kabupaten Asmat. Sementara penggunaan tembok berjenis Tembok dengan rata-rata proporsi sebesar 36% menempati urutan kedua jenis tembok di Papua Selatan.

Tabel II.128 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, 2022

Kabupaten	Tembok	Plasteran Anyaman Bambu	Kayu/ Papan	Anyaman Bambu	Batang Kayu	Bambu	Lainnya
Merauke	63,34	0,01	33,81	0,82	0	0,41	1,61
Boven Digoel	41,32	0,27	57,02	0,49	0,16	0	0,73
Mappi	42,75	0	50,08	1,36	0	0,75	5,06
Asmat	0	0	90,90	0,25	0,78	0,14	7,93
Rata-rata	36,85	0,07	57,95	0,73	0,24	0,33	3,83

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

Tabel II.129 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis lantai hunian. Hunian di Papua Selatan menggunakan beragam jenis bahan dengan proporsi yang cukup signifikan untuk tiap jenis bahannya. Mayoritas jenis lantai yang digunakan pada hunian di Papua Selatan adalah jenis kayu/ papan (45,53%). Di Kabupaten Asmat hampir seluruh huniannya menggunakan lantai berjenis kayu (99%). Sementara jenis lantai dengan penggunaan yang signifikan lainnya di Papua Selatan adalah lantai dengan bahan semen/ bata merah (29%) dan berjenis keramik (15,66%).

Tabel II.129 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Terluas, 2022

Kabupaten	Marmer / Granit	Keramik	Parket/Vinil/Karpet, Ubin/Tegel/Teraso	Kayu/ papan	Semen / Bata	Bambu	Tanah	Lainnya
Merauke	1,07	28,15	11,06	22,14	32,76	0,25	4,37	0,2
Boven Digoel	0,26	25,43	2,56	26,73	40,1	0,33	0,23	4,36
Mappi	2,55	9,07	3,49	34,22	45,67	1,09	2,19	1,71
Asmat	0,08	0	0,33	99,04	0	0,27	0,27	0
Rata-rata	0,99	15,66	4,36	45,53	29,63	0,49	1,77	1,57

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

3) Indeks Desa Membangun

Berdasarkan Tabel II.131 diketahui bahwa meskipun mengalami peningkatan selama periode 2019-2021, status rata-rata IDM Kabupaten di Provinsi Papua Selatan masih berada dalam kategori “**tertinggal**” dengan skor 0,4806 pada tahun 2021. Berdasarkan kabupaten di Papua Selatan, Kabupaten Merauke mengalami perkembangan IDM yang relatif signifikan dari skor 0,4826 pada tahun 2019 menjadi 0,5383 pada tahun 2021. Telah terjadi peningkatan status IDM Kabupaten Merauke dari “sangat tertinggal” pada tahun 2019 menjadi “tertinggal” pada tahun 2020-2021. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung di Kabupaten Merauke.

Tabel II.130 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Klasifikasi	Rentang Nilai IDM
1	sangat tertinggal	$0,270 \leq \text{IDM} \leq 0,491$
2	tertinggal	$0,491 < \text{IDM} \leq 0,599$
3	berkembang	$0,599 < \text{IDM} \leq 0,707$
4	maju	$0,707 < \text{IDM} \leq 0,815$
5	mandiri	$0,815 < \text{IDM} \leq 0,920$

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berbeda dengan kondisi Kabupaten Merauke, nilai IDM 3 (tiga) wilayah lainnya di Provinsi Papua Selatan termasuk dalam kategori “**sangat tertinggal**” dan mengalami penurunan IDM pada tahun 2019-2021. Penurunan signifikan terjadi di Kabupaten Asmat dari 0,5211 pada tahun 2019 menjadi 0,4512 pada tahun 2021. Penurunan signifikan IDM Kabupaten Asmat ini bahkan berimplikasi pada penurunan status IDM kabupaten Asmat dari kategori “tertinggal” menjadi “sangat tertinggal”.

Tabel II.131 Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan

Indikator		2019	2020	2021
Rata-rata IDM Kabupaten		0,4848	0,4971	0,4806
Status Rata-rata IDM Kabupaten		tertinggal	tertinggal	tertinggal
1	Merauke	0,4826	0,5315	0,5383
		sangat tertinggal	tertinggal	tertinggal
2	Boven Digoel	0,4764	0,4764	0,4745
		sangat tertinggal	sangat tertinggal	sangat tertinggal
3	Mappi	0,4592	0,4592	0,4585
		sangat tertinggal	sangat tertinggal	sangat tertinggal
4	Asmat	0,5211	0,5211	0,4512
		tertinggal	tertinggal	sangat tertinggal

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Dokumen

“Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 2016-2021”

4) Transportasi Darat

Berkembangnya aktivitas dan sarana transportasi jalan mengindikasikan penggunaan transportasi darat juga akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan berbagai jenis transportasi darat di Provinsi Papua Selatan. orang dan barang di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020.

Tabel II.132 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Provinsi Papua Selatan per Jenis Kendaraan 2017-2021

Kabupaten	Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	Mobil penumpang	435	5430	629	673	3963
	Mobil bis	2040	103	4219	4712	5205
	Mobil barang	2647	6083	5061	5420	5779
	Sepeda Motor	44215	99200	60461	64436	68411
	Kendaraan bermotor	49337	110816	70370	75241	83358
Boven Digoel	Mobil penumpang	n.a.	1077	n.a.	734	n.a.
	Mobil bis	n.a.	33	n.a.	33	n.a.
	Mobil barang	n.a.	1406	n.a.	1240	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	8504	n.a.	7130	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	11020	n.a.	9137	n.a.
Mappi	Mobil penumpang	n.a.	178	n.a.	734	n.a.
	Mobil bis	n.a.	12	n.a.	33	n.a.
	Mobil barang	n.a.	364	n.a.	1240	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	4318	n.a.	7130	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	4872	n.a.	9137	n.a.
Asmat	Mobil penumpang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Mobil bis	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Mobil barang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2022 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2018-2022)

Tabel II.132 menampilkan jumlah tiap jenis transportasi darat di tiap kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Terjadi peningkatan moda transportasi mobil penumpang, barang, serta sepeda motor yang mengindikasikan peningkatan aktivitas dan pergerakan

5) Transportasi Laut dan Kunjungan Kapal

Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua 2013-2033 menyebutkan bahwa pelabuhan utama di Provinsi Papua Selatan terletak di Kabupaten Merauke yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan antar provinsi.

Terdapat tiga rute utama pelayaran dari pelabuhan Merauke yaitu dengan tujuan akhir 1) Manokwari melalui Ambon, 2) Bitung-Sulawesi, dan 3) Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya. Data Statistik Transportasi Papua 2021 memuat data jumlah penumpang dan barang melalui pelabuhan Merauke. Data menunjukkan kunjungan kapal pada tahun 2021 sebanyak 277 unit dari dalam negeri dan 2 unit dari luar negeri. Muatan barang seluruhnya berasal dari dalam negeri dengan total

muatan 337.213 ton muatan masuk (bongkar) dan 65.324 ton muatan keluar. Pada tahun 2021 Pelabuhan di Merauke telah dilalui oleh 12.868 penumpang datang dan 14.292 penumpang berangkat.

Tabel II.133 Rute Pelayaran di Provinsi Papua Selatan

No.	Nama Kapal	Rute Pelayaran
1	KM Sirimau	Manokwari-Sorong-Ambon-Wanci-Bau bau-Maumere-Lewoleba-Kupang-Kalabahi-Saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats- Merauke (PP)
2	KM Tatamailau	Bitung-Tidore-Sorong-Fak Fak-Kaimana-Tual-Timika-Agats- Merauke (PP)
3	KM Leuser	Tanjung Perak Surabaya-Benoa-Bima-Labuanbajo-Makassar-Bau bau-Wanci-Namrole-Ambon-Saumlaki-Tual-Agatas- Merauke (PP)

Sumber: Jadwal Kapal Pelni, 2023

6) Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan salah satu pilihan yang paling utama untuk digunakan di Papua dikarenakan karakteristik medan yang cukup bergunung, curam, dan diliputi hutan sehingga perjalanan transportasi darat menjadi cukup sulit untuk dilakukan di beberapa tempat. Secara umum terjadi penurunan jumlah pergerakan penumpang melalui jalur udara dari tahun 2018 ke tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan moda transportasi umum untuk mengurangi penyebaran wabah. Terjadi pengurangan jumlah keberangkatan sebesar 35% dan 60% jumlah penumpang berangkat di tahun 2020 dari tahun 2018. Sementara terjadi pengurangan jumlah kedatangan sebesar 28% dengan jumlah penumpang sebesar 64%.

Tabel II.134 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Transportasi Udara di Papua Selatan 2018-2020

		Merauke	Boven Digoel			Mappi	Asmat	Total
		Bandara Moppah	Bandara Mindiptanah	Bandara Tanah Merah	Bandara Bomakia	Kepi	Bandara Ewer	
2018	Jumlah Keberangkatan	4.182	87	5.487	228	958	458	11.400
	Penumpang	224.503	742	21.657	1.795	9.648	3.901	262.246
	Jumlah Kedatangan	4.177	87	5.464	226	958	458	11.370
	Penumpang	218.084	705	18.441	1.671	10.590	3.665	253.156
2019	Jumlah Keberangkatan	3.304	34	5.750	193	742	726	10.749
	Penumpang	166.943	185	27.801	1.528	8.137	8.201	212.795
	Jumlah Kedatangan	3.300	34	5.756	193	738	695	10.716
	Penumpang	166.882	213	25.926	1.556	8.014	7.369	209.960
2020	Jumlah Keberangkatan	1.971	15	5.071	29	445	86	7.617
	Penumpang	78.346	60	13.539	1.329	4.173	9.500	106.947

		Merauke	Boven Digoel			Mappi	Asmat	Total
		Bandara Moppah	Bandara Mindiptanah	Bandara Tanah Merah	Bandara Bomakia	Kepi	Bandara Ewer	
	Jumlah Kedatangan	1.984	15	5.666	29	444	86	8.224
	Penumpang	78.345	49	12.752	12.752	3.932	8.134	115.964

Sumber: Statistik Transportasi Papua Tahun 2021

7) Sarana Transportasi

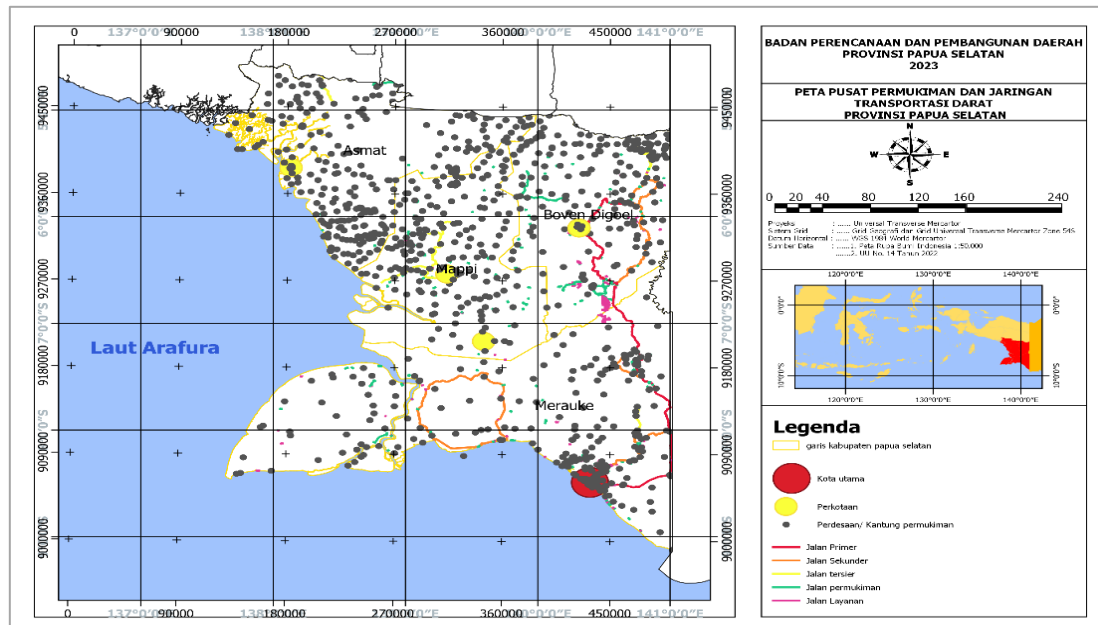
Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial dalam hal perpindahan orang dan barang. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu, maupun risiko perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman barang, barang lebih murah dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas pada umumnya untuk lebih mudah dan sering dilakukan. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya pembangunan.

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini merupakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat aktivitas ini harus terhubung satu sama lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih luas sehingga aktivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi.

Pada Gambar II.122 ditampilkan pusat-pusat aktivitas di Papua Selatan beserta infrastruktur darat yang menghubungkan pusat-pusat tersebut. Data pusat-pusat aktivitas yang berasal dari sumber terbuka OpenStreetMap menunjukkan Merauke sebagai kota utama di Provinsi Papua Selatan secara langsung terhubung dengan pusat Kabupaten Boven Digoel melalui jaringan transportasi darat. Pusat Kabupaten Mappi dan Asmat belum terhubung secara langsung dengan pusat aktivitas kabupaten lainnya melalui jalur darat. Sementara itu pusat aktivitas kabupaten ini terhubung dengan permukiman-permukiman kecil di sekitarnya melalui jaringan jalan sekunder dan tersier. Sementara itu untuk menghubungkan antar perdesaan atau

permukiman sudah terdapat beberapa wilayah yang terlayani jalan permukiman walaupun sebagian besar belum terlayani fasilitas tersebut.

Gambar II.122 Peta Pusat Aktivitas/Permukiman dan Jaringan Transportasi Darat Provinsi Papua Selatan 2023



Sumber: Data OpenStreetMap dan Hasil Analisis, 2023

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

1) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Berdasarkan Tabel II.135 diketahui rata-rata pengeluaran per kapita di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Papua Selatan mengalami trend peningkatan dari rata-rata 7,84 juta rupiah pada 2019 menjadi 8,005 juta pada tahun 2023.

Apabila meninjau kondisi Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, wilayah yang memiliki pengeluaran per kapita tertinggi tahun 2023 adalah Kabupaten Merauke yaitu 10,747 juta rupiah. Adapun wilayah dengan pengeluaran per kapita yang paling rendah di Papua Selatan adalah

Kabupaten Asmat yaitu 6,06 juta rupiah) dan Kabupaten Mappi yaitu 6,82 juta rupiah.

Tabel II.135 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merauke	10.430	10.498	10.097	10.201	10.424	10.747
Boven Digoel	8.211	8.300	7.947	7.864	8.086	8.396
Mappi	6.268	6.513	6.353	6.327	6.550	6.821
Asmat	5.882	6.066	5.733	5.736	5.860	6.057
Rata-rata 4 Kabupaten	7.698	7.844	7.533	7.532	7.730	8.005
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2) Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan

Perubahan pendapatan dan kapasitas ekonomi masyarakat akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Seperti yang dikatakan pada hukum Engle bahwa akan terjadi sebuah pergeseran dari proporsi pengeluaran konsumen untuk produk makanan saat pendapatan meningkat, artinya pada titik dimana pemenuhan kebutuhan makanan sudah tercukupi saat pendapatan meningkat maka peningkatan pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau disimpan sebagai tabungan/investasi.

Tabel II.136 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2022

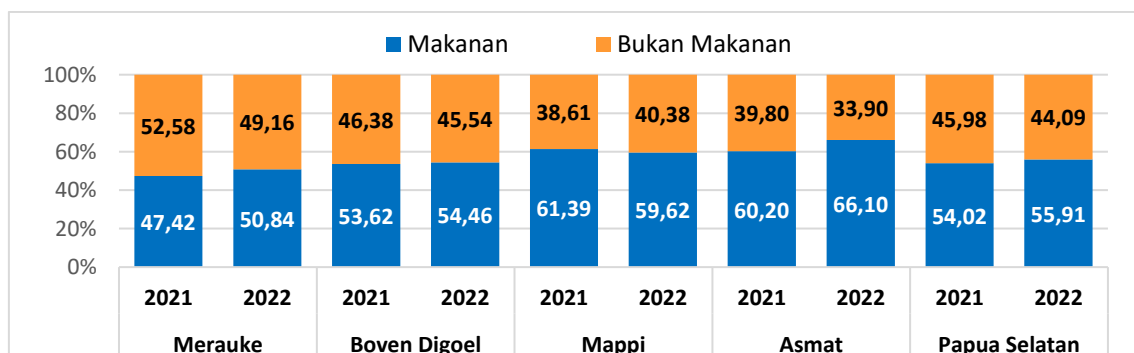
Kabupaten	Satuan	Konsumsi Makanan		Konsumsi Bukan Makanan		Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Merauke	rupiah	751.944	900.434	833.790	870.530	1.585.734	1.770.965
	%	47,42	50,84	52,58	49,16	100,00	100,00
Boven Digoel	rupiah	553.790	587.152	478.935	490.961	1.032.725	1.078.113
	%	53,62	54,46	46,38	45,54	100,00	100,00
Mappi	rupiah	409.437	503.458	257.548	340.943	666.984	844.401
	%	61,39	59,62	38,61	40,38	100,00	100,00
Asmat	rupiah	619.718	581.727	409.723	298.343	1.029.441	880.071
	%	60,20	66,10	39,80	33,90	100,00	100,00
Rata-rata 4 Kabupaten	rupiah	2.888.679	3.159.923	2.458.931	2.491.738	5.347.609	5.651.663
	%	54,02	55,91	45,98	44,09	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka 2023")

Tabel II.136 dan Gambar II.123 menampilkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Papua Selatan. Secara umum, terdapat penurunan kapasitas masyarakat Papua Selatan untuk dapat

mengonsumsi kebutuhan non-makanan dari 45,98% pada tahun 2021 menjadi 44,09% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, kabupaten dengan persentase pengeluaran konsumsi makanan tertinggi adalah Kabupaten Asmat (tahun 2022: 66,10%), sedangkan kabupaten dengan konsumsi makanan terendah adalah Kabupaten Merauke (tahun 2022: 50,84%). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke telah memiliki kapasitas ekonomi / pendapatan yang lebih besar untuk membeli kebutuhan non-pangan, sedangkan masyarakat Kabupaten Asmat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan.

Gambar II.123 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2022

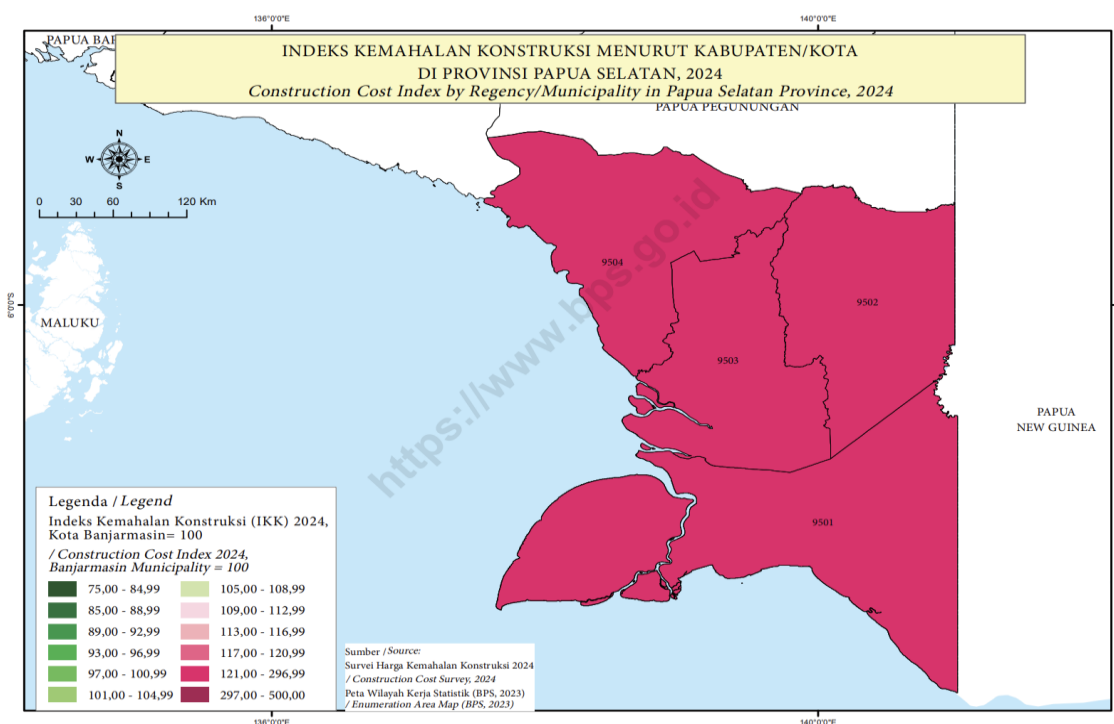


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka 2023”)

3) Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks kemahalan konstruksi (IKK) merupakan ukuran untuk menggambarkan perbandingan `harga barang/ jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga kota acuan. Komoditas konstruksi meliputi gedung tempat tinggal; gedung non tempat tinggal; dan jaringan jalan, irigasi, dan sistem. Semakin tinggi nilai indeks IKK dapat diartikan semakin sulit/mahal pembangunan konstruksi untuk dilakukan di daerah tersebut. IKK memberikan nilai 100 pada Kota Makassar sebagai kota acuan.

Gambar II.124 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Menurut Provinsi, 2024



Sampai dengan tahun 2024 tercatat Indeks Kemahalan Konstruksi Papua Selatan sebesar 142,98 poin cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 138,42 poin. Indeks Kemahalan Konstruksi menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2018-2023 telah mengalami penurunan kemahalan konstruksi signifikan. Kabupaten Asmat tercatat menunjukkan penurunan signifikan dari 213,94 pada tahun 2018 menjadi 140,07 ditahun 2023. Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Provinsi Papua Selatan menurut Kabupaten tahun 2018-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.137 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan 2018-2024

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Merauke	156,56	153,05	150,93	148,88	143,10	132,48	138,95
2	Boven Digoel	161,96	162,63	159,84	157,75	140,02	134,28	139,28
3	Mappi	167,70	152,24	152,02	155,91	150,06	147,34	147,15
4	Asmat	213,94	202,28	179,68	169,93	149,32	140,07	146,77
Rata-rata 4 Kabupaten		175,04	172,38	160,61	158,11	145,62	138,54	143,03
IKK Provinsi Papua Selatan		n.a					138,42	142,98

Sumber: BPS, 2023 (dalam dokumen Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2023)

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif

1) Kapasitas Aparatur Pemerintah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas dimaksud maka setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat memperbandingkan (*merit system*) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumber daya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

Pada tahun 2022 dan 2023, total jumlah aparatur sipil negara di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan secara berturut-turut adalah sebanyak 13.299 dan 13.452 personil. Berdasarkan Tabel II.138, dapat dilihat bahwa mayoritas aparatur sipil negara merupakan lulusan sarjana/magister/doktoral namun masih terdapat personil yang belum mendapatkan kualifikasi pendidikan di perguruan tinggi. Diharapkan, pada masa mendatang kualitas pendidikan aparatur di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan, dikarenakan kapasitas SDM merupakan aspek penting dalam optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah ke depannya diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas, baik dalam bentuk pendidikan formal, maupun dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi kepada aparturnya.

Tabel II.138 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022 dan 2023

Tingkat Pendidikan	Merauke		Boven Digoel		Mappi		Asmat		Jumlah 4 Kabupaten	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sekolah Dasar (SD)	43	37	21	20	104	107	108	108	276	272
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	114	102	21	19	148	168	672	672	955	961
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.407	1.245	687	625	935	870	57	57	3.086	2.797
Diploma I, II, III	1.038	1.001	488	465	690	693	576	576	2.792	2.735
S1, S2, S3	2.573	3.087	1.218	1.234	1.132	1.072	1.267	1.267	6.190	6.660
Jumlah	5.175	5.472	2.435	2.390	3.009	2.910	2.680	2.680	13.299	13.452

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2024 (dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka 2024”)

2) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dalam hal ini, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Indikator kinerja pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dijelaskan dalam subbab ini mencakup persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran, serta persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tabel II.139 Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Kategori	Wilayah	2019	2020	2021	2022
Umur 0-4 Tahun	Merauke	58,72	43,13	55,79	62,93
	Boven Digoel	47,00	59,37	55,20	69,81
	Mappi	66,23	60,21	54,40	63,86
	Asmat	33,77	60,40	67,65	65,23
	Rata-rata 4 Kabupaten	51,43	55,78	58,26	65,46
Umur 5 Tahun ke Atas	Merauke	88,60	88,94	91,97	93,71
	Boven Digoel	81,08	94,64	96,00	96,40
	Mappi	80,62	88,56	92,94	94,21
	Asmat	43,66	76,54	84,51	82,87
	Rata-rata 4 Kabupaten	73,49	87,17	91,36	91,80
Umur 17 Tahun ke Atas	Merauke	90,49	91,20	93,75	96,18
	Boven Digoel	81,92	96,10	97,23	97,21
	Mappi	82,31	91,15	94,99	97,20

Kategori	Wilayah	2019	2020	2021	2022
	Asmat	48,16	78,69	85,78	87,26
	Rata-rata 4 Kabupaten	75,72	89,29	92,94	94,46

Sumber: BPS Provinsi Papua 2019-2022 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

Tabel II.139 menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua Selatan tahun 2019-2022. Berdasarkan Tabel II.139 diketahui bahwa terdapat **peningkatan persentase penduduk yang mempunyai NIK**, baik penduduk usia 0-4 tahun, usia 5 tahun ke atas, maupun 17 tahun ke atas. Pada tahun 2019, rata-rata penduduk usia 0-4 tahun yang memiliki NIK sebanyak 51,43% dan meningkat menjadi 65,46% pada tahun 2022. Penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki NIK pada tahun 2019 sebesar 73,49% dan meningkat menjadi 91,80% pada tahun 2022. Adapun penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki NIK pada tahun 2019 sebesar 75,72% dan meningkat menjadi 94,46% pada tahun 2022.

Tabel II.140 Penduduk yang Mempunyai Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Tahun 2022

Kategori	Wilayah	2019	2020	2021	2022
Umur 0-4 Tahun	Merauke	60,96	52,20	59,27	68,20
	Boven Digoel	47,04	44,74	47,31	57,78
	Mappi	32,64	44,75	21,27	29,25
	Asmat	36,91	35,01	45,73	16,61
	Rata-rata 4 Kabupaten	44,39	44,18	43,40	42,96
Umur 0-17 Tahun	Merauke	71,93	70,07	75,38	76,69
	Boven Digoel	68,00	70,05	65,30	71,07
	Mappi	33,67	59,50	39,62	41,65
	Asmat	38,12	46,34	44,25	20,78
	Rata-rata 4 Kabupaten	52,93	61,49	56,14	52,55

Sumber: BPS Provinsi Papua 2019-2022 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

Tabel II.140 menunjukkan persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Papua Selatan tahun 2019-2022. Berdasarkan Tabel II.140 diketahui bahwa sangat tinggi proporsi penduduk usia 0-4 tahun dan 0-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran dan terdapat trend penurunan kepemilikan akta kelahiran selama tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 rata-rata kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-4 tahun sebesar 44,39% dan mengalami penurunan menjadi 42,96% pada tahun 2022. Adapun penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran rata-rata sebesar 52,93% pada tahun 2019

dan mengalami penurunan menjadi 52,55% pada tahun 2022. Tingginya persentase penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran mengindikasikan rendahnya pemahaman penduduk Papua Selatan tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

3) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan dari 0,78% pada tahun 2020-2021 menjadi 0,89% pada tahun 2021-2022, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.141. Kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi di Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Asmat yaitu 1,69% pada tahun 2021-2022 yang meningkat dari 1,39% pada 2020-2021. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini salah satunya disebabkan karena faktor penggunaan alat KB oleh Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menunda atau mencegah kehamilan yang masih relatif sedikit. Adapun PUS adalah pasangan suami istri yang usia perempuannya adalah 15-49 tahun.

Tabel II.141 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2020-2021	2021-2022
Merauke	0,33	0,29
Boven Digoel	0,67	0,74
Mappi	1,19	1,43
Asmat	1,39	1,69
Papua Selatan	0,78	0,89

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka”)

Tabel II.142 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin berdasarkan status penggunaan alat KB atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan di Provinsi Papua Selatan tahun 2018-2022. Berdasarkan Tabel II.142 diketahui bahwa terdapat penurunan rata-rata persentase penggunaan alat KB dari 43,58% pada tahun 2018 menjadi 38,21% pada tahun 2020, dan lalu kembali menurun menjadi 36,07% pada tahun 2022. Kabupaten yang memiliki persentase perempuan (umur 15-49 tahun) yang paling kecil dalam penggunaan KB pada tahun 2022 adalah Kabupaten Asmat yaitu hanya mencapai 13,99%.

Tabel II.142 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Berdasarkan Status Penggunaan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan

Wilayah	2018			2020			2022		
	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan
Merauke	19,32	54,48	26,2	11,86	43,01	45,13	12,84	37,97	49,2
Boven Digoel	16,53	39,75	43,72	16,92	33,16	49,92	14,94	29,43	55,64
Mappi	12,79	13,25	73,97	5,72	32,59	61,69	12,86	22,25	64,89
Asmat	8,02	10,18	81,8	1,95	7,63	90,42	5,87	8,12	86,01
Rata-rata 4 Kabupaten	14,17	29,42	56,42	9,11	29,10	61,79	11,63	24,44	63,94

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

Tabel II.143 menunjukkan perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang tidak menggunakan alat KB berdasarkan alasan utama tidak menggunakan alat KB tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.143 diketahui bahwa alasan utama tidak menggunakan KB di Provinsi Papua Selatan adalah alasan fertilitas (26,25%), takut efek samping (17,74%) dan alasan lainnya (32,41%). Hal ini mengindikasikan masih lemahnya pemahaman keluarga/ pasangan usia subur (PUS) tentang fungsi dan penggunaan alat KB sehingga penyuluhan secara efektif menjadi penting dilakukan di Provinsi Papua Selatan.

Tabel II.144 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut alat KB atau cara tradisional yang sedang digunakan di Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.144 diketahui bahwa alat KB yang paling sering digunakan PUS di Papua Selatan adalah suntikan (rata-rata: 44,23%) dan kondom pria (rata-rata: 25%).

Tabel II.143 Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Tidak Menggunakan Alat KB Berdasarkan Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat KB Tahun 2022

Alasan Tidak Menggunakan KB	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rerata
Alasan Fertilitas	23,00	36,85	24,52	20,64	26,25
Tidak Setuju KB	5,43	16,44	5,12	10,58	9,39
Tidak Tahu Alat atau Cara KB	1,68	1,68	2,24	5,26	2,72
Takut Efek Samping	18,70	14,16	28,15	9,95	17,74
Lainnya	46,72	22,86	18,43	41,61	32,41
Tidak Tahu	4,46	8,01	21,54	11,96	11,49
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

Tabel II.144 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2022

Alat KB/Cara Tradisional yang Digunakan	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rerata
Sterilisasi Wanita / Tubektomi	1,22	4,81	9,61	3,02	4,67
Sterilisasi Pria / Vasektomi	0,60	0,00	0,00	0,00	0,15
IUD/AKDR	1,10	0,96	3,94	0,00	1,50
Suntikan	70,85	62,43	43,63	0,00	44,23
Susuk KB	9,65	14,31	4,24	0,00	7,05
Pil	14,68	14,06	21,00	0,00	12,44
Kondom Pria	0,92	0,00	0,00	100,00	25,23
Intravag/Komdom wanita/diafragma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metode menyusui alami	0,56	1,37	0,00	0,00	0,48
Pantang berkala/kalender	0,27	2,06	0,00	0,00	0,58
Lainnya	0,14	0,00	17,58	0,00	4,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

Tabel II.145 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin yang menggunakan alat KB modern menurut tempat memperoleh alat KB di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.145 diketahui bahwa mayoritas masyarakat memperoleh alat KB pada tahun 2022 di puskesmas/pustu/klinik (rata-rata: 64,69%), dan praktik bidan/bidan di desa/perawat (rata-rata: 10,82%).

Tabel II.145 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB Modern menurut Tempat Memperoleh Alat KB Modern yang Terakhir Kali, 2022

Tempat Memperoleh Alat KB	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rerata
Rumah Sakit	1,78	8,41	15,10	3,02	7,08
Puskesmas/Pustu/Klinik	59,82	63,06	46,50	89,36	64,69
TKBK/ TMK/ MUYAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polindes/Poskesdes	0,93	0,00	12,04	0,68	3,41
Posyandu / Pos KB / PPKBD	9,45	2,56	8,93	0,00	5,24
Rumah Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktik Dokter Umum/kandungan	3,65	4,75	3,69	1,53	3,41
Praktik Bidan/Bidan di Desa / Perawat	18,03	15,89	4,86	4,49	10,82
Apotek/Toko Obat	6,34	5,33	8,88	0,93	5,37
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

4) Pertanian

Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaan tanah karena. sangat menentukan mudah atau dapat/tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan

penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu. Dalam hal ini, di wilayah Provinsi Papua Selatan perlu diperhatikan adanya berbagai jenis status penguasaan tanah sebagai berikut:

a. Tanah negara bebas	c. Tanah negara yang telah diperuntukkan
b. Tanah negara yang dibebani, di dalamnya termasuk:	d. Tanah negara yang dikuasai penduduk
(1) Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan HPHH	e. Tanah negara yang dikuasai instansi
(2) Hutan Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA)	f. Hak Milik Adat
(3) Hutan Suaka Alam (HSA)	g. Hak Guna Usaha
(4) Hutan Lindung	h. Hak Pakai
(5) Hutan Produksi	i. Hak Pengelolaan
(6) Kontrak Karya	j. Hak Guna Bangunan
(7) Kuasa Pertambangan	k. Hak Milik

Permasalahan yang mencolok adalah ketidaksesuaian antara arahan rencana tata ruang pada suatu lokasi dengan status atau penguasaan tanahnya sekarang terutama untuk tanah negara yang dibebani, yang pada umumnya mencakup areal yang sangat luas seperti HPH, konsesi, kuasa pertambangan kontrak karya. Misalnya pada kasus TGHK yang tumpang tindih dengan kuasa pertambangan atau Hak Penguasaan Hutan (HPH). Hal ini dapat menjadi masalah jika dikaitkan dengan fungsi kawasan yang ingin dipertahankan (misalnya fungsi hidro-orologis).

Pola kepemilikan lahan di Tanah Papua terdiri atas tanah negara dan tanah ulayat. Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan dikuasai oleh kepala adat atau Ondoafi. Pada dasarnya status tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tanah Milik, yaitu tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga secara hukum adat sah karena mendapat warisan dari orang tua, tanah yang diberikan sebagai ganti rugi, dan atau

merupakan hasil rampasan perang yang diperoleh pada zaman dahulu.

- b. Tanah Milik dengan Hak Pakai, yaitu tanah milik masyarakat yang diberikan kepada orang luar dengan seizin kepala adat untuk digarap sesuai dengan perjanjian dan dalam batas waktu tertentu.

Pada umumnya Tanah Milik dan Tanah Milik dengan Hak Pakai tidak dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan dengan bebas pada masyarakat luar. Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan kampung mereka masing-masing karena tanah dan kampung merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat mereka. Hal tersebut dikarenakan cara hidup masyarakat yang masih berharap dan menggantungkan diri pada persediaan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Disamping itu juga mengingat besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur mereka saat memperoleh tanah tersebut pada jaman dahulu. Oleh sebab itu, tanah ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.

5) Statistik

Pencatatan Statistik yang dilakukan oleh Provinsi Papua Selatan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk melakukan urusan statistik Provinsi Papua Selatan. Kelengkapan yang digunakan sebagai indikator kelengkapan urusan statistik merujuk lampiran Permendagri No. 45 Tahun 2020 yaitu ketersediaan dokumen data sebagai bahan kegiatan perencanaan daerah sebagai berikut:

1. Buku Provinsi Daerah
2. Buku Statistik Daerah
3. Buku PDRB Provinsi

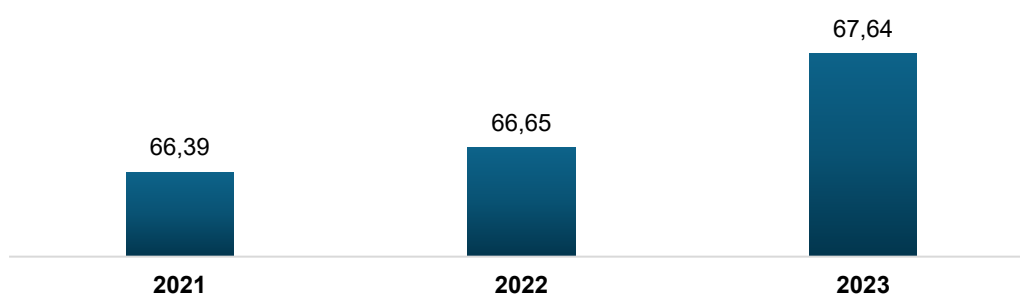
Semenjak ditetapkan sebagai provinsi Papua Selatan pada Juli 2022 hingga dokumen perencanaan ini dibuat, urusan statistik provinsi masih dalam tahap peralihan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan. Sehingga dokumen statistik pada level Provinsi belum terpublikasi. Sumber data perencanaan selama masa peralihan masih menggunakan sebagian data Provinsi Papua sebagai provinsi induk sebelum Provinsi Papua Selatan terbentuk. Data Kabupaten yang terdapat di buku statistik provinsi maupun statistik Kabupaten dan Kota juga digunakan untuk kemudian diagregatkan atau dicari nilai tengah sebagai pendekatan data Provinsi Papua Selatan.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1) Indeks Demokrasi Indonesia

Sampai dengan tahun 2024, perhitungan indeks demokrasi di provinsi Papua Selatan masih menggunakan capaian provinsi Papua sebagai provinsi induk dalam melakukan proksi capaian provinsi Papua Selatan. Pada periode 2021 hingga 2023, Provinsi Papua menunjukkan peningkatan yang stabil dalam Indeks Demokrasi. Pada tahun 2021, indeks ini tercatat sebesar 66,39, kemudian mengalami kenaikan menjadi 66,65 pada tahun 2022, dan mencapai 67,64 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek-aspek demokrasi, seperti partisipasi masyarakat, kebebasan sipil, dan fungsi pemerintahan. Meskipun pertumbuhannya bertahap, tren positif ini mengindikasikan bahwa upaya pemantapan demokrasi di Provinsi Papua terus menunjukkan hasil yang baik.

Gambar II.125 Perkembangan Indeks Demokrasi di Provinsi Papua Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selanjutnya jika merujuk pada aspek demokrasi yang diukur, perkembangan indeks demokrasi Provinsi Papua selama periode 2021-2023 menunjukkan dinamika yang bervariasi pada tiga aspek utama. Pada Aspek Kebebasan, terjadi fluktuasi dengan capaian tertinggi di tahun 2023 sebesar 79,98, meskipun sempat turun menjadi 67,23 pada tahun 2022. Aspek Kesetaraan menunjukkan peningkatan dari 62,3 (2021) menjadi 67,85 (2022), tetapi kembali turun menjadi 60,1 di tahun 2023. Sementara itu, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi relatif stabil dengan nilai bertahan di kisaran 62,15-64,63, meskipun sedikit menurun menjadi 64,5 pada tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa Provinsi Papua telah berhasil meningkatkan kebebasan demokratis pada tahun 2023, namun masih menghadapi tantangan

dalam menjaga konsistensi kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.

Tabel II .. Perkembangan Indeks Domokrasi di Provinsi Papua Menurut Aspek Tahun 2021-2023

Indeks Demokrasi Menurut Aspek :								
Aspek Kebebasan			Aspek Kesetaraan			Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
75,64	67,23	79,98	62,3	67,85	60,1	62,15	64,63	64,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penanganan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Konflik adalah proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ektrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal. Berdasarkan Tabel II.146 diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 42 kampung/kelurahan atau 6,12% dari total kampung/kelurahan di Papua Selatan telah menjadi lokasi perkelahian massal. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi jumlah kejadian perkelahian massal pada tahun 2021. Kabupaten Merauke merupakan daerah dengan lokasi perkelahian paling banyak yaitu 20 kampung/kelurahan atau 10,53% dari jumlah kampung/kelurahan di Kabupaten Merauke. Wilayah dengan lokasi perkelahian massal terendah adalah Kabupaten Mappi yaitu 4 kampung/kelurahan.

Tabel II.146 Jumlah dan Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Jenis Perkelahian Massal di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kategori		Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Kampung/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal	Jumlah	20	4	4	14	42
	%	10,53	3,60	2,44	6,33	6,12
Jumlah kampung/kelurahan menurut	Perkelahian antar kelompok masyarakat	16	4	3	14	37

Kategori		Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Jenis kejadian perkelahian massal	Perkelahian Kelompok Masyarakat Antar Kampung/Kelurahan	3	0	0	0	3
	Perkelahian Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan	2	0	0	0	2
	Perkelahian Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah	1	0	0	1	2
	Perkelahian Pelajar/Mahasiswa	0	0	0	0	0
	Perkelahian Antar Suku	1	0	0	0	1
	Perkelahian lainnya	1	0	1	0	2

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

Dalam upaya menanggulangi isu konflik Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial). Selain itu, terdapat strategi yang dinilai lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Tabel II.147 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021 menunjukkan inisiator yang aktif dalam menyelesaikan perkelahian massal di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.147 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021 dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat merupakan inisiator yang penting dalam penyelesaian konflik di Provinsi Papua Selatan dengan cakupan penyelesaian konflik di 24 kampung/kelurahan atau 40% dari lokasi kejadian perkelahian massal. Aparat keamanan menempati urutan ke-2

sebagai inisiator penyelesaian konflik, sedangkan aparat pemerintah menempati urutan ke-3.

Tabel II.147 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021

Inisiator	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan	
					Jumlah	%
Aparat keamanan	10	1	3	3	17	28,33
Aparat pemerintah	5	4	1	6	16	26,67
Tokoh masyarakat	7	4	2	11	24	40,00
Tokoh agama	0	0	0	0	0	0,00
Lainnya	2	0	0	0	2	3,33
Tidak ada inisiator	0	0	0	1	1	1,67

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

3) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi iklim berinvestasi karena menunjukkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan, serta tingkat kerawanan kejahatan suatu wilayah pada periode tertentu. Berdasarkan Tabel II.148 diketahui bahwa pada periode 2018-2022 secara umum terdapat peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Papua Selatan dari 672 kasus pada tahun 2018 menjadi 966 kasus pada tahun 2022. Wilayah dengan jumlah kejahatan tertinggi adalah Kabupaten Merauke yaitu 413 kasus pada tahun 2018 menjadi 880 kasus pada tahun 2022.

Tabel II.148 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan					Persentase Penyelesaian Tindak Pidana				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	413	530	503	385	808	49,15	37,36	39,76	41,30	22,50
Boven Digoel	82	91	127	185	89	56,09	42,86	10,24	4,32	2,50
Mappi	89	123	127	109	61	29,21	41,46	31,50	33,03	1,70
Asmat	88	111	23	40	8	85,22	34,23	21,74	57,50	0,20
Papua Selatan	672	855	780	719	966	52,08	38,13	33,08	31,43	19,16

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka 2023")

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Papua Selatan, belum diiringi dengan peningkatan persentase penyelesaian tindak pidana. Berdasarkan Tabel II.148 diketahui terdapat penurunan

persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Papua Selatan secara general dari 52,08% pada tahun 2018 menjadi 19,16% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, Kabupaten yang mengalami penurunan drastis penyelesaian tindak pidana adalah Kabupaten Asmat dari 85,22% pada tahun 2018 menjadi 0,20% pada tahun 2022. Kabupaten lainnya yang memiliki penyelesaian tindak pidana yang sangat rendah (<10%) pada tahun 2022 adalah Kabupaten Mappi (1,70%) dan Kabupaten Boven Digoel (2,50%).

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1) Indeks Daya Saing Daerah

IDSD 2024 terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Empat komponen pembentuk daya saing yaitu komponen Lingkungan Pendukung, komponen SDM, komponen Pasar, dan komponen Ekosistem Inovasi.

Pada tahun 2024, Provinsi Papua Selatan mencapai skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 2,78, yang masih berada di bawah skor nasional sebesar 3,43. Capaian ini mencerminkan adanya tantangan dalam beberapa aspek, terutama pada pilar-pilar seperti Pilar 3 (1,94), Pilar 8 (2,36), dan Pilar 12 (2,21), yang menunjukkan perlunya peningkatan signifikan di bidang-bidang terkait. Meskipun demikian, beberapa pilar seperti Pilar 10 (3,59) dan Pilar 6 (3,56) menjadi titik terang dengan skor yang relatif lebih tinggi, mendekati atau bahkan melampaui rata-rata nasional. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Provinsi Papua Selatan memiliki potensi untuk ditingkatkan, terutama melalui intervensi strategis di bidang SDM, ekosistem inovasi, dan lingkungan pendukung, agar mampu bersaing lebih baik di tingkat nasional.

Tabel II.149 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Capaian	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Provinsi Papua Selatan	3,36	2,24	1,94	3,12	3,21	3,56	2,53	2,36	2,36	3,59	2,91	2,21	2,78
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2024

2.1.4.4. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Periode Sebelumnya

Evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah periode sebelumnya dilakukan dengan mengukur keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang terumuskan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026. Adapun evaluasi difokuskan pada realisasi capaian ditahun 2024.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 menunjukkan sejumlah indikator dengan kategori Sangat Tinggi yang patut diapresiasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil mencapai 67,90 atau 108,21% dari target, mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang signifikan. Di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 68,46 tahun (107,37% dari target), menunjukkan perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang didukung oleh penurunan prevalensi stunting menjadi 16,50% dari sebelumnya 25%.

Capaian gemilang juga terlihat pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 83,76 (107,19% dari target) yang mengindikasikan kemajuan dalam kesetaraan gender, didukung pula oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mencapai 64,00 (102,15% dari target). Dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55% (102,48% dari target), sementara Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mencatat 52,17 (110,30% dari target), membuktikan keberhasilan dalam menjaga stabilitas pangan.

Tidak kalah penting, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 71,67% (100,79% dari target) yang menunjukkan peningkatan daya serap tenaga kerja, serta Indeks Kualitas Air (IKA) yang mencapai

60,73 (109,19% dari target) mencerminkan keberhasilan program pengelolaan sumber daya air. Kelima capaian utama ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua Selatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel II.150 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Rasio Capaian	Kategori Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	62,75	67,90	108,21	Sangat Tinggi
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,8	12,70	107,81	Sangat Tinggi
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,93	8,40	105,93	Sangat Tinggi
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	63,76	68,46	107,37	Sangat Tinggi
Prevalensi balita stunting	Persen	25	16,50	66,00	Sedang
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	78,14	83,76	107,19	Sangat Tinggi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,65	64,00	102,15	Sangat Tinggi
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	50,38	45,10	89,52	Tinggi
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	55,17	52,17	94,56	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,497	0,31	63,18	Rendah
Cakupan penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki NIK	Persen	95,51	91,80	96,12	Sangat Tinggi
Cakupan pendataan kependudukan terpilah OAP dan nonOAP	Persen	100	-	-	
Cakupan masyarakat penerima bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persen	40	-	-	
Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,44	4,55	102,48	Sangat Tinggi
Indeks Gini	Indeks	0,379	0,42	111,87	Sangat Tinggi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,11	71,67	100,79	Sangat Tinggi
Persentase Penduduk Miskin (P0)	Persen	17,27	17,44	100,98	Sangat Tinggi
Indeks Desa Membangun (IDM)	Persen	0,5000	0,52	103,16	Sangat Tinggi
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	47,3	52,17	110,30	Sangat Tinggi
Laju pertumbuhan lapangan usaha	Persen	3,55	-	-	

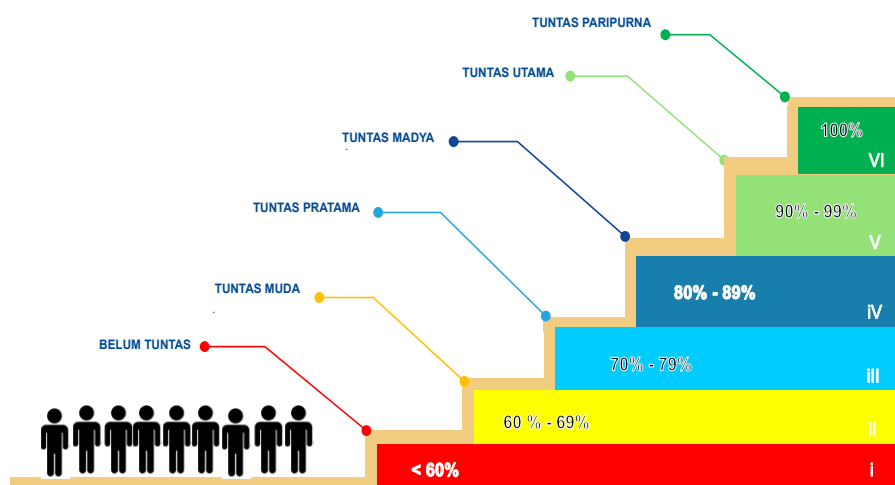
Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Rasio Capaian	Kategori Capaian
pertanian, kehutanan dan perikanan dalam perekonomian					
Laju pertumbuhan sektor pariwisata dalam perekonomian	Persen	5,08	-	-	
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam perekonomian	Persen	1,11	-	-	
Laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan dalam perekonomian	Persen	4,72	-	-	
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	142,72	142,98	100,18	Sangat Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,1	85,08	102,38	Sangat Tinggi
Persentase jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)	Persen	48,99	-	-	
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	55,62	60,73	109,19	Sangat Tinggi
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	96,28	95,44	99,13	Sangat Tinggi
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100	93,20	93,20	Sangat Tinggi
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	87,99	73,67	83,73	Tinggi
Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persen	58,42	60,85	104,16	Sangat Tinggi
Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persen	75,11	7.190,00	9.572,63	Sangat Tinggi
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses listrik (PLN dan non-PLN)	Persen	79,69	80,61	101,15	Sangat Tinggi
Opini BPK Terhadap LKPD Papua Selatan	Kriteria	WTP	WDP	50,00	Sangat Rendah
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	Level 3	-	-	
Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	Baik	-	-	
Kelengkapan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	70	-	-	

Sumber : Hasil analisis, Tahun 2025

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan sarana dalam mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka dari itu SPM dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan 6) Sosial. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Adapun kriteria atau standar yang digunakan dalam penilaian pencapaian SPM, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Gambar II.126 Kategori Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

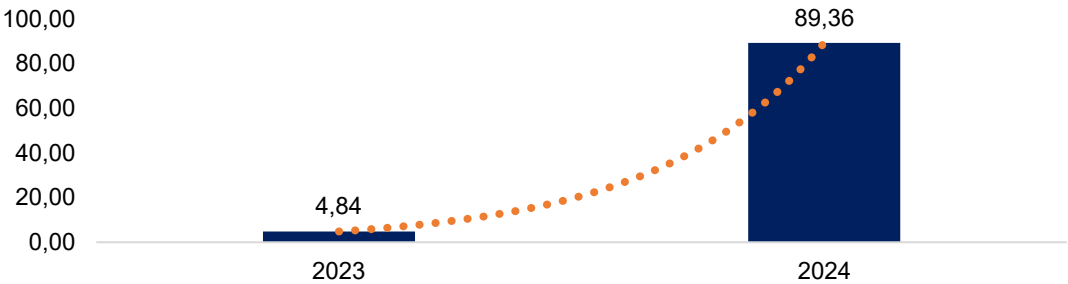


Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Hasil capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Papua Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, rata-rata capaian SPM berada pada 4,84%, yang kemudian meningkat menjadi 89,36% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki dan memperkuat implementasi SPM di berbagai bidang urusan, sehingga mencapai kemajuan yang hampir menyeluruh dalam waktu satu tahun.

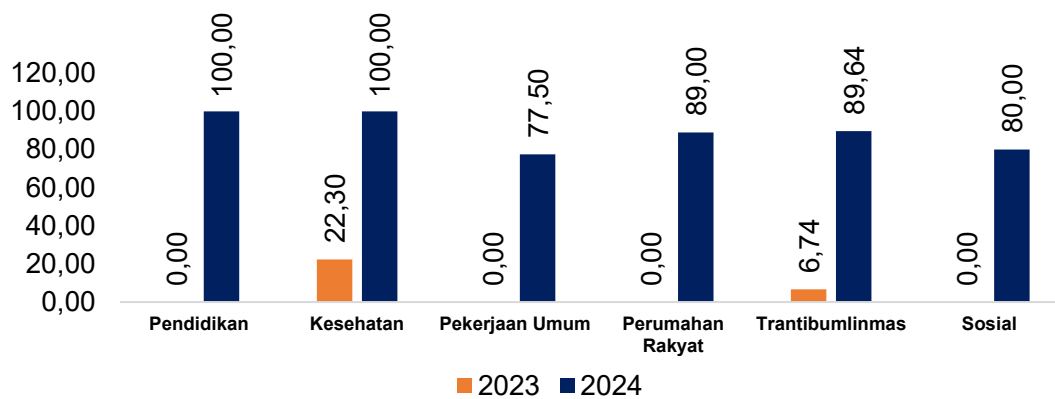
Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di semua bidang urusan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, beberapa bidang seperti Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Sosial masih mencatat capaian 0%, sementara Kesehatan mencapai 22,30% dan Trantibumlinmas sebesar 6,74%. Namun, pada tahun 2024, terjadi lonjakan yang luar biasa di seluruh bidang, dengan Pendidikan dan Kesehatan mencapai 100%, Perumahan Rakyat dan Trantibumlinmas mendekati 90%, serta Pekerjaan Umum dan Sosial masing-masing mencapai 77,50% dan 80%.

Gambar II.127 Rata-Rata Capaian Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2024



Sumber : DITJEN Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

Gambar II.128 Capaian Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Bidang Urusan Tahun 2023-2024



Sumber : DITJEN Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

Pada periode 2019-2024, capaian nilai rata-rata tertinggi setiap kabupaten di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang beragam. Kabupaten Merauke mencapai nilai rata-rata tertinggi pada tahun 2024 sebesar 71,56%, dengan pencapaian tertinggi pada aspek Perumahan Rakyat sebesar 100% dan Trantibumlinmas sebesar 91,23%. Kabupaten Boven Digoel mencatat nilai rata-rata tertinggi pada tahun 2024 sebesar 62,86%, didorong oleh capaian pada bidang Pekerjaan Umum yang mampu mencapai 100% dan bidang Trantibumlinmas sebesar 85%. Kabupaten Mappi mencapai puncak rata-rata tertinggi pada tahun 2024 sebesar 79,90%, dengan capain tertinggi pada semua bidang, terutama bidang Sosial sebesar 85,16% dan bidang Pendidikan yang mampu mencapai 91,14%. Sementara itu, Kabupaten Asmat juga mencatat nilai rata-rata tertinggi pada tahun 2024 sebesar 76,84%, dengan tertinggi di bidang Kesehatan sebesar 95,41% dan bidang Pekerjaan Umum dengan capaian 88,33%. Secara keseluruhan, tahun 2024 menjadi tahun dengan pencapaian tertinggi bagi seluruh kabupaten, mencerminkan peningkatan signifikan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang urusan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.151 Capaian Penerapan SPM Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Bidang Urusan Tahun 2019-2024

Tahun	Kabupaten	Capaian Setiap Aspek (%) :						Rata-Rata Capaian 6 Urusan
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial	
2019	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kab. Boven Digoel	59,61	43,67	48,49	0,00	20,00	55,26	37,84
	Kab. Mappi	86,25	71,56	3,72	0,00	52,69	60,00	45,70
	Kab. Asmat	26,60	44,22	54,33	0,00	0,00	20,00	24,19
2020	Kab. Merauke	52,69	52,14	41,60	0,00	40,10	4,00	31,76
	Kab. Boven Digoel	37,75	58,33	53,73	0,00	20,00	0,00	28,30
	Kab. Mappi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Kab. Merauke	53,26	48,91	42,53	0,00	75,43	22,00	40,36
	Kab. Boven Digoel	38,21	44,54	13,48	0,00	0,00	0,00	16,04
	Kab. Mappi	50,77	52,49	3,72	28,73	21,04	40,00	32,79
	Kab. Asmat	53,86	62,18	38,22	0,00	77,66	15,14	41,18
2022	Kab. Merauke	77,77	62,25	92,50	50,00	30,60	69,01	63,69
	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kab. Mappi	70,10	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16
	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Kab. Merauke	70,10	54,99	62,70	49,29	57,89	86,14	63,52
	Kab. Boven Digoel	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24
	Kab. Mappi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kab. Asmat	25,88	68,44	5,13	88,21	60,28	38,97	47,82
2024	Kab. Merauke	86,15	28,20	72,65	100,00	91,23	51,12	71,56
	Kab. Boven Digoel	80,50	45,84	100,00	7,69	85,00	58,13	62,86
	Kab. Mappi	91,14	76,93	80,27	73,13	72,76	85,16	79,90
	Kab. Asmat	67,10	95,41	88,33	76,92	56,67	76,61	76,84

Sumber : DITJEN Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

2.2. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

2.2.1. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Otonomi fiskal daerah diukur melalui seberapa besar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka otonomi fiskal daerah semakin besar. Pada periode tahun 2022-2024 nilai otonomi fiskal Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mengalami peningkatan.

Tabel II.152 Otonomi Fiskal Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Total	PAD	Otonomi Fiskal Daerah (%)
2022	23,003,003,207	3,003,207	0.01%
2023	1,687,448,157,170	133,465,011,506	7.91%
2024*	1,718,438,492,976	198,686,034,606	11.56%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Selain otonomi fiskal, Kesehatan keuangan daerah juga dapat tercermin dari rasio kemampuan mendanai belanja daerah. Rasio ini membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Semakin tinggi nilai rasio ini diatas 1, menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat untuk menjalankan fungsi pemerintah dan pembangunan.

Tabel II.153 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Total	Penerimaan Pembiayaan	Total Penerimaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Total Pengeluaran	Rasio
2022	23,003,003,207	-	23,003,003,207	8,007,518,557	-	8,007,518,557	2.87
2023	1,687,448,157,170	14,996,382,884	1,702,444,540,054	1,219,826,185,417	-	1,219,826,185,417	1.40
2024*	1,718,438,492,976	467,914,700,175	2,186,353,193,151	1,792,432,065,474	-	1,792,432,065,474	1.22

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Kualitas belanja Pemerintah Provinsi Papua Selatan merupakan aspek penting dalam analisis Kesehatan keuangan daerah. Kualitas ini dapat tercermin melalui rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, dan rasio belanja modal. Rasio belanja pegawai Pemerintah Provinsi Papua Selatan periode 2022-2024 berada dalam rentang rata-rata 11%.

Persentase ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan masih memiliki ruang yang memadai untuk pemenuhan belanja prioritas lainnya. Angka ini juga menunjukkan bahwa belanja pegawai di Provinsi Papua Selatan masih dibawah ketentuan pemerintah mengenai batas maksimal belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni setinggi-tingginya 30% dari total belanja daerah.

Tabel II.154 Rasio Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Rasio Belanja
2022	-	8,007,518,557	-
2023	124,334,194,336	1,219,826,185,417	10.19%
2024*	224,696,940,409	1,792,432,065,474	12.54%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Dalam konteks perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat menjadi akselerator dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi disamping sektor lainnya. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan APBD dalam bentuk belanja pemerintah (government spending) untuk mendorong roda perekonomian daerah dapat menunjukkan semakin berkualitasnya belanja suatu pemerintah daerah. Kualitas belanja pemerintah dapat diukur dari penggunaan APBD untuk belanja modal, barang, dan jasa. Penggunaan ini tercermin melalui rasio belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja barang dan jasa pada periode 2022-2024 rata-rata sebesar 44%

Tabel II.155 Rasio Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Barang dan Jasa	Total Belanja	Rasio Belanja Barang dan Jasa
2022	-	8,007,518,557	-
2023	518,469,960,949	1,219,826,185,417	42.50%
2024*	823,488,192,236	1,792,432,065,474	45.94%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Dalam konteks perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat menjadi akselerator dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah

merupakan salah satu pelaku ekonomi disamping sektor lainnya. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan APBD dalam bentuk belanja.

Tabel II.156 Rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Barang dan Jasa
2022	-	8,007,518,557	-
2023	434,474,174,288	1,219,826,185,417	35.62%
2024*	470,967,252,245	1,792,432,065,474	26.28%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited),
 * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Papua Selatan rata-rata 30% dari total belanja APBD. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Selatan digunakan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sehingga kebijakan belanja modal difokuskan pada penyediaan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan penganggaran belanja modal sesuai pedoman penyusunan APBD, untuk memberi prioritas terhadap pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah

2.2.2. Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Papua Selatan baru mulai terbentuk pada tahun 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Sejak terbentuk, Kebijakan Umum Keuangan Daerah diarahkan pada program prioritas pembangunan Provinsi Papua Selatan yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi pelayanan publik secara maksimal dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Capaian kinerja keuangan masa lalu Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024 digambarkan melalui kinerja pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, serta Neraca Daerah.

Tabel II.157 Realisasi APBD Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun			Pertumbuhan
		2022	2023	2024*	
1	Pendapatan Daerah				
	A. Pendapatan Asli Daerah	3,003,207	133,465,011,506	198,686,034,606	48.87%
	B. Pendapatan Transfer	-	1,529,401,389,664.00	1,519,254,644,370.00	-0.66%
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23,000,000,000.00	24,581,756,000.00	497,814,000.00	-97.97%
	Jumlah Pendapatan	23,003,003,207.00	1,687,448,157,170.00	1,718,438,492,976.00	1.84%
2	Belanja Daerah				
	A. Belanja Operasi	6,139,295,843.00	667,749,155,285.00	1,145,331,771,643.00	71.52%
	B. Belanja Modal	1,868,222,714.00	434,474,174,288.00	470,967,252,245.00	8.40%
	C. Belanja Tak Terduga	-	75,485,948,639.00	42,230,470,050.00	-44.06%
	D. Belanja Transfer	-	42,116,907,205.00	133,902,571,536.00	217.93%
	Jumlah Belanja	8,007,518,557.00	1,219,826,185,417.00	1,792,432,065,474.00	46.94%
	Surplus/Defisit	14,995,484,650.00	467,621,971,753.00	(73,993,572,498.00)	-115.82%
3	Pembiayaan				
	A. Penerimaan Pembiayaan	-	14,996,382,884.00	467,914,700,175.00	3020.18%
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	-	14,996,382,884.00	467,914,700,175.00	3020.18%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	482,618,354,637.00	393,921,127,677.00	-18.38%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Secara umum dalam kurun waktu 3 tahun setelah terbentuk, Pendapatan Daerah Provinsi Papua Selatan mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,84%. Disisi lain, Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sampai dengan 46,94%.

2.2.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2022-2024, hanya kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami pertumbuhan positif, sebesar 48,87%. Sementara itu, kelompok pendapatan transfer dan Lain-lain PAD yang sah, mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat signifikan.

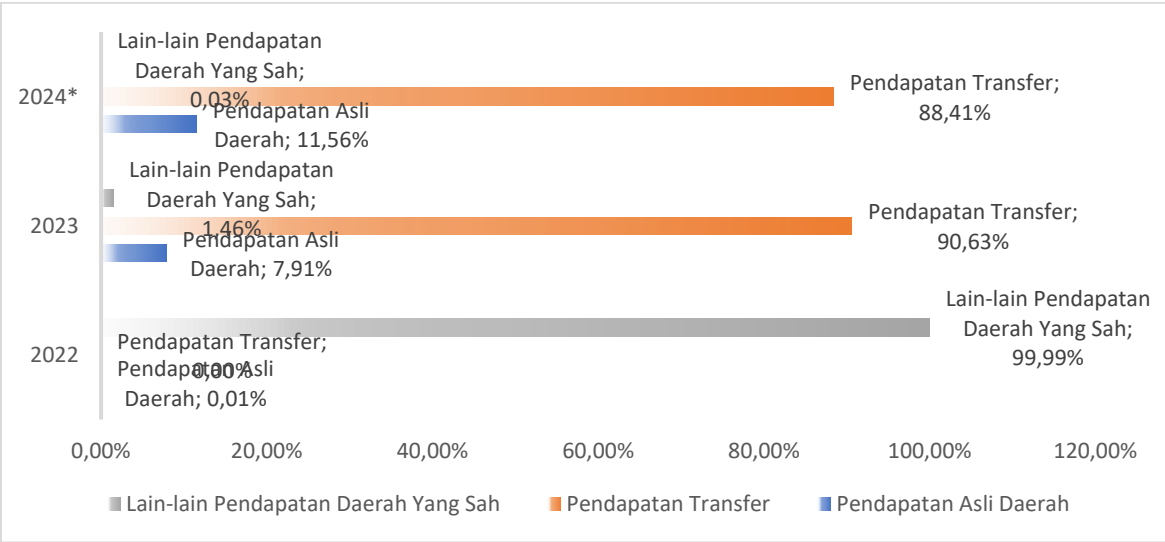
Tabel II.158 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun			Pertumbuhan
		2022	2023	2024*	
1	Pendapatan Daerah	23,003,003,207	1,687,448,157,170	1,718,438,492,976	
	A. Pendapatan Asli Daerah	3,003,207	133,465,011,506	198,686,034,606	48.87%
	Pajak Daerah		126,117,285,649	185,801,714,809	47.32%
	Retribusi Daerah		21,000,000	32,000,000	52.38%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-	
	Lain-lain PAD yang sah	3,003,207	7,326,725,857	12,852,319,797	75.42%
	B. Pendapatan Transfer	-	1,529,401,389,664	1,519,254,644,370	-0.66%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	1,529,368,606,164	1,519,254,644,370	-0.66%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	32,783,500	-	-100.00%
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23,000,000,000	24,581,756,000	497,814,000	-97.97%
	Pendapatan Hibah	23,000,000,000	24,370,075,000	286,664,000	-98.82%
	Lain-lain Pendapatan		211,681,000	211,150,000	-0.25%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Selanjutnya, dalam kelompok PAD, Lain-lain PAD yang sah menunjukkan pertumbuhan terbesar dibandingkan pajak daerah, dan retribusi daerah. Disisi lain, Pendapatan Transfer masih menjadi contributor terbesar dalam struktur pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan.

Tabel II.159 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

2.2.2.2. Kinerja Belanja Daerah

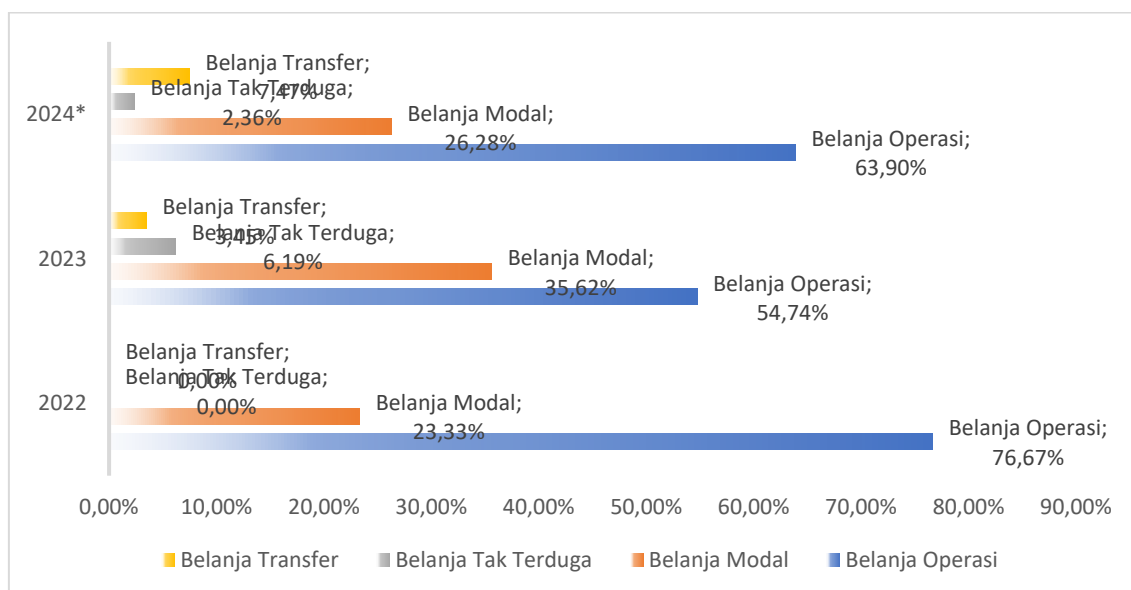
Berdasarkan realisasi belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2022-2024, kelompok Belanja Transfer mengalami pertumbuhan positif terbesar, sampai dengan 217,93% dalam 3 tahun terakhir. Pertumbuhan positif ini, selanjutnya diikuti oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal, masing-masing sebesar 71,52% dan 8,40%. Dalam kelompok belanja daerah, hanya Belanja Tak Terduga yang mengalami pertumbuhan negative sampai dengan 44%.

Tabel II.160 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun			Pertumbuhan
		2022	2023	2024*	
2	Belanja Daerah	8,007,518,557	1,219,826,185,417	1,792,432,065,474	
	A. Belanja Operasi	6,139,295,843	667,749,155,285	1,145,331,771,643	71.52%
	Belanja Pegawai	-	124,334,194,336	224,696,940,409	80.72%
	Belanja Barang dan Jasa	6,139,295,843	518,469,960,949	823,488,192,236	58.83%
	Belanja Bunga	-	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	-	
	Belanja Hibah		24,945,000,000	86,179,754,097	245.48%
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	10,966,884,900	
	B. Belanja Modal	1,868,222,714	434,474,174,288	470,967,252,245	8.40%
	Belanja Modal Tanah		3,000,000,000	-	-100.00%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	876,287,864	111,731,938,181	60,075,400,721	-46.23%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		13,827,559,000	7,908,063,606	-42.81%
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan		303,968,825,107	402,485,243,478	32.41%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	991,934,850	1,945,852,000	498,544,440	-74.38%
	C. Belanja Tak Terduga	-	75,485,948,639	42,230,470,050	-44.06%
	D. Belanja Transfer	-	42,116,907,205	133,902,571,536	217.93%
	Belanja Bagi Hasil	-	18,026,907,205	108,770,413,823	503.38%
	Belanja Bantuan Keuangan	-	24,090,000,000	25,132,157,713	4.33%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Tabel II.161 Proporsi Alokasi Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Sementara itu, berdasarkan jenis belanja yang ada dalam kelompok belanja operasi, Belanja Hibah meningkat sangat tajam, sampai dengan 245,48% dalam periode tahun 2022-2024, diikuti dengan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa, masing-masing sebesar 80,72% dan 58,83%. Disisi lain, Belanja Operasi menjadi tempat alokasi proporsi belanja terbesar dalam belanja daerah Provinsi Papua Selatan dalam 3 tahun sejak terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Anggaran belanja

daerah Provinsi Papua Selatan pada belanja operasi berada pada rentang 54-76%.

2.2.2.3. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi surplus/defisit anggaran. Gambaran pembiayaan riil daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan selama 3 tahun terakhir (2022-2024), menunjukkan Penerimaan Pembiayaan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, sampai dengan 3020,18%, dimana SILPA menjadi contributor terbesar dan satu-satunya terhadap penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel II.162 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun			Pertumbuhan
		2022	2023	2024*	
3	Pembiayaan				
	A. Penerimaan Pembiayaan	-	14,996,382,884.00	467,914,700,175.00	3020.18%
	SILPA		14,996,382,884.00	467,914,700,175.00	3020.18%
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
	Pembiayaan Netto		14,996,382,884.00	467,914,700,175.00	3020.18%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

2.2.3. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Tabel III.4 menunjukkan neraca Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pertumbuhannya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Secara umum dalam kurun waktu 3 tahun setelah terbentuk, Aset Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan sebesar 58 kali sejak tahun 2022. Pertumbuhan aset daerah yang begitu signifikan ini diharapkan dapat memberikan mafaat baik secara ekonomi maupun social.

Berdasarkan informasi neraca Pemerintah Provinsi Papua Selatan diatas, maka selanjutnya dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (Leverage). Analisis likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio cepat (quick ratio).

Tabel II.163 Neraca Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun			Pertumbuhan
		2022	2023	2024*	
1	Aset				
	A. Aset Lancar	15,105,484,649	548,085,012,559		3528.38%
	Kas dan Setara Kas	14,995,484,649	536,681,024,892		3478.95%
	Piutang Pajak Daerah	-	76,047,000		0.00%
	Penyisihan Piutang		(14,782,710)		0.00%
	Beban Dibayar dimuka	110,000,000			-100.00%
	Persediaan	-	11,342,723,377		0.00%
	B. Investasi Jangka Panjang	-	-		0.00%
	C. Aset Tetap	861,682,378.00	418,184,096,277.00		48431.12%
	Tanah	-	3,000,000,000.00		0.00%
	Peralatan dan Mesin	878,551,779.00	110,432,177,178.00		12469.80%
	Gedung dan Bangunan	-	12,357,902,450.00		0.00%
	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	227,234,691,069.00		0.00%
	Tetap Lainnya	-	2,216,416,000.00		0.00%
	KDP	-	70,060,001,656.00		0.00%
	Akum Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16,869,400.00)	(5,112,072,707.00)		30203.82%
	Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	26,993,692.00		0.00%
	Akum Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	-	(1,978,025,675.00)		0.00%
	D. Aset Lainnya	971,269,540.00	93,309,819,494.00		9507.00%
	Tagihan Jangka Panjang	-	21,000,000.00		0.00%
	Aset Tidak Berwujud	991,934,850.00	3,538,590,850.00		256.74%
	Aset Lain-Lain	-	15,000,000.00		0.00%
	Akum Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20,665,309.00)	(415,740,355.00)		1911.78%
	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility	-	90,150,969,000.00		0.00%
	Jumlah Aset	16,938,436,567.00	1,059,578,928,330.00	-	6155.47%
2	Kewajiban				
	A. Kewajiban Jangka Pendek	-	63,665,146,246.00		0.00%
	Utang PFK		54,062,670,254.00		0.00%
	Utang Belanja		9,602,475,992.00		0.00%
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-		0.00%
	Jumlah Kewajiban	-	63,665,146,246.00	-	0.00%
3	Ekuitas				
	Ekuitas	16,938,436,569.00	995,913,782,086.00		5779.61%
	Jumlah Ekuitas	16,938,436,569.00	995,913,782,086.00	-	5779.61%
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	16,938,436,569.00	1,059,578,928,332.00	-	6155.47%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Data Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (audited dan unaudited) belum tersedia

Tabel II.164 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

Rasio	Tahun		
	2022	2023	2024*
Rasio Lancar (Current Ratio)	-	8.6	
Cash Ratio	-	8.4	
Rasio Cair (Quick Ratio)	-	8.4	
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	-	0.06	
Rasio Hutang terhadap Modal	-	0.06	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Data Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (audited dan unaudited) belum tersedia

2.2.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu (2022-2024)

2.2.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan proporsi belanja diatas, dapat dilihat bahwa bahwa dalam 2 tahun terakhir, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur relative lebih kecil dibandingkan dengan total belanja daerah, dengan rentang sebesar 10-12%. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik karena masih tersedia ruang fiskal yang cukup untuk digunakan membiayai pengeluaran selain untuk kebutuhan aparatur pemerintah.

Tabel II.165 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

No	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x100%
1	2022	-	8.007.518.557	-
2	2023	124.334.194.336	1.219.826.185.417	10,19
3	2024*	224.696.940.409	1.792.432.065.474	12,54

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

2.2.4.2 Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022-2024, memperlihatkan bahwa pembiayaan APBD Provinsi Papua Selatan selama tahun 2022-2024 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan. Untuk tahun 2022, yang merupakan tahun awal pembentukan pemerintah Provinsi Papua Selatan, realisasi anggaran belum sampai menyentuh pengeluaran pembiayaan sehingga surplus tahun berjalan sepenuhnya menjadi SiLPA.

Tabel II.166 Gambaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024*
A	PENDAPATAN DAERAH	23.003.003.207	1.687.448.157.170	1.718.438.492.976
B	BELANJA	8.007.518.557	1.219.826.185.417	1.792.432.065.474
	Total Surplus/(Defisit)	14.995.484.650	467.621.971.753	(73.993.572.498)
	PEMBIAYAAN			
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	14.995.484.650	467.914.700.175
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	14.995.484.650	467.914.700.175
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-

No	Uraian	2022	2023	2024*
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
1	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	Pembiayaan Netto	-	14.995.484.650	467.914.700.175
E	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	14.995.484.650	482.539.611.099	393.921.127.677

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited)

Demikian juga di tahun kedua yaitu tahun 2023, penerimaan pembiayaan hanya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya dan belum terjadi realisasi pengeluaran pembiayaan. Sehingga SiLPA tahun sebelumnya seluruhnya menjadi pembiayaan netto. Oleh karena itu kedepan perlu dikembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam.

2.2.5. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

2.2.5.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Salah satu tujuan pemberian otonomi daerah adalah mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Hal ini merupakan salah satu indikator penunjang turunya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat melalui upaya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah memiliki dana yang signifikan dalam rangka belanja dan pembiayaan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun masih terdapat beberapa sumber pajak yang dinilai belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan kata lain masih terdapat beberapa pajak yang pemungutannya belum efektif karena target yang ditetapkan pemerintah masih dibawah potensi yang sesuai dengan

kondisi eksisting daerah dan potensi peningkatannya masih dapat dioptimalkan.

Pencapaian target pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui pendekatan anggaran yang berorientasi pada pencapaian target dari input perencanaan yang dilakukan berdasarkan prinsip penganggaran yang akuntabilitas demi menjamin keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, dibawah menggambarkan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan Provinsi Papua Selatan selama kurun waktu tahun 2026-2030. Proyeksi pembiayaan pembangunan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total pendapatan daerah dengan proyeksi total penerimaan pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel II.167 Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2026-2030

Tahun	Proyeksi Total Pendapatan Daerah (Rp)	Proyeksi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah (Rp)
2026	1,770,679,023,162	88,533,951,158	1,859,212,974,321
2027	1,824,507,665,467	91,225,383,273	1,915,733,048,740
2028	1,879,972,698,497	93,998,634,925	1,973,971,333,422
2029	1,937,123,868,531	96,856,193,427	2,033,980,061,958
2030	1,996,012,434,134	99,800,621,707	2,095,813,055,841

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited), data diolah.

Selanjutnya tabel dibawah akan menggambarkan tentang proyeksi keuangan daerah Provinsi Papua Selatan periode tahun 2026-2030. Proyeksi keuangan daerah meliputi: proyeksi Pendapatan Daerah, proyeksi Belanja Daerah, dan proyeksi Pembiayaan Daerah. Berdasarkan proyeksi keuangan daerah sebagaimana disajikan pada tersebut, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Selatan periode 2026-2030 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Tabel II.168 Proyeksi Kerangka Pendanaan Provinsi Papua Selatan Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun	Proyeksi Tahun				
		2024*	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah						
A.	Pendapatan Asli Daerah	198,686,034,606	204,726,090,058	210,949,763,196	217,362,635,997	223,970,460,131	230,779,162,119
	Pajak Daerah	185,801,714,809	191,450,086,939	197,270,169,582	203,267,182,737	209,446,505,093	215,813,678,847
	Retribusi Daerah	32,000,000	32,972,800	33,975,173	35,008,018	36,072,262	37,168,859
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
	Lain-lain PAD yang sah	12,852,319,797	13,243,030,319	13,645,618,441	14,060,445,241	14,487,882,776	14,928,314,413
B.	Pendapatan Transfer	1,519,254,644,370.00	1,565,439,985,559	1,613,029,361,120	1,662,065,453,698	1,712,592,243,490	1,764,655,047,692
	DBH Pajak dan SDA	57,928,430,151.00	59,689,454,428	61,504,013,842	63,373,735,863	65,300,297,433	67,285,426,475
	DBH Pajak	13,730,056,000.00	14,147,449,702	14,577,532,173	15,020,689,151	15,477,318,102	15,947,828,572
	DBH Sumber Daya Alam	44,198,374,151.00	45,542,004,725	46,926,481,669	48,353,046,712	49,822,979,332	51,337,597,903
	Dana Alokasi Umum (DAU)	475,062,162,000.00	489,504,051,725	504,384,974,897	519,718,278,134	535,517,713,789	551,797,452,289
	DAU tidak ditentukan penggunaannya	417,332,448,000.00	430,019,354,419	443,091,942,794	456,561,937,854	470,441,420,765	484,742,839,957
	DAU yang ditentukan penggunaannya	57,729,714,000.00	59,484,697,306	61,293,032,104	63,156,340,280	65,076,293,024	67,054,612,332
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	144,945,407,219.00	149,351,747,598	153,892,040,725	158,570,358,764	163,390,897,670	168,357,980,959
	DAK Fisik	138,153,415,619.00	142,353,279,454	146,680,819,149	151,139,916,051	155,734,569,499	160,468,900,412
	DAK Non Fisik	6,791,991,600.00	6,998,468,145	7,211,221,576	7,430,442,712	7,656,328,171	7,889,080,547
	Dana Otonomi Khusus	841,318,645,000.00	866,894,731,808	893,248,331,655	920,403,080,937	948,383,334,598	977,214,187,970
	Dana Otonomi Khusus Papua	375,605,522,000.00	387,023,929,869	398,789,457,337	410,912,656,840	423,404,401,608	436,275,895,417
	Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangk	465,713,123,000.00	479,870,801,939	494,458,874,318	509,490,424,097	524,978,932,990	540,938,292,553
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	497,814,000.00	512,947,546	528,541,151	544,608,802	561,164,910	578,224,323
	Pendapatan Hibah	286,664,000.00	295,378,586	304,358,095	313,610,581	323,144,342	332,967,930
	Lain-lain Pendapatan	211,150,000.00	217,568,960	224,183,056	230,998,221	238,020,567	245,256,392
	Jumlah Pendapatan	1,718,438,492,976.00	1,770,679,023,162	1,824,507,665,467	1,879,972,698,497	1,937,123,868,531	1,996,012,434,134
2	Belanja Daerah						
A.	Belanja Operasi	1,145,331,771,643.00	1,180,149,857,501	1,216,026,413,169	1,252,993,616,129	1,291,084,622,060	1,330,333,594,570
	Belanja Pegawai	224,696,940,409.00	231,527,727,397	238,566,170,310	245,818,581,888	253,291,466,777	260,991,527,367
	Belanja Barang dan Jasa	823,488,192,236.00	848,522,233,280	874,317,309,172	900,896,555,371	928,283,810,654	956,503,638,498
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	86,179,754,097.00	88,799,618,622	91,499,127,028	94,280,700,489	97,146,833,784	100,100,097,531
	Belanja Bantuan Sosial	10,966,884,900.00	11,300,278,201	11,643,806,658	11,997,778,381	12,362,510,843	12,738,331,173
B.	Belanja Modal	470,967,252,245.00	485,284,656,713	500,037,310,277	515,238,444,510	530,901,693,223	547,041,104,697
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,075,400,721.00	61,901,692,903	63,783,504,367	65,722,522,900	67,720,487,596	69,779,190,419
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,908,063,606.00	8,148,468,740	8,396,182,189	8,651,426,128	8,914,429,482	9,185,428,138
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	402,485,243,478.00	414,720,794,880	427,328,307,044	440,319,087,578	453,704,787,841	467,497,413,391
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	498,544,440.00	513,700,191	529,316,677	545,407,904	561,988,304	579,072,748
C.	Belanja Tak Terduga	42,230,470,050.00	43,514,276,340	44,837,110,340	46,200,158,495	47,604,643,313	49,051,824,470
D.	Belanja Transfer	133,902,571,536.00	137,973,209,711	142,167,595,286	146,489,490,183	150,942,770,684	155,531,430,913
	Belanja Bagi Hasil	108,770,413,823.00	112,077,034,403	115,484,176,249	118,994,895,207	122,612,340,021	126,339,755,158
	Belanja Bantuan Keuangan	25,132,157,713.00	25,896,175,307	26,683,419,037	27,494,594,976	28,330,430,663	29,191,675,755
	Jumlah Belanja	1,792,432,065,474.00	1,846,922,000,264	1,903,068,429,072	1,960,921,709,316	2,020,533,729,279	2,081,957,954,650
	Surplus/Defisit	(73,993,572,498.00)	(76,242,977,102)	(78,560,763,606)	(80,949,010,819)	(83,409,860,748)	(85,945,520,515)
3	Pembiayaan						
A.	Penerimaan Pembiayaan	467,914,700,175.00	88,533,951,158	91,225,383,273	93,998,634,925	96,856,193,427	99,800,621,707
	SILPA	467,914,700,175.00	88,533,951,158	91,225,383,273	93,998,634,925	96,856,193,427	99,800,621,707
B.	Pengeluaran Pembiayaan	-	12,290,974,056	12,664,619,667	13,049,624,105	13,446,332,678	13,855,101,192
	Pembiayaan Netto	467,914,700,175.00	76,242,977,102	78,560,763,606	80,949,010,819	83,409,860,748	85,945,520,515
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	393,921,127,677.00	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan TA 2023 (audited), * Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 (unaudited), data diolah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang (2026-2030), maka ditetapkan arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Selatan.
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

- d. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pengembangan kualitas aparatur melalui diklat teknis maupun diklat profesi lainnya di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mempercepat pelayanan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial.
- g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima.

Selain hal tersebut, arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada:

- a. Penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- b. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Melakukan pembaruan, pemutakhiran dan akurasi data potensi pajak dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang pendapatan daerah.
- e. Mengintensifkan kegiatan pengawasan internal dan pengawasan di lapangan.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- g. Melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap pendapatan daerah.
- h. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait.

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Untuk itu, belanja daerah tahun 2026-2030 diarahkan untuk mendukung dan memperkuat

pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2026-2030 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

- a. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- b. Belanja daerah dimanfaatkan seoptimal mungkin rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- c. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.
- d. Belanja daerah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik.
- e. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran.
- f. Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrua. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
- g. Belanja daerah dialokasikan secara proporsional dan sesuai kemampuan dan kebutuhan, yang dialokasikan untuk Belanja Operasi, (meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan); Belanja Modal; Belanja Tak Terduga; dan Belanja Transfer.

- h. Belanja daerah dioptimalkan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan.
- i. Belanja daerah diperntukkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- j. Belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- k. Belanja daerah diorientasikan dalam upaya mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- l. Belanja daerah diprioritaskan dengan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- m. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan iklim investasi yang kondusif, perluasan penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan.

2.2.5.2 Proyeksi Pembiayaan

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025-2029, dari aspek penerimaan pembiayaan daerah ditempuh melalui:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD.
- b. Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.
- c. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- d. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah ditempuh dengan beberapa upaya terutama peningkatan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Sedangkan permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Berdasarkan kondisi umum daerah Provisni Papua Selatan, terdapat beberapa permasalahan

pembangunan yang dapat menjadi perhatian selama 5 tahun ke depan (2025-2029) sebagaimana diuraikan berdasarkan setiap aspek berikut ini:

2.3.1.1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi

Rumusan permasalahan pada aspek geografi dan demografi menggambarkan kondisi Posisi, Luas Wilayah, dan Peran Strategis Topografi, Kelerengan, dan Bentang Alam, Jenis Tanah dan Geologi, Hidrologi dan SDA Air, Iklim dan Variabilitas Cuaca, Daya Dukung Lingkungan (Pangan dan Air), Demografi, Persebaran dan Kepadatan, serta Komposisi OAP dan Non-OAP di Provinsi Papua Selatan. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.169 Hasil Rumusan Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Posisi, Luas Wilayah, dan Peran Strategis	Ketimpangan distribusi luas: Merauke 38,2%, Mappi 20,6%, Asmat 21,23%, Boven Digoel 19,99% dari total provinsi (117.849,16 km ²); sebaran 7 pulau.	Kesenjangan kapasitas pengelolaan wilayah	Kondisi geografis kepulauan alami	Disparitas pembangunan & pelayanan publik
		Konektivitas antarpulau terbatas	Infrastruktur dasar & transportasi	Biaya pembangunan tinggi
		Isolasi distrik.	belum merata	Isolasi wilayah terpencil
Topografi, Kelerengan, dan Bentang Alam	Dominan dataran rendah: 0–55 mdpl; 74,7% wilayah kelerengan 0–8% Kelerengan >40% hanya di utara (Asmat, Boven Digoel); 650 desa/kelurahan di dataran.	Potensi bencana banjir/abrasi tinggi di dataran	Morfologi alamiah wilayah; praktik pengelolaan	Biaya infrastruktur tinggi pada dataran basah
		Keterbatasan lahan produktif non-rawan bencana	lahan belum optimal	Risiko kerusakan lingkungan, keterbatasan pola tanam
Jenis Tanah & Geologi	Oksisol marginal (44,9%), tanah gambut di rawa luas (Merauke, Mappi, Asmat) Kesuburan alami rendah; potensi tambang minyak & emas terbatas	Rendahnya produktivitas pertanian	Umur tanah tua, pelapukan lanjut, PH masam	Ketahanan pangan lokal rendah
		Resiko konversi lahan gambut	Kurang inovasi teknologi pertanian	Biaya produksi tinggi, emisi karbon tinggi
		SDA mineral belum tergarap seimbang	spesifik lahan	Ketergantungan ekonomi primer
Hidrologi & SDA Air	Surplus air: ketersediaan 745,4 miliar m ³ /tahun; kebutuhan	Kualitas air baku rendah (gambut/payau),	Sistem pengolahan air sederhana	Penyakit waterborne tinggi

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
	domestik+lahan hanya 3,7 miliar m ³ ; selisih +741 miliar m ³ .	distribusi air belum merata		
	29,3% rumah tangga belum akses air minum layak.	Infrastruktur SPAM terbatas, PDAM terbatas.	Investasi air bersih rendah Tata kelola air kurang efisien	Produktivitas non-pertanian terhambat Gap akses air bersih
Iklim & Variabilitas Cuaca	Curah hujan 321–399 mm/tahun; suhu tinggi 28,4–29,9°C; Risiko: rawan banjir, pasang, abrasi pesisir, anomali musim tanam.	Fluktuasi musim tanam & bencana Frekuensi cuaca ekstrem naik Kegagalan prediksi panen	Perubahan iklim global, degradasi ekosistem; monitoring cuaca minim	Kerugian ekonomi akibat gagal panen Kehilangan sumber penghidupan lokal Kontribusi emisi karbon
Daya Dukung Lingkungan (Pangan & Air)	Surplus pangan 263,4 triliun kkal/tahun (2022); kebutuhan 414 miliar kkal; hanya 798 ha “melampaui” daya dukung, sisa 11,8 juta ha “belum melampaui”. Surplus air di seluruh kabupaten.	Distribusi pangan dan air belum efisien antardaerah Daerah terpencil rentan rawan pangan musiman	Infrastruktur logistik terbatas Sistem distribusi berbasis sungai & rawa belum optimal	Malnutrisi lokal tetap tinggi meski surplus produksi Resiko food loss, akses pangan mahal daerah terpencil
Demografi, Persebaran & Kepadatan	Total penduduk 542,08 ribu (2024); Merauke 44,16%, Boven Digoel 12,74%, Mappi 21,23%, Asmat 21,87% Kepadatan rata-rata 4,64 jiwa/km ² , tertinggi Merauke 5,32 jiwa/km ² .	Konsentrasi penduduk tidak merata Piramida usia muda ekspansif, laju migrasi tinggi ke ibukota	Akses ekonomi & infrastruktur timpang Sentralisasi pelayanan publik di kota	Daerah periferi/terpencil tertinggal layanan Bonus demografi belum dioptimalkan
Komposisi OAP & Non-OAP	Dari 513.617 penduduk (SP2020), cakupan pendataan SIO Papua baru 4,65% (23.865 jiwa); 82% OAP, 18% non-OAP.	Validitas dan cakupan data rendah; program OAP berisiko tidak tepat sasaran	Basis data terintegrasi belum optimal Akses layanan ke kampung OAP bervariasi	Afirmasi OAP terhambat; bantuan layanan dasar/motivasi masuk sekolah rendah

Sumber : Hasil analisis, 2025.

2.3.1.2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Rumusan permasalahan pada aspek Kesejahteraan Masyarakat menggambarkan kondisi Kesejahteraan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan Pendidikan, Perlindungan Sosial

dan Inklusi, Gender dan Anak, serta kondisi Kesejahteraan Budaya dan Kerukunan di Provinsi Papua Selatan. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.170 Hasil Rumusan Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Kesejahteraan Ekonomi	PDRB ADHB naik: Merauke 2018 Rp14,54T → 2024 Rp20,35T	Distribusi pertumbuhan ekonomi sangat timpang antarwilayah	Konsentrasi ekonomi pada Merauke	Daerah tertinggal sulit berkembang
	Ketimpangan tinggi: Merauke kuasai 60,82% PDRB, Asmat hanya 10,19%	Struktur ekonomi agraris dominan sektor primer	Infrastruktur dan industri pengolahan belum berkembang merata	Kemiskinan kasatmata & kemiskinan ekstrem naik (Mappi 25,7%, Asmat 24,5%)
	Gini rasio naik: 0,404 (Mar 2024) → 0,424 (Sep 2024)	Tingkat ketimpangan dan kemiskinan tinggi serta disparitas gender (IPG Provinsi 83,76)	Program pemberdayaan belum menjangkau semua kelompok rentan	Ketimpangan pengeluaran dan peluang perempuan
Ketahanan Sosial	IPM Papua Selatan 2024: 67,90 (nasional: 74,20)	Kualitas pendidikan, kesehatan, dan hunian dasar rendah—khususnya perempuan & minoritas	Fasilitas pendidikan dan kesehatan belum memadai di daerah terpencil	Rendahnya capaian kualitas SDM dan urbanisasi keluar wilayah periferi
	Kabupaten tertinggal Merauke 72,73, terendah Asmat 53,92		Ketersediaan tenaga profesional terbatas	Pola ketimpangan gender pada akses pendidikan & kesehatan
	HLS Provinsi 2024: 12,7 tahun (nasional 13,2 tahun) RLS: 8,4 tahun (nasional 8,9 tahun)		Keterbatasan akses infrastruktur dasar	IPM perempuan Asmat terendah: 33,38 (2023)
Kesehatan Masyarakat	AKI 2023: 239/100.000 KH (nasional: 189); AKB: 38,42/1.000 KH (nasional: 16,85)	Angka kematian ibu/bayi tertinggi nasional	Ketersediaan/penyebaran tenaga medis rendah (rasio dokter: 1:5.019)	Gagal panen generasi emas 2045, produktivitas rendah

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Kesejahteraan Pendidikan	Stunting 2022: 36,3% rata-rata, Asmat 54,5%	Prevalensi stunting sangat tinggi, cakupan layanan ibu-anak rendah, ketimpangan akses kesehatan dasar	Akses geografis ekstrem, sistem rujukan kurang optimal, Ketersediaan infrastruktur kesehatan terbatas	Disparitas kematian ibu/anak, gizi buruk kronis
	APK SD 104,01 (nasional: 104,82); SMP 82,56 (nasional: 92,21)	Kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan formal khususnya menengah & kejuruan	Sebaran sekolah dan guru tidak merata, fasilitas pendidikan dasar minim di distrik terpencil	Partisipasi & kelulusan pendidikan rendah, keterampilan terbatas
	SM/SMK: 80,28 (nasional: 87,29) SLB hanya 1 sekolah (Merauke), rasio guru/kelas rendah, Asmat paling tertinggal	Angka putus sekolah tinggi, terutama anak perempuan dan penyandang disabilitas	Program afirmasi belum optimal, infrastruktur sosial-ekonomi pendukung pendidikan tertinggal	Ketimpangan gender dalam pendidikan, SDM berdaya saing rendah
Perlindungan Sosial & Inklusi	Rumah tangga dengan jaminan sosial <10%	Cakupan perlindungan sosial terbatas, khususnya kelompok disabilitas, lansia, kelompok sangat miskin	Basis data sosial kurang terintegrasi, exclusion error bantuan sosial	Kelompok rentan tidak terlindungi, risiko poverty trap antar generasi naik
	23,6% KK disabilitas terima BPNT; PKH hanya 16,75% 9,47% lansia tinggal sendiri (Desil 1-2 perempuan)		Stigma dan fasilitas ramah disabilitas minim Ketergantungan pada keluarga pengasuh	Kendala partisipasi pendidikan, kesehatan, kerja bagi disabilitas, lansia
Gender dan Anak	IKG turun: 0,536 (2023) → 0,530 (2024) IPG 83,76 (nasional: 91,85); SMP ke atas kasus kekerasan perempuan-anak >100/tahun Partisipasi perempuan di parlemen bervariasi (Asmat tertinggi 30,43%)	Ketimpangan peran politik-ekonomi perempuan, partisipasi sekolah rendah, kekerasan berbasis gender tinggi	Praktik budaya patriarki masih dominan Perempuan miskin, penyandang disabilitas, anak rentan tertinggal akses pendidikan, ekonomi & perlindungan sosial	Kesempatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan rendah, korban kekerasan belum tertangani komprehensif

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Kesejahteraan Budaya dan Kerukunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan 2023: 48,52 Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024: 79,07 (kategori tinggi)	Ketidakseimbangan akses & promosi budaya lokal Persebaran fasilitas budaya & agama belum merata	Wilayah adat terpencil belum dijangkau layanan & fasilitas kebudayaan Kompetensi SDM kebudayaan rendah	Potensi konflik nilai, marginalisasi budaya lokal, daya tarik wisata budaya lemah

Sumber : Hasil analisis, 2025.

2.3.1.3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah

Rumusan permasalahan pada aspek Daya Saing Daerah menggambarkan kondisi Daya Saing SDM, Angka Ketergantungan dan Tenaga Kerja, Pembangunan Olahraga dan Kepemudaan, Indeks Inovasi Daerah dan Industri Pengolahan, Ketenagakerjaan dan Struktur Pekerjaan, Disabilitas dan Gender dalam Daya Saing Pasar Kerja, Indeks Ekonomi Hijau dan Biru, Transformasi Digital dan Infrastruktur, Perdagangan, Industri, dan UMKM, Infrastruktur Ekonomi dan Aksesibilitas, serta kondisi Pariwisata dan Ekonomi Lokal di Provinsi Papua Selatan. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.171 Hasil Rumusan Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Daya Saing SDM – Angka Ketergantungan & Tenaga Kerja	Rasio ketergantungan sangat tinggi 76,56	Beban usia produktif tinggi	Tingginya penduduk usia <15,	SDM produktif terbebani biaya keluarga besar
	Kabupaten Asmat tertinggi (92,62), Merauke terendah (66,22)	Partisipasi Angkatan Kerja perempuan rendah	angka kelahiran tinggi	Inovasi & mobilitas SDM terhambat
	TPAK turin-naik: 71,67% (2024), gender gap 25%		Akses pendidikan/latihan rendah	
Pembangunan Olahraga & Kepemudaan	Indeks Pembangunan Olahraga 0,314 SDM olahraga: 0,055 Ruang terbuka olahraga: 0,048	Fasilitas, SDM, & prestasi olahraga sangat minim	Sarana-prasarana sangat terbatas SDM keolahragaan kurang	Minat olahraga rendah, prestasi minim Efek kesehatan dan ekonomi belum optimal

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
	Performa prestasi: 0,004			
Indeks Inovasi Daerah & Industri Pengolahan	Indeks Inovasi naik (2023: 1,20 → 2024: 1,80; tetap "Kurang Inovatif") PDRB industri pengolahan naik: 5,42% → 5,62%	Kapasitas inovasi & teknologi rendah	SDM R&D rendah	Ekonomi biaya tinggi
Ketenagakerjaan & Struktur Pekerjaan	TPK naik turun: 73,29% (2021), turun 63,99% (2023), naik 71,67% (2024) 95,95% pekerja telah bekerja (2024) Pengangguran 4,05%	Dominasi pekerjaan mandiri & buruh informal	Dukungan inkubasi bisnis terbatas Industri kecil skala rumah tangga Pendidikan rendah (SMA ke atas hanya 10,7%)	Ketergantungan pada ekspor bahan mentah Kesejahteraan pekerja rendah
Disabilitas & Gender dalam Daya Saing Pasar Kerja	TPAK perempuan rata-rata 56,7%, laki-laki 81,4%	Disparitas upah sangat besar	Kualifikasi kerja tidak sesuai kebutuhan pasar	Rentan miskin dan kehilangan pekerjaan
Indeks Ekonomi Hijau & Biru	Disabilitas 56,96% tidak bekerja; 68,7% yang bekerja di sektor informal	Akses pelatihan, fasilitas, & insentif kerja inklusi minim	Inklusi sosial dan ekonomi rendah	Disabilitas & perempuan sulit keluar kemiskinan
	TPAK perempuan rata-rata 56,7%, laki-laki 81,4%		Stigma pekerjaan perempuan & disabilitas tinggi	Ketimpangan gender melebar
	Indeks Ekonomi Hijau naik: 57,16 (2015) → 61,79 (2021) (masih papua induk) Blue Economy Index turun: 34,27 (2022) → 29,68 (2023)	Praktik ekonomi hijau dan biru daerah masih terbatas	Hilirisasi SDA rendah Investasi industri hijau minim Manajemen maritim lemah	Potensi green/blue economy belum digarap maksimal Degradasi SDA pesisir & laut
Transformasi Digital dan Infrastruktur	Indeks Digital naik: 37,09 (2023) → 40,11 (2024) Sinyal 4G di >90% kampung, akses internet 42,22%	Infrastruktur & literasi digital masih jomplang	Ongkos pembangunan mahal SDM digital rendah	Ketimpangan pengetahuan & akses digital Pasar ekonomi digital terbatas
Perdagangan, Industri, & UMKM	Rasio PDRB industri pengolahan 5,62%, perdagangan	Skala usaha mikro, informal dominan	Ketersediaan modal mikro minim	UMKM rentan, nilai tambah rendah, penetrasi pasar luar terbatas

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Infrastruktur Ekonomi dan Aksesibilitas	11,24%, pariwisata 22,79% (2022)			
	Jumlah UMKM: 2.368 unit, koperasi 258 unit	Modal & akses pasar sempit	Pasar konsumen lokal kecil UMKM kurang inovatif	Akses modal sulit
	Jalan mantap 16,1% (2021)	Infrastruktur dasar mahal & belum merata	Topografi, lahan basah, biaya konstruksi tinggi	Konektivitas rendah perdesaan
	IKK turun: 175,04 (2018) → 143,03 (2024) Kunjungan kapal menurun, pelabuhan terbatas	Konsentrasi transportasi Merauke-centric		Distribusi logistik & barang kebutuhan pokok terhambat
Pariwisata & Ekonomi Lokal	Pariwisata kontribusi 22,79% PDRB kabupaten, tapi fasilitas masih kurang	Daya tarik wisata tinggi, manajemen masih lemah	Infrastruktur pariwisata & SDM rendah	Kontribusi PAD daerah rendah
	Jumlah hotel 47 unit (2021), akomodasi Asmat & Mappi minim		Promosi digital & ekowisata belum maksimal	Peluang kerja pariwisata sangat terbatas

Sumber : Hasil analisis, 2025.

2.3.1.4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum Daerah

Rumusan permasalahan pada aspek Pelayanan Umum Daerah menggambarkan kondisi Kapasitas Aparatur Pemerintah, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pertanahan dan Penguasaan Lahan, Statistik, Data Daerah, Satu Data, Hukum dan Demokrasi, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan di Provinsi Papua Selatan. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.172 Hasil Rumusan Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum Daerah

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Kapasitas Aparatur Pemerintah	Jumlah ASN 2023: 13.452 (S1: 49,5%; SD-SMA masih	Mutu SDM ASN tidak merata; ketidakseimbangan distribusi ASN antar	Belum optimalnya merit system, minim pelatihan	Layanan publik lambat/tidak responsif, birokrasi sulit modernisasi,

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
	signifikan); ASN S2/S3: 6.660 orang (↑ dari 6.190/2022)	instansi, kualifikasi rendah di sejumlah kabupaten	dan sertifikasi, distribusi ASN tidak sesuai kebutuhan daerah	ketimpangan kinerja antar instansi
Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	Kepemilikan NIK 0-4 thn: 65,46% (2022); 5+ thn: 91,80%; 17+ thn: 94,46% Kepemilikan akta kelahiran 0-17 thn: hanya 52,55% (2022, turun)	Banyak anak tidak punya akta kelahiran; kepemilikan dokumen kependudukan di kelompok usia balita masih rendah	Pemahaman masyarakat rendah, akses administrasi & teknologi terbatas di kampung, inefisiensi pelayanan	Masalah akses pendidikan/kesehatan, kerentanan legalitas anak, keterbatasan hak sipil/akses bantuan sosial
Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan penduduk ↑ 0,78% (20/21) menjadi 0,89% (21/22), Asmat tertinggi 1,69% Penggunaan Kb Rata-Rata 4 Kabupaten: Turun Ke 36,07% (2022)	KP Pengguna KB di Asmat hanya 8,12%; prevalensi KB semua kabupaten <40%; alasan utama: fertilitas (26,25%), takut efek samping (17,74%)	Edukasi KB minim, stigma dan kepercayaan tradisional tinggi, akses layanan KB terbatas, distribusi alat dan tenaga	Laju penduduk sulit dikendalikan, beban pendidikan/kesehatan meningkat, bayi berisiko tanpa perlindungan hukum
Pertanahan dan Penguasaan Lahan	Legalitas lahan adat VS negara komplek; ketersediaan lahan HPH, perkebunan, tambang luas namun overlapping konsesi	Tumpang tindih status lahan (adat, negara, konsesi, HGU, HPH, tambang); konflik tata ruang meningkat	Penataan RUWP belum efektif, koordinasi kelembagaan masih tumpang tindih, weak enforcement ruang adat/negara	Potensi konflik agraria, investasi macet, kerugian pembangunan, penurunan perlindungan kawasan
Statistik, Data Daerah, Satu Data	Statistik provinsi masih tahap peralihan, belum tersedia lengkap dan sering menggunakan agregat provinsi induk	Validitas dan konsistensi data antar OPD lemah; sinkronisasi antar-kabupaten minim; akses satu data daerah rendah	Infrastruktur data minim, koordinasi BPS-OPD-Informasika belum konsisten, minim SDM analitik data	Perencanaan dan evaluasi program tidak presisi, rawan salah sasaran, hambatan monitoring capaian pembangunan
Hukum & Demokrasi	Indeks Demokrasi:	Kapasitas penyelesaian konflik	Lemahnya jejaring	Potensi instabilitas sosial, investasi

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	67,64 (2023) vs Indeks Kebebasan 79,98, Kesetaraan 60,1, Kapasitas Lembaga 64,5 Kejadian konflik massal: 6,12% kampung (2021)	rendah; perkelahian massal dalam 42 kampung/kelurahan (6% dari total); kriminalitas naik jadi 966 kasus (2022)	penegakan hukum, keterbatasan peran tokoh adat dalam penegakan konflik, akses bantuan hukum terbatas	menurun, ketidakpastian pelayanan, rendahnya rasa aman warga
	Penyelesaian tindak pidana menurun: dari 52,08% (2018) ke 19,16% (2022); sebagian besar ditangani tokoh masyarakat (40%)	Koordinasi aparat lamban, kapasitas polisi & pemda terbatas, keterlibatan masyarakat pada pencegahan konflik belum optimal	Sumberdaya aparat penegak hukum kurang, kapasitas pengelolaan konflik sosial masyarakat masih rendah	Penurunan penyelesaian kriminalitas, eskalasi konflik horizontal, menurunnya rasa aman di komunitas
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan	IDSD 2024: 2,78 (nasional 3,43), Pilar SDM 2,24, Pilar Ekosistem Inovasi 2,21, keamanan masyarakat 28,33%	Daya saing daya tangkal dan inovasi masih lemah; profesionalitas dan sistem informasi belum optimal	Daya saing strategis lemah, pertahanan kawasan rentan, peluang pembangunan terbatas
			Keterbatasan investasi pertahanan & SDM terkait, rendahnya sinergi antarpelaku, minim platform inovasi keamanan	

Sumber : Hasil analisis, 2025.

2.3.1.5. Permasalahan Pada Aspek Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah

Rumusan permasalahan pada aspek Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah menggambarkan kondisi Otonomi Fiskal Daerah, Kemampuan Mendanai Belanja Daerah, Kualitas Belanja (Pegawai, Barang/Jasa, Modal), Struktur Pendapatan Daerah, Struktur Belanja Daerah, Pengelolaan Pembiayaan dan SILPA, serta kondisi Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) di Provinsi Papua Selatan. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.173 Hasil Rumusan Permasalahan Pada Aspek Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
Otonomi Fiskal Daerah	Rasio PAD terhadap total pendapatan meningkat: 0,01%	Ketertanggungtungan pada dana transfer pusat sangat tinggi	Basis ekonomi daerah terbatas; potensi PAD	Kemandirian fiskal rendah, fleksibilitas

Sub Pokok Bahasan	Masalah Utama (Data Kuantitatif)	Permasalahan Spesifik	Akar Masalah	Dampak
	(2022), 7,91% (2023), 11,56% (2024) - masih sangat rendah secara nasional		belum optimal digali	belanja daerah terbatas, ketahanan fiskal lemah
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	Rasio kemampuan mendanai belanja: 2,87 (2022), 1,40 (2023), 1,22 (2024) – tren turun namun masih di atas 1	Belanja tumbuh lebih pesat dari pendapatan; risiko defisit meningkat	Pertumbuhan belanja operasi & hibah > pertumbuhan pendapatan daerah	Tekanan APBD tinggi, potensi defisit fiskal di masa depan, ketergantungan pada pembiayaan eksternal
Kualitas Belanja (Pegawai, Barang/Jasa, Modal)	Rasio belanja pegawai: 10,19% (2023), 12,54% (2024) Rasio belanja barang & jasa: 42,5% (2023), 45,94% (2024) Belanja modal: 35,62% (2023), 26,28% (2024)	Proporsi belanja modal turun, operasional naik	Kurang disiplin alokasi belanja prioritas pembangunan	Daya ungkit ekonomi dari APBD menurun, infrastruktur publik tidak optimal, efisiensi belanja lemah
Struktur Pendapatan Daerah	Dominasi pendapatan transfer: 88,41% dari TP (2024); PAD hanya 11,56%	Kontribusi transfer pusat sangat dominan	Pendataan potensi lokal lemah, ekonomi belum terdiversifikasi	Risiko fiskal jika transfer berkurang; belanja publik rentan perubahan kebijakan pusat
Struktur Belanja Daerah	Belanja operasi dominan: 76,67% (2022), turun ke 54,74% (2023), 63,90% (2024) Belanja modal: 23,33% (2022), 26,28% (2024)	Ketidakseimbangan antar jenis belanja	Kebutuhan belanja wajib tinggi; prioritas modal belum terkelola baik	Infrastruktur publik kurang berkembang, kualitas pelayanan meningkat secara parsial
Pengelolaan Pembiayaan & SILPA	SILPA besar: Rp393,92 M (2024), Rp482,62 M (2023); pembiayaan didominasi SILPA	Pembiayaan pembangunan kurang variatif; keterbatasan instrumen	Pengelolaan cashflow kurang adaptif, alternatif pembiayaan belum dikembangkan	Rendahnya efektivitas penggunaan anggaran, peluang investasi daerah hilang
Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)	Likuiditas & solvabilitas tinggi (current/cash/quick ratio: sekitar 8,4 pada 2023); total utang/aset sangat rendah (0,06)	Rasio likuiditas tinggi tidak sejalan dengan efektivitas realisasi	Struktur cashflow masih didominasi saldo kas & SILPA	Potensi idle cash tinggi, investasi belanja produktif tertahan lambat

Sumber : Hasil analisis, 2025.

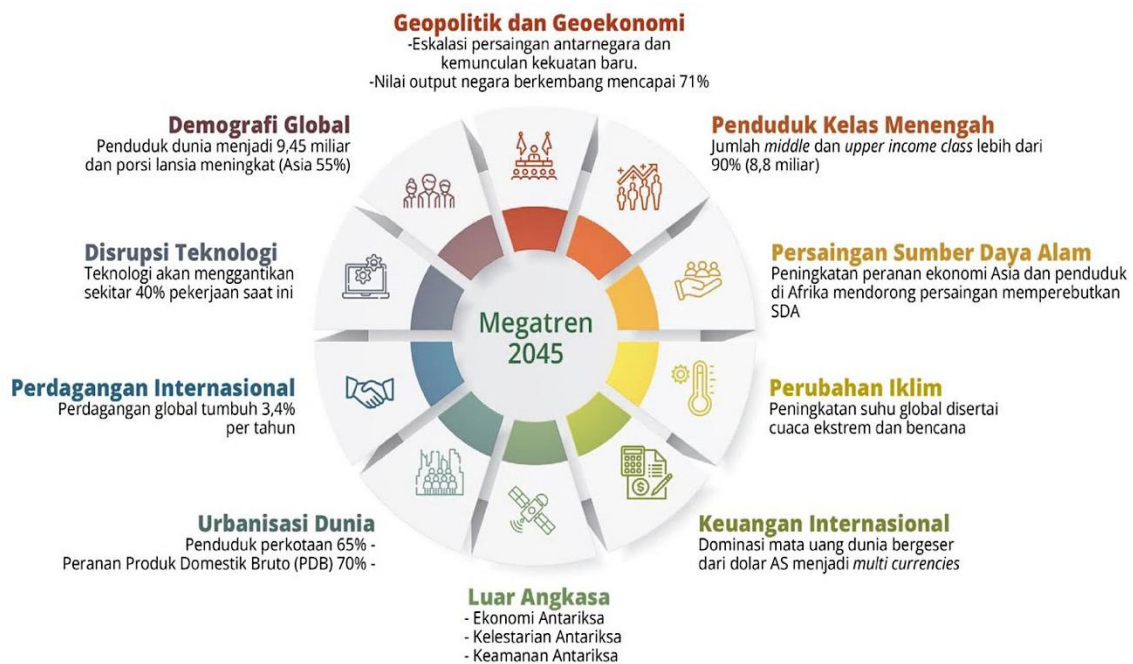
2.3.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

2.3.2.1. Isu Strategis Internasional

Integrasi perencanaan daerah dengan isu-isu global merupakan fokus utama dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, seperti isu perubahan iklim hingga bonus demografi. Dengan memperhatikan isu global, diperlukan arah pembangunan yang berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global, sehingga memastikan bahwa pembangunan daerah terjalin dalam konteks yang lebih luas. Pembangunan Papua Selatan tahun 2025-2029 harus secara cermat menimbang strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai kompleksitas yang ditawarkan oleh isu-isu global. Isu-isu strategis global sebagaimana yang ditampilkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dijabarkan dalam Gambar II.129.

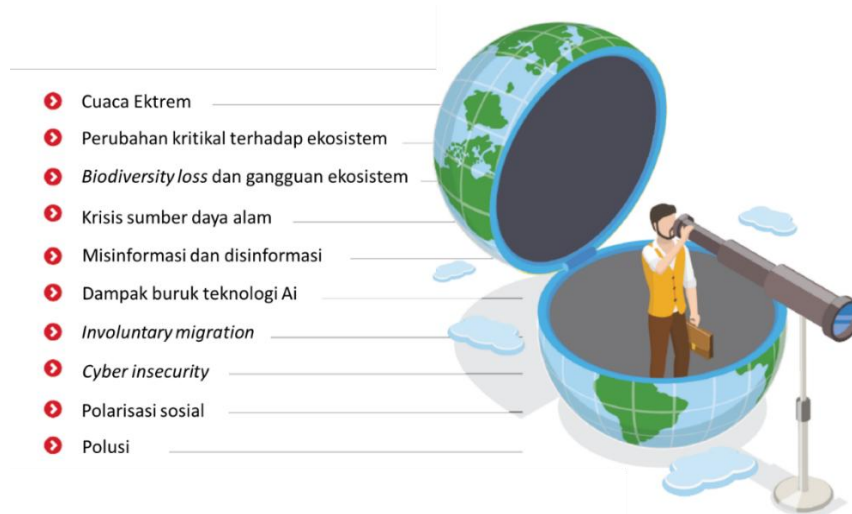
Pemetaan isu global yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 memuat beberapa hal terkait tantangan dan peluang yang akan dihadapi selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Isu-isu tersebut perlu dilihat secara kontekstual dengan menyesuaikan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah. Namun, beberapa upaya mendasar perlu dilakukan mengingat dampaknya yang sudah terasa hingga hari ini. Upaya tersebut antara lain seperti mempersiapkan kualitas SDM yang mumpuni dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan persiapan fondasi pembangunan yang matang, Provinsi Papua Selatan dapat memanfaatkan serta memitigasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan dari isu-isu global tersebut.

Gambar II.129 Megatren Global 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Gambar II.130 Risiko Global Jangka Menengah



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

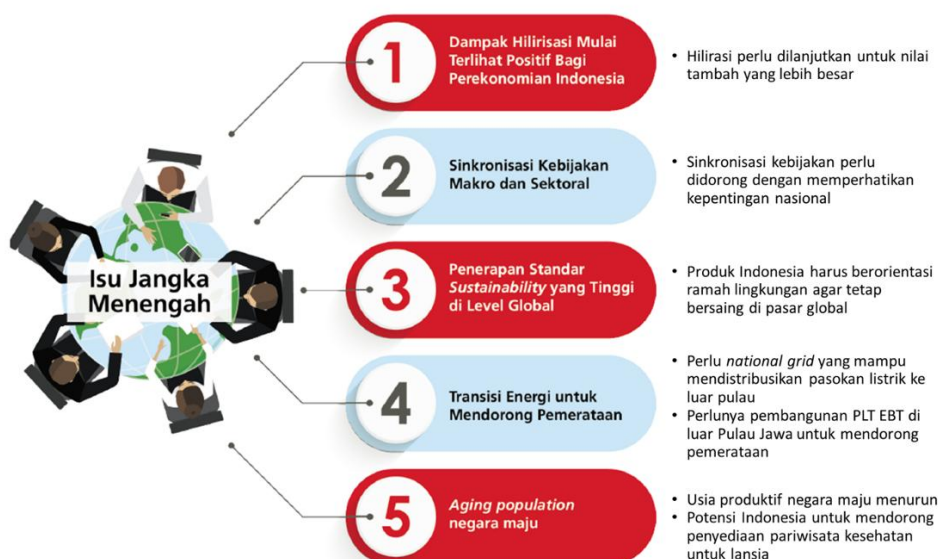
Adapun berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, terdapat 10 (sepuluh) risiko global jangka menengah yang perlu diantisipasi yaitu: (1) cuaca ekstrem; (2) perubahan kritis terhadap ekosistem; (3) biodiversity loss dan gangguan ekosistem; (4) krisis sumber daya alam; (5) misinformasi dan disinformasi; (6) dampak buruk teknologi Ai; (7) involuntary migration; (8) *cyber insecurity*; (9) polarisasi

sosial; serta (10) polusi (sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.130.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu pembangunan nasional jangka menengah (2025-2029) berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 terdiri atas: (1) dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia; (2) sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral; (3) penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global; (4) transisi energi untuk mendorong pemerataan; (5) *aging population* negara maju, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.131.

Gambar II.131 Isu Pembangunan Nasional Jangka Menengah (2025-2029)



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

2.3.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Papua Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisa POKJA KLHS RPJMD, maka Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis di Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029, yaitu :

- 1) **Deforestasi dan degradasi ekosistem** merupakan isu lingkungan global yang signifikan karena keanekaragaman hayatinya yang unik dan cadangan karbonnya yang besar (terutama di gambut).

- 2) **Akses air bersih, sanitasi, listrik dan internet** berimplikasi pada upaya peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.
- 3) **Kemiskinan dan pengangguran** merupakan manifestasi dari ketertinggalan pembangunan multidimensi yang kronis dari keterisolasian wilayah, ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, ketergantungan pada sektor rentan, degradasi lingkungan, dan tata kelola.
- 4) **Dampak perubahan iklim pada pertanian** mengancam ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sektor pertanian, serta adaptasi dan pemulihan ekosistem berbasis masyarakat adat
- 5) **Transportasi dan konektivitas antar wilayah** menjadi dasar pengembangan ekonomi dan layanan publik, tetapi juga berisiko pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat.

2.3.2.4. Isu Strategis Papua Selatan

Selain isu-isu strategis internasional dan kebijakan nasional, Papua Selatan juga menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis di tingkat provinsi. Isu-isu ini terkait dengan pencapaian tujuan pembentukan daerah otonomi baru yakni untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP di ke-4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan.

Proses penetapan isu strategis daerah provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029 dilakukan dengan memetakan setiap isu kedalam berbagai aspek/bidang pembangunan daerah. Adapun dalam prosesnya, analisis juga dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu berdasarkan rekomendasi POKJA KLHS RPJM Papua Selatan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.174 Perumusan Isu Strategis Daerah Papua Selatan

Aspek/Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan Utama	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Global (RPJMN)	Isu RPJMN 2025-2029	Isu Strategis Daerah Papua Selatan
Tata Kelola & Kelembagaan	Status DOB dengan otonomi khusus	ASN 13.452 dengan kualifikasi tidak merata (S1: 49,5%)	Tata kelola berkelanjutan	Misinformasi dan disinformasi	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	ISU 1: Penguatan pondasi tata kelola daerah otonomi baru Papua Selatan, serta tata kelola Otonomi Khusus
	Kewenangan pengelolaan SDA	Pembentukan perangkat daerah baru	Transparansi dan akuntabilitas	Cyber insecurity	Penerapan standar sustainability tinggi	
	Afirmasi OAP dalam rekrutmen ASN	Sistem merit belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Polarisasi sosial		
	Transfer khusus otsus	PAD rendah 11,56% (2024)				
SDM & Layanan Dasar	Bonus demografi (piramida usia muda)	IPM 67,90 vs nasional 74,20	Akses air bersih, sanitasi, listrik dan internet	Cuaca ekstrem mempengaruhi kesehatan	Dampak hilirisasi positif memerlukan SDM terampil	ISU 2: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar
	Penduduk 542,08 ribu (2024)	AKI 239/100rb vs nasional 189	Kemiskinan dan pengangguran	Involuntary migration	Transisi energi untuk pemerataan	
	Kearifan lokal OAP	Stunting 36,3% (Asmat 54,5%)	Pemerataan layanan dasar	Krisis sumber daya alam	Aging population negara maju (bonus demografi)	
	- Kerukunan beragama tinggi (79,07)	- HLS 12,7 th vs nasional 13,2 th - Rasio dokter 1:5.019				
	Infrastruktur & Konektivitas	Luas wilayah 117.849,16 km²	Jalan mantap hanya 16,1% (2021)	Transportasi dan konektivitas antar wilayah	Cuaca ekstrem	Transisi energi untuk pemerataan
Posisi strategis perbatasan		29,3% RT belum akses air layak	Akses air bersih, sanitasi, listrik dan internet	Perubahan kritikal ekosistem	Penerapan standar sustainability tinggi	
Surplus air 745,4 miliar m³/tahun		IKK turun 175,04→143,03 (2024)	Dampak perubahan iklim pada infrastruktur	Krisis sumber daya alam	Sinkronisasi kebijakan infrastruktur	
Sebaran 7 pulau dengan potensi maritim		Konektivitas antarwilayah rendah				
		Infrastruktur dasar belum merata				
Ekonomi & Kesejahteraan	Sektor basis: pertanian, perkebunan, perikanan	Ketimpangan tinggi: Merauke kuasai 60,82% PDRB	Kemiskinan dan pengangguran	Biodiversity loss dan gangguan ekosistem	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif	ISU 4: Pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja
	PDRB naik (Merauke Rp14,54T→Rp20,35T)	Gini ratio naik 0,404→0,424	Deforestasi dan degradasi ekosistem	Krisis sumber daya alam	Penerapan standar sustainability tinggi	
	Surplus pangan 263,4 triliun kkal/tahun	Kemiskinan ekstrem: Asmat 24,5%, Mappi 25,7%	Dampak perubahan iklim pada pertanian	Cuaca ekstrem	Transisi energi untuk pemerataan	

Aspek/Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan Utama	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Global (RPJMN)	Isu RPJMN 2025-2029	Isu Strategis Daerah Papua Selatan
	Potensi pariwisata budaya	UMKM hanya 2.368 unit		Polusi		
	Potensi tambang minyak & emas	Pengangguran 4,05%				
Gender, Inklusi & Budaya	Kearifan lokal OAP (82% penduduk)	IPG 77,36 vs nasional 91,63	Kemiskinan dan pengangguran kelompok rentan	Polarisasi sosial	Sinkronisasi kebijakan sektoral untuk inklusi	ISU 5: Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial
	Keberagaman budaya	SLB hanya 1 sekolah (Merauke)	Akses layanan dasar tidak merata	Involuntary migration	Penerapan standar sustainability	
	Potensi pariwisata budaya	Kekerasan perempuan >100 kasus/tahun	Partisipasi pembangunan inklusif	Dampak buruk teknologi AI pada akses	Transisi energi untuk pemerataan akses	
	Partisipasi perempuan di parlemen bervariasi (Asmat 30,43%)	Disabilitas 56,96% tidak bekerja Data OAP belum lengkap (4,65% tercakup)				

Sumber : Hasil analisis, 2025.

Merujuk pada proses perumusan isu strategis daerah pada tabel di atas, maka dapat ditetapkan 5 (lima) isu strategis Papua Selatan tahun 2025-2029. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar II.132 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Papua Selatan 2025-2029



Dengan berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang definitif, diharapkan akan terjadi optimalisasi pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penetapan isu strategis daerah provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029 dilakukan dengan memetakan setiap isu kedalam berbagai aspek/bidang pembangunan daerah.

ISU 1	Penguatan pondasi tata kelola daerah otonomi baru Papua Selatan, serta tata kelola Otonomi Khusus

Pada tahun-tahun pertama pembentukannya, Provinsi Papua Selatan perlu membangun pondasi yang kuat untuk menyusun tatakelola pemerintahan dalam menyelesaikan urusan pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan Provinsi. Isu-isu strategis berkenaan dengan tata kelola pemerintahan ini antara lain:

a. Pembentukan Perangkat Daerah

Pembentukan perangkat daerah diprioritaskan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib. Perangkat daerah ini meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua Selatan, sekretariat MRP Provinsi Papua Selatan, dinas daerah, badan daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah

b. Manajemen Aparatur Sipil Negara

Yang dimaksud dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara antara lain penugasan, pengalihan, mutasi, dan/ atau rekrutmen serta pengawasan sistem merit. Manajemen aparatur sipil negara diatur dan dilaksanakan oleh Gubernur Papua bersama Penjabat Gubernur Papua Selatan dan ke-4 Bupati di wilayah Provinsi Papua Selatan. Pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan ketentuan khusus memprioritaskan OAP sebagai bentuk afirmasi.

c. Penyerahan Aset serta Dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan

Aset dan dokumen yang dimaksud antara lain:

- 1) Barang milik daerah Provinsi Papua yang bergerak dan tidak bergerak dan/ atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Selatan;
- 2) Barang milik daerah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat yang bergerak dan tidak bergerak yang telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan
- 3) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Papua yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Papua Selatan

- 4) Utang piutang Provinsi Papua yang kegunaannya untuk Provinsi Papua Selatan

d. Persiapan dan Fasilitasi Pembentukan MRP, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPR Papua Selatan

Penjabat Gubernur Papua Selatan untuk pertama kalinya mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Selatan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR Papua Selatan.

e. Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa urusan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan pembentukan Papua Selatan sebagai provinsi baru antara lain:

- 1) Alokasi transfer ke daerah
- 2) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan
- 3) Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
- 4) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
- 5) Sebelum terbentuknya DPR Papua Selatan, Penjabat Gubernur menyusun Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan untuk tahun anggaran berikutnya.

ISU 2

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan bagi seluruh penduduk menjadi isu yang strategis bukan saja karena pemenuhannya merupakan hak asasi setiap orang, tetapi juga karena dengan pencapaian yang baik atas indikator-indikator yang ditetapkan dalam kedua bidang urusan ini merupakan sumbangan terbesar untuk keberhasilan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Papua

Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif menjadi arah kebijakan dan strategi dalam RIPPP 2022- 2041.

Dalam bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi indikator untuk mengukur dampak pembangunan bidang pendidikan. Isu- isu yang perlu ditangani antara lain peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun, penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup, peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi serta penjaminan mutu dan tatakelola penyelenggaraan layanan pendidikan.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Selatan saat ini antara lain terjadi karena (1) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2) Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta (3) Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal.

Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan

ISU 3

Penyiapan suprastruktur dan infrastruktur serta tata ruang Papua Selatan ke depan

Dengan ditetapkannya PPS sebagai DOB, maka akan ada perubahan struktur tata ruang di PPS, termasuk berkembangnya pusat kegiatan nasional dan regional. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka PPS akan segera menyusun dan menetapkan RTRW yang baru berdasarkan pada data dan kebutuhan pengembangan wilayah di PPS yang dapat meningkatkan IPM, aksesibilitas dan infrastruktur, dan kegiatan

ekonomi dan sosial dengan memperhatikan keberlanjutan PPS sebagai salah satu paru-paru nasional dan dunia.

Mengingat perkembangan kegiatan pelayanan dan ekonomi ke depan, PPS juga perlu menyiapkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik. Terutama infrastruktur konektivitas -jalan, pelabuhan dan bandara- yang dapat mengakselerasi kegiatan pelayanan dasar dan ekonomi masyarakat. Selain itu, PPS juga akan mendorong kabupaten/kota agar dapat menyediakan infrastruktur dasar pelayanan dengan baik, terutama infrastruktur pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan kabupaten/kota dan persampahan. Wujud konkrit dari kegiatan ini di tahun awal adalah dengan menyusun roadmap pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua Selatan.

ISU 4	Pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja

Berdasarkan data dalam Bab II, dapat dilihat penyerapan tenaga kerja di PPS masih rendah, jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini tentu saja berkontribusi pada rendahnya daya beli di masyarakat. Untuk itu PPS mengembangkan dua strategi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yaitu:

- 1) memperkuat ekonomi basis yang menjadi keunggulan daerah dan
- 2) mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada sumber daya lokal.

Ekonomi basis di Provinsi Papua Selatan adalah pertanian, perkebunan dan perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan ekonomi rumah tangga, terutama OAP. Karena itu pemerintah PPS akan mendukung, memfasilitasi dan memperkuat kegiatan ekonomi tersebut melalui fasilitasi infrastruktur produksi dan pemasaran, pengembangan pelatihan dan pengembangan pusat-pusat pemasaran.

PPS adalah provinsi dengan laju perkembangan kegiatan yang relatif pesat. Karena itu SDM di PPS perlu dipersiapkan untuk memiliki keterampilan ekonomi non-basis, Ekonomi kreatif -mencakup keterampilan/kerajinan, kesenian/kebudayaan, dan digital adalah kegiatan ekonomi yang berkembang dan perlu dikuasai oleh sumber daya

lokal. Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya keterampilan/kerajinan bisa untuk: 1) memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam PPS misalnya kerajinan peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan; 2) memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, misalnya kuliner dan pakaian dan 3) memenuhi kebutuhan cendera mata bagi turis baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah PPS bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota akan mendukung pengembangan pusat-pusat pelatihan dan pameran kerajinan/industri lokal.

ISU 5	Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial

Rata-rata Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan meningkat dari 75,17 pada tahun 2017 menjadi 77,36 pada tahun 2022, namun angka IPG ini masih di bawah angka nasional yang telah mencapai 91,63 pada tahun 2022. Demikian pula Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari rata-rata 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan bertambah dari 50,61 pada tahun 2017 menjadi 61,63 pada tahun 2022, tetapi masih lebih rendah dibandingkan capaian IDG nasional yang mencapai 76,59 pada tahun 2022.

Ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki di Papua Selatan juga nampak dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yakni 11,03 berbanding 11,44 dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 6,68 berbanding 7,85 (Data BPS untuk Tahun 2021). Perbedaan itu juga nampak pada jenis pekerjaan, yakni penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas terbanyak (32,94%) bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, sedangkan penduduk usia perempuan usia 15 tahun ke atas terbanyak (40,79%) bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar.

Rendahnya capaian pembangunan dan pemberdayaan gender berdasarkan indikator-indikator pembangunan di atas didukung juga oleh belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga memengaruhi kualitas tata kelola pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua Selatan. Beberapa isu mengenai kesetaraan gender di Papua Selatan di antaranya:

- a. Belum optimalnya perlindungan hak serta peningkatan kualitas hidup

dan kesejahteraan perempuan.

- b. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik. Hal ini terkait juga dengan lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan. Demikian pula kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terbatas.
- c. Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan perempuan.
- d. Kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan.
- e. Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal.
- f. Belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan, antara lain terbatasnya tenaga perempuan yang bekerja di DPR, lembaga eksekutif, dan PNS.

Inklusi sosial dan perhatian terhadap kelompok masyarakat dengan disabilitas masih belum optimal di Provinsi Papua Selatan. Belum tersedia data yang valid maupun laporan yang menyeluruh dan terupdate yang berhubungan dengan kelompok disabilitas. Pendidikan Khusus yang terdapat di Provinsi Papua Selatan berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat terbatas. Hanya ada 1 SLB yang bertempat di Kabupaten Merauke.

BAB III

VISI, MISI, dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1.1 Visi Pembangunan Papua Selatan Tahun 2025-2029



Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 menjabarkan dan menguraikan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah diintegrasikan dengan tahap I RPJPD Tahun 2025-2045. Visi ini juga menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dimana rumusan Visi telah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi nyata

pembangunan Provinsi Papua Selatan sesuai gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Selatan sampai dengan tahun 2024 juga diintegrasikan dengan keberlanjutan pembangunan Provinsi Papua Selatan untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045. RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029, menetapkan Visi Pembangunan **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PAPUA SELATAN YANG BERMARTABAT, AMAN, DAMAI, SEJAHTERA DAN PEMERINTAH YANG ASPIRATIF”**.

Penjabaran makna dari visi pembangunan Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

PAPUA SELATAN BERMARTABAT :

Secara teoritis, konsep "bermartabat" dalam konteks pembangunan daerah mengacu pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai subjek utama pembangunan. Martabat manusia dalam pembangunan mencakup pengakuan terhadap nilai kemanusiaan yang inheren, dimana setiap individu dihormati dalam keutuhan dan otonominya tanpa diskriminasi. Konsep ini sejalan dengan teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang menempatkan manusia sebagai sasaran pokok dan sumber strategis pembangunan. Dalam paradigma ini, pembangunan harus mencakup upaya peningkatan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan partisipasi mereka dalam seluruh proses pembangunan. Masyarakat Papua Selatan harus dapat merawat dan menjaga eksistensinya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan, saling menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adapun konsep ini mengandung dimensi **Eksistensi Kemanusiaan**: Pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental manusia Papua Selatan sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. **Nilai Kemanusiaan Universal**: Penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial. **Saling Menghargai**: Terciptanya hubungan sosial yang harmonis berdasarkan penghargaan terhadap keberagaman dan perbedaan. **Spiritualitas**: Pengakuan terhadap dimensi spiritual manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki kewajiban moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, "Papua Selatan Bermartabat" bukan sekadar slogan politik, melainkan paradigma pembangunan yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah.

PAPUA SELATAN AMAN:

Makna "aman" yang menunjukkan bahwa keamanan dipahami sebagai kondisi harmoni sosial yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap keberagaman. Dalam konteks Papua Selatan sebagai daerah yang secara historis memiliki tantangan keamanan, konsep "aman" juga mengandung makna penciptaan "**Papua Selatan Zona Damai**" - sebuah wilayah yang bebas dari konflik dan gangguan keamanan, dimana pembangunan dapat berlangsung dengan optimal. Filosofi keamanan ini juga terkait dengan keamanan berbasis kearifan lokal, dimana nilai-nilai adat dan budaya Papua Selatan menjadi landasan dalam menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial. Ini sejalan dengan konsep bahwa keamanan sejati lahir dari dalam masyarakat itu sendiri, bukan hanya bergantung pada kekuatan eksternal.

Dengan demikian, "Papua Selatan Aman" bukan sekadar kondisi bebas dari ancaman fisik, melainkan paradigma keamanan holistik yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkelanjutan

PAPUA SELATAN DAMAI:

Makna "damai" ini menunjukkan bahwa perdamaian dipahami sebagai upaya aktif membangun persatuan dalam keberagaman. Dalam konteks Papua yang secara historis memiliki tantangan konflik, konsep "damai" mengacu pada paradigma "**Papua Selatan Tanah Damai**" sebagaimana dikembangkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP), yang mengandung sepuluh nilai dasar: keadilan dan kebenaran, partisipasi, rasa aman dan nyaman, harmoni/keutuhan, kebersamaan dan penghargaan, pengakuan dan harga diri, komunikasi dan informasi yang benar, kesejahteraan, kemandirian dan kebebasan. Filosofi "damai" dalam konteks Papua Selatan juga mengacu pada kearifan lokal Papua Selatan dimana tanah adat dipandang sebagai "**mama perdamaian**" yang menyatukan, membebaskan, dan mendamaikan masyarakat secara komprehensif dan permanen. Konsep ini mencerminkan pemahaman bahwa perdamaian sejati lahir dari

harmonisasi antara manusia, alam, dan spiritualitas. Pendekatan perdamaian berbasis budaya lokal ini sejalan dengan konsep "**Satu Tungku Tiga Batu**" yang menunjukkan bahwa Papua Selatan memiliki potensi besar sebagai model perdamaian dalam keberagaman. Dalam konteks RPJMD Papua Selatan, "damai" juga dipahami sebagai proses pembangunan perdamaian (**peacebuilding**) yang mencakup rekonstruksi politik, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Ini melibatkan transformasi konflik melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan, perdamaian, dan demokrasi.

Dengan demikian, "Papua Selatan Damai" bukan sekadar kondisi bebas dari konflik, melainkan paradigma perdamaian holistik yang mengintegrasikan ketenangan sosial, toleransi antarbudaya, harmoni pemerintahan, dan kearifan lokal dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.;

PAPUA SELATAN SEJAHTERA:

Makna "sejahtera" ini menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap terdepan dalam mempertahankan alam & budaya. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dipahami sebagai kondisi yang **Berbasis Keberlanjutan, Berkeadilan, Berbasis Kearifan Lokal**. Dalam konteks filosofi Papua. Selatan, kesejahteraan memiliki makna yang lebih dalam terkait dengan hubungan sakral antara manusia, tanah, dan spiritualitas. Hal Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan Papua Selatan dipahami sebagai **Kesejahteraan Spiritual, Kesejahteraan Ekologis, dan Kesejahteraan Budaya**. Hal ini juga selaras dengan lambang Provinsi Papua Selatan, padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan dipahami sebagai hasil dari kerja keras dan produktivitas masyarakat yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang aspiratif.

Dengan demikian, "Papua Selatan Sejahtera" bukan sekadar kondisi ekonomi yang baik, melainkan paradigma kesejahteraan holistik yang mengintegrasikan kemakmuran material,

keharmonisan spiritual, keseimbangan ekologis, dan keadilan sosial dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang bermartabat, aman, dan damai.

PAPUA SELATAN ASPIRATIF

Secara teoritis, konsep "aspiratif" dalam tata kelola pemerintahan mengacu pada prinsip **responsivitas** dan **partisipasi** yang merupakan pilar utama dalam paradigma *good governance*. Menurut teori hukum responsif, pemerintahan yang aspiratif adalah pemerintahan yang substansi norma dan kebijakannya selaras dengan aspirasi atau keinginan masyarakat. Filosofi aspiratif mengandung dua dimensi fundamental, dimensi proses (**partisipatif**) dan dimensi substansi (**aspiratif**), dimana proses pembentukan kebijakan melibatkan peran aktif masyarakat, sementara substansi kebijakan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Papua Selatan, pemerintahan aspiratif juga mengandung makna "**penguatan tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) yang efektif dan partisipatif**". Ini menunjukkan bahwa aspiratif tidak hanya bermakna umum, tetapi juga spesifik dalam konteks kekhususan Papua yang memerlukan pendekatan **berbasis kearifan lokal** dan **afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP)**. Filosofi "aspiratif" dalam konteks Papua Selatan juga berfungsi sebagai jembatan antara **demokrasi formal** dan **demokrasi substantif**, dimana pemerintahan tidak hanya menjalankan prosedur demokratis, tetapi juga memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat benar-benar tercermin dalam kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah daerah cakap dalam merespon aspirasi kebutuhan masyarakat, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memecahkan masalah, berjiwa visioner serta berpegang teguh pada kebenaran memuliakan rakyat dengan prinsip "**Bila ada masalah masyarakat, Pemerintah Daerah ada**".

Dengan demikian, "Papua Selatan Aspiratif" bukan sekadar slogan pemerintahan, melainkan paradigma tata kelola yang mengintegrasikan responsivitas, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat dalam menciptakan pemerintahan yang benar-benar melayani kepentingan masyarakat Papua Selatan.

Visi di atas diharapkan akan menjadi landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan Provinsi Papua Selatan yang dituangkan dalam RPJPD Provinsi Papua Selatan 2025-2045 yaitu mewujudkan Papua Selatan Sejahtera, Adil, Maju dan Makmur Berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan sasaran dan indikator-indikator makro pembangunan sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029 yang juga merupakan Indikator Makro dari Sasaran Visi Jangka Panjang dalam RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 sehingga terdapat hubungan yang kuat antara sasaran Visi RPJPD dan sasaran visi RPJMD dalam rangka menjaga konsistensi dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Penjabaran indikator makro keberhasilan visi ditampilkan dalam berikut ini:

Tabel III.1 Sasaran Visi dan Indikator Makro Pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Visi	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	a PDRB per kapita (Rp Juta)	65.000000	66.875.000	68.750.000	70.625.000	72.500.000
		b Indeks ekonomi biru (IBEI)	35	37	39	41	42
		c Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,5	5,7	5,9	6,2	6,4
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a Tingkat Kemiskinan (%)	17	16,0	14,9	13,9	12,9
		b Rasio gini (Indeks)	0,372	0,371	0,369	0,368	0,367
		c Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi (%)	0,150	0,157	0,164	0,171	0,178
		d Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6	6	6	6	6
3	Kepemimpinan dalam Mega-biodiversitas dan Eco-culture	a Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
		b Kinerja Eco-culture Papua Selatan	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
4	Kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Meningkat	a Indeks Modal Manusia (IMM)	0,430	0,438	0,445	0,453	0,460
		b Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,74	66,1	67,3	67,9	68,3
5	Intensitas dan Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission (NZE)	a Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59	61,5	64,1	66,6	69,1
		b Penurunan Emisi GRK (%)	80,63	81,02	81,42	81,81	82,20

- a. Sasaran visi pertama yaitu **“Peningkatan Pendapatan Perkapita”** masyarakat Provinsi Papua Selatan akan ditunjukkan dengan peningkatan PDRB Kapita dari sebesar Rp. 65 juta pada tahun 2025

menjadi sebesar Rp. 66,8 juta pada tahun 2026, kemudian menjadi Rp.68,7 juta pada tahun 2027, kemudian Rp.70,6 juta pada tahun 2028 serta menjadi sebesar Rp.72,5 juta pada akhir periode pembangunan jangka menengah tahun 2029. Selama periode ini pertumbuhan ekonomi akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas dari realisasi yang ada selama ini, yaitu kisaran angka 6-7 persen pertahun dengan tentu saja mengandalkan adanya peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari seluruh potensi ekonomi daerah terutama sektor ekonomi berbasis kelautan serta kontribusi dari penambahan industri kecil dan menengah yang berbasis pada penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.

- b. Sasaran visi Kedua yaitu **“Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan”** akan ditandai dengan pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Selain itu, intervensi tersebut juga akan dilakukan dengan upaya pemerataan hasil pembangunan baik antar golongan penghasil maupun antar wilayah di Provinsi Papua Selatan. Dalam perspektif tersebut, tingkat kemiskinan yang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar 17 persen akan mengalami penurunan menjadi 12,9 persen pada tahun 2029. Kemudian rasio gini akan mengalami penurunan dari sebesar 0,372 pada tahun 2025 menjadi sebesar 0,367 pada tahun 2029. Menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan di wilayah Provinsi Papua Selatan juga akan dibarengi oleh peningkatan produktivitas wilayah yang akan ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi yang diberikan oleh Provinsi Papua Selatan terhadap PDB.
- c. Sasaran visi Ketiga yaitu: **“Kepemimpinan dalam Mega-biodiversitas dan Eco-culture”** akan tercapai melalui kepemimpinan kepala daerah yang memiliki kinerja yang tinggi di berbagai bidang pembangunan tapi harus tetap mampu mempertahankan keberlanjutan Provinsi Papua Selatan sebagai wilayah yang memiliki Mega Biodiversitas dan Eco-culture. Dalam periode tahun 2025-2029, Kepala Daerah yang akan memimpin Provinsi Papua Selatan setidaknya memiliki visi yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan memberi perhatian yang besar terhadap kinerja-kinerja wajib yang

harus dipenuhi oleh daerah serta tetap mampu mempertahankan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan.

- d. Sasaran visi Keempat yaitu: **“Kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Meningkat”** ditunjukkan dengan peningkatan indeks modal manusia yang diperkirakan akan mengalami peningkatan dari angka 0,430 pada tahun 2025 menjadi angka 0,460 pada tahun 2029, selain itu indeks pembangunan manusia diperkirakan juga akan mengalami peningkatan dari sebesar 65,74 pada tahun 2025 menjadi sebesar 68,3 poin pada tahun 2029. Peningkatan daya saing sumber daya manusia akan dicapai dengan upaya transformasi sosial yang konsisten sejalan dengan kebijakan Papua Cerdas yang juga diberlakukan di Provinsi Papua Selatan.
- e. Sasaran visi kelima yaitu: **“Intensitas dan Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission (NZE)”** akan dicapai dengan perwujudan upaya yang bersifat komprehensif untuk memadukan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sebuah kerangka yang harmonis dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, perlindungan alam, dan kelangsungan hidup. Selanjutnya pembangunan ekonomi wilayah yang berwawasan lingkungan juga ditunjukkan dengan penataan ruang yang seimbang antara budidaya dan kawasan lestari yang menjadi paru paru kehidupan wilayah Provinsi Papua Selatan.

3.1.2 Misi Pembangunan Papua Selatan Tahun 2025-2029

Misi pembangunan Provinsi Papua Selatan disusun untuk menjawab persoalan dan isu strategis pembangunan Provinsi Papua Selatan sehingga dirumuskan 6 Misi Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Misi Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- 1. MISI 01: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Terutama Bagi Orang Asli Papua (OAP) Dan Kelompok Rentan Yang Mudah Akses, Berkualitas Dan Berkeadilan.** Misi ini berfokus pada afirmasi dan prioritas pembangunan SDM untuk Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan. Pemberdayaan OAP menjadi pondasi pembangunan Papua kedepan, dengan memastikan akses yang mudah, berkualitas, dan

berkeadilan terhadap layanan dasar. Misi ini mengadopsi pendekatan pemberdayaan strategis dan mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. OAP memiliki kerentanan yang lebih tinggi dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, dimana proporsi OAP yang tidak bersekolah atau hanya bersekolah hingga lulus SD masih tinggi. Dalam aspek kesehatan, rendahnya akses OAP terhadap fasilitas kesehatan (faskes) serta terbatasnya ketersediaan faskes dan tenaga kesehatan menjadi tantangan utama. Implementasi misi ini menggunakan pendekatan sosial dan kultural yang melibatkan tokoh adat dan gereja dalam penyaluran program, mengingat OAP memiliki trauma terhadap aparat bersenjata. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menjangkau OAP, termasuk kelompok pengungsi yang memiliki akses paling terbatas terhadap perlindungan sosial.

- 2. MISI 02: Memberdayakan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Potensi Unggulan Yang Berdampak Pada Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Orang Asli Papua (OAP).** Ekonomi inklusif Papua Selatan didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, dengan fokus mengoptimalkan kesempatan ekonomi, menyediakan jaminan sosial, dan memastikan akses yang sama bagi kesempatan ekonomi. Mengembangkan ekonomi yang memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah seperti sagu, perikanan, gaharu, dan perkebunan. Misi ini menggunakan pendekatan ekonomi produktif yang memberikan dampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan OAP, serta memastikan OAP tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi. Ekonomi inklusif Papua Selatan didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, dengan fokus pada tiga pilar utama: mengoptimalkan kesempatan ekonomi, menyediakan jaminan sosial, dan memastikan akses yang sama bagi kesempatan ekonomi.
- 3. MISI 03: Memperkuat Pemerintahan Dan Tata Kelola Otonomi Khusus Yang Efektif (Tepat Guna, Tepat Waktu, Tepat Sasaran), Bersih, Partisipatif Dan Afirmatif.** Memperkuat implementasi

Otonomi Khusus (Otsus) dengan prinsip tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, bersih, partisipatif, dan afirmatif. Misi ini mengoptimalkan dana Otsus untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pembangunan fisik, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat Papua Selatan

- 4. MISI 04: Melestarikan Dan Mendayagunakan Hayati Berbasis Wilayah Adat Secara Berkelanjutan.** Mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat secara berkelanjutan. Papua Selatan memiliki kekayaan hayati tinggi seperti Taman Nasional Wasur dengan walabi, cenderawasih, dan ekosistem rawa yang unik. Misi ini memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang harmonis dengan kearifan lokal dan nilai-nilai adat
- 5. MISI 05: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Kohesi Dan Harmoni Social Lintas Etnis, Agama Dan Golongan Berbasis Kearifan Lokal Anim Ha.** Membangun harmoni sosial lintas etnis, agama, dan golongan dengan pendekatan kearifan lokal Anim Ha. Anim Ha atau "Manusia Sejati" merupakan filosofi suku-suku Papua Selatan yang menekankan kedekatan dengan alam dan harmoni sosial. Misi ini memperkuat kapasitas kelembagaan dan menciptakan kohesi sosial yang solid dalam keberagaman.
- 6. MISI 06: Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Konektivitas Antar Wilayah Terutama Daerah 3T, Pusat Pertumbuhan Berbasis Tata Ruang Yang Inklusif.** Membangun sarana prasarana dan konektivitas terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan pusat pertumbuhan berbasis tata ruang inklusif. Papua Selatan sebagai wilayah terdepan yang berbatasan dengan Papua Nugini memerlukan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah untuk mempercepat akses pelayanan dan pengembangan ekonomi lokal. Misi ini terintegrasi dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dengan tiga misi utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, menjadikan Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia.

Keenam misi ini saling terkait dalam kerangka pembangunan holistik yang menempatkan OAP sebagai subjek pembangunan, dengan pendekatan berbasis kearifan lokal Anim Ha, pelestarian lingkungan,

dan tata kelola Otsus yang efektif untuk mewujudkan Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera, dan aspiratif.

Keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.2 Keterkaitan Visi dengan Misi Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

Pokok-Pokok Visi	Misi Pembangunan
Bermartabat	Memperkuat Pemerintahan Dan Tata Kelola Otsus Yang Efektif (Tepat Guna, Tepat Waktu, Tepat Sasaran) Bersih, Partisipatif Dan Afirmatif
	Melestarikan Dan Mendayagunakan Hayati Berbasis Wilayah Adat Secara Berkelanjutan
Aman	Memperkuat Pemerintahan Dan Tata Kelola Otsus Yang Efektif (Tepat Guna, Tepat Waktu, Tepat Sasaran) Bersih, Partisipatif Dan Afirmatif
Damai	Memperkuat Pemerintahan Dan Tata Kelola Otsus Yang Efektif (Tepat Guna, Tepat Waktu, Tepat Sasaran) Bersih, Partisipatif Dan Afirmatif;
	Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Konektivitas Antar Wilayah Terutama Daerah 3T, Pusat Pertumbuhan Berbasis Tata Ruang Yang Inklusif
Sejahtera	Memberdayakan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Potensi Unggulan Yang Berdampak Pada Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat OAP
	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Terutama Bagi OAP Dan Kelompok Rentan Yang Mudah Akses, Berkualitas Dan Berkeadilan
	Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Konektivitas Antar Wilayah Terutama Daerah 3T, Pusat Pertumbuhan Berbasis Tata Ruang Yang Inklusif
Aspiratif	Memperkuat Pemerintahan Dan Tata Kelola Otsus Yang Efektif (Tepat Guna, Tepat Waktu, Tepat Sasaran) Bersih, Partisipatif Dan Afirmatif

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi dan 6 Misi RPJMD Provinsi Papua Selatan 2025-2029, selanjutnya dirumuskan menjadi 8 tujuan dan 25 sasaran RPJMD Provinsi Papua Selatan 2025-2029. Tujuan dan saran ini juga akan menjadi dasar bagi penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 tahun. Adapun tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
“TERWUJUDNYA PAPUA SELATAN YANG BER MARTABAT, AMAN, DAMAI, SEJAHTERA DAN PEMERINTAHAN YANG ASPIRATIF”									
MISI 1: Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan									
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Selatan yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,86	69,26	69,66	70,06	70,46	70,86	71,26
	KInerja Eco-culture Papua Selatan	Persen	N/A	11,04	11,04	22,08	33,12	44,16	55,2
Sasaran 1: Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Literasi/Numerasi	Persen	49,78	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	77,00
	Indeks Modal Manusia (IMM)	Persen	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,47	0,47
	Harapan Lama Sekolah	Persen	12,67	12,73	12,80	12,86	12,93	12,99	13,05
	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	8,38	8,42	8,46	8,51	8,55	8,59	8,63
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen	63,98	65,98	67,05	69,33	71,45	73,77	75,00
Sasaran 2: Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Persen	48,52	49,54	50,01	50,26	50,63	50,99	51,62
Sasaran 3: Meningkatkan peran pemuda dalam	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	52,17	56,33	57,17	58,03	58,9	59,79	59,79

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,314	0,322	0,330	0,338	0,347	0,355	0,364
Sasaran 4: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,46	69,2	69,6	70	70,39	70,79	71,19
	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 kelahiran hidup)	N/A	424	403	382	362	341	320
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	24	22,80	21,66	20,58	19,55	18,57	17,64
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	59,84	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	100,00
Sasaran 5: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Persen	67,12	39,38	39,55-	39,73	39,9-40,11	40,08	40,25
Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan perlakuan yang adil, inklusif, dan afirmatif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	68,00	68,54	69,09	69,65	70,20	70,76	71,33
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	83,76	84,43	85,11	85,79	86,47	87,16	87,86
Sasaran 6: Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Indeks Keberfungsian Sosial	Persen	31,21	35,00	45,00	55,00	70,00	80,00	100,00

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 7: Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPDG)	Indeks	64,00	64,10	66,20	67,50	68,80	69,00	69,20
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,53	0,50	0,47	0,42	0,40	0,39	0,35
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	44,53	44,89	45,25	45,61	45,97	46,34	46,71
	Indeks Pemenuhan Anak (IPA)	Indeks	45,10	45,90	46,20	47,40	48,90	49,60	50,35
MISI 2: Memberdayakan ekonomi yang inklusif berbasis potensi unggulan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP									
Tujuan 3: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,63	4,72	4,80	4,89	4,97	5,06
	PDRB Perkapita	Rp. Juta	61,58	62,07	62,57	63,07	63,57	64,08	64,60
	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,35	17,00	16,20	15,40	14,60	13,80	13,00
	Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional	Persen	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20
Sasaran 8: Meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi keunggulan lokal berbasis karakteristik lokal	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	52,17	54,78	57,52	60,39	63,41	66,58	69,91
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	29,26	30,72	32,26	33,87	35,57	37,34	39,21
	Nilai Tukar Petani	Indeks	105,03	112,05	112,39	112,72	113,06	113,40	113,74
	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Perbatasan	Rp. Juta	45,00	45,36	45,72	46,09	46,46	46,83	47,20

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Rp. Juta	64,40	64,59	64,79	64,98	65,18	65,37	65,57
	Indeks ekonomi biru (IBEL)	Indeks	35,31	35,31	36,38	37,45	38,51	39,58	40,65
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	87,00	87,00	87,20	87,40	87,60	87,80	88,80
Sasaran 9: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,05	2,65-3,12	2,63-3,12	2,61-3,11	2,59-3,11	2,57-3,11	2,55-3,10
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	53,45	53,45	55,83	58,21	60,59	62,97	65,36
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Orang Asli Papua (OAP)	Persen	54,1	56,81	59,65	62,63	65,76	69,05	72,50
	Proporsi Penciptaan lapangan Kerja Formal	Persen	N/A	20	21	22	23	24	25
Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian.	Inklusi Keuangan	Persen	76,36	83,32	84,32	84,89	85,47	86,04	86,61
	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen							
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persen	N/A	1,62	1,71	1,79	1,88	1,96	2,05
	Persentase usaha Industri kecil dan mikro yang melakukan inovasi	Persen	N/A	10,03	10,03	20,06	30,09	40,12	50,15

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	produk, pemasaran, distribusi dan/atau teknologi								
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada Level Provinsi	Persen	N/A	13,14	13,22	13,3	13,39	13,47	13,55
Sasaran 11: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	29,40	29,46	29,52	29,58	29,64	29,70	29,75
	Nilai investasi PMA/PMDN	Rp. Triliun	8,95	1,87	1,88	1,89	1,90	1,91	1,92
Sasaran 12: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	0,86	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15
Sasaran 13: Meningkatnya nilai tambah perdagangan dan daya saing industri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	5,62	5,90	6,20	6,51	6,83	7,17	7,53
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,81	13,45	14,12	14,83	15,57	16,35	17,17
	Tingkat Inflasi	Persen	2,39	2,38	2,38	2,37	2,36	2,35	2,35
MISI 3: Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola OTSUS yang efektif, bersih, partisipatif, dan afirmatif									
Tujuan 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari korupsi, partisipatif, afirmatif, dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,68	3,68	3,70	3,72	3,74	3,75	3,77
	indeks integritas Papua Selatan	Indeks	67,4	74,52	74,89	75,27	75,64	76,02	76,40

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 14: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	Skor	73,75	75,59	77,48	79,42	81,41	83,44	85,53
	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Skor	N/A	3	3	3	3	3	3
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRPS terhadap Pelayanan Sekretariat DPRPS (skor kepuasan)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat kepuasan masyarakat adat terhadap DPRPS Pengangkatan (skor kepuasan)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	N/A	20,00	22,40	25,09	28,10	31,47	35,25
	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (indeks)	Indeks	N/A	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 15: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (level)	Level	N/A	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,00
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (indeks)	Indeks	N/A	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	70,00
	Indeks Pembangunan Statistik (indeks)	Indeks	N/A	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	75,00
	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	46,9	49,25	51,71	54,29	57,01	59,86	62,85
	Indeks persepsi korupsi	Indeks	38,00	38,95	39,92	40,92	41,94	42,99	44,07
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1,20	1,30	1,40	1,51	1,63	1,76	1,90
	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,78	2,92	3,06	3,22	3,38	3,55	3,73
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,5158 (Tertinggal)		0,020	0,040	0,060	0,060	0,100
Sasaran 16: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian kampung	Jumlah kampung adat	Kampung	N/A						
	Cakupan kabupaten/kota yang menetapkan Masyarakat	Persen	50,00	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81	67,00

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Hukum Adat (MHA) (persen)								
Sasaran 17: Meningkatkan kemampuan fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,853	1,946	2,043	2,145	2,252	2,365	2,483
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,67	0,67	0,64	0,6	0,57	0,53	0,50
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen		17,05	17,24	17,43	17,62	17,81	18,00
MISI 4: Melestarikan dan mendayagunakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan									
Tujuan 5: Meningkatkan keberlangsungan ekosistem dan biodiversitas, sekaligus peran wilayah adat sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	79,78	80,98	82,19	83,42	84,68	85,95	87,23
	Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	Indeks	N/A	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Sasaran 18: Meningkatkan pengelolaan keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati dan peran wilayah adat dalam pembangunan Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Persentase Tutupan Lahan	Persen	69,06	69,4	69,75	70,09	70,43	70,78	70,78
Sasaran 19: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	95,44	84,80	85	85,20	85,40	85,60	85,60
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	60,73	71,77	71,97	72,17	72,37	72,57	72,57

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	93,16	94,5	95,02	95,09	95,16	95,23	95,23
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	N/A	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	59,00	59,00	60,24	61,48	62,72	63,96	65,00
Sasaran 20: Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi		N/A	26,6	27,49	28,38	29,27	30,16	31,05
MISI 5: Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kohesi dan harmoni sosial lintas etnis, agama, dan golongan berbasis kearifan Ha Anim									
Tujuan 6: Menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan resilien dalam menghadapi tantangan keberagaman dan dinamika sosial	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	64,5	64,82	65,15	65,47	65,80	66,13	66,46
	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	62,5	64,4	66,3	68,1	70	70
Sasaran 21: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	N/A	76,46	76,66	76,86	77,06	77,26	77,46
Sasaran 22: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Tingkat kondusivitas wilayah	Persen	N/A	46,60	47,28	47,96	48,64	49,32	50,00
	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Persen	138,2	135,436	132,7273	130,0727	127,4713	124,9219	122,4234
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian	Persen	N/A	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	73,05

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	di Area Tempat Tinggalnya								
	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	N/A	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	3,60
MISI 6: Meningkatkan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah terutama daerah 3T, pusat pertumbuhan berbasis tata ruang yang inklusif									
Tujuan 7: Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks	142,98	142,27	141,55	140,85	140,14	139,44	138,74
Sasaran 23: Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan handal	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	N/A	61,94	64,60	67,25	69,91	72,59	75,85
	Cakupan rumah yang dapat mengakses listrik (PLN dan Non PLN)	Persen	67,05	68,73	70,44	72,21	74,01	75,86	77,76
	Konsumsi Listrik per Kapita	KHw	312,87	312,87	328,51	344,94	362,19	380,30	399,31
	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	Persen	71,90	72,98	74,07	75,18	76,31	77,46	78,62
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	74,41	76,27	78,18	80,13	82,13	84,19	86,29
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh	Persen	N/A	27,00	30,60	34,20	37,80	41,40	45,00

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengumpulan Sampah (% RT)								
	Indeks Tranformasi Digital Nasional	Indeks	N/A	8,65	8,82	8,99	9,16	9,33	9,50
	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet	Persen							
	i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	m3/detik	N/A	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
Sasaran 24: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	N/A	30,94	34,87	38,79	42,72	46,64	50,57
Sasaran 25: Terwujudnya layanan transportasi (udara, laut, darat) yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas		26,72	32,51	32,51	32,51	32,51	32,51	41,36

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pentahapan pembangunan jangka panjang daerah dalam RPJMD Papua Selatan 2025-2029 menjadi 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka pendek daerah juga akan memastikan adanya penanganan permasalahan dan isu strategis daerah secara lebih realistis dan terukur serta berbasis pada kemampuan dan kapasitas terpasang yang dimiliki oleh seluruh stakeholder pembangunan daerah di Provinsi Papua Selatan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, masyarakat sipil, pihak swasta dan stakeholder pembangunan daerah lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, skema pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 akan terbagi kedalam 5 (lima) tahapan pelaksanaan sesuai dengan periode Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Selatan, yaitu:

Gambar III.1 Tahapan Pembangunan Provinsi Papua Selatan 2026-2030



- Tahap ke-I (tahun 2026) **“Penguatan Dasar Pembangunan dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Energi Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Papua Selatan yang Produktif, Inklusif, dan Berkelanjutan”**;
- Tahap ke-I (tahun 2027) **“Percepatan Dan Pemerataan Akses Dan Kualitas Pelayanan Dasar, Serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat”**;
- Tahap ke-I (tahun 2028) **“Peningkatan Kualitas Layanan Dasar, Serta Peningkatan Rantai Nilai Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Berbasis Sektor Unggulan Papua Selatan”**

- d. Tahap ke-I (tahun 2029) **“Penguatan Keunggulan Kompetitif Daerah Melalui Percepatan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis Dan Peningkatan Investasi Yang Berfokus Pada Potensi Unggulan Lokal”**
- e. Tahap ke-I (tahun 2030) **“Terwujudnya Papua Selatan Yang Ber Martabat, Aman, Damai, Sejahtera Dan Pemerintahan Yang Aspiratif”**, sebagai fondasi implementasi tahap pembangunan ke-2 RPJPD (2030-2034).

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien pada tahun 2025-2029. Strategi pembangunan menunjukkan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders pembangunan daerah. Keterkaitan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Provinsi Papua Selatan 2025-2029 dapat dilihat dalam table, dibawah ini

Tabel III.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
MISI 1: Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan							
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Selatan yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter							
- Sasaran 1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah - Sasaran 2: Terwujudnya berkebudayaan maju - Sasaran 3: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga - Sasaran 4: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Sasaran 5: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Pemenuhan dan keterjangkauan pendidikan berkualitas yang Merata	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah berpola asrama	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil,penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	✓	✓	✓	✓	✓
		peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skills) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya)	✓	✓	✓	✓	✓
		peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, penelitian dan inovasi	✓	✓	✓	✓	✓
		peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat, serta tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
	sosialisasi dan lomba kampung bersih dan sehat	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan layanan SDM dan Saprass Pemenuhan kesehatan	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan khususnya di wilayah sulit akses.	sinergikan pemenuhan layanan kesehatan; moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau termasuk jaringan internet, listrik dan sarana prasarana penanganan limbah medis	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan eliminasi malaria, tuberkolosis dan HIV AIDS	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal	Percepatan penurunan stunting	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular di Papua Selatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB)	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan perlakuan yang adil, inklusif, dan afirmatif							
▪ Sasaran 6: Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif	✓	✓	✓	✓	✓
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran	✓	✓	✓	✓	✓
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim					
		Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua Selatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	✓	✓	✓	✓	✓
MISI 2: Memberdayakan ekonomi yang inklusif berbasis potensi unggulan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP							
Tujuan 3: Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan							

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
- Sasaran 7: Meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi keunggulan lokal berbasis karakteristik lokal . - Sasaran 8: Menurunnya ketimpangan masyarakat melalui peningkatan pendapatan - Sasaran 9: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja - Sasaran 10: Meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian - Sasaran 11: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif. - Sasaran 12: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif. - Sasaran 13:	Peningkatan, dan pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, dan perikanan melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis pariwisata, sentra kelautan dan perikanan terpadu, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
	Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan	Pengembangan pusat riset biodiversitas Papua Selatan untuk mendukung ekonomi biru, hijau berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya daya saing industri.		Pengembangankawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara melalui peningkatan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal;	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skfll deuelopment)	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda baik OAP maupun non OAP di Papua Selatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha					
		Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	✓	✓	✓	✓	✓
	pembangunan dan pengembangan serta perluasan pemerataan UMKM serta pemanfaatan dan pengembangan digital	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan start up;	✓	✓	✓	✓	✓
		Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor unggulan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha baik OAP maupun Non OAP	✓	✓	✓	✓	✓
	Integrasi Ekonomi Domestik.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Papua New Guenia, Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Integrasi Ekonomi Domestik	Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis bahari dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan budaya Ha-anim	✓	✓	✓	✓	✓
	Beragama Maslahat, Ketahanan Sosial dan Budaya berdasar kearifan budaya Ha-anim	Pembangunan destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif;	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan pusat riset dan industri berbasis keunggulan lokal	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan pusat riset biodiversitas Papua Selatan untuk mendukung ekonomi biru, hijau berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
MISI 3: Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola OTSUS yang efektif, bersih, partisipatif, dan afirmatif							
Tujuan 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari korupsi, partisipatif, dan afirmatif							
▪ Sasaran 14: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Sasaran 15: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel Sasaran 16: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian kampung. Sasaran 17: Meningkatkan kemampuan fiskal daerah	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, adaftif, dan inklusif	Peningkatan tata kelola yang baik, adapatif,integratif,profesional	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan literasi digital untuk mendukung tata kelola pelayanan di dibidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan Integritas pemerintahan desa melalui tata kelola yang transparan, partisipatif dann responsif terhadap kebutuhan masyarkaak kampung..	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam forum musyawarah kampung yang inklusif					
	Penguatan indeks kepuasan masyarakat	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.					
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	✓	✓	✓	✓	✓
	Penguatan SDM	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	✓	✓	✓	✓	✓
	Penguatan pemanfaatan dana otsus	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel,transparan, dan tepat sasaran.	✓	✓	✓	✓	✓
	penguatan indeks kepuasan masyarakat	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.					
		Percepatan Desain Penataan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan Kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif	✓	✓	✓	✓	✓
		dukungan pelayanan dan penegakkan hukum yang inklusif	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 717 (berbatasan dengan perairan Palau).	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara	Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara.	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi pemanfaatan dana transfer daerah (TKD)	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.					
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.	✓	✓	✓	✓	✓
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	✓	✓	✓	✓	✓
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	✓	✓	✓	✓	✓
		Tujuan 5: Meningkatkan keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, sekaligus peran wilayah adat sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan					

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
▪ Sasaran 18: Meningkatnya pengelolaan keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati dan peran wilayah adat dalam pembangunan Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pengembangan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru	✓	✓	✓	✓	✓
		Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, pertanian, dan perkebunan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua dalam kesatuan budaya bangsa sesuai kearifan budaya Ha-anim di Papua Selatan dan pengembangan etos kerja	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional		✓	✓	✓	✓
MISI 4: Melestarikan dan mendayagunakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan							
Tujuan 6: Menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan resilien dalam menghadapi tantangan keberagaman dan dinamika sosial							
▪ Sasaran 19: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Kondusivitas wilayah yangberbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan,	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran 20: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.					
		Peningkatan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai- nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	✓	✓	✓	✓	✓
	Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture)secara berkelanjutan	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan moderasl beragama untuk mengukuhkan toleransl, kerukunan dan harmoni sosial	✓	✓	✓	✓	✓
MISI 5: Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kohesi dan harmoni sosial lintas etnis, agama, dan golongan berbasis kearifan Anim Ha							
Tujuan 7: Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata							
▪ Sasaran 21: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang	Berketahanan Energi Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan.	Pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi;	✓	✓	✓	✓	✓
		Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi;					

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
berkualitas dan handal Sasaran 22: Meningkatnya ketahanan pangan dan pemenuhan akses air minum Sasaran 23: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Sasaran 24: Terwujudnya layanan transportasi (udara, laut, darat) yang nyaman, aman dan terjangkau		Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat;					
		Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.					
	Perluasan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)					
	Upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran.	peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas	✓	✓	✓	✓	✓
		Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok					
		Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran);					

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Pengembangan sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi didukung oleh peningkatan konektivitas dan mobilitas pada kawasan perbatasan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan infrastruktur dasar,	Pengembangan sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
	sistem Konektivitas dan Kemandirian Pangan	kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi					
		Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan peningkatan layanan bandara udara	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua selatan serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan yang terintegrasi;	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan dan Peningkatan konektivitastransportasi daratuntuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan waduk multiguna untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi listrik.	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Pengembangan transportasi perkotaan Papua Selatan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang di kota sedang	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah afirmasi	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	✓	✓	✓	✓	✓
MISI 6: Meningkatkan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah terutama daerah 3T, pusat pertumbuhan berbasis tata ruang yang inklusif							
Tujuan 8: Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan							
- Sasaran 25: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup - Sasaran 26: Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Lingkungan Hidup Berkualitas	Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan proses pembangunan perdamaian peace building yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi multi bencana	✓	✓	✓	✓	✓
		Percepatan penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.	✓	✓	✓	✓	✓
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.	✓	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓	✓
	Konektivitas dan Kemandirian Pangan	Penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan.	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim.	✓	✓	✓	✓	✓

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat adat	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemngembangan masyarakat Papua Selatan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah;	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua Selatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Upaya pembangunan readah karbon dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	✓	✓	✓	✓	✓

3.2.2.Arah Kebijakan Umum dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Selatan

3.2.2.1. Kebijakan Umum Menurut RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 memperhatikan dokumen kewilayahan dan arahan yang tertuang dalam Tahapan I RPJPD Tahun 2025-2045, dimana dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Ungulan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global
2. Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata
5. Koordinasi dan Monitoring yang intens di setiap unit pelayanan Pendidikan
6. Percepatan akreditasi dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan
7. Perluasan cakupan dan pengembangan layanan telemedicine dan pembangunan puskesmas di distrik tanpa puskesmas
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses
9. Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal dan pascapersalinan dengan tenaga kesehatan terlatih
10. Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi
11. Perbaikan distribusi alat Kesehatan, obat dan vaksin untuk mencukupi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan
12. Jaminan Kesehatan Gratis bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah
13. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak
14. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Hak-hak Anak

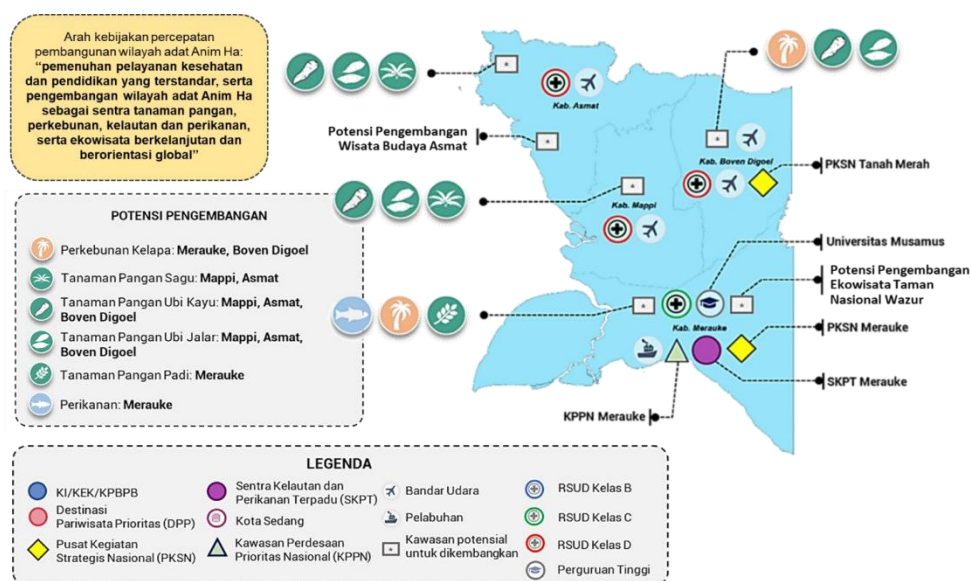
15. Penguatan Layanan Terpadu di bidang perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota
16. Peningkatan cakupan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelibatan pemangku kepentingan terkait dan berdasarkan kondisi sosial budaya setempat
17. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan
18. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
19. Penyusunan Dokumen Penataan Ruang terkait Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan
20. Intensifikasi Dan Extensifikasi Pertanian
21. Koordinasi dan Optimalisasi antar OPD terkait dan Penyuluh Pertanian dalam pengendalian OPT
22. Peningkatan Sarana Produksi Hasil Pertanian
23. Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya
24. Penyelenggaraan event rutin dan atraksi pariwisata
25. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pelaku kepariwisataan
26. Pengembangan industri pariwisata
27. Pengembangan promosi pariwisata
28. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada distrik sulit akses
29. Pelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air
30. Penyediaan dan Pengembangan fasilitas akses penunjang transportasi
31. Perluasan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok
32. Meningkatkan cakupan dan kualitas pengelolaan aset daerah
33. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pencatatan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
34. Penerapan dan optimalisasi hasil kajian atau riset dalam implemantasi pembangunan daerah
35. Penyebarluasan akses internet dan pengawasan penggunaan pada tingkat masyarakat

36. Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan
37. Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh pemerintah daerah
38. Menegakkan kebijakan dan regulasi untuk peningkatan disiplin aparatur
39. Mengembangkan kerjasama dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga terkait untuk implementasi inovasi pelayanan daerah
40. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan yang berasal dari penelitian- penelitian terapan.

3.2.2.2. Kebijakan Pengembangan Wilayah Menurut Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)

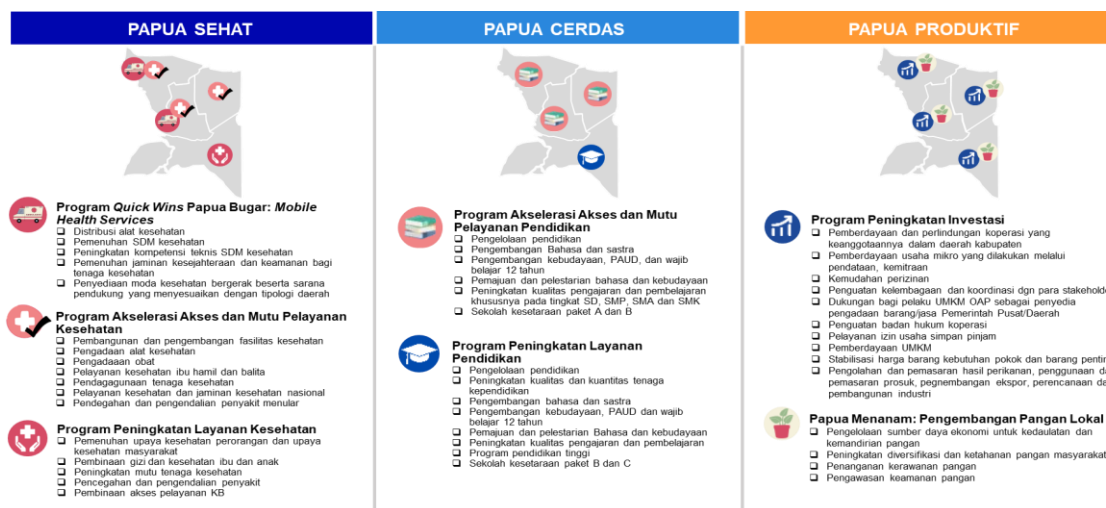
Berdasarkan RIPPP 2022-2041 terdapat arahan pengembangan wilayah Papua Selatan sebagai wilayah adat Anim Ha yaitu: “pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.” Dalam hal ini, terdapat arahan pengembangan komoditas unggulan yang berbeda antar wilayah dan perlu dikembangkan untuk mendorong terbentuknya sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta ekowisata.

Gambar III.2 Arahan Pengembangan Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041



Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “Green Growth berbasis wilayah adat” diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan wilayah Papua Selatan. Hal ini diperlukan terutama dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Gambar VI.2 dapat diketahui adanya dominasi cakupan Kawasan strategis pengembangan wilayah rendah karbon di seluruh wilayah Papua Selatan, serta cakupan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Kabupaten Merauke.

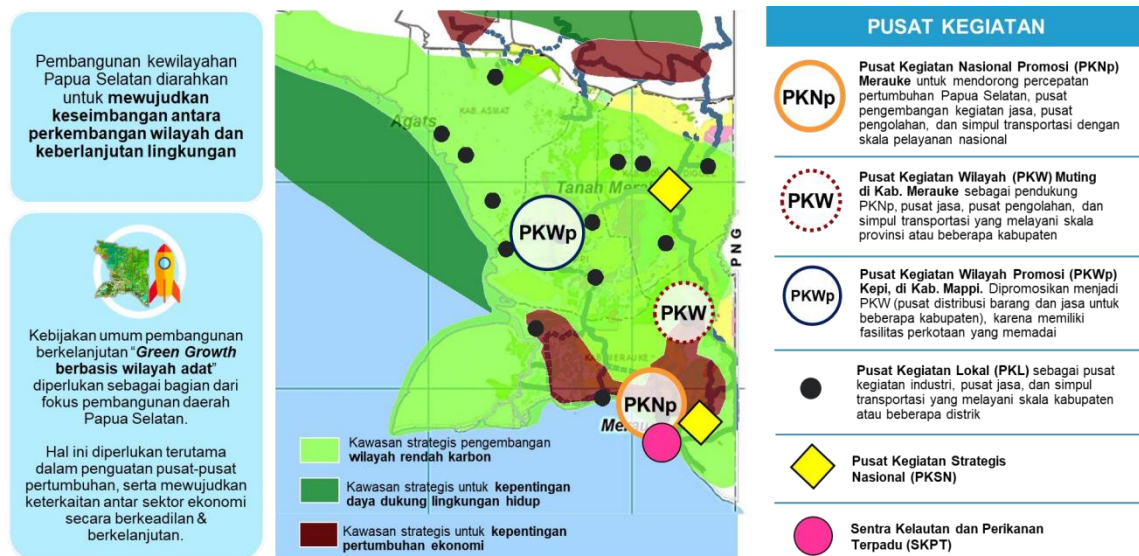
Gambar III.3 Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Flagship Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dalam RAPPP 2023



3.2.2.3. Kebijakan Pengembangan Wilayah Menurut RTRW

Pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah yang terdapat di Provinsi Papua Selatan sebagai DOB masih perlu dikembangkan. Saat ini baru terdapat 3 (tiga) pusat kegiatan dengan skala pelayanan nasional/wilayah, yaitu PKNP di Kabupaten Merauke, PKW Muting di Kabupaten Merauke dan PKWp Kepi di Kabupaten Mappi. Adapun pusat kegiatan di Kabupaten Boven Digoel dan Asmat masih berupa pusat kegiatan lokal yang melayani skala kabupaten atau beberapa distrik.

Gambar III.4 Arahan Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua Selatan Berdasarkan RTRW Provinsi Papua



Pengembangan wilayah Provinsi Papua Selatan merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Pengembangan kewilayahan Provinsi Papua Selatan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Provinsi Papua sebagai provinsi induk (khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah), hasil analisis kondisi daerah, serta arahan RIRPP dan RARPP. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3.2.2.4. Kebijakan Pengembangan Wilayah Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Kebijakan pengembangan wilayah menurut RPJMN 2025–2029 di Provinsi Papua Selatan diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi serta kebutuhan lokal. Dokumen RPJMD Papua Selatan 2025–2029 menjadi pedoman utama yang disusun partisipatif dan selaras dengan target nasional, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat adat setempat.

Gambar III.5 Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Selatan dalam RPJMN



Adapun secara kewilayahan Provinsi Papua Selatan dalam lokasi prioritas dan intervensi kebijakan Nasional seperti berikut ini:

Tabel III.5 Intervensi Kebijakan Nasional di Provinsi Papua Selatan

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
A2	Kawasan Pertumbuhan: • A2: Kab. Merauke	Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, melalui: • Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, dengan <i>output</i> : pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i> : rencana induk (masterplan)

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
		• Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Ewer • Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, peningkatan akses internet tetap pitalebar untuk UMKM dan fasilitas umum, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penataan kawasan
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: Kawasan Asmat (Kab. Asmat)	Penyiapan kawasan Asmat, melalui: • Pengembangan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah dan pengembangan bandara Ewer (Kab. Asmat) • Pengembangan produk kepariwisataan, dengan <i>output</i>: pendukungan <i>event</i> daerah, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual pada produk ekonomi lokal, dan pengembangan produk ekonomi lokal • Pengembangan sentra pariwisata, dengan <i>output</i>: pengembangan desa wisata • Peningkatan kapasitas sdm, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan <i>output</i>: pelatihan dan pembekalan sdm pariwisata serta sertifikasi sdm bidang pariwisata • Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan <i>output</i>: promosi terpadu secara nasional dan internasional • Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
B4	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-cakalang-tongkol) Sentra Produksi • B4: Kab. Merauke	Penyiapan pengembangan sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: • Penguatan sentra produksi perikanan, dengan <i>output</i>: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat, serta pengembangan kampung nelayan • Pengembangan tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengembangan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi logistik produk, penumbuhan eksportir, industrialisasi koperasi melalui rantai pasok produksi, pembentukan dan penguatan koperasi, pelaku usaha, UMKM dalam rantai pasok, pembentukan/pengembangan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan <i>output</i>: siswa SMK yang tersertifikasi kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, sertifikasi awak kapal, dan pemberian akreditasi kepada lembaga pendidikan kelautan perikanan • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, pengembangan kampung nelayan, dan perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: hilirisasi produk akuakultur dan produk hilirisasi pangan hasil laut, pemberian bantuan pendanaan <i>matching fund</i> (BOPTN Penelitian) terkait produk hilirisasi kelautan perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital
B1 B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas sagu) Sentra Produksi • B1: Kab. Merauke (sagu) • B2: Kab. Mappi (sagu) • B3: Kab. Asmat (sagu)	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas sagu, melalui: • Peningkatan produksi perkebunan, dengan <i>output</i>: pemberian bibit unggul tanaman, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan • Pengembangan tata niaga/pemasaran, dan promosi produk, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, BUMDesa, dan koperasi, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM, dengan <i>output</i>: pengembangan sekolah vokasi, serta Fasilitas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i> serta peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian)

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: - Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan <i>output</i>: penanganan jalan daerah dan pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (Iwur–Waropko, Merauke–Mappi) - Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: peningkatan pelayaran kapal Ro-Ro, penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Agats di Kab. Asmat, pengembangan fasilitas Pelabuhan Moor di Kab. Mappi, pembangunan fasilitas Pelabuhan Wowi di Kab. Asmat, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade di Kab. Mappi, layanan angkutan laut perintis, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan penyeberangan perintis - Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat, Bandar Udara Tanah Merah di Kab. Boven Digoel, Bandar Udara Mopah di Kab. Merauke, dan Bandar Udara Kepi di Kab. Mappi, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, pengembangan angkutan udara perintis kargo, pengembangan angkutan BBM pesawat udara - Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan - Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi - Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan <i>output</i>: pembangunan BTS 4G/<i>Lastmile</i>, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan digital
	- Kab. Merauke (perikanan dan perkebunan) - Kab. Mappi (perkebunan) - Kab. Asmat (perkebunan dan ekonomi kreatif)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, perkebunan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: - Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) - Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri - Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
C1	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: C1: Kab. Merauke	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Merauke yang didukung dengan kawasan transmigrasi Salor, melalui: - Pencetakan sawah - Peningkatan produksi, dengan <i>output</i>: penyaluran benih padi, areal pengendalian organisme pengganggu tanaman (opt) pangan, dan unit pengolah pupuk organik (uppo)

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
		• Penyiapan pengembangan kawasan, dengan <i>output</i>: optimasi lahan menjadi produktif, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, konektivitas transportasi desa, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian pra panen, sistem drainase yang dibangun di kawasan transmigrasi, area penyaluran benih padi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP • Penguatan sarana pascapanen dan tata kelola, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i>
C1	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Merauke* (padi dan pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Boven Digoel** (padi) • Kab. Mappi** (sagu) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/<i>bluefood</i> berbasis perikanan tangkap, melalui: • Penguatan produksi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian prapanen, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut dan tawar • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan dan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan bandara) sebagai akses menuju sentra pangan lokal, pembangunan fasilitas logistik (gudang penyimpanan pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan) yang terlatih GAP, GHP, dan PHT, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (<i>Good Agriculture Practices</i>), GHP (<i>Good Handling Practices</i>), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, mendorong <i>ownership</i> petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan padi dan sagu, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan
C1	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Merauke* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Mappi**	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan pada kawasan potensial energi, melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT)

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
	- Kab. Asmat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), energi berbasis bahan baku nabati (<i>bioenergy</i>) termasuk ethanol, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk - Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit - Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
C2	Kawasan Potensial Swasembada Air: - C2: Kab. Boven Digoel* Kawasan Rawan Air: - Kab. Merauke** - Kab Asmat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui: - Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan embung dan tampungan air lainnya - Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
D1	Kawasan Afirmasi	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal
D2	Daerah Tertinggal*:	menjadi daerah berkembang, melalui:
D3	- D1: Kab. Boven Digoel (karet) - D2: Kab. Asmat (sagu dan ekonomi kreatif) - D3: Kab. Mappi* (sagu) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	- Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan Program Afiriasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif - Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi berbasis pengembangan sentra perkebunan terintegrasi dan ekonomi kreatif, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pendukungan <i>event</i> daerah, pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM lokal, peningkatan kemandirian masyarakat, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
		- Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis darat dan udara, serta pengembangan Bandara Mindiptanah dan Lapter Bomakia (Kab. Boven Digoel) - Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana
D4 D5 D6 D7	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung - D4: PKSN Merauke, serta Kec. Ilwayab, Tabonji, Waan, Tubang, Okaba, Malind, Naukenjerai (Kab. Merauke) - D5: PKSN Tanah Merah, serta Kec. Kombut, Waropko, Ambatkwi (Kab. Boven Digoel) Kecamatan Perbatasan Prioritas - D6: Kec. Agats dan Kec. Fayit (Kab. Asmat) - D7: Kec. Minyamur (Kab. Mappi)	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah dan Merauke, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: - Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik - Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, penyediaan bibit unggul, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengolahan pasca panen komoditas, masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, peningkatan akses pembiayaan modal, serta pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk - Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua Selatan - Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN
D8 D9	Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi: - D8: KT. Salor (Kab. Merauke) - D9: KT. Muting (Kab. Merauke)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salor dan Muting, melalui: - Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, sarana permukiman di kawasan transmigrasi, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital - Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian sagu, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, dan penyediaan bibit unggul pertanian - Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi - Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran - Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan <i>output</i>: tenaga pelatihan yang ditingkatkan

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
		kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di Kawasan Transmigrasi
D1 0	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas: D10: Kawasan Perdesaan Prioritas Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind (Kab. Merauke)	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind, melalui: - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R - Peningkatan aksesibilitas desa, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa - Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes - Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan <i>output</i>: fasilitasi penguatan tata kelola desa
	Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: - Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) - Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pengembangan sekolah berpola asrama: - Kab. Merauke (PKSN Merauke) Pengembangan sekolah sepanjang hari: - Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: - Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: - Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran - Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen - Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) - Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA - Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah - Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan - Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital - Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Kab. Asmat, melalui: - Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya - Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
		kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pembangunan RSUD provinsi: • Kab. Merauke Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah) • Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua Selatan • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
	Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Merauke • Kab. Asmat • Kab. Boven Digoel • Kab. Mappi Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Mappi • Kab. Boven Digoel Pengendalian penyakit filariasis,	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
	kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Selatan	pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL - Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL - Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL - Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
	Provinsi Papua Selatan	Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, melalui: - Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua - Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) - Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL - Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan - Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB - Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
	Pemberantasan IUU Fishing: - WPP 718 (perbatasan dengan Australia) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: - Provinsi Papua Selatan	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU Fishing pada WPP 718, melalui: - Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan <i>output</i>: peningkatan operasi kapal dan <i>speedboat</i> pengawas, serta patroli mandiri - Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta iuu (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) fishing. - Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (sdkp) - Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan <i>output</i>: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua - Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan <i>output</i>: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat
E1 E2	Kawasan Konservasi: • E1: TN Lorentz (Kab. Asmat) • E2: TN Wasur (Kab. Merauke)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan <i>monitoring</i> ekosistem
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta penerapan <i>nature-based solutions</i>, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa

NO	KAWASAN	INTERVENSI KEBIJAKAN LOKASI PRIORITAS
		• Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah • Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: peningkatan portal pelayanan publik dan penerapan PTSP berbasis OSS di daerah • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

3.2.2.4. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

1). Arah Kebijakan Kabupaten Asmat, diantaranya :

1. Penguataan ekonomi local berbasis Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan budaya lokal
2. Peningkatan Skil dan Partisipasi Masyarakat dalam sector ekonomi
3. Konektivitas wilayah
4. Pengentasan Kemiskinan



2). Arah Kebijakan Kabupaten Merauke diantaranya:

1. Penyelesaian Masalah Kesenjangan Unit Pelayanan Pendidikan diseluruh Jenjang Pendidikan
2. Penyediaan Jaminan Pendidikan Gratis Peserta Didik Kurang Mampu
3. Peningkatan kinerja Tuntas Wajib 9 Tahun
4. Pemberian Jaminan akses pembiayaan pendidikan tinggi dan vokasi bagi pemuda marind
5. Pemerataan Pelayanan Kesehatan Khususnya di Tingkat Kampung
6. Pemberdayaan kesehatan bagi masyarakat lokal dan promosi kesehatan
7. Jaminan Kesehatan Gratis bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah



8. Paket Makanan Bergizi bagi Ibu dan Balita/bayi
9. Pengetahuan Ibu Hamil Mengenai Potensi perilaku Beresiko Kematian Bayi/balita
10. Penggulangan secara komprehensif mengenai prioritas stunting, khususnya bagi kelompok masyarakat rentang social
11. Mutu sumber daya pelatih/instruktur keolahragaan
12. Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Merauke
13. Kampung Mandiri Benih (Kelompok Penangkar) Kab.Merauke
14. Koordinasi dan Optimalisasi antar OPD terkait dan Penyuluh Pertanian dalam pengendalian OPT Kabupaten Merauke
15. Koordinasi dan Jalinan kemitraan strategis pemerintah daerah dengan
16. Bulog, Investor dan antar pemerintah daerah lainnya Kabupaten.Merauke
17. Promosi makan ikan Kab.Merauke dalam kerangka pencegahan potensi stunting di kalangan masyarakat merauke
18. Iklim dan administrasi perizinan melalui Konsep Mall Pelayanan Publik
19. Pemberdayaan regulasi investasi dan sistem perizinan berbasis digital Kabupaten.Merauke
20. Rumah menjadi layak huni Pengurangan Kawasan kumuh dalam rangka mendukung Peningkatan kualitas kawasan permukiman
21. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
22. Sistem pengelolaan sampah secara terpadu
23. Pemberdayaan pemerintah distrik dan masyarakat kampung sekitar daerah perbatasan
24. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kampung
25. Pendelegasian kewenangan dalam kerangka optimalisasi kapasitas kelembagaan distrik
26. Agenda ekspresi kebudayaan lokal dan non lokal

3). Arah Kebijakan Kabupaten Boven Digoel diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas yang merata dan terjangkau
2. Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan secara merata
3. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Optimalisasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam pembangunan



5. Optimalisasi pengelolaan dan penataan jalur pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi
6. Perluasan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka mengembangkan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
7. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berorientasi kebutuhan pasar
8. Optimalisasi pendidikan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja ahli yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar
9. Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi
10. Kebutuhan Pasar
11. Optimalisasi pemanfaatan data ketenagakerjaan dalam hubungan industrial
12. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri terutama bagi industri kecil dan menengah
13. Peningkatan kapasitas produksi sumberdaya pangan lokal
14. Peningkatan produksi dan promosi diversifikasi pangan lokal
15. Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal
16. Mengembangkan komoditi unggulan pertanian berbasis potensi lokal
17. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal
18. Mengembangkan komoditi unggulan pertanian berbasis potensi lokal
19. Mengembangkan komoditi unggulan perkebunan berbasis potensi lokal
20. Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
21. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker dan Promosi)
22. penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas
23. Mengembangkan Inkubator Bisnis
24. Peningkatan ketersediaan dan pengawasan pasokan dan stok bahanbahan pokok makanan dan minuman
25. Peningkatan kelancaran distribusi dan penggudangan barang

26. Perluasan prasarana transportasi pada kantong-kantong kemiskinan
27. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan poros antar distrik dan antar kampung yang menunjang kawasan pengembangan wilayah
28. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan mendukung kelancaran pergerakan arus orang dan barang
29. Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang
31. Pengembangan kawasan pemukiman yang sesuai dengan standar hidup layak masyarakat
32. Penguatan sistem pengawasan kualitas udara, air dan tutupan lahan
33. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran udara dan air
34. Peningkatan tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan
35. Peningkatan Peran wilayah Perbatasan sebagai beranda pembangunan nasional
36. Peningkatan kesesuaian dan kepatuhan dalam perencanaan dan penganggaran
37. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
38. Peningkatan peranan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah
39. Peningkatan Fungsi Pelayanan DPRD

4). Arah Kebijakan Kabupaten Mappi diantaranya:

1. Pembangunan jalan ruas :
 - a) Senggo-Kumaban-Suator-Basmas-Bosma
 - b) Kotial-Wonggi-Kaibar-Yandiruma-Bosma
 - c) Busiri-Gauda-MasinTokompatu
 - d) Eci-Meda-Wanganu II-Atsy
 - e) Wanggate-Kali Mappi f). Yakomi-Venaha-Ikisi
 - f) Tagaimon Sino-OgothoMuya-Sien-Padat Karya
2. Perencanaan pengembangan jaringan jalan
3. Inventarisasi kondisi jalan
4. Pembangunan Jembatan : a). Linggua b). Tagaimon/Kali Mappi c). Asset d). Magabag
5. Pengembangan prasarana perhubungan darat
6. Peningkatan ketersediaan fasilitas moda transportasi
7. Perencanaan pengembangan pelayanan perhubungan antar distrik



8. Pengembangan Dermaga : a). Kotiak di Distrik Passue b). Amazu di Distrik Kaibar c). Sahapikya di Distrik Venaha d). Haju di Distrik Haju e). Distrik-Distrik yang belum terhubung jalur sungai
9. Pembangunan talud pada wilayah dermaga rawan abrasi
10. Peningkatan ketersediaan fasilitas perhubungan sungai/rawa
11. Peningkatan kualitas sistem uji kapal angkut barang dan penumpang serta nelayan
12. Peningkatan kualitas jalan terbangun
13. Perbaiki jalan pada yang rusak
14. Perbaiki jembatan yang rusak
15. Peningkatan jembatan terbangun berkualitas beton
16. Peningkatan kualitas sistem uji kendaraan bermotor
17. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat
18. Peningkatan kualitas sarana perhubungan darat
19. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman
20. Peningkatan ketersediaan saluran drainase
21. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air baku dan air minum
22. Perbaiki sarana dan prasarana air baku
23. Pembangunan rumah layak huni untuk KAT
24. Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat tidak mampu
25. Pembangunan rumah untuk pendukung kinerja pelayanan kedinasan
26. Perbaiki sarana dan prasarana perumahan
27. Pembangunan infrastruktur ketengalistrikan pada distrik-distrik yang belum teraliri listrik
28. Rehabilitasi sarana dan prasarana pembangkit listrik yang rusak
29. Pembangunan Jaringan Irigasi/Rawa di Distrik Edera
30. Pembangunan Jaringan Irigasi/Rawa di Distrik Nambioman Bapai.

3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", sinergi antara prioritas nasional (PN) dan misi pembangunan Provinsi Papua Selatan menjadi kunci dalam penyusunan agenda pembangunan tahun 2025–2029. Dalam hal ini, Provinsi Papua Selatan mengusung visi “Terwujudnya Papua Selatan Yang Bermartabat, Aman, Damai, Sejahtera Dan Pemerintahan Yang Aspiratif” yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan, yang secara strategis terkait dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN1–PN8).

- a. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Terutama Bagi Oap Dan Kelompok Rentan Yang Mudah Akses, Berkualitas Dan Berkeadilan (Misi 1)** memiliki keterkaitan langsung dengan PN1, PN4, dan PN6, yang menekankan penguatan ideologi, pembangunan SDM, serta pemerataan dan pengentasan kemiskinan.
- b. **Pemberdayaan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Potensi Unggulan Yang Berdampak Pada Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Terutama OAP (Misi 2)** sangat berkaitan dengan PN2, PN3, PN5, dan PN6. Fokus nasional pada pengembangan ekonomi berbasis sumber daya dan industri kreatif, serta infrastruktur dan kewirausahaan.
- c. **Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Tata Kelola OTSUS Yang Efektif, Bersih, Partisipatif, Dan Afirmatif (Misi 3)** memiliki hubungan dengan PN7 yang menekankan pada reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Serta dalam konteks OTSUS memiliki hubungan dengan PN1, PN6, dan PN8 Fokus pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), pemerataan pembangunan, dan pelestarian budaya lokal.
- d. **Lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan (Misi 4)** memiliki hubungan dengan PN2 dan PN8 yang menekankan pada pemberdayaan sumber daya alam serta penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan alam.
- e. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kohesi Dan Harmoni Sosial Lintas Etnis, Agama, Dan Golongan Berbasis Kearifan Anim Ha (Misi 5)** selaras dengan PN1 dan PN7. Penguatan ideologi Pancasila dan reformasi hukum serta birokrasi mencerminkan pentingnya stabilitas sosial dan toleransi antarumat beragama sebagai dasar pembangunan yang damai.
- f. **Penguatan Sarana Prasarana Dan Konektivitas Antar Wilayah Terutama Daerah 3T, Pusat Pertumbuhan Berbasis Tata Ruang Yang Inklusif (Misi 6)** berhubungan erat dengan PN3, yang menekankan pengembangan infrastruktur nasional untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, sejalan dengan kebutuhan Papua Selatan untuk wilayah yang terintegrasi dan mudah diakses.

3.3. PRORGAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025-2029

Adapun program prioritas Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029, tergambar dalam Misi Pembangunan Provinsi Papua Selatan, dibawah ini :

1. **MISI 1:** Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan
 - Pendidikan berpola asrama
 - Rumah sakit provinsi
 - Akademi komunitas
 - Sekolah luar biasa (SLB)
 - Kesehatan Gratis (Kartu Jaminan Sehat OAP Selatan bagi penduduk miskin)
2. **MISI 2:** Memberdayakan ekonomi yang inklusif berbasis potensi unggulan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP
 - Jaminan Perlindungan Sosial
 - Pemberdayaan pengusaha OAP
 - Pemberdayaan ekonomi inklusif
 - Pariwisata budaya
 - Pemberdayaan masyarakat dalam PSN (Food Estate)
 - Pembangunan Pasar Mama Papua
3. **MISI 3:** Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola OTSUS yang efektif bersih, partisipatif, dan afirmatif
 - Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan (musrenbang inklusif)
 - Pendamping dan Kader pemberdayaan masyarakat kampung
 - MONEV Pembangunan Terintegrasi dan Terpadu
 - Penguatan terhadap seluruh Organisasi kepemudaan dan perempuan
 - Insentif berbasis kinerja
 - Penguatan Peran Distrik
 - Penataan dan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
 - Penguatan kapasitas DPRP jalur pengangkatan

- pendataan terpilah OAP
 - Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan daerah
 - Roadmap PAD Provinsi Papua Selatan
 - Papua Selatan Satu Data (Data Terpilah OAP)
 - Revitalisasi BLK Provinsi Papua Selatan
4. **MISI 4:** Melestarikan dan mendayagunakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan
- Pemetaan wilayah adat/Masyarakat Hukum Adat
 - Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
 - Penataan kawasan perkantoran PPS
 - Pemberdayaan masyarakat adat dalam pelaksanaan PSN berbasis hayati
 - Roadmap Kajian Banjir
5. **MISI 5:** Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kohesi dan harmoni sosial lintas etnis, agama, dan golongan berbasis kearifan Anim Ha
- Forum komunikasi lintas suku, ras, agama dan etnis
 - Pengembangan pusat pemuda dan olahragwan
 - Pengembangan pusat kebudayaan Anim Ha yang inklusi
 - Festival budaya Anim Ha yang inklusif
6. **MISI 6:** Meningkatkan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah terutama daerah 3T, pusat pertumbuhan berbasis tata ruang yang inklusif
- Penyiapan Sarana Prasarana dalam mendukung Transportasi terpadu dan terintegrasi (darat, sungai, laut, dan udara)
 - Pembangunan dan Peningkatan layanan Infrastruktur fisik, energi, air, dan sosial terutama daerah 3T.

Selain itu, berdasarkan program prioritas diatas terdapat 7 (tujuh) program Super Prioritas Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029 yang dianggap memiliki nilai strategis pembangunan di Papua Selatan diantaranya:

- 1) Rumah Sakit Provinsi
- 2) Kartu Jaminan Sehat Oap Selatan Bagi Penduduk Miskin

- 3) Perlinsos Anak Usia Sekolah
- 4) Penyediaan Tenaga Kerja Terlatih Terutama Oap Dalam Mendukung Pelaksanaan PSN
- 5) Papua Selatan Satu Data dan Pendataan Terpilah
- 6) Pusat Kebudayaan Anim Ha
- 7) Transportasi Terpadu Dan Terintegrasi

Tabel III.6 Program Prioritas Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
"TERWUJUDNYA PAPUA SELATAN YANG BER MARTABAT, AMAN, DAMAI, SEJAHTERA DAN PEMERINTAHAN YANG ASPIRATIF"				
MISI 1: Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan				
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Selatan yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia Kinerja Eco-culture Papua Selatan		
Sasaran 1: Meningkatnya intelegualitas dan karakter anak usia sekolah		Skor Literasi/Numerasi Indeks Modal Manusia (IMM) Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Jumlah Jenis Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sasaran 2: Terwujudnya berkebudayaan maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan	Meningkatnya peran serta masyarakat	Cakupan seni budaya OAP guna	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Kesenian Tradisional	dalam pengembangan kesenian tradisional	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan		
Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Cakupan Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata kelola museum	Cakupan pengelolaan museum yang dikelola	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 3: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
		Indeks Pembangunan Olahraga		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran 4: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup		
		Angka Kematian Ibu		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi		
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
		Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Bayi (0-11 Bulan) Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Olah raga Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage) Prevalensi HIV Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Sasaran 5: Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Cakupan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi yang mendapat pemberdayaan dan peningkatan peran serta dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan perlakuan yang adil, inklusif, dan afirmatif		Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
Sasaran 6: Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat		Indeks Keberfungsian Sosial		
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Cakupan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan sosial afirmatif OAP kewenangan provinsi	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		
Program Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Cakupan korban bencana alam yang mendapat bantuan logistik tanggap darurat	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Cakupan korban bencana alam yang mendapat bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial		
		Cakupan korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial		
Sasaran 7: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IPDG)		
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		
		Indeks Pemenuhan Anak (IPA)		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan Prosentase kelembagaan PUG (Pokja PUG) yg terbentuk di Kab/Kota Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Cakupan Kab/Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
MISI 2: Memberdayakan ekonomi yang inklusif berbasis potensi unggulan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP				
Tujuan 3: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan		Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita Tingkat Kemiskinan Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional		
Sasaran 8: Meningkatnya		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
pusat pertumbuhan ekonomi keunggulan lokal berbasis karakteristik lokal		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
		Nilai Tukar Petani		
		Pendapatan Per Kapita di Wilayah Perbatasan		
		Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi		
		Indeks ekonomi biru (IBEI)		
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah		
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pangan	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Perikanan dan Kelautan	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Perikanan dan Kelautan	
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Perikanan dan Kelautan	
		Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)		
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Angka Konsumsi Ikan	Perikanan dan Kelautan	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan	Pertanian	
		Pertumbuhan Produksi Hortikultura		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pertumbuhan Produksi Komoditas Peternakan	Pertanian	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Pertanian	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Pertanian	
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
		atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Pertanian	
		Persentase Kelembagaan Koperas Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Pertanian	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Pertanian	
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Pertumbuhan Wirausaha Lokal dikawasan perbatasan	Pengelolaan Perbatasan	
Program Pengelolaan Perbatasan Negara	Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan negara	Jumlah pelintas batas yang terlayani oleh pos imigrasi	Pengelolaan Perbatasan	
Sasaran 9: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Orang Asli Papua (OAP)		
		Proporsi Penciptaan lapangan Kerja Formal		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase tenaga kerja OAP yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
		Persentase tenaga kerja OAP yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)		
		Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang dibina		
Program Hubungan Industrial	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlindungnya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian.		Inklusi Keuangan		
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB		
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi		
		Persentase usaha Industri kecil dan mikro yang melakukan inovasi produk, pemasaran, distribusi dan/atau teknologi		
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada Level Provinsi		
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor keluar provinsi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Proporsi UKM Orang Asli Papua (OAP) Ekspor keluar provinsi		
		Pertumbuhan wirausaha penyandang disabilitas		
Program penguatan badan hukum koperasi	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
				Perindustrian dan Perdagangan
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Pertumbuhan wirausaha	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program pengawasan dan pemeriksaamn koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 11: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Nilai investasi PMA/PMDN		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program kerja sama penanaman modal	Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase kerja sama penanaman modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 12: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Cakupan Daya Tarik/Destinasi Wisata yang ditingkatkan Rata-rata lama menginap tamu asing Rata-rata lama menginap tamu domestik	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Tingkat penghunian kamar hotel berbintang	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Tingkat penghunian kamar hotel nonbintang dan akomodasi lainnya		
		Jumlah event pariwisata tahunan		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Cakupan Sumberdaya OAP yang terlibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang memperoleh pembinaan		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi		
		pada even promosi pariwisata di dalam negeri		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran 13: Meningkatkan nilai tambah perdagangan dan daya saing industri		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		
		Tingkat Inflasi		
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor barang	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
dan Barang Penting	barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Perindustrian dan Perdagangan
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, terkini	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MISI 3: Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola OTSUS yang efektif, bersih, partisipatif, dan afirmatif				
Tujuan 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari korupsi, partisipatif, afirmatif, dan profesional		Indeks Reformasi Birokrasi		
		Indeks Pelayanan Publik		
		indeks integritas Papua Selatan		
Sasaran 14: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Nilai SAKIP		
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRPS terhadap Pelayanan Sekretariat DPRPS (skor kepuasan)		
		Tingkat kepuasan masyarakat adat terhadap DPRPS Pengangkatan (skor kepuasan)		
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		
		Indeks Profesionalitas ASN (indeks)		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (indeks)		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik	Statistik	Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persandian	Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian
Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase capaian bantuan kepada masyarakat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus Papua	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/kota yang disusun tepat waktu		
Program Penataan Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Presentase perangkat daerah tepat urusan dan tepat ukuran	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Presentase Rumusan kebijakan pembinaan BUMD dan investasi daerah		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan administari Pembangunan	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD	Sekretariat DPRD	Sekertariat DPRPS
		Persentase Penetapan Ranperda		
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur		
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (indeks)		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Cakupan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Utama Dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua	Menningkatnya peran dan fungsi MRP	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	Majelis Rakyat Papua	Sekertariat Majelis Rakyat Papua Selatan
		Persentase penyelenggaraan tugas dan fungsi MRP dalam urusan Adat, Agama dan Perempuan		
Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
		Persentase Data Kependudukan Orang Asli Papua (OAP)		
		Cakupan data kependudukan dan sosial ekonomi terpilah Orang Asli Papua (OAP)		
Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Administrasi Kependudukan dan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Pencatatan Sipil	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Sasaran 15: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan yang transparan, akuntabel dan inovatif		Opini BPK Atas Laporan Keuangan		
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (level)		
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (indeks)		
		Indeks Pembangunan Statistik (indeks)		
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		
		Indeks persepsi korupsi		
		Indeks Inovasi Daerah		
		Indeks Daya Saing Daerah		
Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kinerja daerah dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		
		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
		Cakupan rewiu dokumen perencanaan lintas kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan OTSUS	Ketepatan penyusunan Rencana Anggaran dan Progam OTSUS		
Penelitian Dan Pengembangan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Cakupan pelaksanaan penelitian dan inovasi pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Penelitian dan Pengembangan	
	Meningkatnya kajian yang termfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
	Meningkatnya kajian yang termfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Provinsi beserta Peraturan Gubernur Penjabarannya	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Presentasi Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D		
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi		
		Presentase Raperda/Raperkada Kab tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu		
		Presentase Raperda/Raperkada Kab tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu		
		Persentase Alokasi Belanja Bidang Pendidikan		
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
		Persentase Penurunan SILPA		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Aset Tanah yang tersertifikasi		
		Persentase dokumen pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Pengawasan	Insepektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN MCP/MSCP	Pengawasan	Insepektorat Daerah
Sasaran 16: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian kampung		Indeks Desa Membangun (IDM) Jumlah kampung adat Cakupan kabupaten/kota yang menetapkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) (persen)		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Sasaran 17: Meningkatkan kemampuan fiskal daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional Total Dana Pihak Ketiga/PDRB		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
MISI 4: Melestarikan dan mendayagunakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan				

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Tujuan 5: Meningkatkan keberlangsungan ekosistem dan biodiversitas, sekaligus peran wilayah adat sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan		
Sasaran 18: Meningkatnya pengelolaan keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati dan peran wilayah adat dalam pembangunan Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.		Persentase Tutupan Lahan		
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Cakupan masyarakat OAP dan penyuluh serta polhut yang mendapatkan pemberberdayaan kehutanan	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Sasaran 19: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Penurunan Intensitas Emisi GRK		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan kabupaten/kota yang dilaksanakan uji kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Sasaran 20: Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		Porsi EBT dalam Bauran Energi		
Program Pengelolaan Aspek Geologi	Meningkatnya tata kelola kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota		
Program Pengelolaan	Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Mineral dan Batubara		Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR		dan Sumber Daya Mineral
Program Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Kuota BBM (JBT dan JBKP)	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Kuota Solar		
		Jumlah Kuota Minyak Tanah		
		Jumlah Kuota Petalite		
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Porsi EBT dalam Bauran Energi		
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
MISI 5: Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kohesi dan harmoni sosial lintas etnis, agama, dan golongan berbasis kearifan Ha Anim				
Tujuan 6: Menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan resilien dalam menghadapi tantangan keberagaman dan dinamika sosial		Indeks Demokrasi Indonesia		
		Indeks Harmoni Indonesia		
Sasaran 21: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang dibina dan diawasi	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran 22: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Tingkat kondusivitas wilayah		
		Indeks Resiko Bencana (IRB)		
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		
		Rasio Kewirausahaan Daerah		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, dan Pembinaan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
MISI 6: Meningkatkan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah terutama daerah 3T, pusat pertumbuhan berbasis tata ruang yang inklusif				
Tujuan 7: Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata		Indeks Kemahalan Konstruksi		
Sasaran 23: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan handal		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)		
		Cakupan rumah yang dapat mengakses listrik (PLN dan Non PLN)		
		Konsumsi Listrik per Kapita		
		Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak		

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Indeks Tranformasi Digital Nasional Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)* ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa		
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Cakupan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak Rasio rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan dan perkotaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio bangunan ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Cakupan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Status dan Tingkat Kelengkapan dokumen perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sasaran 24: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Persentase peningkatan perlindungan kawasan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Urusan Pemerintah	OPD
		pemukiman rawan banjir		
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob		
		Persentase luas layanan irigasi multikomoditas		
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)		
Sasaran 25: Terwujudnya layanan transportasi (udara, laut, darat) yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Perhubungan	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Penerbangan	Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	Perhubungan	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	Perhubungan	Dinas Perhubungan

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH dan KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.1.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Papua Selatan tahun 2025 – 2029 didukung dengan program perangkat daerah Provinsi Papua Selatan yang tertuang dalam Bab VI Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 - 2029. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

Tabel 0.1 Program Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tahun	71,68	72,04	215.36 5.000. 000	72,40	218.595. 475.000	72,76	221.874. 407.000	73,12	225.202. 523.000	73,49	228.580.5 61.000	73,86	232.009.2 69.000
Program Pengembang an Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	Mata Pelajar an	N/A	23	595.00 0.000	26	603.925. 000	30	612.984. 000	35	622.179. 000	40	631.512.0 00	46	640.985.0 00
Program Pengembang an Bahasa Dan Sastra	Terlestarikan nya bahasa dan sastra daerah	Jumlah Jenis Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	Modul	N/A	15	1.180. 000.00 0	17	1.197.70 0.000	20	1.215.66 6.000	23	1.233.90 1.000	26	1.252.410. 000	30	1.271.196. 000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
Program Pemenuhan	Meningkatnya kualitas	Rasio Daya Tampung		N/A	1:1	125.61	1:1		1:2		1:3		1:5		1:5	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	kesehatan perorangan dan masyarakat	Rumah Sakit Rujukan				7.000.000		127.501.255.000		129.413.774.000		131.354.981.000		133.325.306.000		135.325.186.000
		Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi	Persen	N/A	100,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Jumlah Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran Hidup	438	424,00		377,00		335,00		298,00		265,00		260,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Jumlah Kematian Bayi (0-11 Bulan)	per 1000 kelahiran Hidup	N/A	13,00		12,00		11,00		10,00		9,00		8,00	
		Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Kabupaten /	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja														
		Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Olah raga	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	N/A	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	N/A	50,00		51,00		52,00		53,00		54,00		55,00	
		Prevalensi HIV	Persen	N/A	50,00		51,00		52,00		53,00		54,00		55,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk		N/A	64,03		64,03		62,00		60,00		60,00		60,00	
		Jumlah Kabupaten/K ota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Daerah	1	4		4		4		4		4		4	
		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	45,6	55,00		60,00		65,00		70,00		73,00		75,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	10	10,00	7.932. 000.00 0	15,00	8.050.98 0.000	20,00	8.171.74 5.000	25,00	8.294.32 1.000	30,00	8.418.736. 000	35,00	8.545.017. 000
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	N/A	100,0 0	2.174. 000.00 0	100,0 0	2.206.61 0.000	100,0 0	2.239.70 9.000	100,0 0	2.273.30 5.000	100,0 0	2.307.405. 000	100,0 0	2.342.016. 000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
	dan makanan minuman															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																
Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Persen	7,58	18,10	21.344 .000.0 00	19,00	21.664.1 60.000	19,95	21.989.1 22.000	20,95	22.318.9 59.000	22,00	22.653.74 3.000	23,10	22.993.54 9.000
		Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi														
Program Pengembang an Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Cakupan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Persen	12,58	12,58	12.288 .000.0 00	18,87	12.472.3 20.000	21,38	12.659.4 05.000	23,27	12.849.2 96.000	23,90	13.042.03 5.000	23,90	13.237.66 6.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak	Persen	6,73	6,73	26.064 .000.0 00	10,10	26.454.9 60.000	15,15	26.851.7 84.000	22,73	27.254.5 61.000	34,09	27.663.37 9.000	45,32	28.078.33 0.000
		Ratsio rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan dan perkotaan	Persen	6,73	6,73		10,10		15,15		22,73		34,09		45,32	
Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	7,58	7,58		7,96	12.000.0 00.000	8,36	12.180.0 00.000	8,78	12.362.7 00.000	9,22	12.548.14 1.000	9,68	12.736.36 3.000
Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio bangunan ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persen	N/A	8,97	188.74 7.000. 000	8,97	191.578. 205.000	9,42	194.451. 878.000	9,89	197.368. 656.000	10,38	200.329.1 86.000	9,29	203.334.1 24.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Cakupan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Persen	N/A	9,35	16.419.000.000	14,03	16.665.285.000	16,13	16.915.264.000	24,20	17.168.993.000	36,29	17.426.528.000	49,95	17.687.926.000
Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	26,28	27,81	121.560.000.000	29,43	123.383.400.000	31,16	125.234.151.000	33,01	127.112.663.000	34,99	129.019.353.000	37,10	130.954.643.000
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Persen	N/A	20,00	10.570.000.000	23,47	10.728.550.000	24,64	10.889.478.000	25,88	11.052.820.000	26,01	11.218.612.000	27,94	11.386.891.000
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Status dan Tingkat Kelengkapan dokumen perencanaan tata ruang	Persen	N/A	10,00	17.445.000.000	11,37	17.706.675.000	17,06	17.972.275.000	25,59	18.241.859.000	38,39	18.515.487.000	41,40	18.793.219.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		wilayah Provinsi Papua Selatan														
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	Persen	74,41	76,27	35.916 .000.0 00	78,18	36.454.7 40.000	80,13	37.001.5 61.000	82,13	37.556.5 84.000	84,19	38.119.93 3.000	86,29	38.691.73 2.000
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan pemukiman rawan banjir	Persen	18,58	12,55		18,96		20,86		22,75		24,64		26,54	
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen	13,65	8,89		14,29		17,46		20,63		23,81		26,98	
		Persentase luas layanan irigasi multikomodit as	Persen	15,90	13,15		19,82		21,17		22,05		23,53		25,89	
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Persen	6,4	3,8		14,4		21		24,6		27		28,5	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen	N/A	10,00	1.026.000.000	25,00	1.041.390.000	25,00	1.057.011.000	25,00	1.072.866.000	25,00	1.088.959.000	25,00	1.105.293.000
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	10,00	500.000.000	25,00	507.500.000	25,00	515.113.000	25,00	522.840.000	25,00	530.683.000	25,00	538.643.000
Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	N/A	10,00	2.000.000.000	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00		20,00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	25,00	33,30	1.000.000.000	40,00	1.015.000.000	42,90	1.030.225.000	50,00	1.045.678.000	66,70	1.061.363.000	80,00	1.077.283.000
Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	76,00	77,52	2.625.000.000	79,07	2.664.375.000	80,65	2.704.341.000	82,26	2.744.906.000	83,91	2.786.080.000	85,59	2.827.871.000
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Presentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, dan Pembinaan	Persen	20,00	40,00	322.000.000	42,90	326.830.000	50,00	331.732.000	66,70	336.708.000	71,40	341.759.000	83,30	346.885.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi	Cakupan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan	Persen	N/A	30,00	1.878.000.000	45,00	1.906.170.000	60,00	1.934.763.000	75,00	1.963.784.000	85,00	1.993.241.000	100,00	2.023.140.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
	kesejahteraan sosial	provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas														
		Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persen	N/A	30,00		45,00		60,00		75,00		85,00		100,00	
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	86,21	100,00	3.872.000.000	100,00	3.930.080.000	100,00	3.989.031.000	100,00	4.048.866.000	100,00	4.109.599.000	100,00	4.171.243.000
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	33,23	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Urusan/ Ururan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		dasarnya di dalam panti														
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	N/A	30,00		45,00		60,00		75,00		85,00		100,00	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan sosial afirmatif OAP kewenangan provinsi	Persen	2,87	50,00	1.100.000.000	60,00	1.116.500.000	70,00	1.133.248.000	80,00	1.150.247.000	90,00	1.167.501.000	100,00	1.185.014.000
		Persentase PMKS yang memperoleh	Persen	10,02	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		bantuan sosial														
Program Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Cakupan korban bencana alam yang mendapat bantuan logistik tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	1.231.000.000	100,00	1.249.465.000	100,00	1.268.207.000	100,00	1.287.230.000	100,00	1.306.538.000	100,00	1.326.136.000
		Cakupan korban bencana alam yang mendapat bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Cakupan korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitas nya	Persen	50,00	55,00	1.577. 000.00 0	60,00	1.600.65 5.000	63,00	1.624.66 5.000	67,00	1.649.03 5.000	70,00	1.673.771. 000	73,00	1.698.878. 000
		Persentase tenaga kerja OAP yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Persen	33,00	33,50		35,00		38,00		41,00		44,00		47,00	
		Persentase tenaga kerja OAP yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persen	20,00	22,50		25,00		28,00		32,00		37,00		41,00	
		Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang dibina	Persen													
Program Hubungan Industrial	Meningkatnya a pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak	Orang	19.795	22.00 0	101.00 0.000	25.00 0	102.515. 000	30.00 0	104.053. 000	35.00 0	105.614. 000	40.00 0	107.198.0 00	45.00 0	108.806.0 00

Urusan/ Urutan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Pekerja dan Dialog Sosial														
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlindungnya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	19.800	21.000	152.000.000	27.000	154.280.000	32.000	156.594.000	37.000	158.943.000	42.000	161.327.000	47.000	163.747.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota				626.000.000		635.390.000		644.921.000		654.595.000		664.414.000		674.380.000
		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	N/A	15,00		15,00		15,00		20,00		25,00		33,00	
		Prosentase kelembagaan PUG (Pokja PUG) yg terbentuk di Kab/Kota	Persen	25,00	25,00		33,00		40,00		55,00		64,00		75,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Persentase OPD/Lembag a Pemerintah yang Mengimpleme ntasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	N/A	2,50		3,50		4,62		5,82		6,53		7,78	
Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen													
Program Pemberdayaa n Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya pemberdayaa n dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbinga n, Pengembanga n, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persen			2.988. 000.00 0		3.032.82 0.000		3.078.31 2.000		3.124.48 7.000		3.171.354. 000		3.218.924. 000
Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan	Persen	52,40	65,20		68,90	300.000. 000	72,40	304.500. 000	79,60	309.068. 000	82,50	313.704.0 00	85,40	318.410.0 00

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
	eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Layanan Komprehensif														
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	40,89	41,50		48,50		55,20		62,10		65,20		71,30	
Program Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	44,53	45,30		46,20	400.000. 000	48,90	406.000. 000	50,60	412.090. 000	55,70	418.271.0 00	60,20	424.545.0 00
		Cakupan Kab/Kota Layak Anak	Persen	N/A	N/A		33,00		45,00		57,00		68,00		75,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen			203.00 0.000		206.045. 000		209.136. 000		212.273. 000		215.457.0 00		218.689.0 00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN																
Program Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Persen	N/A		563.00 0.000		571.445. 000		580.017. 000		588.717. 000		597.548.0 00		606.511.0 00

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persen	N/A				150.000.000		152.250.000		154.534.000		156.852.000		159.205.000
Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen	N/A		983.000.000		997.745.000		1.012.711.000		1.027.902.000		1.043.321.000		1.058.971.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN																
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	54,00	18,00	507.000.000		514.605.000	18,00	522.324.000	10,00	530.159.000		538.111.000		546.183.000
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan kabupaten/kota yang dilaksanakan uji kualitas lingkungan hidup	Persen	100,00	100,00	608.000.000	100,00	617.120.000	100,00	626.377.000	100,00	635.773.000	100,00	645.310.000	100,00	654.990.000
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Persen					33.000.000		33.495.000		33.997.000		34.507.000		35.025.000
Program Pengendalian	Meningkatnya penanganan	Persentase Limbah B3	Persen	99,45	99,56	715.200.000	99,67	725.928.000	99,78	736.817.000	99,89	747.869.000	100,00	759.087.000	100,00	770.473.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	yang Terkelola														
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	90,00	97,00	304.00 0.000	98,00	308.560. 000	98,00	313.188. 000	99,00	317.886. 000	100,0 0	322.654.0 00	100,0 0	327.494.0 00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen			355.00 0.000		360.325. 000		365.730. 000		371.216. 000		376.784.0 00		382.436.0 00
Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	39,40	41,37		43,44	300.000. 000	45,61	304.500. 000	47,89	309.068. 000	50,29	313.704.0 00	52,80	318.410.0 00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependuduka n Digital	Persen	58,40	62,00		65,60	1.064.60 5.000	69,20	1.080.57 4.000	72,80	1.096.78 3.000	76,40	1.113.235. 000	80,00	1.129.934. 000
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	23,78	24,25		25,40		26,55		27,70		28,85		30,00	
		Persentase Data Kependuduka n Orang Asli Papua (OAP)	Persen	68,69	79,00		79,31		79,62		79,93		80,24		80,55	
		Cakupan data kependuduka n dan sosial ekonomi terpilah Orang Asli Papua (OAP)	Persen	20,60	23,69		27,24		31,33		36,03		41,43		47,65	
Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	1,01	2,00		2,12	1.475.00 0.000	2,24	1.497.12 5.000	2,36	1.519.58 2.000	2,48	1.542.376. 000	2,60	1.565.512. 000
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persen	50,49	51,00		52,80		54,60		56,40		58,20		60,00	

Urusan/ Ururan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		bagi yang Melaporkan														
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	38,67	39,00		41,20		43,40		45,60		47,80		50,00	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	58,52	59,00		59,20		59,40		59,60		59,80		60,00	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	30,00	30,00		38,00	2.474.900.000	46,00	2.512.024.000	54,00	2.549.704.000	62,00	2.587.950.000	70,00	2.626.769.000
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	12,50	13,00		13,00	30.000.000	13,00	30.450.000	13,00	30.907.000	13,00	31.371.000	13,00	31.842.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG																
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang	Persen	0,05	5,30		5,42		5,54		5,66		5,78		5,90	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
	pemerintahan desa	Ditingkatkan Kapasitasnya														
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	0,05	5,20		5,30		5,40		5,50		5,60		5,70	
Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan a n Desa (LKD)	Persen	0,04	3,00	2.765.000.000	4,00	2.806.475.000	5,00	2.848.572.000	6,00	2.891.301.000	7,00	2.934.671.000	8,00	2.978.691.000
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	0,13	13,00		14,00		15,00		16,00		17,00		18,00	
Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	0,27	27,00		28,00		29,00		30,00		31,00		32,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
Program Pengendalian Penduduk	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Rate	2,70	2,23	1.419.000.000	2,18	1.440.285.000	2,13	1.461.889.000	2,13	1.483.817.000	2,13	1.506.074.000	1,97	1.528.665.000
		Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,45	1,49		1,52		1,56		1,60		1,64		1,68	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	N/A	70,00	646.000.000	72,00	655.690.000	73,00	665.525.000	74,00	675.508.000	74,00	685.641.000	74,00	695.926.000
		Cakupan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen	N/A	30,00		31,50		34,50		36,50		39,00		39,00	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	N/A	55,00	3.027.000.000	55,50	3.072.405.000	56,50	3.118.491.000	56,50	3.165.268.000	57,75	3.212.747.000	57,75	3.260.938.000
		Cakupan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi yang mendapat pemberdayaan dan peningkatan peran serta dalam	Persen	N/A	4,46		8,01		21,54		11,96		12,58		12,58	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
DINAS PERHUBUNGAN																
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Persen	N/A	40,00	2.026.000.000	49,00	2.056.390.000	58,00	2.087.236.000	67,00	2.118.545.000	76,00	2.150.323.000	85,00	2.182.578.000
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	51,84	60,81		61,65		62,48		63,32		64,16		65,00	
Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Persen	9,09	13,64		27,27	2.100.000.000	40,91	2.131.500.000	54,55	2.163.473.000	68,18	2.195.925.000	81,82	2.228.864.000
Program Pengelolaan Penerbangan	Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	Persen	19,23	23,08		38,46	1.300.000.000	53,85	1.319.500.000	69,23	1.339.293.000	84,62	1.359.382.000	100,00	1.379.773.000
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api	Cakupan perlindungan kereta api yang ditangani	Persen	N/A	5,00		9,00		13,00		17,00		21,00		25,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Indeks	1,61	1,80	5.570. 000.00 0	2,02	5.653.55 0.000	2,26	5.738.35 3.000	2,53	5.824.42 8.000	2,84	5.911.794. 000	3,18	6.000.471. 000
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persen			3.520. 000.00 0		3.572.80 0.000		3.626.39 2.000		3.680.78 8.000		3.736.000. 000		3.792.040. 000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	26,50	34,00	1.013. 000.00 0	41,50	1.028.19 5.000	49,00	1.043.61 8.000	56,50	1.059.27 2.000	64,00	1.075.161. 000	71,50	1.091.288. 000
Program Pengembang an UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor keluar provinsi	Persen			2.026. 000.00 0		2.056.39 0.000		2.087.23 6.000		2.118.54 5.000		2.150.323. 000		2.182.578. 000
		Proporsi UKM Orang Asli Papua (OAP)	Persen	N/A	0,50		3,74		6,98		10,22		13,46		16,70	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Ekspor keluar provinsi														
		Pertumbuhan wirausaha penyandang disabilitas	Persen													
Program penguatan badan hukum koperasi	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen	N/A	20,00		36,00		52,00		68,00		84,00		100,00	
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	N/A	40,00		52,00		64,00		76,00		88,00		100,00	
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	17,00	24,67		33,00	1.050.000.000	41,33	1.065.750.000	49,67	1.081.736.000	58,00	1.097.962.000	66,33	1.114.431.000
		Pertumbuhan wirausaha	Persen	0,45	0,45		0,81		1,17		1,53		1,89		2,25	
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	N/A	65,00		72,00	400.000.000	79,00	406.000.000	86,00	412.090.000	93,00	418.271.000	100,00	424.545.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	99,50	20,00	1.763.000.000	36,00	1.789.445.000	52,00	1.816.287.000	68,00	1.843.531.000	84,00	1.871.184.000	100,00	1.899.252.000
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	50,00	58,33	595.000.000	66,67	603.925.000	75,00	612.984.000	83,33	622.179.000	91,67	631.512.000	100,00	640.985.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	79,70	83,08	959.000.000	86,47	973.385.000	89,85	987.986.000	93,23	1.002.806.000	96,62	1.017.848.000	100,00	1.033.116.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	50,00	58,33	526.000.000	66,67	533.890.000	75,00	541.898.000	83,33	550.026.000	91,67	558.276.000	100,00	566.650.000
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	442,50	100,00		100,00	75.000.000	100,00	76.125.000	100,00	77.267.000	100,00	78.426.000	100,00	79.602.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program kerja sama penanaman modal	Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase kerja sama penanaman modal	Persen	0,00	25,00		40,00		55,00		70,00		85,00		100,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	85,00	95		100		110		120		130		140	
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	6,00	10		15		20		25		30		35	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masrakat dalam kepramukaan	Persen	9,15	9150		9200		9250		9.300		9350		9400	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	2,6		2,81		3,03		3,28		3,54		3,82	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Skor	N/A	1	218.000.000	1	221.270.000	2	224.589.000	2	227.958.000	3	231.377.000	3	234.848.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan				3.592.000.000		3.645.880.000		3.700.568.000		3.756.077.000		3.812.418.000		3.869.604.000
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Cakupan seni budaya OAP guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan				3.079.000.000		3.125.185.000		3.172.063.000		3.219.644.000		3.267.939.000		3.316.958.000
Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya akses masyarakat	Cakupan Jumlah Sarana dan				3.530.000.000		3.582.950.000		3.636.694.000		3.691.244.000		3.746.613.000		3.802.812.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
	terhadap informasi sejarah	Prasarana Pembinaan Sejarah														
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Cakupan Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan guna Perlindungan, Pengembangan , Pemanfaatan dan Pembinaan				8.825.000.000		8.957.375.000		9.091.736.000		9.228.112.000		9.366.534.000		9.507.032.000
Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata kelola museum	Cakupan pengelolaan museum yang dikelola	Persen	0	0	3.284.000.000	0	3.333.260.000	0	3.383.259.000	1	3.434.008.000	1	3.485.518.000	1	3.537.801.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
SEKRETARIAT DAERAH																
Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	N/A	54,82	1.180.000.000	57,56	1.197.700.000	60,44	1.215.666.000	63,46	1.233.901.000	66,63	1.252.410.000	69,97	1.271.196.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Laut, pesisir, dan pulau- pulau kecil sebagai nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	9,11	9,57	1.516. 000.00 0	10,04	1.538.74 0.000	10,55	1.561.82 1.000	11,07	1.585.24 8.000	11,63	1.609.027. 000	12,21	1.633.162. 000
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.282. 130	18.55 6.362	2.114. 000.00 0	18.83 4.707	2.145.71 0.000	19.11 7.228	2.177.89 6.000	19.40 3.986	2.210.56 4.000	19.69 5.046	2.243.722. 000	19.99 0.472	2.277.378. 000
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	117,56	117,9 1		118,2 7		118,6 2		118,9 8		119,3 3		119,6 9	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	901.80 0	915.3 27		929.0 57	350.000. 000	942.9 93	355.250. 000	957.1 38	360.579. 000	971.4 95	365.988.0 00	986.0 67	371.478.0 00
		Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	104,37	104,6 8		105,0 0		105,3 1		105,6 3		105,9 4		106,2 6	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaraga man hayati	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Ka pita/Ta hun	N/A	40,00	750.00 0.000	42,00	761.250. 000	44,10	772.669. 000	46,31	784.259. 000	48,62	796.023.0 00	51,05	807.963.0 00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																
Program Peningkatan	Meningkatnya daya tarik	Cakupan Daya	objek	6	6		7		8		9		10		40	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Daya Tarik Destinasi Pariwisata	destinasi pariwisata	Tarik/Destina si Wisata yang ditingkatkan				170.00 0.000		172.550. 000		175.138. 000		177.765. 000		180.431.0 00		183.137.0 00
		Rata-rata lama menginap tamu asing	hari	2	2		3		4		5		6		20	
		Rata-rata lama menginap tamu domestik	hari	3,00	3		4		5		6		7		25	
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Tingkat penghunian kamar hotel berbintang	tahun	15000	1500 0	323.00 0.000	1600 0	327.845. 000	1700 0	332.763. 000	1800 0	337.754. 000	1900 0	342.820.0 00	8500 0	347.962.0 00
		Tingkat penghunian kamar hotel nonbintang dan akomodasi lainnya														
		Jumlah event pariwisata tahunan	Event	9	9		10		11		12		13		55	
Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Cakupan Sumberdaya OAP yang telibat dalam pengembang an pariwisata kegiatan	orang	110	110	451.00 0.000	120	457.765. 000	121	464.631. 000	122	471.600. 000	123	478.674.0 00	596	485.854.0 00

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Kepariwisataa n dan ekonomi kreatif														
		Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang memperoleh pembinaan	orang	30	35		37		38		39		40		189	
		Jumlah industri parwisata daerah yang berpartisipasi														
		pada even promosi parwisata di dalam negeri	orang	160	160		162		163		164		165		814	
Program Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapsitas SDM parwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan / lestari yang di berdayakan				1.345. 000.00 0		1.365.17 5.000		1.385.65 3.000		1.406.43 8.000		1.427.535. 000		1.448.948. 000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Penyediaan Dan Pengembang n Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan	Ton/H a	4,57	4,80	4.103. 000.00 0	5,04	4.164.54 5.000	5,29	4.227.01 3.000	5,55	4.290.41 8.000	5,83	4.354.774. 000	6,12	4.420.096. 000
		Pertumbuhan Produksi Hortikultura	Persen													
Program Penyediaan Dan Pengembang n Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pertumbuhan Produksi Komoditas Petrnakan	Persen													
Program Penyediaan Dan Pengembang n Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha			1.870. 000.00 0		1.898.05 0.000		1.926.52 1.000		1.955.41 9.000		1.984.750. 000		2.014.521. 000
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen			486.00 0.000		493.290. 000		500.689. 000		508.199. 000		515.822.0 00		523.559.0 00
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor	Persen													

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Kontrol Veteriner)														
Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen			957.00 0.000		971.355. 000		985.925. 000		1.000.71 4.000		1.015.725. 000		1.030.961. 000
		Persentase Kelembagaan Koperas Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN																
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaa n Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Cakupan masyarakat OAP dan penyuluh serta polhut yang mendapatkan pemberberday aan kehutanan	Persen	10,00	15,00	2.955. 000.00 0	20,00	2.999.32 5.000	25,00	3.044.31 5.000	30,00	3.089.98 0.000	35,00	3.136.330. 000	35,00	3.183.375. 000
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Persen	9,00	11,00	2.955. 000.00 0	13,00	2.999.32 5.000	14,00	3.044.31 5.000	15,00	3.089.98 0.000	17,00	3.136.330. 000	19,00	3.183.375. 000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Meningkatnya tata kelola kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/K ota	m ³			904.00 0.000		917.560. 000		931.323. 000		945.293. 000		959.472.0 00		973.864.0 00
		Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/K ota	km ³													
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Hektar	N/A	5,00		24,00	20.000.0 00	43,00	20.300.0 00	62,00	20.605.0 00	81,00	20.914.00 0	100,0 0	21.228.00 0
		Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Dokum en	4	8,00		16,40		24,80		33,20		41,60		50,00	
Program Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Kuota BBM (JBT dan JBKP)	KL					70.000.0 00		71.050.0 00		72.116.0 00		73.198.00 0		74.296.00 0
		Jumlah Kuota Solar	KL	43.383	47.26 2		72.90 6		98.55 0		124.1 94		149.8 38		175.4 82	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Jumlah Kuota Minyak Tanah	KL	21.673	19.864		30.642		41.420		52.197		62.975		73.753	
		Jumlah Kuota Petalite	KL	69.702	75.124		115.885		156.646		197.407		238.168		278.929	
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	RT	28.488	30.424		30.726	157.500.000	31.026	159.863.000	31.326	162.261.000	31.626	164.695.000	31.926	167.165.000
		Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	TAD	28,00		29,00		30,00		31,00		31.5		32,00	
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	Persen	53,00	55.53		58,00	5.050.000.000	60,00	5.125.750.000	63,00	5.202.636.000	70,00	5.280.676.000	75,00	5.359.886.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	N/A	65,00	564.000.000	72,00	572.460.000	79,00	581.047.000	86,00	589.763.000	93,00	598.609.000	100,00	607.588.000
Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang	Nilai Ekspor barang	Persen			308.000.000		312.620.000		317.309.000		322.069.000		326.900.000		331.804.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
	berorientasi ekspor															
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persen	N/A	45,00	1.129.000.000	56,00	1.145.935.000	67,00	1.163.124.000	78,00	1.180.571.000	89,00	1.198.280.000	100,00	1.216.254.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	N/A	60,00	1.950.000.000	68,00	1.979.250.000	76,00	2.008.939.000	84,00	2.039.073.000	92,00	2.069.659.000	100,00	2.100.704.000
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	Persen	19,78	26,09	3.181.000.000	31,49	3.228.715.000	36,89	3.277.146.000	42,29	3.326.303.000	47,70	3.376.198.000	53,10	3.426.841.000
		Pertumbuhan jumlah industri	Persen													

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		sedang dan besar														
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	N/A	65,00	1.077. 000.00 0	72,00	1.093.15 5.000	79,00	1.109.55 2.000	86,00	1.126.19 5.000	93,00	1.143.088. 000	100,0 0	1.160.234. 000
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, terkini	Persen	1,76	3,50		5,38		7,26		9,14		11,02		12,90	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	37,9	19,42	570.00 0.000	19,12	578.550. 000	18,57	587.228. 000	18,00	596.036. 000	17,06	604.977.0 00	16,00	614.052.0 00
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen			751.00 0.000		762.265. 000		773.699. 000		785.304. 000		797.084.0 00		809.040.0 00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
SEKRETARIAT DAERAH																
SEKRETARIAT DAERAH																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase capaian bantuan kepada masyarakat	Persen			1.501.000.000		1.523.515.000		1.546.368.000		1.569.564.000		1.593.107.000		1.617.004.000
Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus Papua	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan , Otonomi Daerah dan Kerjasama daerah	Persen			25.654.000.000		26.038.810.000		26.429.392.000		26.825.833.000		27.228.220.000		27.636.643.000
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen			839.000.000		851.585.000		864.359.000		877.324.000		890.484.000		903.841.000
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	3,31	2,60		3,31		3,40		3,50		3,60		3,70	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang difasilitasi	Persen	N/A	100,0 0	2.159.000.000	100,0 0	2.191.385.000	100,0 0	2.224.256.000	100,0 0	2.257.620.000	100,0 0	2.291.484.000	100,0 0	2.325.856.000
		Persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/k ota yang disusun tepat waktu	Persen	100,00	100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0	
Program Penataan Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Presentase perangkat daerah tepat urusan dan tepat ukuran	Persen	100,00	100,0 0	500.000.000	100,0 0	507.500.000	100,0 0	515.113.000	100,0 0	522.840.000	100,0 0	530.683.000	100,0 0	538.643.000
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian , Perindustrian dan Perdagangan	Persen	16,67	16,67	265.000.000	45,00	268.975.000	50,00	273.010.000	75,00	277.105.000	100,0 0	281.262.000	100,0 0	285.481.000
		Presentase Rumusan	Persen	N/A	50,00		50,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		kebijakan pembinaan BUMD dan investasi daerah														
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan administari Pembangunan	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna n	Persen	50,00	80,00	393.000.000	100,00	398.895.000	100,00	404.878.000	100,00	410.951.000	100,00	417.115.000	100,00	423.372.000
SEKRETARIAT DPRD																
SEKRETARIAT DPRS																
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Wakt u	12.830.000.000	Tepat Wakt u	13.022.450.000	Tepat Wakt u	13.217.787.000	Tepat Wakt u	13.416.054.000	Tepat Wakt u	13.617.295.000	Tepat Wakt u	13.821.554.000
		Persentase Penetapan Ranperda	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
PERENCANAAN																
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH																
Program Perencanaan	Meningkatnya kualitas	Persentase kinerja	Persen	N/A	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan daerah	daerah dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna n Darah				11.124 .000.0 00		11.290.8 60.000		11.460.2 23.000		11.632.1 26.000		11.806.60 8.000		11.983.70 7.000
		Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100,00	100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0	
		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100,00	100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembanguna n daerah	Persen													
		Cakupan reviu dokumen perencanaan lintas kabupaten/k ota di Provinsi	Persen	100,00	100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Papua Selatan														
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100,00	100,00	16.088.000.000	100,00	16.329.320.000	100,00	16.574.260.000	100,00	16.822.874.000	100,00	17.075.217.000	100,00	17.331.345.000
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan OTSUS	Ketepatan penyusunan Rencana Anggaran dan Prorgam OTSUS	Persen	50,00	50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KEUANGAN																
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH																

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata anggaran, perbendahara an, akuntansi dan pelaporan	Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Provinsi beserta Peraturan Gubernur Penjabaranny a	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Wakt u	173.07 4.000. 000	Tepat Wakt u	175.670. 110.000	Tepat Wakt u	178.305. 162.000	Tepat Wakt u	180.979. 739.000	Tepat Wakt u	183.694.4 35.000	Tepat Wakt u	186.449.8 52.000
		Presentasi Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen	98,00	100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	waktu	Tepat Waktu	Tepat Wakt u		Tepat Wakt u		Tepat Wakt u		Tepat Wakt u		Tepat Wakt u		Tepat Wakt u	
		Presentase Raperda/Rap erkada Kab tentang APBD	Persen	100,00	100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		dan Perubahan APBD yang dievaluasi/dis ahkan tepat waktu														
		Presentase Raperda/Rap erkada Kab tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi/dis ahkan tepat waktu	Persen	100,00	100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0	
		Persentase Alokasi Belanja Bidang Pendidikan	Persen	22,18	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	41,00	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib	Persen	82,62	85,00		89,00		92,00		95,00		95,00		95,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
		Pelayanan Dasar														
		Persentase Penurunan SILPA	Persen	22,80	20,00		18,00		15,00		12,00		11,00		11,00	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap				1.231.000.000		1.249.465.000		1.268.207.000		1.287.230.000		1.306.538.000		1.326.136.000
		Presentase Aset Tanah yang tersertifikasi	Persen	25	50,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase dokumen pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	87,5	95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Presentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen	48,85	3,04	4.823.000.000	3,04	4.895.345.000	3,04	4.968.775.000	3,03	5.043.307.000	3,03	5.118.957.000	3,03	5.195.741.000
KEPEGAWAIAN																
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
	Meningkatnya kualitas layanan	Cakupan penanganan pelayanan	Persen	100,00	100,00		100,00	1.547.875.000	100,00	1.571.093.000	100,00	1.594.659.000	100,00	1.618.579.000	100,00	1.642.858.000

Urusan/ Ururan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Kepegawaian Daerah	administrasi kepegawaian	kepegawaian daerah				1.525. 000.00 0										
	Meningkatnya pengembang an kompetensi ASN	Cakupan penyelenggar aan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur	Persen	10,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Indeks Profesionalita s ASN Dimensi Kompetensi (indeks)	Indeks	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
Program Pengembang an Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembang an kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Cakupan ASN yang mengikuti pengembang an kompetensi SDM	Persen	10,00	10,00	2.579. 000.00 0	10,00	2.617.68 5.000	10,00	2.656.95 0.000	10,00	2.696.80 4.000	10,00	2.737.256. 000	10,00	2.778.315. 000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH																
Penelitian Dan Pengembang an	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam	Cakupan pelaksanaan penelitian dan inovasi pembanguna n daerah	Persen	N/A	50,00	11.153 .576.0 00	75,00	11.320.8 80.000	100,0 0	11.490.6 93.000	100,0 0	11.663.0 53.000	100,0 0	11.837.99 9.000	100,0 0	12.015.56 9.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
	perencanaan pembangunan															
Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset	Persen	N/A	25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00	

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
	dan inovasi di daerah	dan Inovasi di Daerah														
PENGELOLAAN PERBATASAN																
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH																
Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Pertumbuhan Wirausaha Lokal dikawasan perbatasan	Persen													
Program Pengelolaan Perbatasan Negara	Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan negara	Jumlah pelintas batas yang terlayani oleh pos imigrasi	Orang													
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
INSPEKTORAT DAERAH																
INSPEKTORAT																
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2,54	2,8	4.047.508.000	3,00	4.108.221.000	3,00	4.169.844.000	3,00	4.232.392.000	3,00	4.295.878.000	3,00	4.360.316.000
		Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	85,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN	Persen	100,00	95,00	2.775.600.000	95,00	2.817.234.000	95,00	2.859.493.000	95,00	2.902.385.000	95,00	2.945.921.000	95,00	2.990.110.000

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
n Dan Asistensi		MCP/MSCP	Persen	65,00	65,00		67,00		68,00		69,00		70,00		70,00	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembang n Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembang n etika serta budaya politik				252.00 0.000		255.780. 000		259.617. 000		263.511. 000		267.464.0 00		271.476.0 00
Program Pemberdayaa n Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang dibina dan diawasi				515.00 0.000		522.725. 000		530.566. 000		538.524. 000		546.602.0 00		554.801.0 00
Program Pembinaan Dan Pengembang n Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Cakupan pembinaan dan pengembang n ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama				588.00 0.000		596.820. 000		605.772. 000		614.859. 000		624.082.0 00		633.443.0 00

Urusan/ Urusan Bidang/ Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan DIni Masyarakat) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah				103.000.000		104.545.000		106.113.000		107.705.000		109.321.000		110.961.000

4.2. INDIKATOR KINERJA

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

Tabel 0.2 Indikator kinerja Utama Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Kinerja Utama					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,86	69,26	69,66	70,06	70,46	70,86	71,26
2	Kinerja Eco-culture Papua Selatan	Persen	N/A	11,04	11,04	22,08	33,12	44,16	55,2
3	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	68,00	68,54	69,09	69,65	70,20	70,76	71,33
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	83,76	84,43	85,11	85,79	86,47	87,16	87,86
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,63	4,72	4,80	4,89	4,97	5,06
6	PDRB Perkapita	Rp. Juta	61,58	62,07	62,57	63,07	63,57	64,08	64,60
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,35	17,00	16,20	15,40	14,60	13,80	13,00
8	Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional	Persen	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
10	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,68	3,68	3,70	3,72	3,74	3,75	3,77
11	indeks integritas Papua Selatan	Indeks	67,4	74,52	74,89	75,27	75,64	76,02	76,40
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	79,78	80,98	82,19	83,42	84,68	85,95	87,23
13	Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	Indeks	N/A	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
14	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	64,5	64,82	65,15	65,47	65,80	66,13	66,46
15	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	62,5	64,4	66,3	68,1	70	70
16	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks	142,98	142,27	141,55	140,85	140,14	139,44	138,74

4.2.1 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 0.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator kinerja Kunci Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. INDIKATOR KINERJA DAERAH								
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	52,17	54,78	57,52	60,39	63,41	66,58	69,91
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	29,26	30,72	32,26	33,87	35,57	37,34	39,21
Cakupan rumah yang dapat mengakses listrik (PLN dan Non PLN)	Persen	67,05	68,73	70,44	72,21	74,01	75,86	77,76
Konsumsi Listrik per Kapita	KHw	312,87	312,87	328,51	344,94	362,19	380,30	399,31
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	Persen	71,90	72,98	74,07	75,18	76,31	77,46	78,62
ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	79,78	80,98	82,19	83,42	84,68	85,95	87,23
Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	Indeks	N/A	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Persentase Tutupan Lahan	Persen	69,06	69,4	69,75	70,09	70,43	70,78	70,78
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	95,44	84,80	85	85,20	85,40	85,60	85,60
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	60,73	71,77	71,97	72,17	72,37	72,57	72,57
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	93,16	94,5	95,02	95,09	95,16	95,23	95,23
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	N/A	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	74,41	76,27	78,18	80,13	82,13	84,19	86,29
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	N/A	27,00	30,60	34,20	37,80	41,40	45,00
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	59,00	59,00	60,24	61,48	62,72	63,96	65,00
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Persen	138,2	135,436	132,727 28	130,072 734	127,471 28	124,921 854	122,423 417
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (indeks)	Indeks	N/A	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	64,5	64,82	65,15	65,47	65,80	66,13	66,46
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,78	2,92	3,06	3,22	3,38	3,55	3,73
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,63	4,72	4,80	4,89	4,97	5,06
PDRB Perkapita	Rp. Juta	61,58	62,07	62,57	63,07	63,57	64,08	64,60
Pendapatan Per Kapita di Wilayah Perbatasan	Rp. Juta	45,00	45,36	45,72	46,09	46,46	46,83	47,20
Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Rp. Juta	64,40	64,59	64,79	64,98	65,18	65,37	65,57
Tingkat Kemiskinan	Persen	19,35	17,00	16,20	15,40	14,60	13,80	13,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,05	3,12	3,12	3,11	3,11	3,11	3,1
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,86	69,26	69,66	70,06	70,46	70,86	71,26
Klnerja Eco-culture Papua Selatan	Persen	N/A	11,04	11,04	22,08	33,12	44,16	55,2

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/ 2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Modal Manusia (IMM)	Persen	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,47	0,47
Usia Harapan Hidup	Tahun	68,46	69,2	69,6	70	70,39	70,79	71,19
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Persen	67,12	39,38	39,55-	39,73	39,9-40,11	40,08	40,25
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	24	22,80	21,66	20,58	19,55	18,57	17,64
Harapan Lama Sekolah	Persen	12,67	12,73	12,80	12,86	12,93	12,99	13,05
Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	8,38	8,42	8,46	8,51	8,55	8,59	8,63
Skor Literasi/Numerasi	Persen	49,78	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	77,00
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	59,84	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	100,00
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	N/A	76,46	76,66	76,86	77,06	77,26	77,46
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Persen	48,52	49,54	50,01	50,26	50,63	50,99	51,62
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	44,53	44,89	45,25	45,61	45,97	46,34	46,71
Indeks Pemenuhan Anak (IPA)	Indeks	45,10	45,90	46,20	47,40	48,90	49,60	50,35
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	83,76	84,43	85,11	85,79	86,47	87,16	87,86
Indeks Pemberdayaan Gender (IPDG)	Indeks	64,00	64,10	66,20	67,50	68,80	69,00	69,20
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,53	0,50	0,47	0,42	0,40	0,39	0,35
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	52,17	56,33	57,17	58,03	58,9	59,79	59,79
Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,314	0,322	0,330	0,338	0,347	0,355	0,364
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional	Persen	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20
Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen							
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	0,86	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	5,62	5,90	6,20	6,51	6,83	7,17	7,53
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	N/A	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	3,60
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	53,45	53,45	55,83	58,21	60,59	62,97	65,36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Orang Asli Papua (OAP)	Persen	54,1	56,81	59,65	62,63	65,76	69,05	72,50
Proporsi Penciptaan lapangan Kerja Formal	Persen	N/A	20	21	22	23	24	25
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1,20	1,30	1,40	1,51	1,63	1,76	1,90
Indeks ekonomi biru (IBEL)	Indeks	35,31	35,31	36,38	37,45	38,51	39,58	40,65
Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	87,00	87,00	87,20	87,40	87,60	87,80	88,80
Porsi EBT dalam Bauran Energi		N/A	26,6	27,49	28,38	29,27	30,16	31,05
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Skor	N/A	3	3	3	3	3	3
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	29,40	29,46	29,52	29,58	29,64	29,70	29,75
Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks	142,98	142,27	141,55	140,85	140,14	139,44	138,74
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	N/A	61,94	64,60	67,25	69,91	72,59	75,85
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	N/A	30,94	34,87	38,79	42,72	46,64	50,57
Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,5158		0,020	0,040	0,060	0,060	0,100
Jumlah kampung adat	Kampung	N/A						
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,67	0,67	0,64	0,6	0,57	0,53	0,50
Tingkat Inflasi	Persen	2,39	2,38	2,38	2,37	2,36	2,35	2,35
Nilai investasi PMA/PMDN	Rp. Triliun	8,95	1,87	1,88	1,89	1,90	1,91	1,92

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,81	13,45	14,12	14,83	15,57	16,35	17,17
Inklusi Keuangan	Persen	76,36	83,32	84,32	84,89	85,47	86,04	86,61
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persen	N/A	1,62	1,71	1,79	1,88	1,96	2,05
Persentase usaha Industri kecil dan mikro yang melakukan inovasi produk, pemasaran, distribusi dan/atau teknologi	Persen	N/A	10,03	10,03	20,06	30,09	40,12	50,15
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada Level Provinsi	Persen	N/A	13,14	13,22	13,3	13,39	13,47	13,55
Rasio Konektivitas		26,72	32,51	32,51	32,51	32,51	32,51	41,36
Indeks Tranformasi Digital Nasional	Indeks	N/A	8,65	8,82	8,99	9,16	9,33	9,50
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Indeks SPBE	Indeks	1,61	1,80	2,02	2,26	2,53	2,84	3,18
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,68	3,68	3,70	3,72	3,74	3,75	3,77
indeks integritas Papua Selatan	Indeks	67,4	74,52	74,89	75,27	75,64	76,02	76,40
Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	62,5	64,4	66,3	68,1	70	70
Tingkat kondusivitas wilayah	Persen	N/A	46,60	47,28	47,96	48,64	49,32	50,00
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	73,05
Nilai SAKIP	Skor	73,75	75,59	77,48	79,42	81,41	83,44	85,53
Tingkat Kepuasan Anggota DPRPS terhadap Pelayanan Sekretariat DPRPS (skor kepuasan)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kepuasan masyarakat adat terhadap DPRPS Pengangkatan (skor kepuasan)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	N/A	20,00	22,40	25,09	28,10	31,47	35,25
Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (level)	Level	N/A	2,00	2,40	2,60	2,80	3,00	3,00
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (indeks)	Indeks	N/A	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	70,00
Indeks Pembangunan Statistik (indeks)	Indeks	N/A	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	75,00
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	46,9	49,25	51,71	54,29	57,01	59,86	62,85
Indeks persepsi korupsi	Indeks	38,00	38,95	39,92	40,92	41,94	42,99	44,07
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,853	1,946	2,043	2,145	2,252	2,365	2,483
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen		17,05	17,24	17,43	17,62	17,81	18,00
II. INDIKATOR KINERJA KUNCI								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tahun	71,68	72,04	72,40	72,76	73,12	73,49	73,86
Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	Mata Pelajar an	N/A	23	26	30	35	40	46
Jumlah Jenis Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	Modul	N/A	15	17	20	23	26	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		N/A	1:1	1:1	1:2	1:3	1:5	1:5
Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi	Persen	N/A	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran Hidup	438	424,00	377,00	335,00	298,00	265,00	260,00
Jumlah Kematian Bayi (0-11 Bulan)	per 1000 kelahiran Hidup	N/A	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Olah raga	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	N/A	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	N/A	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
Prevalensi HIV	Persen	N/A	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk		N/A	64,03	64,03	62,00	60,00	60,00	60,00
Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Daerah	1	4	4	4	4	4	4
Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	45,6	55,00	60,00	65,00	70,00	73,00	75,00
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	10	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Persen	7,58	18,10	19,00	19,95	20,95	22,00	23,10
Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi								
Cakupan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Persen	12,58	12,58	18,87	21,38	23,27	23,90	23,90

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak	Persen	6,73	6,73	10,10	15,15	22,73	34,09	45,32
Rasio rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan dan perkotaan	Persen	6,73	6,73	10,10	15,15	22,73	34,09	45,32
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	7,58	7,58	7,96	8,36	8,78	9,22	9,68
Rasio bangunan ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persen	N/A	8,97	8,97	9,42	9,89	10,38	9,29
Cakupan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Persen	N/A	9,35	14,03	16,13	24,20	36,29	49,95
Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	26,28	27,81	29,43	31,16	33,01	34,99	37,10
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Persen	N/A	20,00	23,47	24,64	25,88	26,01	27,94
Status dan Tingkat Kelengkapan dokumen perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan	Persen	N/A	10,00	11,37	17,06	25,59	38,39	41,40
Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	Persen	74,41	76,27	78,18	80,13	82,13	84,19	86,29
Persentase peningkatan perlindungan kawasan pemukiman rawan banjir	Persen	18,58	12,55	18,96	20,86	22,75	24,64	26,54
Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen	13,65	8,89	14,29	17,46	20,63	23,81	26,98
Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	15,90	13,15	19,82	21,17	22,05	23,53	25,89
Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Persen	6,4	3,8	14,4	21	24,6	27	28,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen	N/A	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	N/A	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	25,00	33,30	40,00	42,90	50,00	66,70	80,00
Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	76,00	77,52	79,07	80,65	82,26	83,91	85,59
Presentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, dan Pembinaan	Persen	20,00	40,00	42,90	50,00	66,70	71,40	83,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Cakupan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persen	N/A	30,00	45,00	60,00	75,00	85,00	100,00
Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persen	N/A	30,00	45,00	60,00	75,00	85,00	100,00

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	86,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	33,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	N/A	30,00	45,00	60,00	75,00	85,00	100,00
Persentase KPM yang mendapatkan bantuan sosial afirmatif OAP kewenangan provinsi	Persen	2,87	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	10,02	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Cakupan korban bencana alam yang mendapat bantuan logistik tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan korban bencana alam yang mendapat bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	50,00	55,00	60,00	63,00	67,00	70,00	73,00
Persentase tenaga kerja OAP yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Persen	33,00	33,50	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00
Persentase tenaga kerja OAP yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persen	20,00	22,50	25,00	28,00	32,00	37,00	41,00
Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang dibina	Persen							
Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	19.795	22.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	19.800	21.000	27.000	32.000	37.000	42.000	47.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota								
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	N/A	15,00	15,00	15,00	20,00	25,00	33,00
Prosentase kelembagaan PUG (Pokja PUG) yg terbentuk di Kab/Kota	Persen	25,00	25,00	33,00	40,00	55,00	64,00	75,00
Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	N/A	2,50	3,50	4,62	5,82	6,53	7,78
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen							
Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persen							

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	52,40	65,20	68,90	72,40	79,60	82,50	85,40
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	40,89	41,50	48,50	55,20	62,10	65,20	71,30
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	44,53	45,30	46,20	48,90	50,60	55,70	60,20
Cakupan Kab/Kota Layak Anak	Persen	N/A	N/A	33,00	45,00	57,00	68,00	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Persen	N/A						
Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persen	N/A						
Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen	N/A						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	54,00	18,00		18,00	10,00		
Cakupan kabupaten/kota yang dilaksanakan uji kualitas lingkungan hidup	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase RTH	Persen							
Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	99,45	99,56	99,67	99,78	99,89	100,00	100,00
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	90,00	97,00	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen							
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	39,40	41,37	43,44	45,61	47,89	50,29	52,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	58,40	62,00	65,60	69,20	72,80	76,40	80,00
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	23,78	24,25	25,40	26,55	27,70	28,85	30,00
Persentase Data Kependudukan Orang Asli Papua (OAP)	Persen	68,69	79,00	79,31	79,62	79,93	80,24	80,55
Cakupan data kependudukan dan sosial ekonomi terpilah Orang Asli Papua (OAP)	Persen	20,60	23,69	27,24	31,33	36,03	41,43	47,65
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	1,01	2,00	2,12	2,24	2,36	2,48	2,60
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	50,49	51,00	52,80	54,60	56,40	58,20	60,00
Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	38,67	39,00	41,20	43,40	45,60	47,80	50,00
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	58,52	59,00	59,20	59,40	59,60	59,80	60,00
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	30,00	30,00	38,00	46,00	54,00	62,00	70,00
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	12,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	0,05	5,30	5,42	5,54	5,66	5,78	5,90
Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	0,05	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	0,04	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	0,13	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	0,27	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Rate	2,70	2,23	2,18	2,13	2,13	2,13	1,97
Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,45	1,49	1,52	1,56	1,60	1,64	1,68
Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	N/A	70,00	72,00	73,00	74,00	74,00	74,00
Cakupan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen	N/A	30,00	31,50	34,50	36,50	39,00	39,00
Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	N/A	55,00	55,50	56,50	56,50	57,75	57,75
Cakupan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi yang mendapat pemberdayaan dan peningkatan peran serta dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persen	N/A	4,46	8,01	21,54	11,96	12,58	12,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Konektivitas Darat	Persen	N/A	40,00	49,00	58,00	67,00	76,00	85,00
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	51,84	60,81	61,65	62,48	63,32	64,16	65,00
Konektivitas Laut	Persen	9,09	13,64	27,27	40,91	54,55	68,18	81,82
Persentase Pengendalian KKOP	Persen	19,23	23,08	38,46	53,85	69,23	84,62	100,00
Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	Persen	N/A	5,00	9,00	13,00	17,00	21,00	25,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Indeks SPBE	Indeks	1,61	1,80	2,02	2,26	2,53	2,84	3,18
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persen							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	26,50	34,00	41,50	49,00	56,50	64,00	71,50
Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor keluar provinsi	Persen							
Proporsi UKM Orang Asli Papua (OAP) Ekspor keluar provinsi	Persen	N/A	0,50	3,74	6,98	10,22	13,46	16,70
Pertumbuhan wirausaha penyandang disabilitas	Persen							
Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen	N/A	20,00	36,00	52,00	68,00	84,00	100,00
Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	N/A	40,00	52,00	64,00	76,00	88,00	100,00
Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	17,00	24,67	33,00	41,33	49,67	58,00	66,33
Pertumbuhan wirausaha	Persen	0,45	0,45	0,81	1,17	1,53	1,89	2,25
Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	N/A	65,00	72,00	79,00	86,00	93,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	99,50	20,00	36,00	52,00	68,00	84,00	100,00
Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	79,70	83,08	86,47	89,85	93,23	96,62	100,00
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00
Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	442,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kerja sama penanaman modal	Persen	0,00	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00	100,00

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA								
Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	85,00	95	100	110	120	130	140
Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	6,00	10	15	20	25	30	35
Tingkat partisipasi masrakat dalam kepramukaan	Persen	9,15	9150	9200	9250	9.300	9350	9400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	2,6	2,81	3,03	3,28	3,54	3,82
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Skor	N/A	1	1	2	2	3	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan guna Perlindungan, Pegembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan								
Cakupan seni budaya OAP guna Perlindungan, Pegembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan								
Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah								
Cakupan Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan guna Perlindungan, Pegembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan								
Cakupan pengelolaan museum yang dikelola	Persen	0	0	0	0	1	1	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	N/A	54,82	57,56	60,44	63,46	66,63	69,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	9,11	9,57	10,04	10,55	11,07	11,63	12,21
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.282.130	18.556.362	18.834.707	19.117.228	19.403.986	19.695.046	19.990.472
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	117,56	117,91	118,27	118,62	118,98	119,33	119,69
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	901.800	915.327	929.057	942.993	957.138	971.495	986.067
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	104,37	104,68	105,00	105,31	105,63	105,94	106,26
Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	N/A	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	51,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
Cakupan Daya Tarik/Destinas Wisata yang ditingkatkan	objek	6	6	7	8	9	10	40
Rata-rata lama menginap tamu asing	hari	2	2	3	4	5	6	20
Rata-rata lama menginap tamu domestik	hari	3,00	3	4	5	6	7	25
Tingkat penghunian kamar hotel berbintang	tahun	15000	15000	16000	17000	18000	19000	85000
Tingkat penghunian kamar hotel nonbintang dan akomodasi lainnya								
Jumlah event pariwisata tahunan	Event	9	9	10	11	12	13	55
Cakupan Sumberdaya OAP yang telibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	orang	110	110	120	121	122	123	596

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang memperoleh pembinaan	orang	30	35	37	38	39	40	189
Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi								
pada even promosi pariwisata di dalam negeri	orang	160	160	162	163	164	165	814
Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
Produktivitas Tanaman Pangan	Ton/Ha	4,57	4,80	5,04	5,29	5,55	5,83	6,12
Pertumbuhan Produksi Hortikultura	Persen							
Pertumbuhan Produksi Komoditas Peternakan	Persen							
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha							
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen							
Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen							
Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen							
Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
Cakupan masyarakat OAP dan penyuluh serta polhut yang mendapatkan pemberdayaan kehutanan	Persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00
Persentase lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Persen	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	17,00	19,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	m ³							
Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	km ³							
Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Hektar	N/A	5,00	24,00	43,00	62,00	81,00	100,00
Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Dokumen	4	8,00	16,40	24,80	33,20	41,60	50,00
Jumlah Kuota BBM (JBT dan JBKP)	KL							
Jumlah Kuota Solar	KL	43.383	47.262	72.906	98.550	124.194	149.838	175.482
Jumlah Kuota Minyak Tanah	KL	21.673	19.864	30.642	41.420	52.197	62.975	73.753
Jumlah Kuota Petalite	KL	69.702	75.124	115.885	156.646	197.407	238.168	278.929
Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	RT	28.488	30.424	30.726	31.026	31.326	31.626	31.926
Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	TAD	28,00	29,00	30,00	31,00	31,5	32,00
Rasio Elektrifikasi	Persen	53,00	55,53	58,00	60,00	63,00	70,00	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	N/A	65,00	72,00	79,00	86,00	93,00	100,00
Nilai Ekspor barang	Persen							

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persen	N/A	45,00	56,00	67,00	78,00	89,00	100,00
Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	N/A	60,00	68,00	76,00	84,00	92,00	100,00
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	Persen	19,78	26,09	31,49	36,89	42,29	47,70	53,10
Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	Persen							
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	N/A	65,00	72,00	79,00	86,00	93,00	100,00
Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, terkini	Persen	1,76	3,50	5,38	7,26	9,14	11,02	12,90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	37,9	19,42	19,12	18,57	18,00	17,06	16,00
Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen							
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
Persentase capaian bantuan kepada masyarakat	Persen							
Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama daerah	Persen							
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen							
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	3,31	2,60	3,31	3,40	3,50	3,60	3,70
Persentase produk hukum yang difasilitasi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/kota yang disusun tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase perangkat daerah tepat urusan dan tepat ukuran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan	Persen	16,67	16,67	45,00	50,00	75,00	100,00	100,00
Persentase Rumusan kebijakan pembinaan BUMD dan investasi daerah	Persen	N/A	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	50,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEKRETARIAT DPRD								
Ketepatan Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase Penetapan Ranperda	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN								

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase kinerja daerah dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	N/A	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen							
Cakupan reviu dokumen perencanaan lintas kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketepatan penyusunan Rencana Anggaran dan Prorgam OTSUS	Persen	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KEUANGAN								
Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Provinsi beserta Peraturan Gubernur Penjabarannya	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Presentasi Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Presentase Raperda/Raperkada Kab tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase Raperda/Raperkada Kab tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Alokasi Belanja Bidang Pendidikan	Persen	22,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	82,62	85,00	89,00	92,00	95,00	95,00	95,00
Persentase Penurunan SILPA	Persen	22,80	20,00	18,00	15,00	12,00	11,00	11,00
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap								
Presentase Aset Tanah yang tersertifikasi	Persen	25	50,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase dokumen pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	87,5	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen	48,85	3,04	3,04	3,04	3,03	3,03	3,03
KEPEGAWAIAN								
Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur	Persen	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2023/2024)	Target Indikator Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (indeks)	Indeks	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
Cakupan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Cakupan pelaksanaan penelitian dan inovasi pembangunan daerah	Persen	N/A	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen	N/A	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00
PENGLOLAAN PERBATASAN								
Pertumbuhan Wirausaha Lokal dikawasan perbatasan	Persen							
Jumlah pelintas batas yang terlayani oleh pos imigrasi	Orang							
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
INSPEKTORAT DAERAH								
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2,54	2,8	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN	Persen	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
MCP/MSCP	Persen	65,00	65,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik								
Persentase ormas yang dibina dan diawasi								
Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama								
Persentase rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah								

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN SUBSTANSIAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan periode 2029-2030 yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah Papua Selatan secara tahunan dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya yang berlaku. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan akan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Papua Selatan dalam lima tahun ke depan.

Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Papua Selatan. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Papua Selatan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Papua Selatan Yang Bermartabat, Aman, Damai, Sejahtera Dan Pemerintah Yang Aspiratif”**, yang dijabarkan dalam tiga Misi pembangunan daerah yaitu: 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan; 2) Memberdayakan ekonomi yang inklusif berbasis potensi unggulan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP); 3) Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola OTSUS yang efektif (tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran), bersih, partisipatif, dan afirmatif; 4) Melestarikan dan mendayagunakan

lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan; 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kohesi dan harmoni sosial lintas etnis, agama, dan golongan berbasis kearifan Anim Ha; 6) Meningkatkan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah terutama daerah 3T, pusat pertumbuhan berbasis tata ruang yang inklusif. Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Papua Selatan semakin maju dan lebih baik.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN dan PEDOMAN TRANSISI

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur merupakan pedoman bagi setiap kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Provinsi Papua Selatan setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: ^[1]_[SEP]

- a. Gubernur Provinsi Papua Selatan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua selatan Tahun 2025-2029 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah; ^[1]_[SEP]
- b. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua selatan Tahun 2025-2029; ^[1]_[SEP]
- c. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja perangkat daerah setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala OPD serta disahkan oleh Gubernur.
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Papua Selatan berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra perangkat daerah Provinsi Papua Selatan; ^[1]_[SEP]

- e. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Provinsi Papua Selatan; ^[1]_{SEP}
- f. Dalam hal pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Provinsi Papua selatan Tahun 2025-2029 menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada di luar kendali Pemerintah Provinsi Papua selatan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPR Provinsi Papua selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. ^[1]_{SEP}

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPR Provinsi Papua Selatan, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Provinsi Papua Selatan akan menjadi provinsi yang **Bermartabat, Aman, Damai, Sejahtera Dan Pemerintah Yang Aspiratif**.

Ditetapkan di Merauke

Pada tanggal, 25 September 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016





**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2025**